



RKPD

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2022



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman:
 - a. penyelenggaraan pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
 - b. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; dan
 - d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2023 juga memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 7 Juli 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 7 Juli 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



RINALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022 NOMOR
24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 24 TAHUN 2022
TANGGAL 7 JULI 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I.5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I.10
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I.12
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I.13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II.1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II.1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis.....	II.1
2.1.1.1 Aspek Geografis.....	II.1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....	II.8
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II.20
2.1.1.4 Aspek Demografi	II.23
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II.29
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..	II.29
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II.51
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II.59
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II.61
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II.61
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II.103
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II.129
2.1.3.4 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	II.142
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II.148
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II.148
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II.152

2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II.157
2.1.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II.158
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II.160
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II.261
2.3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II.261
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II.273
2.3.2.1	Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II.273
2.3.2.2	Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II.277
2.3.2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pilihan	II.285
2.3.2.4	Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Penunjang	II.287
2.3.3	Standar Pelayanan Minimal	II.290

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

	DAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.5
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023	III.5
3.1.1.1	Kebijakan Ekonomi Nasional	III.5
3.1.1.2	Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat	III.6
3.1.1.3	Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III.8
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023	III.12
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III.14
3.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	III.15
3.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	III.20
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III.24

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV.1
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV.1
4.1.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2023	IV.4
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV.8
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV.11
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional	IV.11
4.2.2	Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat	IV.26

4.2.3	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV.36
4.2.3.1	Prioritas Pembangunan	IV.36
4.2.3.2	Arah Kebijakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV.42
4.3	Inovasi Pembangunan Daerah	IV.204
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		V.1
5.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023.....	V.1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....		VI.1
BAB VII PENUTUP		VII.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021.....	II.2
Tabel 2.2	Jumlah Desa dan Dusun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021	II.3
Tabel 2.3	Luasan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Kepulauan Mentawai	II.4
Tabel 2.4	Struktur PDRB ADHB (%) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.9
Tabel 2.5	Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021.....	II.11
Tabel 2.6	Tingkat Resiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai	II.21
Tabel 2.7	Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021	II.24
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021	II.25
Tabel 2.9	Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawai Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021	II.28
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.35
Tabel 2.11	Indikator Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.40
Tabel 2.12	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita se Bulan menurut kelompok komoditas (Rupiah) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2021	II.44
Tabel 2.13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021	II.47
Tabel 2.14	Penduduk Angkatan Kerja Berusia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021..	II.48
Tabel 2.15	Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2021	II.49
Tabel 2.16	Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021	II.50
Tabel 2.17	Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.60
Tabel 2.18	Perkembangan Kepemudaaan dan Keolahragaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.60
Tabel 2.19	Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2021	II.64
Tabel 2.20	Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis (Persen), 2021	II.65

Tabel 2.21	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.72
Tabel 2.22	Angka Kesakitan Menurut Karakteristik (Persen), 2021	II.75
Tabel 2.23	Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan (Persen), 2021	II.76
Tabel 2.24	Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi (Persen), 2021	II.77
Tabel 2.25	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Merokok dan Rata-Rata Batang Rokok yang dihisap per Minggu (Persen), 2021	II.78
Tabel 2.26	Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021.....	II.79
Tabel 2.27	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021.....	II.84
Tabel 2.28	Jumlah Layanan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021.....	II.85
Tabel 2.29	Rasio Jumlah Tenaga Medis dan Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.86
Tabel 2.30	Jumlah Bayi yang Diberi Imunisasi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.86
Tabel 2.31	Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.88
Tabel 2.32	Kondisi Jalan Trans Mentawai, 2021	II.88
Tabel 2.33	Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.91
Tabel 2.34	Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021	II.97
Tabel 2.35	Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.98
Tabel 2.36	Perkembangan Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021.....	II.99
Tabel 2.37	Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.102
Tabel 2.38	Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.103
Tabel 2.39	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021.....	II.106
Tabel 2.40	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.107
Tabel 2.41	Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.108

Tabel 2.42	Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.110
Tabel 2.43	Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.111
Tabel 2.44	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2021	II.112
Tabel 2.45	Perkembangan Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.114
Tabel 2.46	Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.115
Tabel 2.47	Perkembangan Indikator Pelabuhan Laut dan Penyebrangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.116
Tabel 2.48	Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.118
Tabel 2.49	Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.119
Tabel 2.50	Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.21
Tabel 2.51	Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.121
Tabel 2.52	Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.123
Tabel 2.53	Perkembangan Indikator Urusan Persandian, 2017-2021 ..	II.124
Tabel 2.54	Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.126
Tabel 2.55	Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.127
Tabel 2.56	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.129
Tabel 2.57	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.130
Tabel 2.58	Jumlah Sarana Tangkap Nelayan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.131
Tabel 2.59	Jumlah Nelayan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2011	II.132
Tabel 2.60	Banyaknya dan jenis Objek Wisata Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.133
Tabel 2.61	Banyaknya Resort, Wisma, dan Penginapan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.134
Tabel 2.62	Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.134
Tabel 2.63	Produksi Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.136
Tabel 2.64	Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.139
Tabel 2.65	Perkembangan Kontribusi Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.140

Tabel 2.66	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.144
Tabel 2.67	Perkembangan Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.148
Tabel 2.68	Angka Konsumsi RT Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2017-2021	II.149
Tabel 2.69	Rasio Angka Konsumsi RT Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2017-2021	II.150
Tabel 2.70	Angka Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2017-2021	II.151
Tabel 2.71	Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.157
Tabel 2.72	Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2021	II.160
Tabel 2.73	Kecenderungan Kejadian Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai	II.264
Tabel 2.74	Tingkat Bahaya Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai	II.265
Tabel 2.75	Pencapaian SPM Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021 ..	II.291
Tabel 3.1	Indikator sasaran Pembangunan Nasional, 2023	III.6
Tabel 3.2	Perkembangan Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat, 2023	III.7
Tabel 3.3	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2023	III.12
Tabel 3.4	Derajat Otonomi Fiskal Daerah, 2017-2021	III.15
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024	III.18
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024	III.22
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024	III.25
Tabel 4.1	Sasaran Pembangunan Nasional, 2023	IV.3
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan Propinsi Sumatera Barat , 2023	IV.7
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023	IV.8
Tabel 4.4	Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023	IV.10
Tabel 4.5	Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023	IV.10
Tabel 4.6	Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2023	IV.42
Tabel 4.7	Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi	IV.45
Tabel 4.8	Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV.108
Tabel 4.9	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026	IV.109

Tabel 4.10	Dukungan Program Daerah (RKPD) Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2023.....	IV.112
Tabel 4.11	Dukungan Program Daerah (RKPD) Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2023.....	IV.167
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama.....	VI.1
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai , 2023.....	VI.4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I.11
Gambar 2.1	Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai	II.5
Gambar 2.2	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021	II.26
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Rentang 14 Tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021	II.27
Gambar 2.4	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.31
Gambar 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2021	II.32
Gambar 2.6	Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021	II.34
Gambar 2.7	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.36
Gambar 2.8	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2021	II.39
Gambar 2.9	Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021 ..	II.42
Gambar 2.10	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.43
Gambar 2.11	Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021	II.51
Gambar 2.12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.52
Gambar 2.13	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.54
Gambar 2.14	Rata-Rata Lama Sekolah(Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.56
Gambar 2.15	Harapan Lama Sekolah(Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.57
Gambar 2.16	Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.58
Gambar 2.17	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.66
Gambar 2.18	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.68
Gambar 2.19	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.69
Gambar 2.20	Perkembangan Rasio Siswa terhadap Guru Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.70
Gambar 2.21	Perkembangan Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.89
Gambar 2.22	Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.99

Gambar 2.23	Produktivitas Tenaga Kerja (miliar rupiah) Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.105
Gambar 2.24	Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.141
Gambar 2.25	Produktivitas Total Daerah (miliar rupiah) Kepulauan Mentawai, 2017-2021	II.152
Gambar 3.1	Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2023.....	III.9
Gambar 3.2	Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, 2017-2023.....	III.11
Gambar 4.1	Sasaran PDB Per Kapita menuju High Income Country Pasca Covid 19	IV.2
Gambar 4.2	Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023.....	IV.14
Gambar 4.3	Pelaku Usaha.....	IV.205
Gambar 4.4	Peresmian Forum Sikereita oleh Bupati	IV.206
Gambar 4.5	Pelatihan e-commerce	IV.207

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah daerah sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran setiap tahun dari RPJMD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 sebagaimana amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Selain itu, penyusunan dokumen RKPD ini berpedoman pada Permendagri terkait pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023, RKP Tahun 2023, RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RKPD ini sangat penting, mengingat:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023–2026.
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran pada RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023–2026.

4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dan penyusunan RAPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

Penanganan dan pengendalian COVID-19 yang semakin baik terutama pelaksanaan vaksinasi yang secara masif dilakukan untuk membentuk kekebalan komunitas telah mampu menjaga asa dan harapan masyarakat untuk kembali menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi seperti biasa. Pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun 2021 tumbuh positif 3,69 persen dan pada triwulan I tahun 2022 tumbuh 5,01 persen menjadi indikasi semakin membaiknya ekonomi secara nasional. Begitu juga skala regional di Propinsi Sumatera Barat, dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tumbuh positif sebesar 3,29 persen dan pada triwulan I tahun 2020 tumbuh sebesar 3,64 persen yang tentunya bagian dari agregasi pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/ kota termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sebagai sebuah sistem perencanaan yang selaras dan berkelanjutan, pembangunan sumberdaya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 sebagai upaya meningkatkan produktivitas masyarakat dan memberikan nilai tambah pada setiap usaha ekonomi yang sedang dan terus diupayakan menuju transformasi ekonomi daerah. Hal ini juga sejalan dengan tema

pembangunan nasional tahun 2023 sebagai estafet pembangunan berkelanjutan dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2022 menjadi landasan kuat untuk mendorong akselerasi ekonomi pada tahun 2023. Akselerasi tersebut didorong oleh agenda transformasi ekonomi Indonesia pascapandemi COVID-19 melalui produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial, transisi menuju ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk memulai mengembalikan dan mengangkat pertumbuhan ekonomi ketingkat yang lebih baik.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 ini, mengacu pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Sebagai catatan, tahun 2023 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

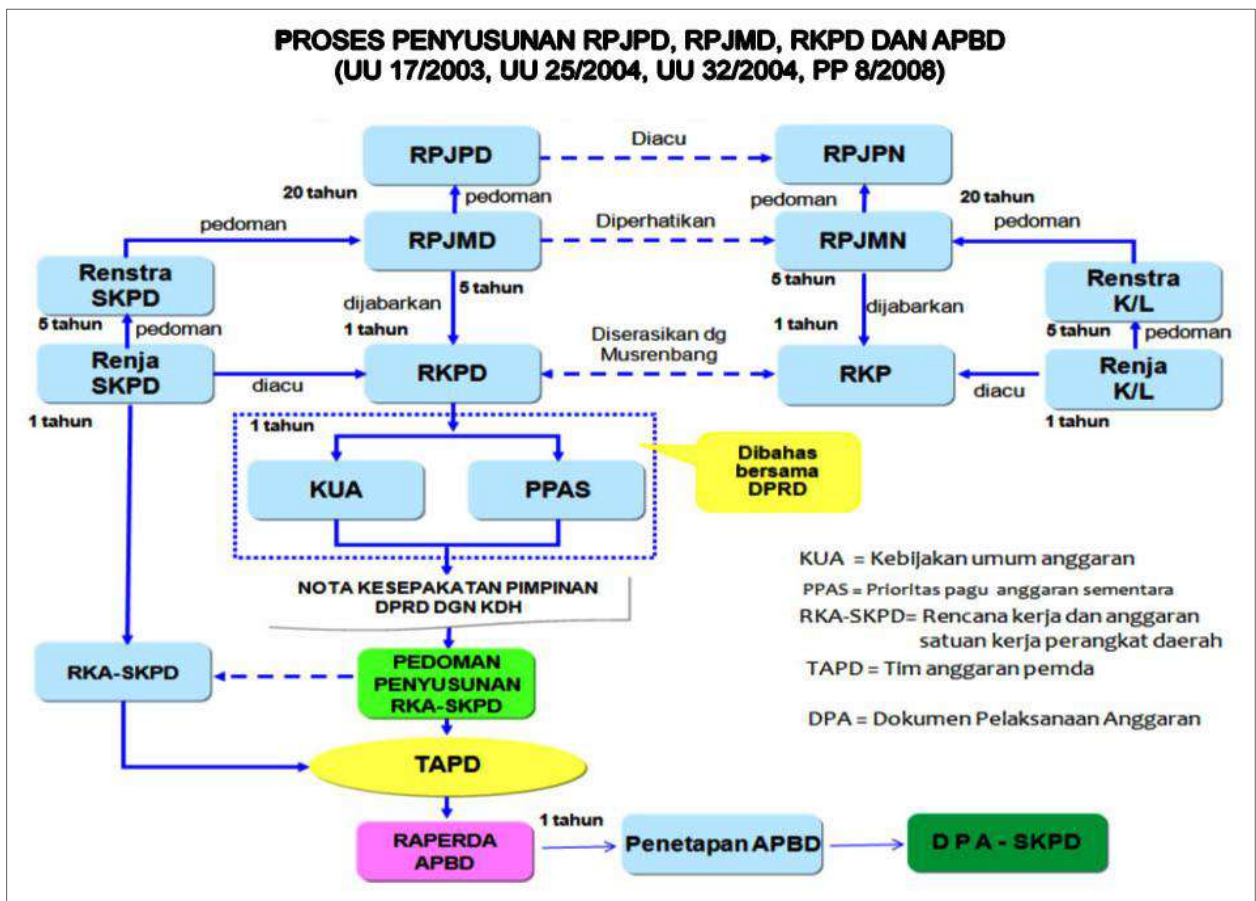
- Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6);
 23. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019-2023;
 24. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026. Hubungan antara RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 memperhatikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
2. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035.

3. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
4. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dimaksudkan agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (RKPD) Tahun 2023 antara lain:

1. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2023.
2. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.
3. Menjadi acuan Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023.
4. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan; memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD;

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; berisi terkait evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Bab ini memuat kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi pelaksanaan RPJMD kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022; Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Bab ini berisikan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, menguraikan kebijakan pembangunan nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah selama 2 (dua) tahun sebelumnya (2020-2021), dan perkiraan untuk tahun 2024.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.
- BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; berisi Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.
- BAB VII Penutup; Berisi penegasan bahwa RKPD adalah pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografis

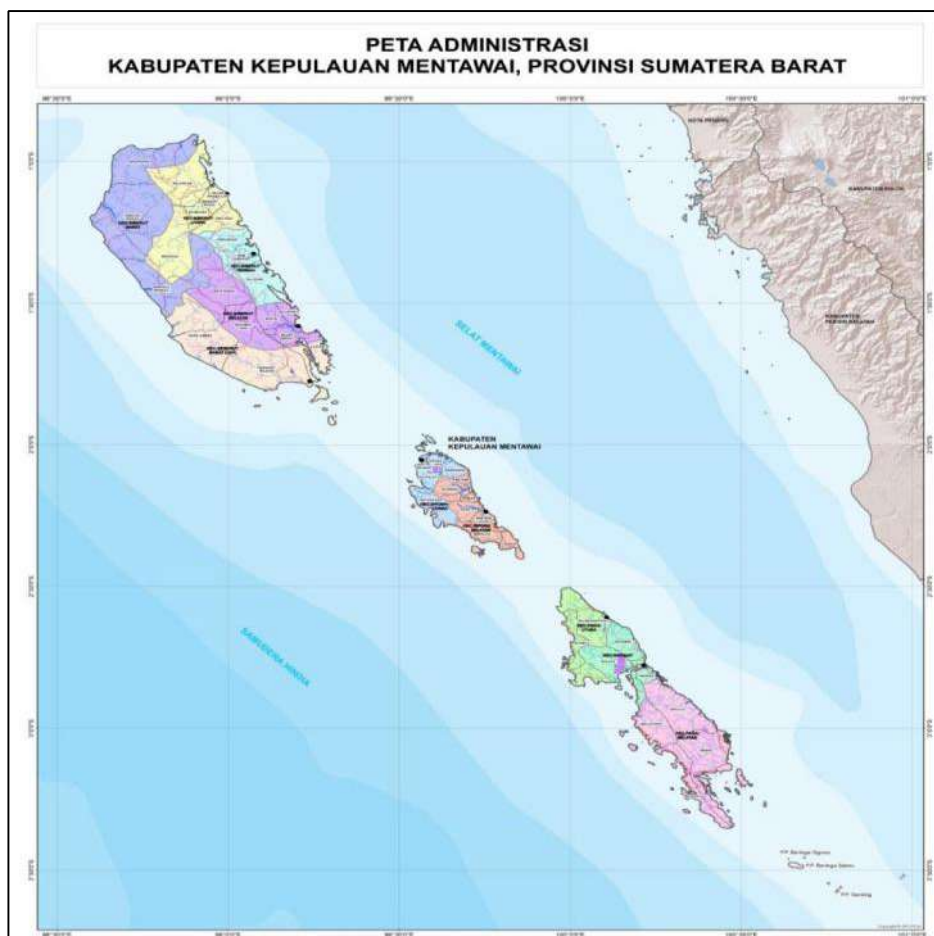
Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak pada posisi 0°55'00"-3°21'00" Lintang Selatan dan 98°35'00"-100°32'00" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara geografis berbatasan dengan:

- sebelah Utara adalah Selat Siberut;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai;
- sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya kabupaten yang wilayah administrasinya terpisah oleh laut dengan Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah sekitar luas wilayah 6.011,35 km² dan panjang garis pantai 1.402,66 km.

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 yang terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa dan 341 dusun, dengan Kecamatan Siberut Barat memiliki luas

wilayah terbesar yaitu 1.124,86 km² dan Kecamatan Sikakap dengan luas wilayah terkecil yaitu 278,45 km².



Adapun keadaan geografis dan administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap kecamatannya disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pagai Selatan	Bulasat	901,08	2 ^o 49'04"-3 ^o 21'00"	100 ^o 07'01"-100 ^o 32'00"
2	Sikakap	Taikako	278,45	2 ^o 37'12"-3 ^o 55'04"	100 ^o 00'00"-100 ^o 16'12"
3	Pagai Utara	Saumanganya'	342,02	2 ^o 30'00"-2 ^o 51'36"	99 ^o 57'00"-100 ^o 09'36"
4	Sipora Selatan	Sioban	268,47	2 ^o 06'00"-2 ^o 24'36"	99 ^o 36'00"-99 ^o 52'12"
5	Sipora Utara	Sido Makmur	383,08	1 ^o 57'00"-2 ^o 18'00"	98 ^o 30'00"-99 ^o 42'00"

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Lintang Selatan	Bujur Timur
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	508,33	1°19'48"-1°42'00"	98°48'00"-99°18'00"
7	Siberut Barat Daya	Pei-Pei	649,08	1°27'36"-1°57'00"	98°45'00"-99°19'48"
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	739,87	1°15'00"-1°33'00"	98°54'00"-99°12'00"
9	Siberut Utara	Muara Sikabalu	816,11	0°54'00"-1°27'00"	98°40'48"-99°06'00"
10	Siberut Barat	Betaet	1.124,86	0°55'00"-1°34'12"	98°35'00"-98°59'24"

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Jumlah desa dan dusun di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditunjukkan tabel 2.2 dengan jumlah desa sebanyak 43 desa dan dusun sebanyak 431 dusun. Kecamatan Pagai Selatan dengan jumlah dusun paling banyak yaitu dengan 49 dusun dan Kecamatan Siberut Utara dengan jumlah dusun paling sedikit yaitu dengan 26 dusun

Tabel 2.2
Jumlah Desa dan Dusun
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Pagai Selatan	Bulasat	4	49
2	Sikakap	Taikako	3	44
3	Pagai Utara	Saumanganya'	3	30
4	Sipora Selatan	Sioban	7	43
5	Sipora Utara	Sido Makmur	6	29
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	5	34
7	Siberut Barat Daya	Pei-Pei	3	25
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	32
9	Siberut Utara	Muara Sikabalu	6	26
10	Siberut Barat	Betaet	3	29
Jumlah			43	341

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Luasan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dibagi kedalam 5 kawasan penggunaan lahan, antara lain hutan lindung, kawasan suaka dan pelestarian alam, hutan produksi tetap, hutan produksi dapat dikonversi dan areal penggunaan lainnya.

Tabel 2.3
Luasan Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai

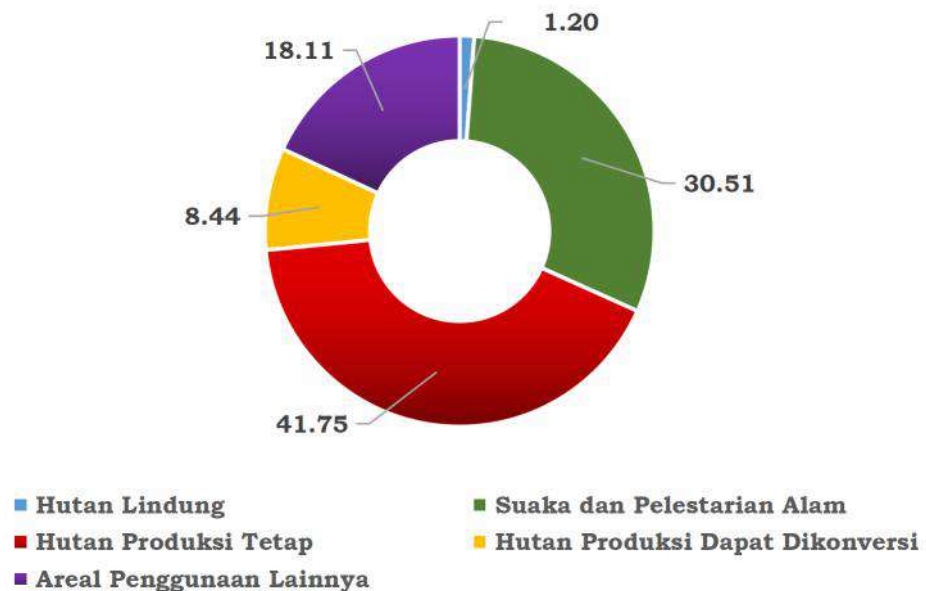
	Hutan Lindung	Suaka dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Areal Penggunaan Lainnya	Total
Penggunaan Lahan (ha)	7.217,28	183.378,9	250.971,2	50.727	108.840,62	601.135

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Luasan penggunaan lahan di Kabupaten Kepulauan didominasi oleh kawasan hutan dengan persentase sekitar 81,89 persen dan areal penggunaan lainnya sekitar 18,11 persen. Untuk luasan hutan produksi tetap menjadi kawasan hutan dengan persentase sebesar 41,75 persen atau seluas 250.971,2 ha dan kawasan suaka dan pelestarian alam sebesar 30,51 persen atau seluas 183.378,9 ha, kawasan hutan lindung sebesar 7.217,28 ha atau sekitar 1,20 persen dari luas wilayah. Untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 50.727 ha atau sekitar 8,44 persen dari total luas wilayah dan memiliki potensi yang besar untuk dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. Areal penggunaan lainnya sebagai areal penopang kehidupan

masyarakat sebesar 108.840,62 ha atau sekitar 18,11 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai.

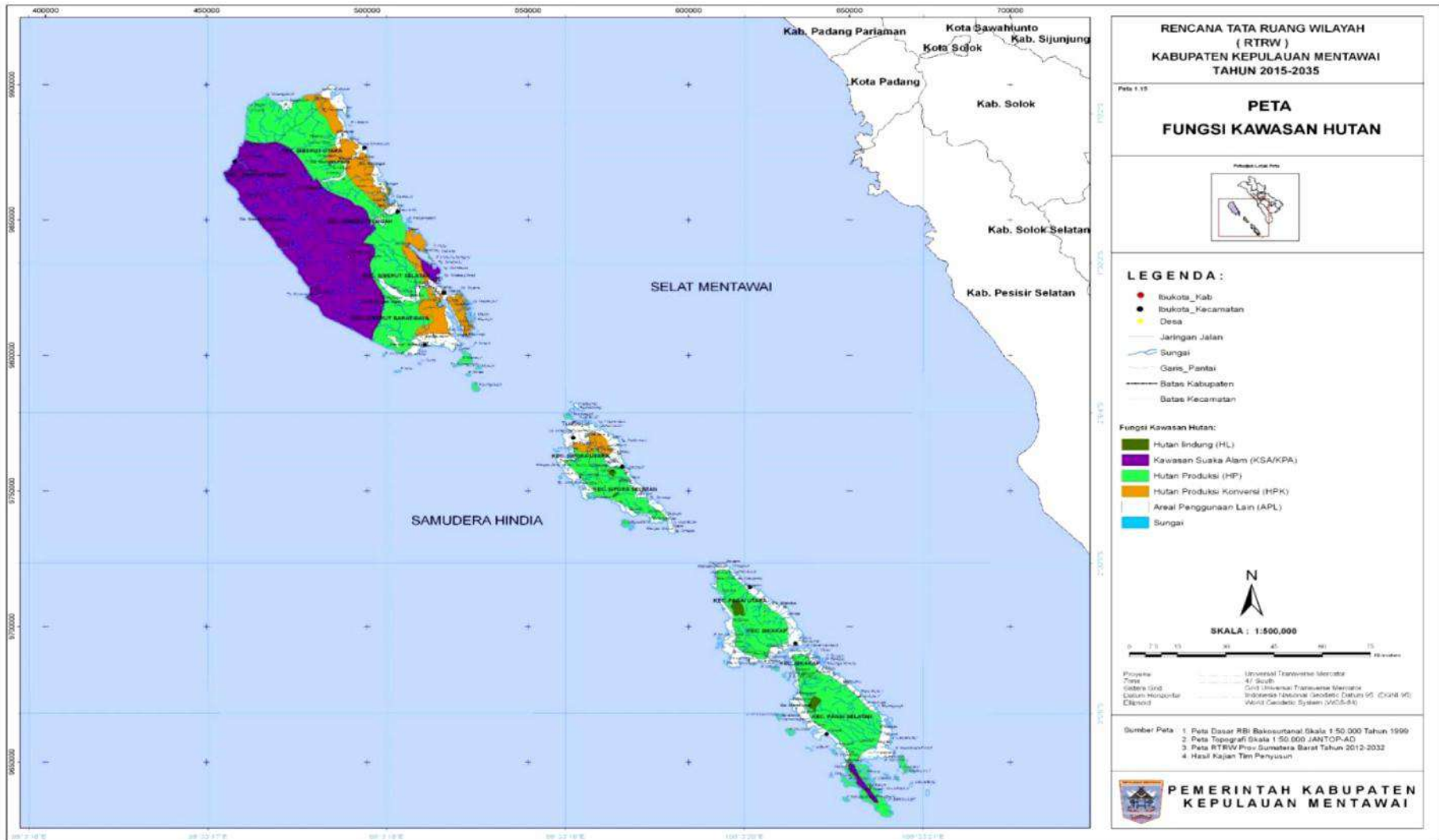
Gambar 2.1
Persentase Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Peruntukan dan Penggunaan kawasan hutan oleh pihak swasta maupun pemerintah, yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain KSA/KPA yang ditunjuk seluas \pm 183.397 Ha termasuk Kawasan Taman Nasional Siberut (TNS) di Pulau Siberut melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor K.304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 96.904 ha, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas 147.213 Ha, peruntukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 9.906 Ha di Provinsi Sumatera Barat, Hutan Produksi (HP) yang ada di Pulau Siberut dikelola dalam bentuk

IUPHHK-HA oleh PT. Salaki Summa Sejahtera seluas ± 48.420 Ha sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 413/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004, dicadangkan seluas ± 79.795 ha di Pulau Siberut (eks IUPHHK-HA Koperasi Andalas Madani) untuk IUPHHK-Restorasi Ekosistem kepada PT. Global Green melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.769/Menhut-VI/2009 tanggal 28 September 2009.



2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kepulauan Mentawai sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan wilayah daerah.

Tabel 2.4 menunjukkan struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi pada PDRB sebesar 48,03 persen, artinya sektor primer masih menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat Mentawai. Jika dilihat tren transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor manufaktur/ industri dan sektor jasa

belum menunjukkan perubahan (kenaikan) yang signifikan

Tabel 2.4
Struktur PDRB ADHB (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
A	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	49,03	47,61	46,21	48,46	48,87	48,03
B	Pertambangan dan Penggalian	1,77	1,74	1,62	1,64	1,65	1,68
C	Industri Pengolahan	2,8	2,68	2,34	2,43	2,57	2,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dll	-	-	-	-	-	-
F	Konstruksi	12,08	12,59	13,11	13,25	13,66	12,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran	12,25	12,55	12,82	12,8	12,72	12,62
H	Transportasi dan Pergudangan	10,48	11,14	11,8	8,58	7,48	9,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,77	0,78	0,8	0,76	0,81	0,78
J	Informasi dan Komunikasi	0,81	0,85	0,9	0,99	1,04	0,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12
L	Real Astate	0,89	0,89	0,91	0,92	0,91	0,90
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan	6,47	6,45	6,65	7,21	7,25	6,80
P	Jasa Pendidikan	1,07	1,1	1,14	1,23	1,23	1,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,57	0,59	0,61	0,69	0,74	0,64
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,82	0,84	0,89	0,83	0,88	0,85

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Kontribusi Sektor konstruksi terhadap PDRB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang positif yaitu dari 12,08 persen tahun 2017 meningkat menjadi 13,66 persen pada tahun 2021 dengan rata-rata capaian sebesar 12,93 persen.

Analisis potensi pengembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan PDRB dapat diketahui bahwa sektor lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan merupakan sektor maju dan tumbuh pesat dan juga sudah menjadi sektor basis ekonomi masyarakat Mentawai secara umum, kedepan sektor ini juga sangat potensial untuk dikembangkan dengan tingkat pertumbuhan sektor yang tinggi dan memiliki keunggulan kompetitif untuk wilayah Sumatera Barat.

Tabel 2.5
Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Lapangan Usaha		Tipologi Klassen	Analisis LQ	Analisis DLQ	Pertumbuhan Proporsional	Keunggulan Kompetitif	Pergeseran Bersih
A	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
B	Pertambangan dan Penggalian	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
C	Industri Pengolahan	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dll	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
F	Konstruksi	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
G	Perdagangan Besar dan Eceran	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
H	Transportasi dan Pergudangan	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
J	Informasi dan Komunikasi	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
L	Real Astate	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
M, N	Jasa Perusahaan	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
O	Administrasi Pemerintahan	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
P	Jasa Pendidikan	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
R,S, T, U	Jasa Lainnya	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif

Sumber :BPS (data diolah)

Untuk sektor lapangan usaha industri pengolahan menjadi sektor relatif tertinggal namun memiliki potensi untuk dikembangkan kedepan dan berdasarkan analisis *shift share* memiliki pergeseran sektor yang progresif sehingga sektor ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam struktur ekonomi daerah. Begitu juga dengan konsep hilirisasi sektor primer yang menjadi prioritas pembangunan daerah untuk memberikan nilai tambah (*value added*) dan peningkatan ekonomi masyarakat memiliki peluang besar dalam proses perencanaan pembangunan. Sajalan dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga secara tipologi klassen sebagai sektor potensial /masih dapat berkembang dengan pesat dan analisis *shift share* memiliki keunggulan kompetitif kedepannya seiring dengan prioritas pembangunan pada sektor pariwisata sebagai penopang pengembangan sektor ini. Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan luas 601.134,96 ha terdiri atas kawasan hutan lindung

seluas 492.294,38 ha sekitar 82 persen dari luas wilayah, sedangkan 108.840,62 ha atau sekitar 18 persen adalah kawasan Area Penggunaan Lain (APL), potensi pengembangan wilayah Kepulauan Mentawai dapat dikembangkan melalui pengembangan kawasan budidaya yang telah ditetapkan antara lain.

1) Kawasan peruntukan hutan produksi.

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi tetap yang merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun cara tebang habis. Kawasan ini terdapat di seluruh kecamatan, dengan luasan 246.011,41 hektar. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi merupakan kawasan hutan yang dapat dicadangkan atau diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan diluar sektor kehutanan seperti perkebunan, pertanian, permukiman, industri. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Siberut Barat, Kecamatan Siberut

Barat Daya, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Selatan dengan luasan kurang lebih 54.856,28 hektar.

2) Kawasan peruntukan pertanian.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi sawah dan komoditas tanaman pangan lainnya dengan total luas adalah 24.934,03 ha. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan komoditi sayuran dan buah-buahan dengan total luas adalah 3.740,17 ha. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas lahan adalah 90.818 ha dengan komoditas perkebunan skala kecil atau perkebunan rakyat khas Mentawai yaitu coklat, karet, cengkeh, pala, kelapa, nilam, manau. Kawasan perkebunan rakyat tidak merusak alam dan lingkungan sekitar hutan. Kawasan peruntukan peternakan terdapat di seluruh

wilayah daerah dengan memanfaatkan areal pertanian dan perkebunan.

3) Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap di seluruh perairan wilayah daerah dengan pusat perikanan tangkap di Kecamatan Siberut Utara, Tuapejat, Pagai Utara dan Sikakap. Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri dari Budidaya perikanan laut meliputi: Muara Sigep, Malancan, Sirilogui, Saibi Samukop, Saliguma, Malilimok, Katurei (Pulau Siberut), Teraet, Teluk Beriulou, Teluk Pukarajat, Tuapejat (Pulau Sipora), Sikakap dan Betumonga (Pulau Pagai Utara), Pulau Tanopo, Makalo dan Sinaka (Pulau Pagai Selatan). Budidaya perikanan darat meliputi: Bosua, Saureinu, Nemnemleleu, (Sipora Selatan), Malancan, Sirilogui, Bojakan, Sotboyak, Muara Sikabaluan, Monganpoula (Siberut Utara), Muara Siberut, Salappak, Maileppet, Muntei,

Madobag, Matotonan (Siberut Selatan), Saibi Samukop, Cimpungan (Siberut Tengah), Saumanganya, Betumonga, Silabu (Pagai Utara), Matobe, Taikako (Sikakap), Desa Malakopa dan Desa Bulasat (Pagai Selatan). Kawasan Minapolitan adalah Sikakap dan Muara Siberut (Siberut Selatan). Kawasan pengolahan hasil perikanan memiliki prasarana pendukung, meliputi bagian wilayah Tuapejat di Kecamatan Sipora Utara dan bagian wilayah Muara Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Muara Sikabalu di Kecamatan Siberut Utara, Sikakap. Prasarana pendukung kawasan pengolahan hasil perikanan terdiri atas rencana pengembangan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di Tuapejat dan Sikakap, rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tuapejat, Sikakap, Muara Siberut dan Muara Sikabalu, dan rencana pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Sikakap.

4) Kawasan peruntukan industri.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri rumah tangga yang dapat dikembangkan di setiap kecamatan dengan memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

5) Kawasan peruntukkan pertambangan.

Kawasan peruntukkan pertambangan diperuntukkan untuk wilayah pertambangan terdapat di Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang memiliki potensi bahan tambang jenis bebatuan (galian C).

6) Kawasan peruntukan pariwisata.

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya dan sejarah terdapat di Pulau Siberut yang meliputi kawasan Madobag dan Matotonan (Siberut Selatan), Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat),

Bojakan (Siberut Utara), Sagulubbek (Siberut Barat Daya), benteng peninggalan Jepang di Sioban (Sipora Selatan). Kawasan peruntukan pariwisata alam terdapat di pulau Siberut yang meliputi kawasan Sigapokna, Simalegi dan Simatalu (Siberut Barat), Bojakan (Siberut Utara), Sibudda Oinan (Siberut Tengah), Matotonan dan Madobag (Siberut Selatan), Katurei dan Sagulubbek (Siberut Barat Daya). Kawasan peruntukan pariwisata bahari terdapat di Silabu (Pagai Utara), Sikakap, Malakopa dan Sinakak (Pagai Selatan), Katiet, Bosua, Gobi dan Pulau Siruamata (Sipora Selatan), Mapaddegat, Teluk Pukarajat, Taraet dan Matuptuman (Sipora Utara), Teluk Katurei dan Taileleu (Siberut Barat Daya), Saibi Samukop dan Saliguma (Siberut Tengah), Sirilogui (Siberut Utara), dan Pulau-pulau kecil lainnya. Kawasan peruntukan ekonomi khusus pariwisata terdapat di Mapaddegat seluas 300 ha, Katiet, Gobi dan Bosua 100 ha, Teluk Katurei 300

ha, Taraet 50 ha, Matutuman Buggei Siata 50 ha. Kawasan peruntukan konservasi budaya terdapat di Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan dan Sakudei Kecamatan Siberut Barat Daya, Simatalu Kecamatan Siberut Barat.

7) Kawasan peruntukan permukiman.

Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan yaitu Muara Siberut (PKW), Tuapejat (PKL), Sikakap (PKLp), Muara Sikabalu, Saibi Samukop, Pasakiat Taileleu, Saumanganyak, Bulasat, Sido Makmur dan Sioban. Kawasan peruntukan perdesaan yaitu pusat lingkungan pemukiman disetiap dusun diluar kawasan perkotaan dan kawasan hunian tetap (huntap) korban tsunami.

8) Kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, seperti kawasan bandara, kawasan militer AD, AL,

kepolisian dan satuan keamanan dan pertahanan lainnya.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan potensi yang rawan bencana baik berupa gempa bumi (tektonik), gelombang besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Dari 43 desa yang ada, 33 desa diantaranya merupakan desa pesisir, yang pada kondisi saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana terhadap bahaya tsunami. Sebagaimana yang telah terjadi pada tanggal 25 Oktober 2010, bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 SR (atau 7,5 SR menurut USGS) telah memicu terjadinya gelombang tsunami.

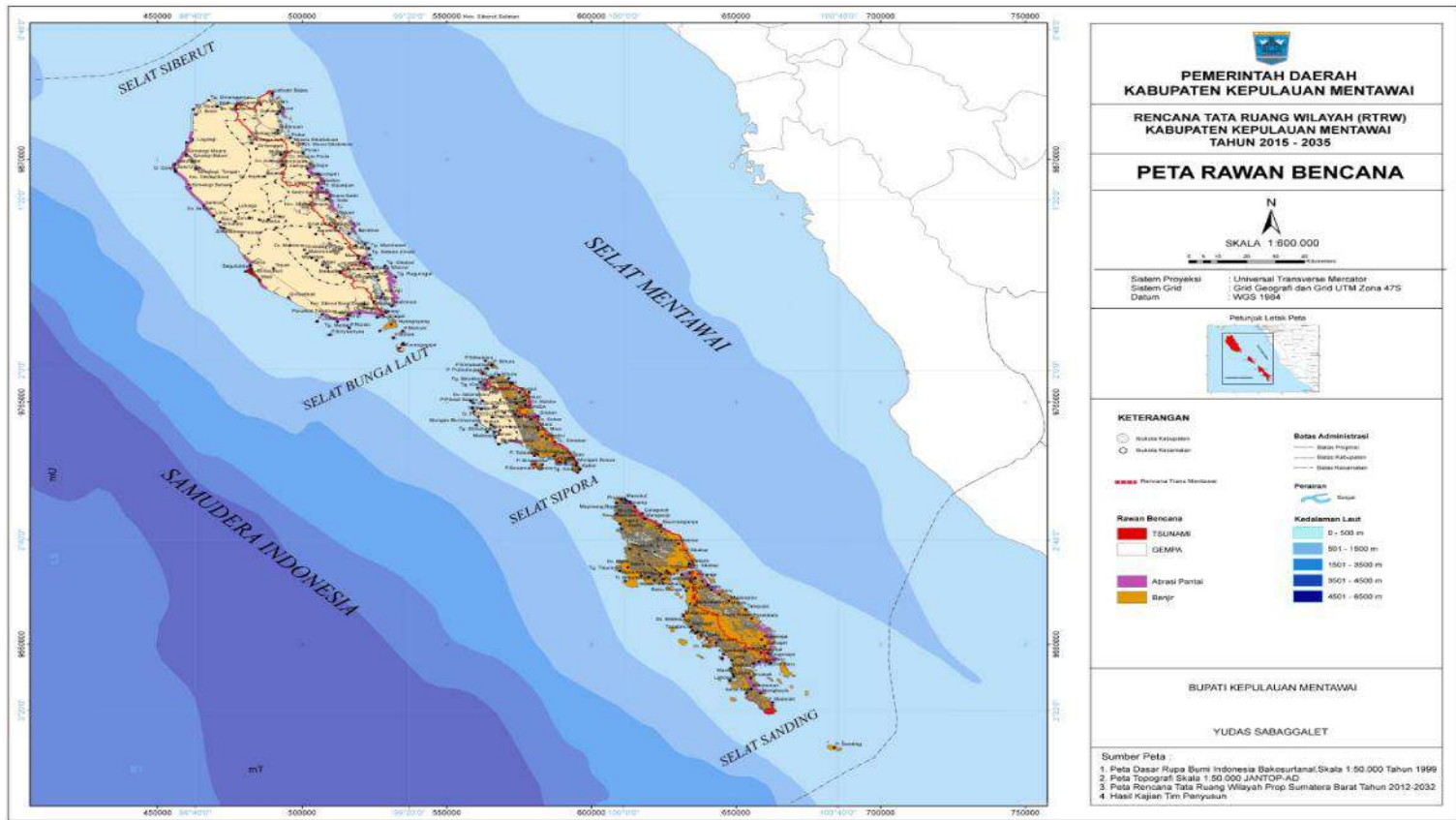
Dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas bahaya terdampak paling besar.

Tabel 2.6
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
1	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi
2	Gempa Bumi	Tinggi
3	Tsunami	Tinggi
4	Cuaca Ekstrim	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi
6	Banjir	Tinggi
7	Kekeringan	Sedang
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), 2021

Tabel 2.6 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrim, tanah longsor, banjir, bencana gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan sedangkan tingkat bahaya sedang terhadap bencana kekeringan. Indeks bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.



2.1.1.4 Aspek Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Secara umum keadaan kependudukan di Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara teori (BPS), penduduk diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk menjadi aset dan modal besar dalam pembangunan, sebagai pelaku dan penikmat hasil pembangunan. Integrasi perencanaan dengan kependudukan menjadi hal penting bagi daerah dalam mengarahkan esensi pembangunan daerah, bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Disisi lain, tantangan pertumbuhan penduduk menjadi permasalahan tersendiri di daerah baik itu dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi, tingkat ketergantungan, kepadatan penduduk yang akan dikaitkan dengan daya dukung lingkungan/alam. Jumlah penduduk per kecamatan, luas daerah dan kepadatan penduduk disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk,
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

No	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Jenis Kelamin (jiwa)	
						Laki-Laki	Perempuan
1	Pagai Selatan	901,08	9.385	10,02	0,13	4.895	4.490
2	Sikakap	278,45	10.236	32,75	0,17	5.309	4.927
3	Pagai Utara	342,02	6.086	16,39	0,91	3.174	2.912
4	Sipora Selatan	268,47	9.903	28,42	0,93	5.101	4.802
5	Sipora Utara	383,08	12.228	44,84	2,17	6.292	5.936
6	Siberut Selatan	508,33	10.039	30,60	1,07	5.171	4.868
7	Siberut Barat Daya	649,08	7.126	7,02	0,96	3.736	3.390
8	Siberut Tengah	739,87	7.160	12,14	1,00	3.715	3.445
9	Siberut Utara	816,11	8.351	10,66	0,17	4.365	3.986
10	Siberut Barat	1.124,86	7.875	6,76	0,92	4.133	3.742
2021		6.011,35	88.389	19,96	0,84	45.891	42.498
2020		6.011,35	87.623	14,52	1,41	45.477	42.146
2019		6.011,35	92.021	15,31	1,82		
2018		6.011,35	90.373	15	1,90		

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 tercatat sebanyak 88.389 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021, dengan laju pertumbuhan rata sebesar 0,84 persen. Laju pertumbuhan penduduk terbesar berada di Kecamatan Sipora Utara. Hal ini kemungkinan disebabkan sebagai ibukota kabupaten dengan tingkat kelahiran dan migrasi penduduk yang cukup intens. Tingkat kepadatan penduduk di Kepulauan Mentawai dikategorikan masih sangat jarang yaitu 19,96 orang/km², artinya setiap km² terdapat sekitar 19-20 orang penduduk. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan

Sipora Utara dengan kepadatan penduduk sebesar 44,84 orang/km², kemudian Kecamatan Sikakap dengan kepadatan penduduk 32,75 orang/km² dan Kecamatan Siberut Selatan dengan kepadatan penduduk 30,60 orang/km².

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan jenis Kelamin
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
0 - 4	3.569	3.404	104,8
5 - 9	4.058	3.953	102,7
10 - 14	4.982	4.676	106,5
15 - 19	4.566	4.047	112,8
20 - 24	3.922	3.845	102,0
25 - 29	3.883	3.838	101,2
30 - 34	4.019	3.864	104,0
35 - 39	3.562	3.067	116,1
40 - 44	3.118	2.882	108,2
45 - 49	2.705	2.384	113,5
50 - 54	2.422	2.080	116,4
55 - 59	1.754	1.567	111,9
60 - 64	1.322	1.229	107,6
65 - 69	784	706	111,0
70 - 74	596	573	104,0
75+	418	383	109,1
Total	45.891	42.498	108,2

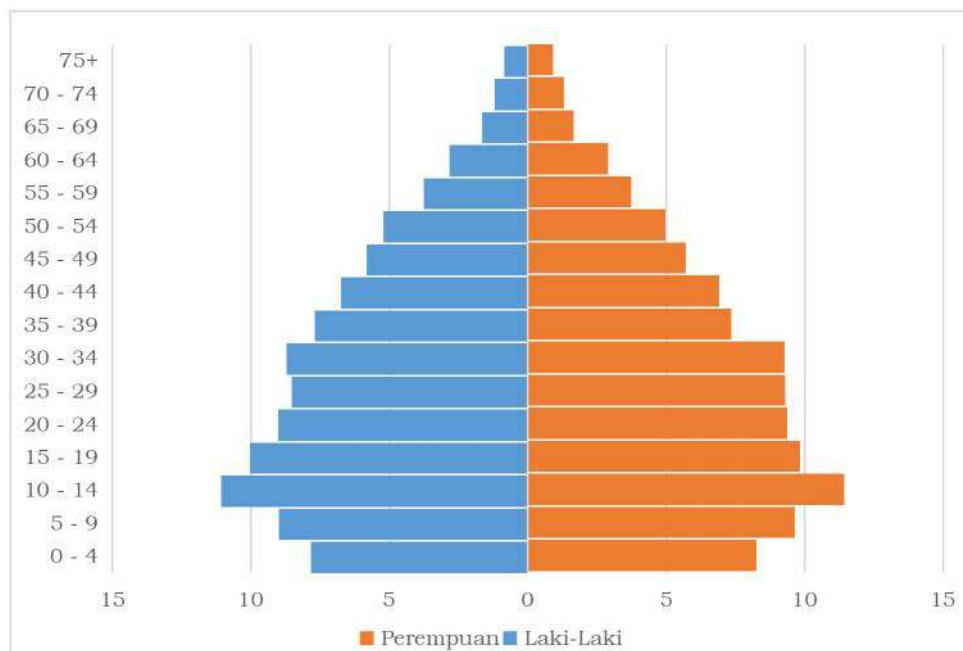
Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan atau dengan rasio 108,2, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 108 orang penduduk laki-laki di Kepulauan Mentawai. Untuk kelompok umur usia non produktif lansia (65+ tahun), rasionya cukup besar yaitu 108,03. Artinya

setiap 100 orang penduduk lansia perempuan terdapat 108 orang lansia laki-laki. Kondisi ini menggambarkan penduduk lansia laki-laki lebih banyak daripada penduduk lansia perempuan, apakah data ini disebabkan oleh kematian, perpindahan atau migrasi penduduk lansia perempuan cukup sering tentunya perlu analisis lebih lanjut lagi.

Komposisi penduduk Kepulauan Mentawai jika dilihat dari piramida penduduk seperti pada Gambar 2.2 menunjukkan bahwa kelompok usia 10-14 tahun memiliki komposisi paling besar dari struktur usia penduduk di Kepulauan Mentawai, namun menurun tajam pada komposisi kelompok usia 55+ tahun.

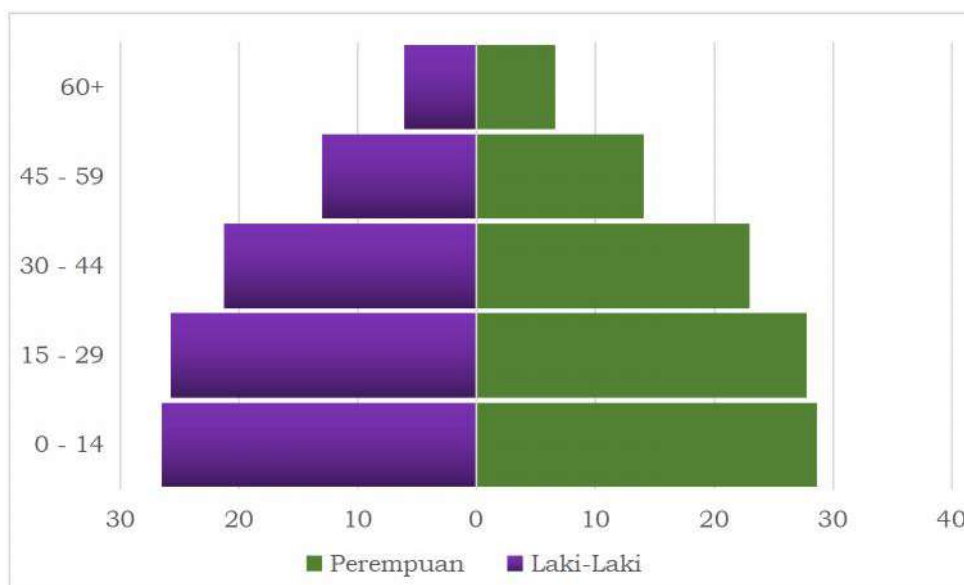
Gambar 2.2
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021



Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Tingkat kelahiran dan perpindahan penduduk menjadi indikator cukup tingginya komposisi penduduk usia 0-9 tahun, namun di sisi lain masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat berdampak pada penurunan jumlah penduduk kelompok usia produktif hingga penduduk pada kelompok usia lansia. Jika dilihat komposisi penduduk dari kelompok usia dengan rentang usia 14 tahun seperti pada Gambar 2.3 piramida penduduk usia rentang 14 tahun, menunjukkan bahwa kelompok usia 0-14 tahun dan 15-29 tahun dengan komposisi terbesar. Kelompok usia produktif 30-44 tahun, 45-59 tahun mengalami penurunan.

Gambar 2.3
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Rentang 14 Tahun
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021



Hal ini mengindikasikan terjadinya pengurangan jumlah penduduk baik pria dan wanita kelompok usia produktif, apakah itu akibat adanya kematian atau karena perpindahan. Penduduk

pada usia produktif yang menjadi tulang punggung pembangunan perlu menjadi perhatian, agar dapat ambil bagian dalam proses pembangunan, tentunya intervensinya dimulai dari menjadi embrio kehidupan, lahir dan balita, baik itu dari segi kesehatan individu, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungannya.

Tabel 2.9
Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio
Penduduk Usia 0 - 14	12.609	12.033	24.642	104,8
Penduduk Usia 15 - 64	31.273	28.803	60.076	108,6
Penduduk Usia 65 +	1798	1662	3.460	108,2
Rasio Ketergantungan	46,07	47,55	46,78	

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa kelompok usia produktif laki-laki lebih besar dari pada perempuan dengan rasio 108,6. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif perempuan terdapat 108-109 penduduk usia produktif laki-laki. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021, rasio ketergantungan Kepulauan Mentawai tahun 2021 sudah dibawah 50 persen yaitu sebesar 46,07 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 46 penduduk usia tidak produktif. Jika rasio ketergantungan ini ditahun berikutnya mengalami penurunan maka Kepulauan Mentawai akan mendapatkan bonus demografi yang tentunya sangat berguna dalam pembangunan di daerah

terkhususnya dengan ketersediaan sumber daya manusia yang produktif dan memiliki daya saing dan kompetitif.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan pembangunan yang sebesar-besarnya adalah menyajahterakan masyarakatnya. Sejatinya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menghilangkan ketimpangan pembangunan baik dari sisi pendapatan, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial dan ekonomi. Pembangunan manusia menjadi pembangunan yang senyatanya benar dan realitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh positif tidak serta merta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi merata dan setidaknya menjadi *trickle-down effect* yang diharapkan menetes kebawah membantu ekonomi masyarakat dengan tetap membutuhkan intervensi pemerintah daerah sebagai katalisator pembangunan sehingga masyarakat benar-benar merasakan arti pembangunan.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kerugian pendapatan bagi masyarakat mulai dari masyarakat dengan bidang usaha mikro, kecil, menengah sampai pada kategori besar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi seperti pertumbuhan

ekonomi tahun 2020 ditutup pada angka minus 1,85 persen di Kabupaten Kepulauan Mentawai, minus 1,6 persen di Propinsi Sumatera Barat dan minus 2,07 untuk skala Nasional. Berbagai upaya pemulihan ekonomi dan percepatan regulasi kebijakan harus segera dilaksanakan karena jika tidak bertindak, akan berisiko terhambat peluang, pertumbuhan yang rapuh, dan bahkan keresahan sosial. Berbagai upaya pengendalian secara maksimal dilakukan agar perekonomian masyarakat dapat kembali tumbuh dan mampu bergerak, berakselerasi seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Melalui vaksinasi yang secara masif dilakukan sejak tahun 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan disetiap aktivitas sosial ekonomi masyarakat telah mampu meningkatkan konsumsi masyarakat sebagai dampak berangsur pulihnya mobilitas masyarakat dan secara agregat pertumbuhan ekonomi membaik dan tumbuh positif.

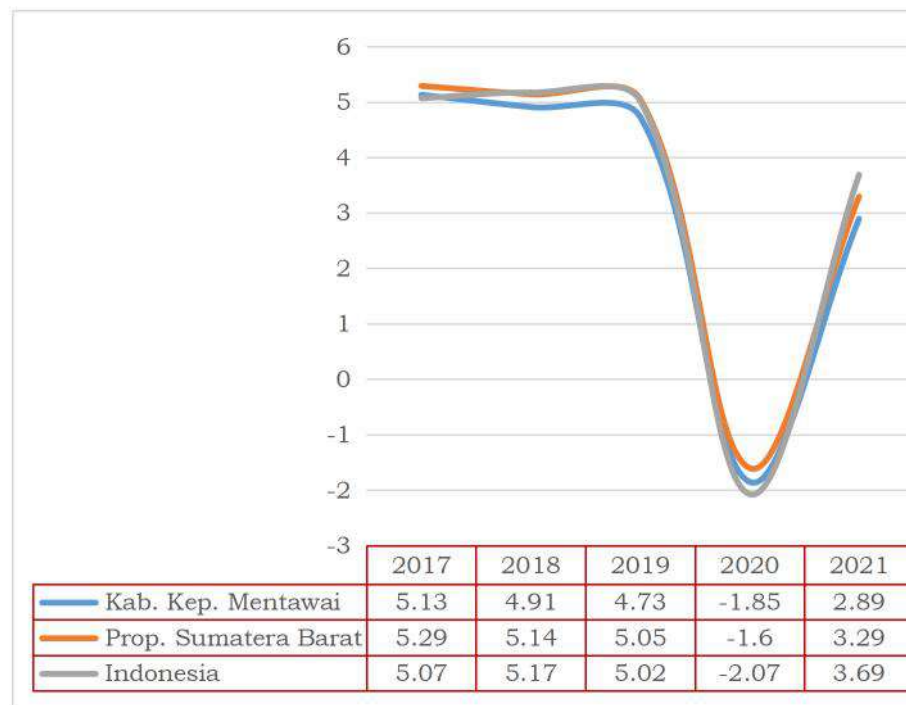
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan ekonomi suatu daerah, semakin membaiknya distribusi ekonomi/pendapatan masyarakat dan meningkatnya daya beli masyarakat serta menurunnya tingkat kemiskinan.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan

pembangunan secara umum. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkat menunjukkan perkembangan produksi barang dan jasa suatu daerah ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah yang dilihat dari berbagai waktu tertentu.

Gambar 2.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



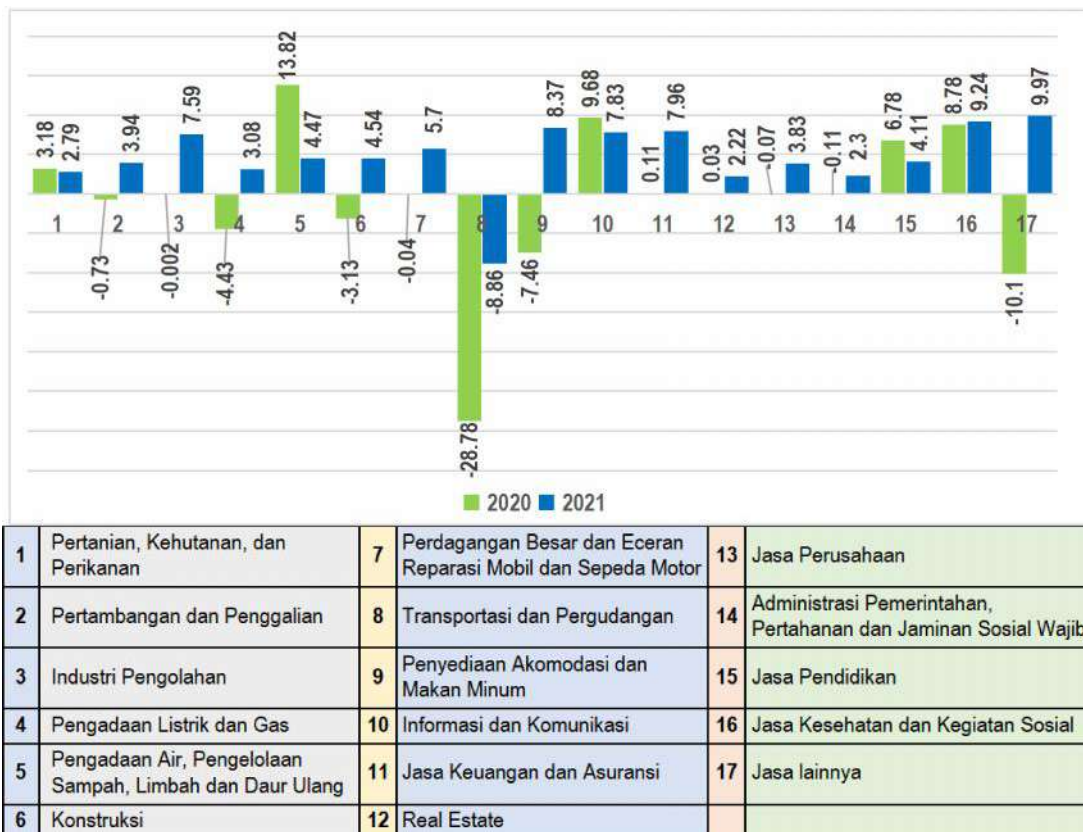
Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Capaian pembangunan makro tahun 2021 menunjukkan hasil yang membaik jika dibandingkan dengan tahun 2020. Perkembangan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang dapat dilihat pada Gambar 2.4 bahwa tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Mentawai telah pada posisi

positif 2,89 persen meningkat jika dibandingkan tahun 2020 dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar minus 1,85 persen.

Tentu ini menjadi awal yang baik dimana aktivitas masyarakat yang berangsur pulih, menjalankan aktivitas dengan tatanan kehidupan dengan kebiasaan baru yang beriringan dengan pandemi COVID-19. Capaian ini juga seiring dengan perbaikan capaian pertumbuhan ekonomi skala regional di Propinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 3,29 persen dan secara Nasional yaitu sebesar 3,69 persen pada tahun 2021.

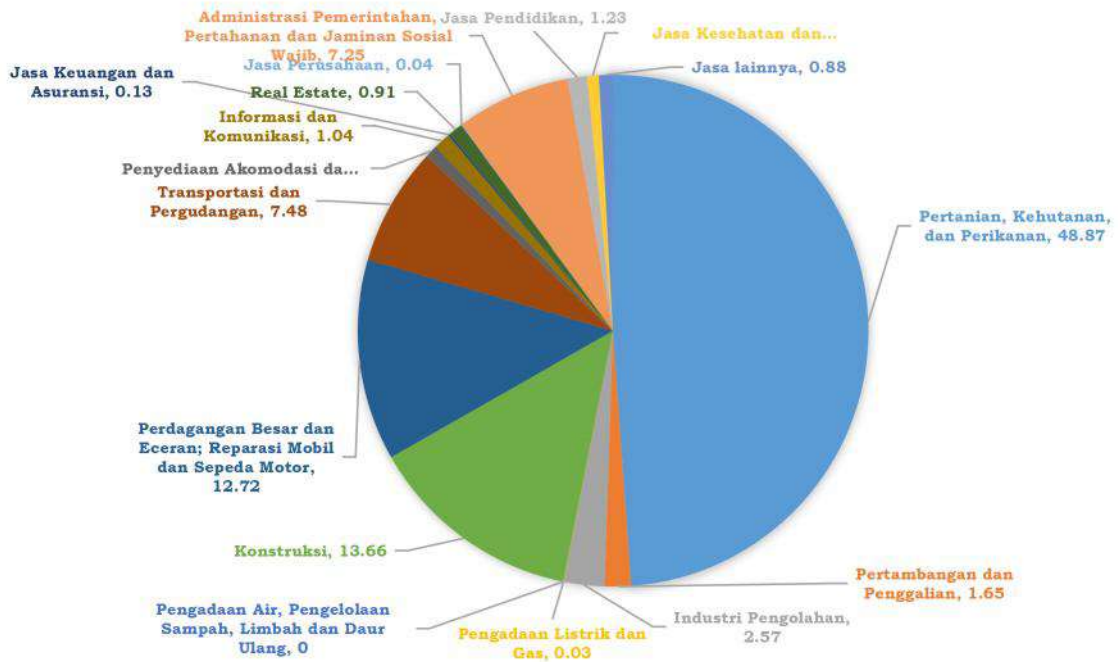
Gambar 2.5
Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2021



Gambar 2.5 menunjukkan laju pertumbuhan sektoral pada PDRB dalam kurun waktu 2020-2021. Dari perkembangan laju pertumbuhan sektoral menunjukkan bahwa tahun 2021 sebageian besar laju pertumbuhan sektoral berada pada angka yang positif, kecuali sektor transportasi dan pergudangan, namun jika dilihat dari angka capaiannya, antara tahun 2020 dan 2021 sudah mengalami perbaikan yaitu sebesar minus 28,78 persen tahun 2020 membaik menjadi minus 8,86 persen tahun 2021. Untuk sektor yang dominan (tumbuh) dimasa pandemi COVID-19 seperti sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor infomasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial relatif terjaga walaupun ada perlambatan dari sisi permintaan.

Berdasarkan kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 ditopang oleh sektor pertanian dengan kontribusi sektoral sebesar 48,87 persen. Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor primer, kontribusi sektor pertanian perkebunan kehutanan dan perikanan menjadi pilar utama yang membangun ekonomi masyarakat Mentawai, begitu juga selama pandemi COVID-19 dimana diberlakukannya pembatasan aktivitas sosial masyarakat, sektor pertanian perkebunan kehutanan dan perikanan menjadi penopang ekonomi dan sebagai menjaga ketahanan pangan selama terjadi pandemi tahun 2020 dan 2021.

Gambar 2.6
Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Secara keseluruhan komponen penyusun PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 didominasi oleh 3 sektor utama antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 48,87 persen, konstruksi 13,66 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,72 persen.

2. Pendapatan Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor

produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Selain sebagai data pencapaian pembangunan daerah, pendapatan per kapita juga dapat menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi daerah. Pendapatan per kapita yang tinggi mengindikasikan tingginya daya beli masyarakat.

Tabel 2.10
 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB (Juta Rupiah)					
ADHK	2.741.550	2.875.664	3.011.724	2.956.010	3.041.550
ADHB	4.001.871	4.525.824	4.641.481	4.647.100	4.843.810
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
ADHB	46,10	47,06	50,12	53,18	54,80

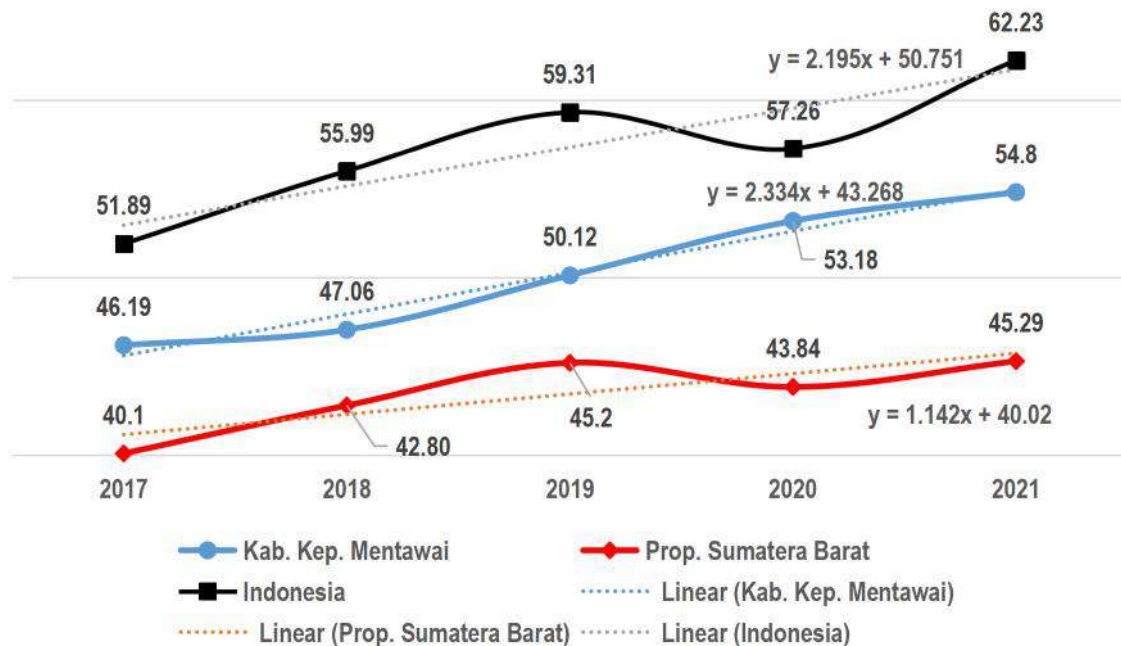
Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Tabel 2.10 menunjukkan perkembangan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2017-2021 yang mengalami kenaikan. Untuk PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan dari 4,647 triliun rupiah meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 menjadi sebesar 4,843 triliun rupiah. Begitu juga dengan PDRB perkapita yang dapat dilihat dengan membaginya dengan total jumlah penduduk, didapat bahwa pada

tahun 2017 PDRB perkapita sebesar 46,10 juta rupiah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 PDRB perkapita menjadi sebesar 54,80 juta rupiah.

Secara umum gambaran pendapatan perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2021 pada Gambar 2.7 mengalami tren kenaikan. Pendapatan perkapita yang diartikan sebagai total produktifitas sumber daya yang ada di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yaitu tahun 2017 sebesar 46,19 juta rupiah perkapita pertahun meningkat menjadi 54,8 juta perkapita pertahun pada tahun 2021.

Gambar 2.7
Pendapatan Perkapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Jika dibandingkan tren kenaikan pendapatan perkapita di kurun waktu yang sama antara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat dan Indonesia menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai berada diatas rata-rata pendapatan per kapita Propinsi Sumatera Barat, namun secara Nasional pendapatan perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dibawah rata-rata pendapatan nasional. Namun angka statistik yang tidak berbanding lurus ketika terjadi kenaikan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan (Tahun 2021 = 14,84 persen), fenomena ini mengindikasikan bahwa belum menjadi syarat utama bagi daerah ketika pendapatan per kapita menjadi ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Jika dilihat dari nilai intersep/ tren, Capaian pendapatan perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh angka yang paling tinggi yaitu sebesar 2.334, sedangkan Propinsi Sumatera Barat sebesar 2.195 dan nasional sebesar 1.142, hal ini mengindikasikan bahwa proyeksi pendapatan perkapita Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mengalami kenaikan lebih baik.

3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu

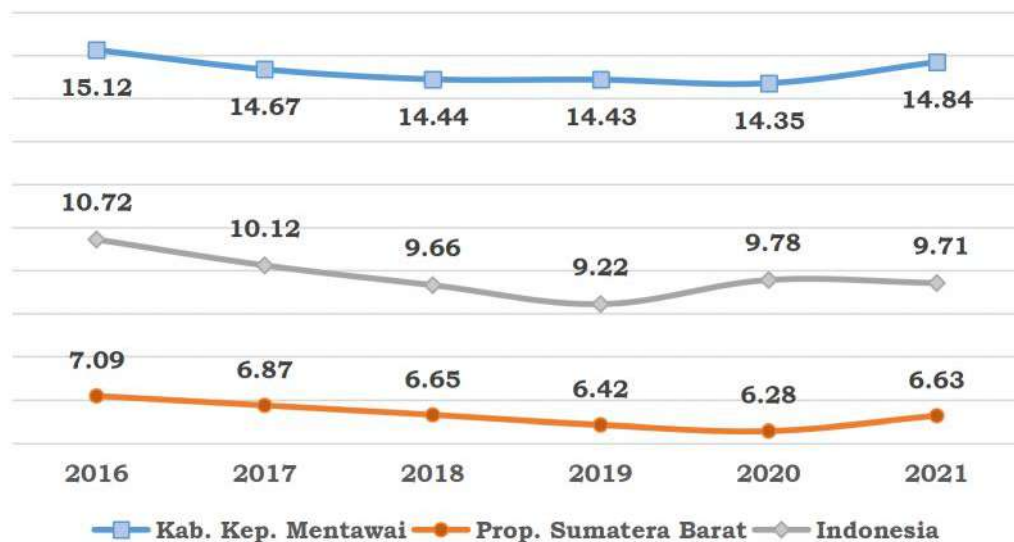
tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (World Bank, 1990). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS).

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2016-2021 mengalami tren penurunan walaupun secara agregat tidak signifikan. Jika dilihat Gambar 2.8 tingkat kemiskinan daerah dari sisi persentase mengalami penurunan yaitu 15,12 persen tahun 2016 turun menjadi 14,84 persen pada tahun 2021. Dampak pandemi terlihat dari meningkatnya tingkat kemiskinan yang dapat dilihat dari kenaikan, yaitu dari 14,35 persen ditahun 2020 menjadi 14,84 persen ditahun 2021. Begitu juga dari disisi jumlah masyarakat miskin mengalami penambahan yaitu pada tahun 2019 penduduk miskin berjumlah 13.220 jiwa dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebanyak 14.310 jiwa atau bertambah 1.090 jiwa.

Jika dilihat secara kasat mata yaitu berdasarkan perbandingan angka persentase penduduk miskin yang tinggi dengan tingkat pengangguran terbuka yang dikatakan masih rendah tentu analoginya tidak sesuai. Analisis sederhananya tentu

dengan rendahnya tingkat pengangguran berimplikasi pada rendahnya tingkat kemiskinan. Namun, hal itu menjadi bias ketika dilihat secara definisi masing-masing indikator ekonomi pembangunan antara tingkat pengangguran dengan persentase penduduk miskin.

Gambar 2.8
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Begitu juga jika dilihat dari perbandingan pencapaian penurunan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.8 menunjukkan bahwa pencapaian tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada jauh diatas pencapaian penurunan tingkat kemiskinan Propinsi Sumatera Barat dan secara Nasional. Pada Tahun 2021 tingkat kemiskinan Propinsi Sumatera Barat sebesar 6,63 persen,

Nasional sebesar 9,71 persen dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,84 persen. Jika dianalisis lebih dalam lagi indikator kemiskinan sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11
Indikator Kemiskinan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,70	0,61	0,42	0,77	0,63
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,58	2,42	1,87	2,84	2,43
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	280.695	294.284	310.033	340.191	356.403
Tingkat Kemiskinan (persen)	14,67	14,44	14,43	14,35	14,84
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	12.950	12.990	13.200	13.370	14.310

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Tabel 2.11 menunjukkan perkembangan berbagai indikator kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren penurunan, pada tahun 2017 capaiannya sebesar 0,70 dan mengalami penurunan menjadi 0,42 pada tahun 2019 dan ada kenaikan pada tahun 2020 menjadi 0,77 sebagai dampak COVID-19 lalu kembali turun menjadi 0,63 di tahun 2021. Capaian indeks keparahan kemiskinan dalam kurun waktu 2017-2021 mengindikasikan bahwa semakin rendahnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kepulauan Mentawai.

Begitu juga dengan indikator indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2017-2021 menunjukkan tren penurunan yaitu pada tahun 2017 sebesar

2,58 lalu turun pada tahun 2019 menjadi 1,87, walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,87 lalu turun pada tahun 2021 menjadi 2,43. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan kurun waktu 2017-2021 menunjukkan kecenderungan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil. Kondisi ini menggambarkan tentu masih perlunya penanganan melalui program pembangunan yang terintegrasi dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kepulauan Mentawai.

4. Rasio Gini

Rasio gini menjadi salah satu ukuran untuk melihat sejauh mana pemerataan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Jika nilai rasio gini bernilai 0 maka dikatakan pemerataan pendapatan sempurna, namun jika rasio gini bernilai 1 maka dikatakan ketimpangan pendapatan sempurna.

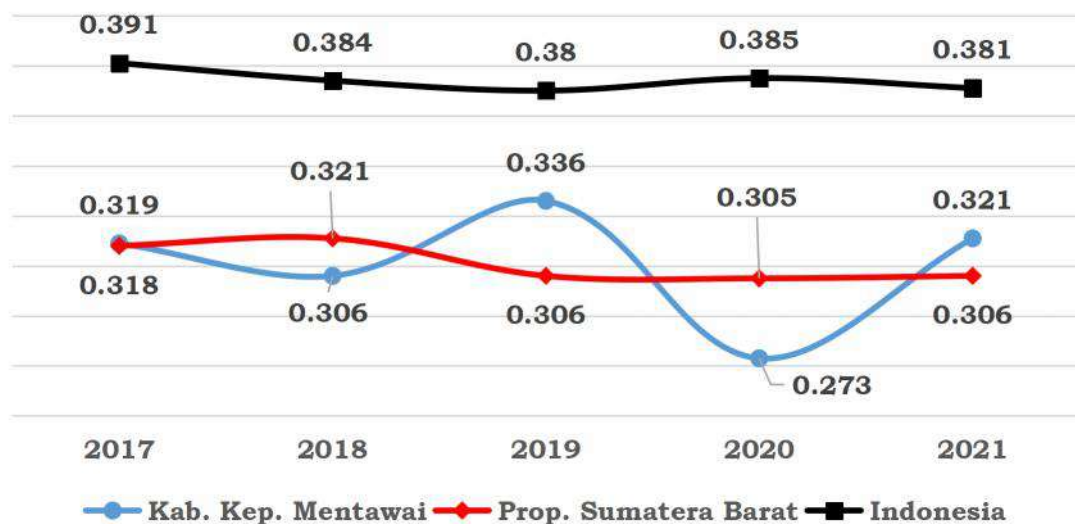
Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Ketimpangan Rendah
0,4 - 0,5	Ketimpangan Sedang
> 0,5	Ketimpangan Tinggi

Gambar 2.9 menunjukkan perkembangan rasio gini Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat dikatakan cukup baik. Walaupun pencapaiannya selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif. Namun secara tren perkembangannya berada pada

posisi 0,31. Perbandingan pencapaian Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional menunjukkan perkembangan yang baik, bahwa pencapaian Rasio Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 5 tahun terakhir berada di bawah rata-rata pencapaian Rasio Gini Nasional dan hanya terpaut 0,03 dari pencapaian rata-rata Rasio Gini Propinsi Sumatera Barat (0,31).

Capaian rasio gini Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan yaitu tahun 2020 sebesar 0,273 menjadi 0,321 pada tahun 2021. Artinya ada peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Kepulauan Mentawai. Namun, secara umum pencapaian rasio gini Kabupaten Kepulauan Mentawai 5 tahun terakhir masih dikategorikan pada tingkat ketimpangan rendah ($0 < \text{rasio gini} < 0,4$).

Gambar 2.9
Rasio Gini
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

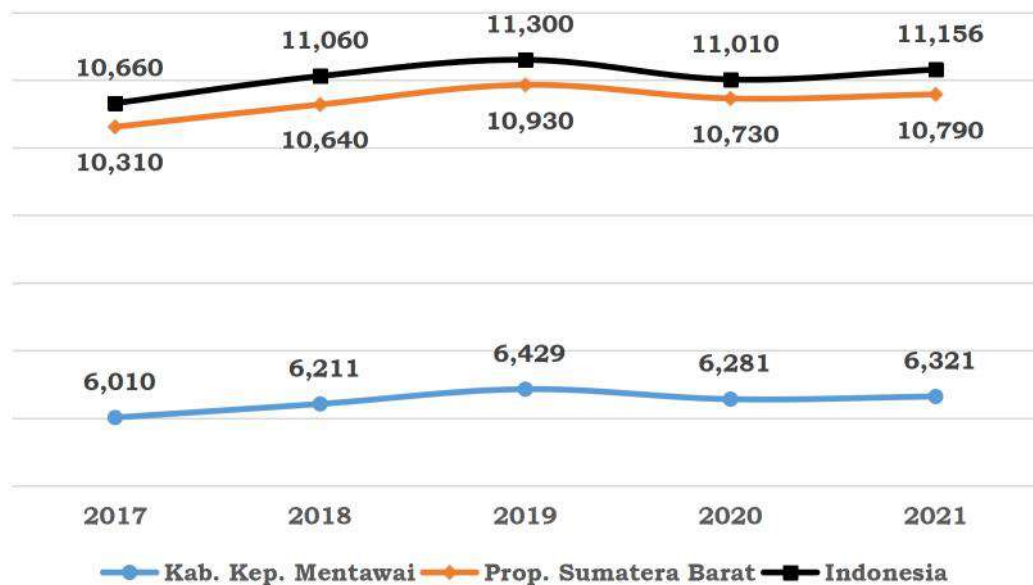


Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

5. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran.

Gambar 2.10
Pengeluaran Perkapita
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran perkapita masyarakat Kepulauan Mentawai yang ditunjukkan melalui Gambar 2.10 memperlihatkan terjadi peningkatan pengeluaran perkapita, yaitu pada tahun 2017 pengeluaran perkapita masyarakat Kepulauan Mentawai sebesar Rp.6,01 juta/kapita/tahun naik pertahunnya hingga tahun 2021 menjadi sebesar Rp.6,32 juta/kapita/tahun, peningkatan ini mengindikasikan membaiknya ekonomi dan daya beli masyarakat. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19, yang mengakibatkan penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat yaitu menjadi sebesar 6,28 juta/kapita/tahun.

Tabel 2.12
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan
Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2021

Uraian	2020	%	2021	%
Makanan				
Padi-padian	68.080	10,93	78.576	12,38
Umbi-umbian	29.860	4,80	28.980	4,57
Ikan/udang/cumi/kerang	65.383	10,50	89.962	14,18
Daging	25.727	4,13	24.703	3,89
Telur dan susu	23.931	3,84	29.646	4,67
Sayur-sayuran	50.527	8,12	63.697	10,04
Kacang-kacangan	3.866	0,62	5.772	0,91

Uraian	2020	%	2021	%
Buah-buahan	95.736	15,38	22.379	3,53
Minyak dan kelapa	20.150	3,24	22.415	3,53
Bahan minuman	24.424	3,92	25.976	4,09
Bumbu-bumbuan	10.144	1,63	11.924	1,88
Konsumsi lainnya	7.196	1,16	9.559	1,51
Makanan dan minuman jadi	114.890	18,45	119.181	18,78
Rokok	82.694	13,28	101.848	16,05
JUMLAH (I)	622.608		634.621	
Bukan Makanan				
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	165.468	52,64	222.319	53,15
Aneka komoditas dan jasa	75.248	23,94	107.296	25,65
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	25.680	8,17	28.203	6,74
Barang tahan lama	16.348	5,20	23.098	5,52
Pajak, pungutan, dan asuransi	19.381	6,17	31.295	7,48
Keperluan pesta dan upacara	11.746	3,74	6.053	1,45
JUMLAH (II)	314.320		418.263	
TOTAL (JUMLAH I+II)	936.929		1.052.884	

Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Pengeluaran rata-rata perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan total anggota rumah tangga tersebut. Tabel 2.12 menunjukkan perkembangan pengeluaran masyarakat per bulan berdasarkan jenis makanan dan non makanan. Dalam kurun tahun 2021 pengeluaran rata-rata perkapita sudah mengalami perbaikan yang ditandai dengan peningkatan mayoritas konsumsi atau pengeluaran di masing-masing uraian. Pergerakan barang dan orang atau mobilisasi yang

sudah mulai lancar menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya aktivitas masyarakat yang ditandai dengan peningkatan konsumsi.

Untuk jenis pengeluaran makanan (14 item) hampir seluruhnya mengalami kenaikan konsumsi di tahun 2021. konsumsi barang makanan pokok dan sehari-hari seperti padi-padian, ikan, udang, telur, susu, sayuran hingga pada konsumsi rokok mengalami kenaikan. Masa tanggap COVID-19 yang dirasakan dan menjadi atensi masyarakat di tahun 2020 sepertinya pada tahun 2021 sudah mulai terbuka, sehingga pemenuhan kebutuhan tidak sekedar antisipasi dan memenuhi kebutuhan kesehatan namun juga sudah pada memenuhi kebutuhan lainnya.

6. Tingkat Pengangguran

Salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing. Penguatan sumberdaya manusia menjadi penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.13
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
Kab. Kepulauan Mentawai	1,96	2,31	2,92	3,98	2,79	2,79
Kab. Pesisir Selatan	5,95	6,03	6,02	7	5,97	6,19
Kab. Solok	6,05	6,12	4,72	4,65	4,67	5,24
Kab. Sijunjung	3,32	3,22	3,64	5,3	3,57	3,81
Kab. Tanah Datar	3,72	4,01	3,2	4,79	4,63	4,07
Kab. Padang Pariaman	6,65	7,03	6,08	8,13	8,41	7,26
Kab. Agam	4,23	4,93	4,78	4,61	5,06	4,72
Kab. Lima Puluh Kota	2,6	2,73	2,3	3,03	2,25	2,58
Kab. Pasaman	6,81	6,04	5,28	5,04	4,92	5,62
Kab. Solok Selatan	5,54	5,84	4,91	5,62	4,84	5,35
Kab. Dharmasraya	3,69	4,02	5,06	5,31	5	4,62
Kab. Pasaman Barat	3,99	3,36	4,74	4,69	5,02	4,36
Kota Padang	9,44	9,29	8,74	13,64	13,37	10,90
Kota Solok	5,88	6,03	7,06	8,35	5,15	6,49
Kota Sawahlunto	6,19	5,92	6,84	8,2	6,38	6,71
Kota Padang Panjang	5,43	5,35	4,38	7,22	4,9	5,46
Kota Bukittinggi	6,94	7,24	6,2	7,51	6,09	6,80
Kota Payakumbuh	3,45	3,95	4,13	6,68	6,47	4,94
Kota Pariaman	5,97	5,82	5,48	5,73	6,09	5,82
Prop. Sumatera Barat	5,58	5,55	5,32	6,88	6,52	5,97

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel 2.13 menunjukkan perkembangan tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat kurun waktu 2017-2021. Pada tabel tersebut dapat dilihat daerah dengan tingkat pengangguran terendah yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rata-rata TPT sebesar 2,58 persen dan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata TPT sebesar 2,79 persen.

Tabel 2.14
Penduduk Angkatan Kerja Berusia 15 Tahun Keatas
Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			
	Bekerja (jiwa)	%	Pengangguran (jiwa)	%
Belum pernah bersekolah atau tidak menamatkan SD	214	0,41	-	
SD/MI/Sederajat	15.038	29,11	231	15,56
SMP/MTs/Sederajat	8.474	16,40	53	3,57
SMA/SMK/MAN/Sederajat	6.305	12,20	69	4,65
Diploma I, II	14.770	28,59	914	61,55
Diploma III	1.591	3,08	-	
Diploma IV/Strata I	817	1,58	87	5,86
Strata II/III	4.459	8,63	131	8,82
Jumlah	51.668	-	1.485	-

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Berdasarkan jumlah angkatan kerja Kepulauan Mentawai tahun 2021 seperti pada Tabel 2.14 menunjukkan bahwa kualitas angkatan kerja yang bekerja yang dilihat dari pendidikan tertinggi berada pada jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 29,11 persen, tamatan SMA/SMK/MI/ sederajat sebesar 12,20 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa *hard skill* penduduk Kepulauan Mentawai yang bekerja masih sangat rendah dan tidak memiliki nilai tawar yang kuat dalam dunia kerja, jika diakumulasikan tamatan SMA/SKM/MAN/ sederajat hingga jenjang yang belum pernah bersekolah/tidak tamat SD angka ini bahkan mencapai 58,12 persen dari total angkatan kerja tahun 2021. Ini menjadi perhatian untuk memaksimalkan peranan sekolah kejuruan dan sekolah kesetaraan untuk meningkatkan disiplin ilmu dan keahlian masyarakat (angkatan kerja) di Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.15
Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, 2021

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Berusaha Sendiri	5.860	2.343	8.203	15,88
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	11.192	5.095	16.287	31,52
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	110	190	300	0,58
Buruh/Karyawan/Pegawai	5.683	4.635	10.318	19,97
Pekerja Bebas di Pertanian	870	98	968	1,87
Pekerja Bebas di non Pertanian	873	183	1.056	2,04
Pekerja Keluarga/Tak dibayar	4.896	9.640	14.536	28,13
Jumlah	29.484	22.184	51.668	

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Dilihat dari penduduk Kepulauan Mentawai yang bekerja (15+ tahun) seperti pada Tabel 2.15 menunjukkan bahwa status pekerjaan utama masyarakat Mentawai pada kriteria status pekerjaan penduduk berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tak dibayar dengan persentase sebesar 31,52 persen, dengan jumlah tenaga kerja laki-laki yang mendominasi (11.192 jiwa) sedangkan perempuan sebanyak 5.095 jiwa dan pekerja keluarga/tak dibayar dengan persentase sebesar 28,13 persen, dengan jumlah tenaga kerja perempuan lebih banyak yaitu sebesar 9.640 jiwa sedangkan pekerja laki-laki sebanyak 4.896 jiwa. Hal ini menjadi wajar dikarenakan oleh sektor primer (pertanian, peternakan dan perikanan) sebagai sumber utama mata pencarian masyarakat Mentawai dan masih bersifat kekeluargaan.

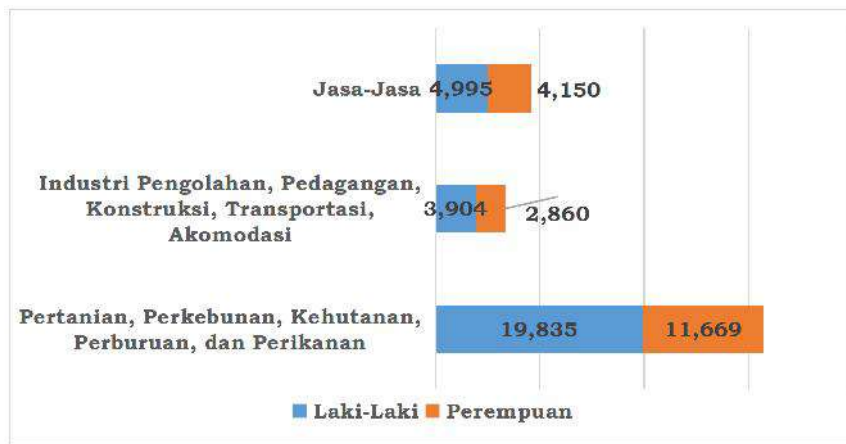
Tabel 2.16
Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	19.835	11.669	31.504	66,45
Industri Pengolahan, Pedagangan, Konstruksi, Transportasi, Akomodasi	3.904	2.860	6.764	14,27
Jasa-Jasa	4.995	4.150	9.145	19,29
Jumlah	28.734	18.679	47.413	

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama seperti pada Tabel 2.16 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Mentawai bekerja di sektor primer (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan) yaitu sebanyak 31.504 jiwa atau sekitar 66,45 persen sedangkan untuk lapangan usaha di sektor industri pengolahan, pedagangan, konstruksi, transportasi, akomodasi, jumlah pekerja/ masyarakat yang bekerja di sektor ini berbeda jauh dengan jumlah di sektor primer yaitu hanya sebanyak 6.764 jiwa atau sekitar 14,27 persen dengan jumlah pekerja laki-laki mendominasi sebanyak 3.904 jiwa dan pekerja perempuan sebanyak 2.280 jiwa.

Gambar 2.11
Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, 2021



Gambar 2.11 menunjukkan dominasi pekerja laki-laki untuk setiap sektor pekerjaan utama di Kepulauan Mentawai terutama di sektor industri pengolahan yaitu dengan kontribusi sebesar 57,71 persen atau sebanyak 3.904 jiwa. Namun, semakin berimbang di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebesar 62,96 persen, begitu juga di sektor jasa-jasa dengan dominasi pekerja laki-laki sebesar 53,05 persen atau sebanyak 19.835 jiwa.

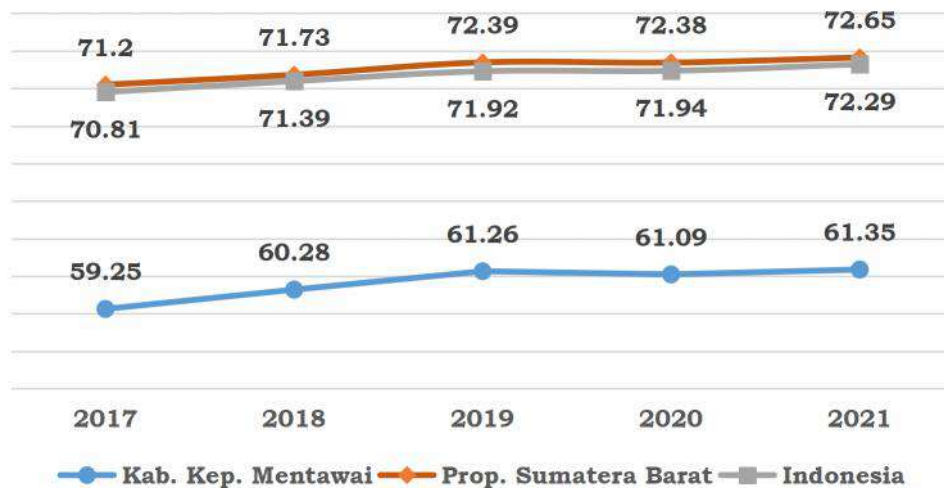
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator ukuran keberhasilan pembangunan dalam menyejahterahkan masyarakat dapat dilihat dari capaian indeks pembangunan manusia setiap tahunnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga)

dimensi dasar umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

Gambar 2.12
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021 seperti terlihat dalam Gambar 2.12. Jika dilihat dari perbandingan capaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Propinsi Sumatera Barat dan nasional, tampak pada Gambar 2.12 bahwa capaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2017-2021 berada jauh dibawah capaian rata-rata IPM Propinsi Sumatera Barat dan Nasional. Capaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih di bawah pencapaian IPM menunjukkan belum baiknya kinerja elemen/indikator yang membangun IPM itu sendiri, antara lain harapan lama sekolah, rata lama sekolah, pendapatan perkapita dan angka harapan hidup masih rendah.

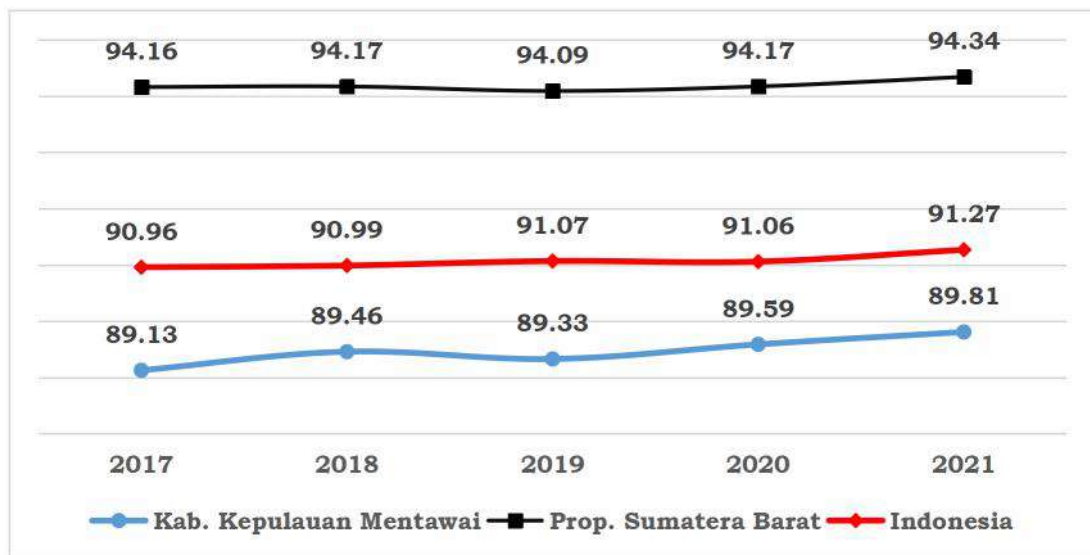
IPM ini merupakan angka komposit dari capaian angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Pada tahun 2017, capaian IPM Kepulauan Mentawai sebesar 59,25 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 61,26. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 61,09. penurunan ini terjadi pada sisi pengeluaran perkapita masyarakat selama pandemi yang mengalami penurunan lalu mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 61,35.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Indeks pembangunan gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Pembangunan gender menjadi hal penting dalam melihat bagaimana kesetaraan gender yang lebih dimaknai sebagai

kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian IPD Propinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Gambar 2.13
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



Sumber : BPS (diolah)

Gambar 2.13 menunjukkan perkembangan IPG Kepulauan Mentawai Tahun 2017 sebesar 89,13 mengalami peningkatan pencapaian hingga tahun 2021 IPG Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 89,81 artinya ketimpangan peran antara perempuan dengan laki-laki semakin berkurang (menuju 100). Namun, jika dilihat dari tren perkembangan IPG Kepulauan Mentawai kurun waktu 2017-2021 menunjukkan tren menaik (peningkatan), berbeda dengan tren IPG Nasional yang menaik tapi sangat landai,

begitu juga tren IPG Propinsi Sumatera Barat tren menurun sangat landai. Kondisi ini tentunya menjadi optimisme peningkatan IPG tahun-tahun berikutnya agar capaiannya jauh lebih baik.

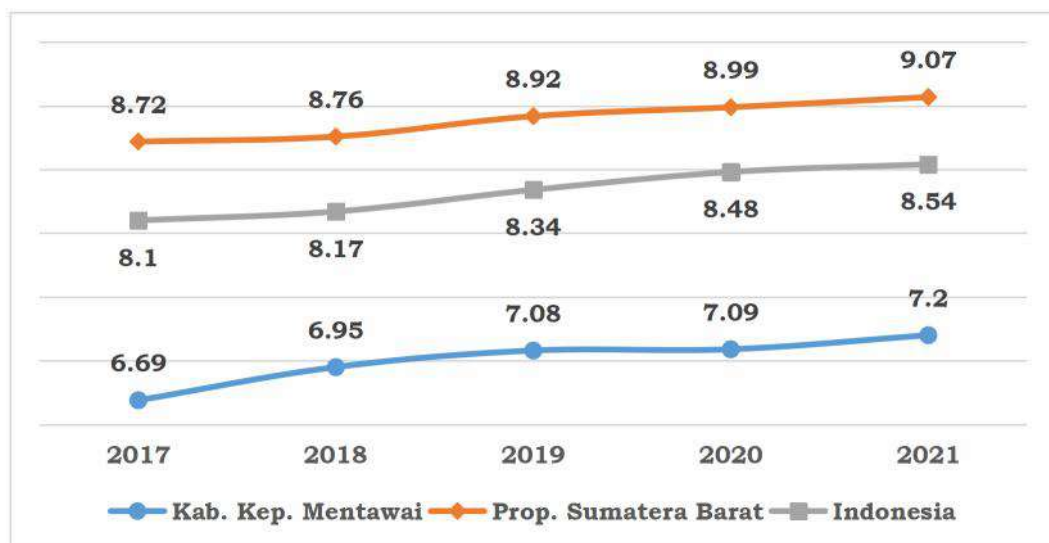
3. Rata dan Harapan Lama Sekolah

Mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat tersebut membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut andil dalam penyelenggaraan kegiatan sosial kemanusiaan. Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sejatinnya pembangunan ekonomi daerah yang mengalami peningkatan haruslah berbanding lurus pembangunan manusianya.

Gambar 2.14 menunjukkan perkembangan rata-rata lama sekolah di Kepulauan Mentawai setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tahun 2017 rata-rata lama sekolah di Kepulauan Mentawai sebesar 6,69 tahun naik setiap tahunnya hingga tahun 2021 menjadi sebesar 7,2 tahun atau setara dengan kelas 7 SMP/ sederajat. Jika dibandingkan dengan capaian Propinsi Sumatera Barat (9,07 tahun atau setara dengan kelas 8-9

SMP/ sederajat) dan secara Nasional (8,54 tahun atau setara dengan kelas 8 SMP/ sederajat) tentunya capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih jauh dibawahnya (tampak seperti Gambar 2.14).

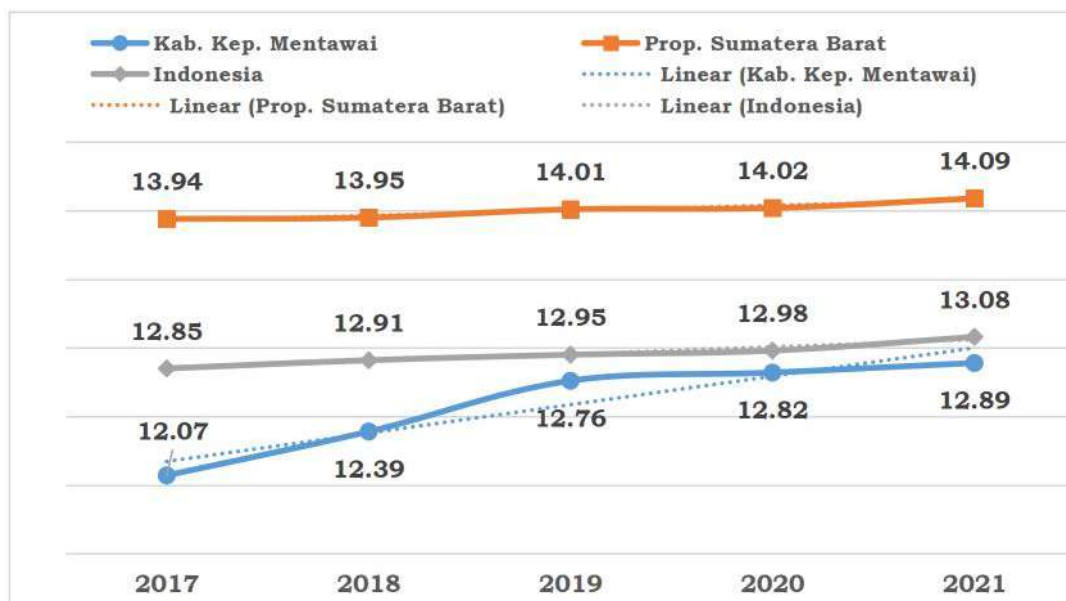
Gambar 2.14
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Begitu juga capaian harapan lama sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditampilkan melalui Gambar 2.15 menunjukkan bahwa capaian harapan lama sekolah selama kurun waktu 2017-2021 berada dibawah capaian harapan lama sekolah Propinsi Sumatera Barat dan Nasional. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Gambar 2.15
Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



Sumber : BPS (diolah)

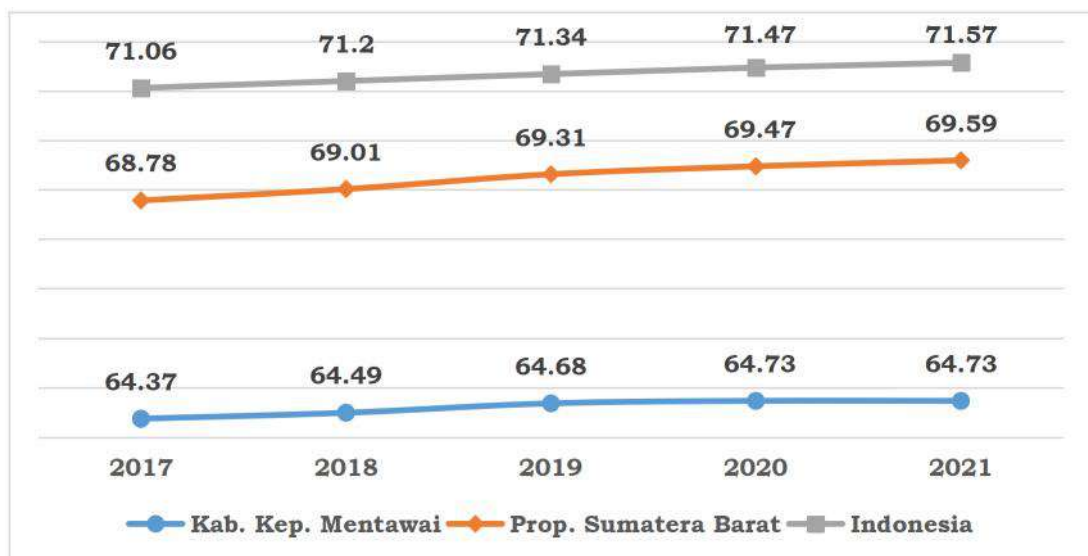
Pada tahun 2017 harapan lama sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 12,07 tahun dan setiap tahun meningkat hingga tahun 2021 menjadi sebesar 12,89 tahun atau setara dengan Diploma I atau Perguruan Tinggi (PT) semester 1. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kepulauan Mentawai masih jauh berada dibawah capaian HLS Propinsi Sumatra Barat dan secara Nasional. Namun, jika dilihat dari tren capaiannya bahwa proyeksi capaian HLS Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan (tren menaik tajam).

4. Angka Harapan Hidup

Kebijakan pembangunan kesehatan di daerah diarahkan pada upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan daerah tertinggal yaitu dengan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan

pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan agar derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator-indikator kesehatan dapat tercapai dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Gambar 2.16
 Angka Harapan Hidup (Tahun)
 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



Sumber : data (diolah)

Pada Gambar 2.16 menunjukkan perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat di Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan pencapaian, ini terlihat pada tahun 2017 AHH Kepulauan Mentawai sebesar 64,37 tahun meningkat setiap

tahunnya hingga pada tahun 2021 menjadi sebesar 64,73 tahun. Jika dibandingkan capaian AHH Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian AHH Propinsi Sumatera Barat dan secara Nasional, tentunya capaian AHH Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berada dibawah capaian AHH Propinsi Sumatera Barat dan Nasional (Gambar 2.16). Upaya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) sangat erat kaitannya angka kematian anak lahir, gizi yang cukup bagi ibu hamil dan bayi lahir, nutrisi dan gizi bagi anak, pola hidup sehat dan produktivitas, kualitas lingkungan, kualitas hidup bagi lanjut usia

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa dilakukan dalam upaya pelestarian tata cara/norma kehidupan bermasyarakat. Meningkatkan kepedulian dan minat masyarakat menjadi hal penting dalam menunumbuhkembangkan nilai-nilai budaya pada masyarakat

terutama kaum muda agar nilai tersebut berkelanjutan dan lestari kegenerasi berikutnya.

Tabel 2.17
Perkembangan Seni dan Budaya
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	2	8	0	0
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	5	1	1	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	55	55	55	55	55

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Melalui berbagai even/festival yang dilakukan juga berbagai pembangunan sarana, pelestarian objek dan warisan budaya diharapkan mampu memajukan kebudayaan daerah sehingga menjadi lestari dan dikenal dengan baik.

Tabel 2.18
Perkembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah organisasi pemuda	16	16	9	10	10
2	Jumlah organisasi olahraga	23	23	10	10	10
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	5	5	0	0
4	Jumlah kegiatan olahraga	12	12	10	3	0
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	5	5	30	0	0
6	Lapangan olahraga	209	209	267	5	5
	Total	270	270	331	28	25

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perkembangan keolahragaan di Kepulauan Mentawai sangat identik dengan kehidupan bermasyarakat Mentawai, sejak tahun 2020 kegiatan even olahraga dan kepemudaan tidak terselenggara yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Beberapa sarana keolahragaan dimasing-masing desa juga beberapa dalam kondisi tidak terawat dan tidak difungsikan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan pelayanan yang secara umum dibutuhkan dan menjadi prasyarat kehidupan masyarakat yang bermartabat dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga atas suatu barang jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Pelayanan umum ini pada dasarnya terbagi 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisa kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman; (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; (6) sosial.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan tersebut antara lain kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia juga harus dapat diukur. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat berlaku di semua wilayah. Membuka akses pelayanan pendidikan menjadi kebutuhan prioritas dalam membangun dunia pendidikan. Pembangunan unit sekolah baru maupun rehabilitasi sekolah selalu diupayakan dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Letak geografis Kepulauan Mentawai menjadi tantangan tersendiri dalam membuka akses sekolah bagi masyarakat, selain terkait alokasi anggaran peran lintas sektoral juga ikut dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Keunggulan suatu bangsa tak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan sumber daya manusia. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi, sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Secara rasional dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kualitas hidup manusia akan semakin baik, karena dengan ilmu pengetahuannya ia dapat mengelola dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh para ahli aliran klasik yang menganggap manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusianya (Smith, 1790). Pembangunan pendidikan merupakan untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut merupakan motor

penggerak (*engine of growth*) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri.

Tabel 2.19
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2021

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah lagi
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	
JENIS KELAMIN					
Laki-Laki	6,22	17,64	6,58	7,25	62,31
Perempuan	10,01	20,96	6,77	5,12	57,14
KELOMPOK PENGELUARAN					
40 Persen Terbawah	10,60	23,75	6,43	4,70	54,53
40 Persen Tengah	8,32	18,97	6,50	6,77	59,44
20 Persen Atas	NA	11,01	NA	NA	70,85
Kabupaten Kepulauan Mentawai	8,07	19,26	6,67	6,21	59,79

Sumber: SATKESRA KKM 2021

Penduduk Mentawai yang berumur 5 tahun keatas dengan status pendidikan tidak bersekolah lagi sebesar 59,79 persen dan dengan status pendidikan tidak/belum pernah bersekolah sebesar 8,07 persen. Artinya ada sekitar 67,86 persen masyarakat Mentawai yang belum pernah dan belum menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu, sehingga selain memastikan akses layanan pendidikan formal bagi masyarakat juga memfasilitasi masyarakat yang akan mengikuti pendidikan kesetaraan sehingga secara formal jenjang pendidikannya telah terpenuhi.

Tabel 2.20
Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik
dan Kemampuan Membaca dan Menulis (Persen), 2021

Karakteristik Penduduk	Huruf Latin	Lainnya
Laki-laki	98,62	10,09
Perempuan	97,73	9,57
Kelompok Pengeluaran 40% Terbawah	97,95	3,47
Kelompok Pengeluaran 40% Tengah	97,58	6,26
Kelompok Pengeluaran 20% Teratas	99,69	26,24
Kepulauan Mentawai	98,20	9,85

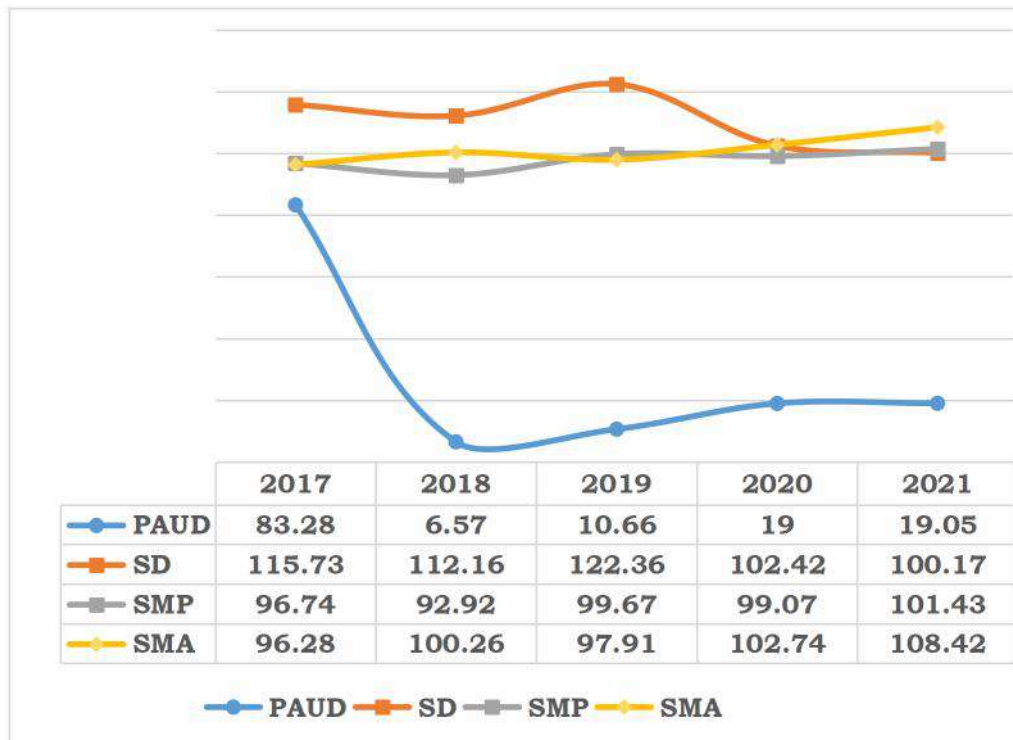
Sumber : Satkesra KKM 2021

Jika dilihat dari karakteristik penduduk dengan kemampuan membaca menulis tampak pada Tabel 2.20 bahwa pada tahun 2021 angka melek huruf di Kepulauan Mentawai telah mencapai 98,20 persen, artinya penduduk Mentawai tinggal sekitar 1,8 persen yang tidak bisa membaca dan menulis. Dari capaian ini terdapat sebanyak 98,62 persen laki-laki dan 97,73 persen perempuan sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Begitu juga jika diperbandingkan berdasarkan tingkat pendapatan 40 persen terbawah bahwa sebanyak 97,95 persen telah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Indikator ini penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Gambar 2.17 menunjukkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2017-2022 dengan tren peningkatan. Untuk APK PAUD mengalami

peningkatan jika dilihat perkembangan capaian mulai dari tahun 2018 sebesar 6,57 persen menjadi 19,05 persen di tahun 2021.

Gambar 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



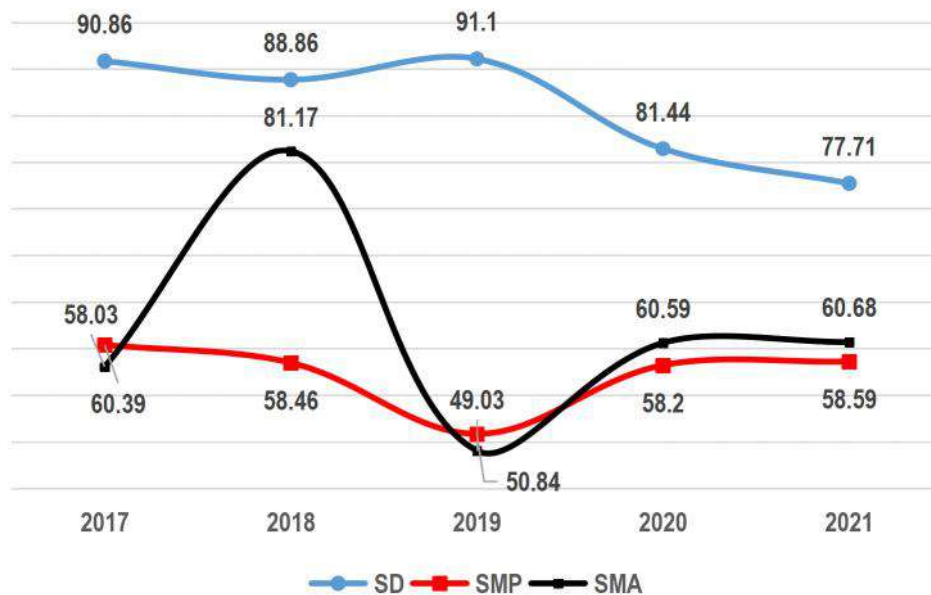
Sumber : <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Untuk jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan SD/ sederajat sesuai dengan kelompok umur usia sekolah SD/ sederajat hingga Tahun 2021 (APK) kurun waktu 2017-2021 sudah melebihi 100 persen, artinya bahwa jumlah peserta didik SD/ sederajat sudah melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang seharusnya. Jika dilihat dari tren perkembangan APK SD/ sederajat mengalami penurunan capaian, tentunya ini menjadi perhatian bagi masyarakat juga pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat terutama yang

masyarakat yang tidak berusia sekolah jenjang SD/ sederajat karena terdapat 11.753 jiwa atau 24,17 persen angkatan kerja belum pernah bersekolah atau tidak menamatkan SD/ sederajat. Untuk capaian APK SMP/ sederajat juga mengalami penurunan. Capaian APK SMP/ sederajat tahun 2017 sebesar 96,74 persen capaiannya meningkat hingga tahun 2021 menjadi sebesar 101,43 persen. Hal ini menjadi perhatian serius terkait kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak pada produktivitas. Begitu juga dengan APK SMA/ sederajat, walaupun secara tren mengalami peningkatan dari 96,28 persen pada tahun 2017 menjadi 108,42 persen tahun 2021 tentu menjadi perhatian serius bagaimana meningkatkan minimal penduduk usia produktif jenjang pendidikannya tamatan SMA/ sederajat, agar dari sisi kapasitas dan produktifitas dapat memadai.

Gambar 2.18 menunjukkan seberapa besar penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan tepat waktu dan pada rentang umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Untuk setiap jenjang pendidikan SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat capaian APM belum mencapai 100 persen, artinya masih terdapat masyarakat pada usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu belum mendapatkan layanan pendidikan.

Gambar 2.18
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



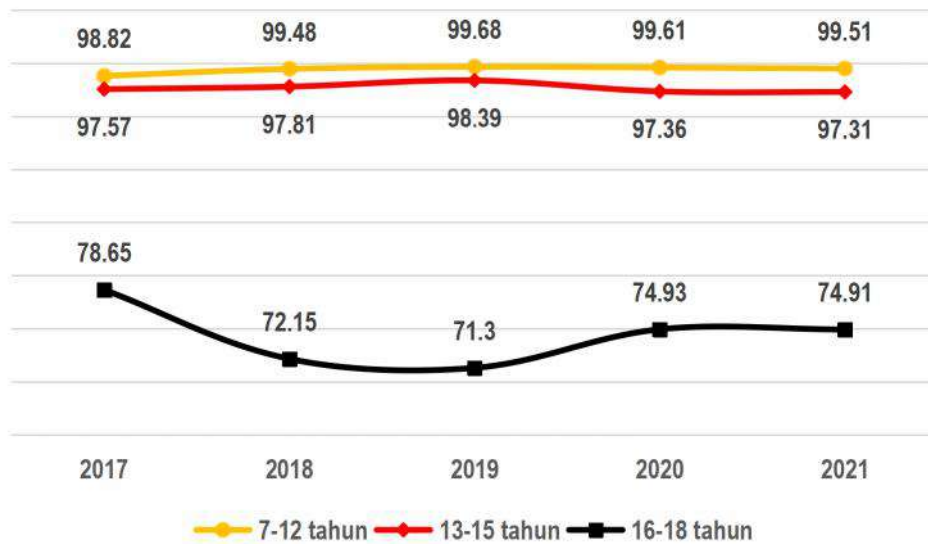
Sumber : <https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>

Untuk APM SMP/ sederajat pencapaiannya masih sangat rendah yaitu pada tahun 2021 sebesar 58,59 persen, sedangkan untuk jenjang SD/ sederajat mengalami tren penurunan dari 90,86 persen ditahun 2017 turun menjadi sebesar 77,71 persen tahun 2021. Begitu juga capaian APM untuk jenjang sekolah SMA/ sederajat, jika dilihat dari tren capaiannya menunjukkan penurunan yaitu tahun 2017 APM SMA/ sederajat sebesar 58,03 persen hingga tahun 2021 menjadi 60,68 persen. Artinya ada sekitar 39,32 persen peserta didik jenjang SMA/ sederajat bersekolah sesuai dengan usia dijenjang pendidikan SMA/ sederajat.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan

layanan dan fasilitas pendidikan. Gambar 2.19 menunjukkan APS kelompok usia 7-12 tahun dan kelompok usia 13-15 tahun belum mencapai 100 persen tahun 2017 dan hingga tahun 2021 capaiannya mendekati 100 persen, kondisi menggambarkan bahwa hampir 100 persen penduduk berusia 7-12 tahun dan penduduk berusia 13-15 tahun sedang bersekolah dan menikmati sarana dan fasilitas pendidikan.

Gambar 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

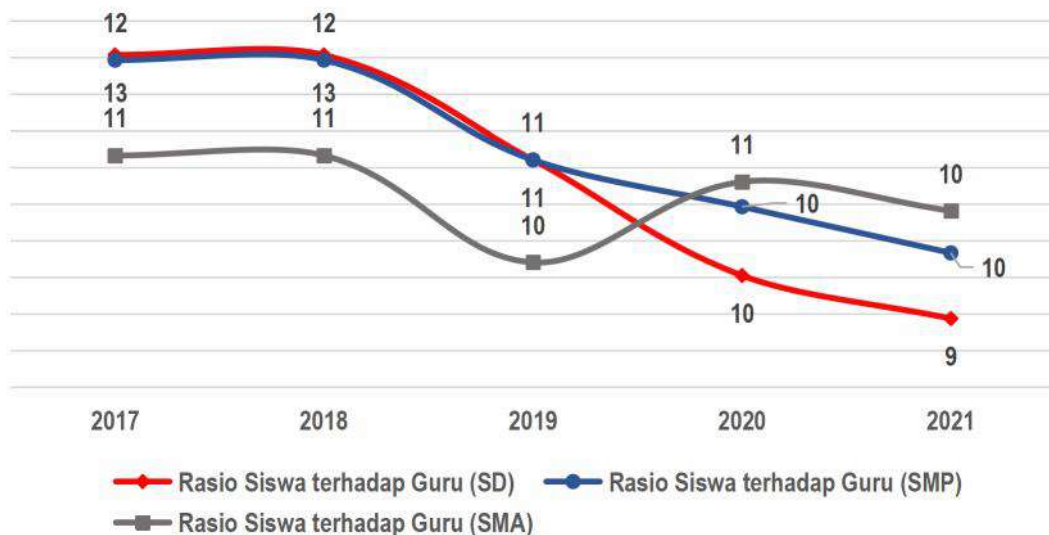


Sumber : Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2022

Namun jika dilihat capaian APS untuk kelompok usia 16-18 tahun menunjukkan tren penurunan. APS kelompok usia 16-18 tahun sejak tahun 2017-2021 mengalami penurunan mulai dari 78,65 persen turun hingga menjadi 74,91 persen. Artinya hanya sekitar 74,91 persen penduduk berusia 16-18 tahun di Kepulauan Mentawai yang sedang bersekolah.

Baiknya, ada batasan jumlah tertentu di mana guru dapat membimbing peserta didiknya di setiap kelas atau rombongan belajar. Hal tersebut dapat menunjang efektivitas dan efisiensi selama proses pembelajaran. Gambar 2.20 menunjukkan perkembangan rasio guru dan siswa yang mengalami penurunan. Untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat rasio guru dan murid sebesar 1:9, untuk SMP/ sederajat sebesar 1:10 dan untuk jenjang pendidikan SMA/ SMK/ sederajat sebesar 1:10.

Gambar 2.20
Perkembangan Rasio Siswa Terhadap Guru
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



Angka ini mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru dalam sebuah sekolah, berarti semakin mengurangi efektivitas proses pembelajaran karena tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang sehingga mutu pengajaran cenderung lebih rendah. Baiknya, ada batasan jumlah

tertentu di mana guru dapat membimbing peserta didiknya di setiap kelas atau rombongan belajar. Hal tersebut dapat menunjang efektivitas dan efisiensi selama proses pembelajaran. Namun, jika capaian rasio guru dan murid dibandingkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) disetiap jenjang pendidikan tentu akan bertolak belakang, dalam artian capaian rasio guru dan murid yang semakin baik tidak sejalan dengan cakupan partisipasi sekolah di usia sekolah yang tren pencapaiannya menurun. Capaian indikator pendidikan ini tentunya ini menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah dalam memajukan sektor pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk melihat sejauhmana akses pendidikan dapat dijangkau oleh masyarakat pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Secara umum pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 mengalami peningkatan pencapaian dibandingkan pencapaian di tahun 2017 untuk setiap jenjang pendidikan kecuali di jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Kondisi ini menjadi perhatian dikarenakan secara anggaran, pengalokasian untuk sektor pendidikan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebesar 20 persen.

Tabel 2.21
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	APS 7-12 tahun	98,82	99,48	99,68	99,61	99,51
2	APS 13-15 tahun	97,57	97,81	98,39	97,36	97,31
3	APS 16-18 tahun	78,65	72,15	71,3	74,93	74,91

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Tabel 2.21 menunjukkan tren peningkatan pencapaian angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SD/ sederajat atau 7-12 tahun, SMP/ sederajat atau 13-15 tahun dan SMA/ SMK/ sederajat atau 16-18 tahun. Pada jenjang pendidikan SD/ sederajat peningkatan capaian dimulai sejak tahun 2017 telah mendekati 100 persen. Ini artinya bahwa pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, seluruh peserta didik pada usia sekolah sudah mengenyam pendidikan SD/ sederajat. Begitu juga pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat juga mengalami peningkatan pencapaian. Pada tahun 2017 mencapai 97,57 persen, hingga pada tahun 2021 pencapaian APS SMP/ sederajat mencapai 97,31 persen. Namun pencapaian positif pada angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat tidak sejalan dengan pencapaian APS pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Pada tahun 2017 capaian APS SMA/ sederajat sebesar 78,65 persen mengalami peningkatan pencapaian hingga pada tahun 2021 capaian APS SMA/ sederajat sebesar 74,91 persen. Penurunan capaian ini jika dianalisis diindikasikan berbagai faktor selain faktor sosial budaya masyarakat juga disebabkan

oleh peralihan kewenangan sebagai amanat undang-undang pemerintahan daerah.

Untuk rata-rata kemampuan literasi SD sesuai assesment Nasional dan Rata-rata kemampuan literasi SMP sesuai assesment Nasional dimana masing-masing indikator literasi berada pada angka 2 artinya peserta didik telah memiliki kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).

Rata-rata kemampuan numerasi SD sesuai assesment Nasional dan rata-rata kemampuan Numerasi SMP sesuai assesment Nasional masing-masing berada pada angka 1,65 (SD) dan 1,61 (SMP), artinya peserta didik telah memiliki kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraannya, masyarakat yang sakit, akan terkendala untuk melakukan kegiatan yang produktif, penurunan penghasilan dan pendapatan, sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kondisi fisik dan non fisik. Secara langsung kondisi fisik seseorang akan ditentukan oleh tingkat kesehatannya, sedangkan kondisi non fisik seperti tingkat

intelektual, pengendalian emosional juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan seseorang.

Kesehatan yang buruk secara langsung menurunkan potensi kognitif dan secara tidak langsung mengurangi kemampuan sekolah. Penyakit dapat membuat miskin keluarga melalui menurunnya pendapatan, menurunnya angka harapan hidup, dan menurunnya kesejahteraan psikologis.

Ketimpangan dan diskriminasi dalam memberikan layanan kesehatan serta ketidaksiapan negara/ daerah dalam menanggulangi ancaman wabah/penyakit akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat, seperti pada Pandemi COVID-19 yang berlangsung hingga saat ini telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Kesiapan negara dalam mengelola dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentunya akan berbanding lurus pada pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Angka kesakitan atau morbiditas adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan disini diartikan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi.

Tabel 2.22
Angka Kesakitan Menurut Karakteristik (Persen), 2021

Karakteristik Penduduk	2020	2021
Laki-laki	16,19	14,11
Perempuan	16,88	14,61
40% Terbawah	15,30	17,25
40% Tengah	19,17	14,44
20% Teratas	NA	8,48
Kepulauan Mentawai	15,21	14,37

Sumber : SATKESRA KKM, 2021

Angka kesakitan masyarakat Kepulauan Mentawai Tahun 2021 secara keseluruhan adalah sebesar 14,37 persen. Artinya ada sekitar 14,37 persen dari total penduduk mengalami keluhan kesehatan menurun jika dibandingkan dengan angka kesakitan tahun 2020 yang sebesar 15,21 persen. Pola hidup sehat, perbaikan kualitas lingkungan dan penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan menjadi hal penting dalam upaya pengurangan tingkat kesakitan yang dialami oleh masyarakat. Jika dilihat lagi berdasarkan jenis kelamin, bahwa tingkat kesehatan atau keluhan kesehatan lebih banyak dialami oleh perempuan yaitu sebesar 14,61 persen, sedangkan laki-laki sebesar 14,11 persen. Begitu juga, jika dilihat persentase pengeluaran masyarakat, dari Tabel 2.22 menunjukkan bahwa penduduk dengan pengasilan 40 persen berpengeluaran sedang dan rendah lebih banyak mengalami keluhan kesehatan yaitu sebesar 59,41 persen dan 53,32 persen.

Tabel 2.23
Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan menurut Karakteristik, 2021

Karakteristik Penduduk	2020	2021
Laki-laki	51,33	44,12
Perempuan	54,65	39,63
40% Terbawah	41,99	20,75
40% Tengah	59,41	57,43
20% Teratas	53,32	74,59
Kepulauan Mentawai	53,00	41,97

Sumber : SATKESRA KKM 2021

Masyarakat Kepulauan Mentawai yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 41,97 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 53,00 persen. Capaian ini tentu masih sangat rendah untuk layanan kesehatan yang diterima masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin yang berada pada rentang 40 persen pendapatan terendah yang pada angka 20,75 persen, artinya lebih setengah masyarakat miskin tidak menggunakan jaminan kesehatan dalam melakukan layanan kesehatannya.

Berbagai persoalan kemungkinan penyebab tidak maksimalnya penggunaan jaminan kesehatan daerah untuk melayani masyarakat terkhususnya masyarakat miskin dan rentan miskin di Kepulauan Mentawai. Fakta ini sangat bertolak belakang dengan kucuran iuran yang disalurkan ke BPJS kesehatan untuk memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Balita yang telah mendapatkan imunisasi lengkap pada tahun 2021 masih pada angka 30,30 persen, hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah pasangan atau ibu yang memiliki kartu imunisasi yang sudah pada angka 90,61 persen.

Tabel 2.24
 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita)
 yang Pernah Mendapat Imunisasi (Persen), 2021

Karakteristik Penduduk	Memiliki Kartu Imunisasi	Mendapat Imunisasi Lengkap
Laki-laki	93,22	26,28
Perempuan	86,78	36,21
40% Terbawah	81,54	27,29
40% Tengah	97,84	NA
20% Teratas	97,10	NA
Pendidikan Tertinggi KRT (SD kebawah)	84,80	27,84
Pendidikan Tertinggi KRT (SMP keatas)	95,20	32,24
Kepulauan Mentawai	90,61	30,30

Sumber : SATKESRA KKM 2021

Begitu juga dengan Keluarga yang mendapatkan imunisasi dengan pendidikan tertinggi kepala keluarga SD kebawah hanya sebesar 27,84 persen. Capaian ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam memberikan advokasi, himbuan bagi masyarakat yang memiliki balita (0-59 bulan) untuk melakukan imunisasi lengkap agar anak terpenuhi imun/daya tahan dan kekebalan tubuh anak. Kualitas kesehatan masyarakat juga sangat dipengaruhi dengan perilaku konsumsinya. Tabel 2.25 menunjukkan tingkat konsumsi rokok masyarakat Kepulauan Mentawai tahun 2021 sebesar 31,66 persen sebagaimana rata-rata konsumsi nasional sebesar 30-32 persen. Untuk persentase

perokok penduduk dengan pendidikan tertinggi SD ke bawah sebesar 32,01 persen lebih tinggi dari penduduk perokok dengan tingkat pendidikan SMP keatas yaitu sebesar 31,66 persen. Rata-rata jumlah rokok yang dikonsumsi setiap minggu adalah sebanyak 147 batang, artinya dalam seminggu pengeluaran untuk kebutuhan rokok sebesar Rp.294.000.

Tabel 2.25
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok
dan Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu (Persen), 2021

Karakteristik Penduduk	2021	
	Perokok	Rata-rata Batang Rokok per Minggu
40% Terbawah	29,64	154,86
40% Tengah	33,89	135,70
20% Teratas	30,92	157,49
Pendidikan Tertinggi SD ke bawah	32,01	148,48
Pendidikan Tertinggi SMP ke atas	31,30	145,76
Kepulauan Mentawai	31,66	147,14

Sumber : SATKESRA KKM 2021

Jika dihitung dari jumlah rata-rata konsumsi rokok perbatang perhari, bahwa sebanyak 21 batang/hari atau setara dengan 1 bungkus rokok. Konsumsi rokok ini tentunya akan sangat menguras pendapatan dan menambah pengeluaran. Persentase pengeluaran penduduk pengonsumsi rokok, bahwa mayoritas pengonsumsi rokok terbesar adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran 40 persen tengah dan 20 persen teratas yaitu dengan persentase 33,89 persen dan 30,92 persen.

Tabel 2.26
Indikator Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Indikator Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup (tahun)	64,37	64,37	64,49	64,73	64,73
Prevalensi Stunting	31,87	31,7	25,2	19,3*	27,3
Angka Kematian Bayi (kematian/ 1.000 kelahiran hidup)	19	22,6	24,8	20,2	23
Angka Kematian Balita (1.000 balita)	30	27,9	28,1	3,6	3,2
Angka Kematian Ibu (kematian/ 100.000 kelahiran hidup)	328	332	191,3	356,3	207
Prevalensi Gizi kurang	8,20	6,3	3,6	10,1	12,7
Cakupan Desa UCI (%)	60	62,79	27,91	61,36	59,52
Kunjungan ibu hamil (%)	51,6	46,4	43,86	43,9	53,1
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	2,65	2,66	50,97	50,99	66,50
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin (%)	66,69	54,13	40,04	61,76	55,14
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	60,9	57,6	32,58	65,33	59,07
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	41,69	34,57	35,18	27,24	58,01
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	NA	NA	NA	12,74	17,74
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	2,57	30,9	37	31,71	32,71
Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	NA	4,18	0,9	8,79	84,61
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	NA	16,48	NA	15,54	48,83
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0,65	29,3	31,5	14,36	10,88
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1,8	8,46	0,81	36,04	38,91
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan standar pelayanan TBC sesuai standar (%)	19,21	38,85	53,96	30,04	18,52

Indikator Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angka kesakitan Malaria	3,92	4	2,55	0,77	0,5
Angka kesembuhan TB	84,4	85,3	86,48	28,5	64
Rasio Daya Tampung RS Rujukan (TT/100.000 penduduk)	NA	NA	48	59	71
Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD

sumber : data (diolah), * data e-PPGM

Perkembangan indikator kinerja kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2017-2021 secara umum menunjukkan capaian yang sesuai dengan target yang direncanakan dalam rencana kerja jangka menengah daerah. Pada Tabel 2.26 menunjukkan beberapa capaian indikator kesehatan daerah selama 5 tahun terakhir. Capaian penurunan angka prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara tren selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yaitu dari 31,87 persen di tahun 2017 menjadi 27,3 persen di tahun 2021, peningkatan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat begitu juga pemenuhan asupan gizi kepada pasangan atau ibu hamil/ 1000 hari pertama kehidupan ketika sudah diketahui ada janin, begitu juga dengan pemantauan gizi ibu hamil yang senantiasa dilakukan melalui pelayanan kesehatan. Begitu juga perbaikan sarana dan prasarana lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan berupa pembangunan toilet RT, pengelolaan limbah, drainase dan berbagai intervensi yang terpadu. Akselerasi

penanganan stunting telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gerakan Mentawai Anti Stunting dan Gizi Buruk Pedulu Anak (Masgibur Dua) dengan sasaran intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

Indikator angka kematian bayi yang diukur dari jumlah kelahiran per 1.000 kelahiran hidup capaiannya juga mengalami perbaikan. Jumlah angka kematian bayi yang dilahirkan meninggal hingga berumur 1 tahun pada tahun 2017 sebanyak 19 kasus kematian lalu kasus ini meningkat dan pada tahun 2021 tercatat ada 23 kasus kejadian kematian bayi dari 1.000 kelahiran bayi hidup. Selain itu, indikator kesehatan lain yang sangat penting adalah angka kematian ibu yang capainnya atau kasusnya masih cukup tinggi. Pada tahun 2017 angka kematian ibu melahirkan tercatat 328 kasus mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 tercatat sebanyak 207 kasus. Angka ini masih tergolong cukup tinggi karena 1 (satu) nyawapun ibu pada saat bersalin/melahirkan harus tertolong. Begitu juga dalam upaya penanggulangan stunting dan pemberian asupan vitamin melalui imunisasi kepada balita, capaian indikator cakupan desa UCI mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 cakupan desa UCI mencapai 60 persen dan capaian relatif konstan hingga tahun 2021 cakupannya menjadi sebesar 59,52 persen. Upaya peningkatan cakupan desa UCI terus dilakukan selain secara konvensional melalui posyandu yang telah

terjadwal setiap bulannya, juga dilakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan ataupun melalui kunjungan langsung ke rumah tangga.

Persentase kunjungan ibu hamil dalam kurun 5 tahu terakhir (2017-2021) mengalami peningkatan dari 51,6 persen tahun 2017 meningkat menjadi 53,1 persen di tahun 2021 dengan harapan menurunnya risiko atau kasus kematian ibu melahirkan dan anak lahir. Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2017 sebesar 26,5 persen meningkat pada tahun 2021 menjadi 66,50 persen. Begitu juga dengan persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan persalinan pada tahun 2021 sudah mencapai 55,14 persen, dan persentase bayi baru lahir yang mendalatkan layanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2021 sebesar 59,07 persen.

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2021 sebesar 17,74 persen. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar masih pada kisaran 20-30 persen, yaitu pada tahun 2021 sebesar 32,71 persen. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sudah mencapai 84,61 persen pada tahun 2021 tentu ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat usia lanjut dan meningkatkan

angka harapan hidup masyarakat. Cakupan layanan kesehatan bagi penderita hipertensi juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 sebesar 16,48 persen meningkat menjadi 48,83 persen pada tahun 2021. Cakupan layanan penderita diabetes melitus (DM) juga mengalami peningkatan yaitu dari 0,65 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 10,88 persen pada tahun 2021. Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar yaitu 38,91 persen pada tahun 2021. Untuk rasio daya tampung RS rujukan setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu sebesar 71 TT per 100.000 penduduk, artinya telah tersedia sebanyak sekitar 71 tempat tidur untuk melayani rujukan dan rawatan di RS, angka ini juga sebagai syarat untuk peningkatan akreditasi layanan RS dimana hingga pada tahun 2021 masih pada akreditasi D dan satu-satunya RSUD yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pembangunan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki atau yang tersedia pada daerah tersebut. Tentunya tenaga kesehatan yang tersedia sudah seharusnya memiliki standar keahlian dimasing-masing disiplin ilmunya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan tenaga kesehatan melalui beberapa saluran, antara lain penerimaan CPNS, tenaga medis kontrak, tenaga penyuluh, kemitraan dengan perdesaan/dusun, tenaga kesehatan PTT dan melalui saluran lainnya.

Tabel 2.27
Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Tenaga Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
Dokter	17	25	17	48	38
Perawat	267	329	160	297	137
Bidan	153	239	82	250	79
Dukun Bermitra	188	181	151	NA	NA

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Jumlah tenaga kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan jumlah yaitu untuk tenaga kesehatan perawat dan bidan. Untuk penyediaan tenaga kesehatan dokter masih menjadi tugas berat dalam menyediakan jasa layanan kesehatannya terkhusus di desa-desa dan dusun.

Pembangunan kesehatan adalah bentuk pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat. Tentunya akses terhadap layanan kesehatan harus menjadi catatan penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan sarana kesehatan untuk mempermudah dalam mengatasi permasalahan kesehatannya. Penyediaan sarana kesehatan sebagai sarana bagi masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan permasalahan kesehatan baik itu preventif, kuratif dan promotif kesehatan bagi masyarakat.

Ketersediaan layanan kesehatan berupa sarana dan prasarana kesehatan adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses layanan kesehatan. Pusat layanan kesehatan masyarakat harus menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga masyarakat tidak bersusah payah pergi ke daerah lain untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel 2.28
Jumlah Layanan Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Sarana Layanan Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	RSUD	1	1	1	1	1
2	Puskesmas	10	12	14	15	15
3	Puskesmas Pembantu (Pustu)	18	22	39	38	27
4	Poskesdes	63	71	82	82	128
5	Posyandu	255	255	255	279	279
6	Polindes	11	39	52	33	33

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Tabel 2.28 menunjukkan perkembangan sarana kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami perkembangan dalam hal jumlah sarana, terutama di daerah terpencil yaitu di dusun-dusun. Tentunya tidak sekedar penyediaan pusat layanan kesehatan bagi masyarakat, yang lebih esensial lagi adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan promosi pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat. Rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Tabel 2.29

menunjukkan masih kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.29
Rasio Jumlah Tenaga Medis dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Tenaga Medis	625	781	259	595	428
2	Jumlah Penduduk	85.292	86.981	92.021	87.623	88.389
3	Rasio	136,46	111,37	355,29	147,26	206,52

Sumber : Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Angka rasio tenaga medis dengan jumlah penduduk tahun 2017-2021 masih sangat besar, ini berarti masih perlu upaya yang keras dalam menyeimbangkan ketersediaan tenaga medis dengan kebutuhan masyarakat. Rasio jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk relatif masih sangat tinggi. Tahun 2017 rasio jumlah tenaga medis dan jumlah penduduk sebesar 136,46 dan di tahun 2021 sebesar 206,52 artinya untuk 1 orang tenaga kesehatan/medis melayani sekitar 205 penduduk.

Tabel 2.30
Jumlah Bayi yang Diberi Imunisasi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Jenis Imunisasi	2017	2018	2019	2020	2021
BCG	1.290	1.455	1.547	1.763	1.525
Polio 4	1.362	1.540	2.168	1.951	1.733
Campak	1.211	1.569	1.427	1.017	1.168
DPT 1	1.916	1.448	1.480	1.959	1.480

Imunisasi merupakan upaya pencegahan yang amat bermanfaat untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi. Tujuan dari imunisasi adalah untuk melindungi anak dari penyakit

tertentu, yang pada akhirnya mengeradikasi suatu penyakit. Kesadaran masyarakat akan kesehatan sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pemberian imunisasi adalah salah satunya.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat dalam memperlancarkan aktivitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan meningkatkan produktivitas serta daya saing.

Pembangunan jalan menjadi hal utama dan pertama yang harus disediakan pemerintah. Ketersediaan jalan menjadi prasyarat awal dalam pembangunan yang berkelanjutan. Jalan memegang peranan penting dalam kegiatan transportasi dan mobilitas penduduk. Sebagai penopang sistem sosial dan ekonomi masyarakat, jalan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perkembangan sektor lain, terutama dalam peningkatan sektor ekonomi riil masyarakat.

Tabel 2.31 menunjukkan panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kondisi baik terus mengalami penurunan kualitas hingga tahun 2021 total panjang jalan dengan kondisi baik hanya 59,09 km dari total panjang jalan yang ada 1.130 km atau 4,96 persen, sedangkan panjang jalan dengan

mkondisi rusak sedang tahun 2021 sekitar 630,2 km atau 55,76 persen dari total panjang jalan.

Tabel 2.31
Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Tahun	Kondisi Jalan (km)			Panjang Jalan (km)
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2017	92,31	63,35	972,8	1.130,2
2018	60,95	10,70	1.058,5	1.130,2
2019	64	41,10	616,90	1.130,2
2020	64,80	43,10	616,90	1.130,2
2021	59,09	630,2	443,91	1.130,2

Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, mengingat peran strategis pembangunan jalan dalam memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Tabel 2.32
Kondisi Jalan Trans Mentawai, 2021

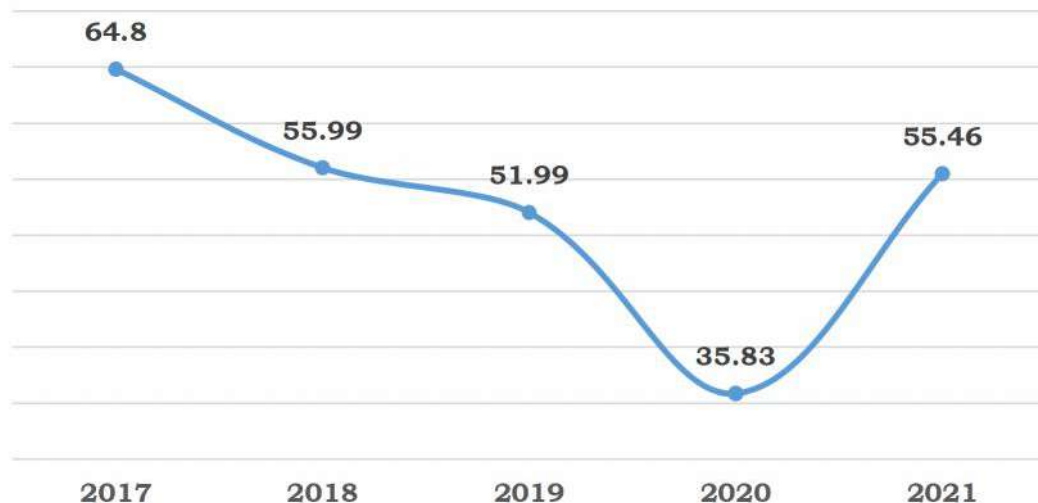
Rencana Jalan TRANS MENTAWAI (393,2 km)	Total Panjang hingga saat ini (km)	Yang Belum Terbangun (km)
Trans Sipora (77 km)	69,1	7,9
Trans Pagai Utara (63 km)	40	23
Trans Pagai Selatan (66 km)	58	8
Trans Siberut (187,2 km)	187,2	0
Total	356,3	38,9

Sumber : Dinas PUPR Kab.Kepulauan Mentawai

Perkembangan jalan trans Mentawai yang dilaksanakan melalui program pembangunan jalan tahun jamak (*multi years*) hingga tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hingga tahun 2021, panjang jalan yang telah dibangun adalah sepanjang 356,3 km dengan rincian trans Sipora sepanjang 69,1

km, trans Pagai Utara sepanjang 40 km, trans Pagai Selatan sepanjang 58 km, dan trans Siberut sepanjang 187,2 km. Secara total, panjang trans Mentawai yang belum terbangun adalah sepanjang 38,9 km. ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan pembukaan jalan trans Mentawai agar wilayah mulai dari ujung utara hingga selatan Pulau Siberut sudah terhubung, begitu juga di 3 pulau lainnya.

Gambar 2.21
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

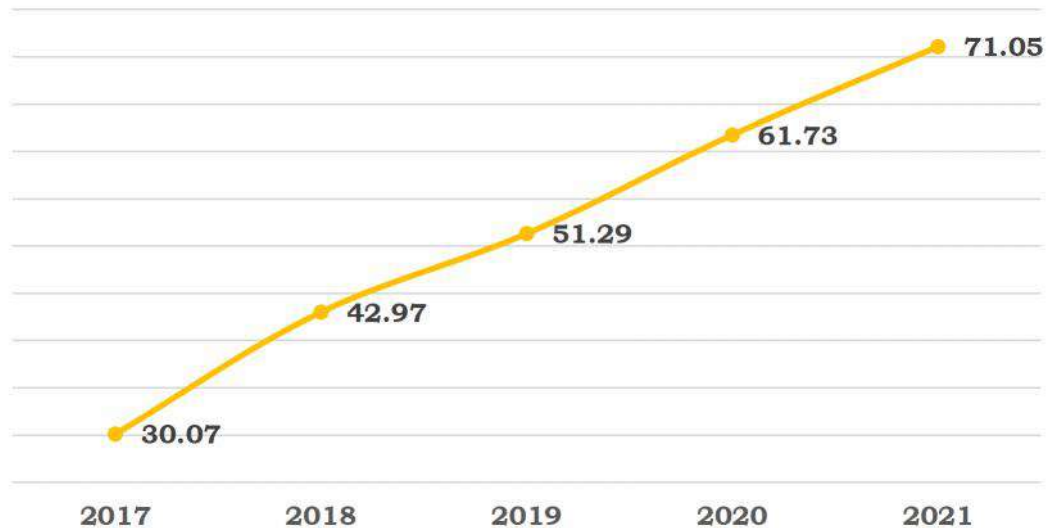


Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Gambar 2.21 menunjukkan perkembangan rumah tangga dengan akses air minum layak, selama kurun waktu 2017-2021 tren pencapaiannya menurun, yaitu pada tahun 2017 persentase RT dengan akses air minum layak sebesar 64,8 persen dan capaiannya setiap tahun menurun hingga pada tahun 2021 capaiannya menjadi sebesar 55,46 persen. Capaian ini tentunya menjadi perhatian pemerintah karena intervensi capaiannya dapat

didorong dari investasi atau belanja pemerintah pada pengadaan sistem penyediaan air minum.

Gambar 2.22
Perkembangan Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Perkembangan capaian rumah tangga dengan sanitasi layak di Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan capaian. Pada gambar 2.22, tahun 2017 rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 30,07 persen meningkat pada tahun 2021 menjadi 71,05 persen. Capaian ini tentunya didorong oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat secara mandiri untuk menyediakan dan mengelola sanitasi layak skala rumah tangga.

Perkembangan capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun belum menunjukkan

peningkatan yang signifikan, informasi terkait capaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diuraikan pada tabel 2.33.

Tabel 2.33
Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Uraian Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	0	0	0	0	0
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten	18,54	20,31	27,35	27,35	27,35
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	28,47	31,83	39,35	39,35	40,96
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	23,96	33,02	45,13	50,74	55,35
Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	16,60	17,68	20,35	30,82	30,82
Rasio kepatuhan IMB kota	100	63	71	66	80
Tingkat kemantapan jalan	8,33	10,13	29,44	30,74	13,19
Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	25,4	50,4	75,4	75,4	75,4
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	15	17	17	25	39

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Untuk luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai yang menjadi kewenangan kabupaten meningkat dari 18,54 persen tahun 2017 menjadi 27,35 persen pada tahun 2021. Luas daerah irigasi kewenangan

kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi juga mengalami peningkatan dari 28,47 persen pada tahun 2017 menjadi 40,96 persen pada tahun 2021. Begitu juga dengan persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga sebesar 23,96 persen tahun 2017 meningkat menjadi 55,35 persen di tahun 2021. Untuk capaian tingkat kemantapan jalan mengalami peningkatan capaian yaitu dari 8,33 persen tahun 2017 menjadi 13,19 persen tahun 2021. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi kemantapan jalan di Kepulauan Mentawai semakin membaik, walaupun pencapaiannya belum signifikan. Untuk Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi hingga tahun 2021 telah mencapai 75,4 persen.

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang seperti tertuang pada pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Penyelenggaraan penataan ruang tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota atau kawasan lainnya.

Penataan ruang dan wilayah mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035 menjadi acuan hukum dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat. Rencana kawasan tata ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam jangka waktu 20 tahun di bagi dalam 2 kawasan antar lain kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri:

1) Kawasan hutan lindung.

Kawasan hutan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung darat dan kawasan hutan lindung mangrove dengan luas 13.533,86 ha.

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya antara lain adalah kawasan resapan air. Kawasan ini tersebar di setiap kecamatan di Kepulauan Mentawai.

3) Kawasan perlindungan setempat.

Kawasan ini meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar danau, kawasan hutan mangrove dengan ketentuan daratan sepanjang tepian dengan jarak minimal 100 meter dari titik ke

arah daratan, sedangkan kawasan hutan mangrove dengan luas 13.353 ha.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.

Kawasan ini terdiri atas kawasan suaka alam, kawasan suaka alam perairan, kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan suaka terdiri atas kawasan suaka alam dengan luas 6.019,99 ha. Kawasan suaka alam perairan terdiri atas kawasan suaka alam perairan atau dpl dengan luas 160 ha. Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Siberut seluas 190.500 hektar. Kawasan wisata alam laut yaitu Taman Wisata Laut Teluk Sarabua Saibi terdapat di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah seluas 21.200 hektar. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan yaitu kawasan komunitas adat/budaya Mentawai terdapat di Dusun Terekan Hulu Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Dusun Sirisurak Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Desa Madobag, Dusun Ongah dan Kinikdog Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan, Dusun Bolotok dan Boboakenen Desa Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, dan benteng Peninggalan Jepang di Sioban Kecamatan Sipora Selatan.

5) Kawasan rawan bencana alam.

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor di wilayah perbukitan Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Kawasan rawan gelombang pasang tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan gempa dan tsunami tersebar di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan banjir tersebar di sekitar aliran dan muara Sungai Talopulai dan Sungai Makalo di Kecamatan Pagai Selatan, Sungai Silabu dan Sungai Saumanganya di Kecamatan Pagai Utara, Sungai Taikako dan Sungai Matobe di Kecamatan Sikakap, Sungai Saureinu di Kecamatan Sipora Selatan, Sungai Pogari, Sungai Berimanua dan Sungai Betumonga di Kecamatan Sipora Utara, Sungai Sagulubbek dan Sungai Taileleu di Kecamatan Siberut Barat Daya, Sungai Saibi di Kecamatan siberut tengah, Sungai Siberut di Kecamatan Siberut Selatan, Sungai Sikabaluan, Sungai Monganpoula, Sungai Sotboyak, Sungai Bojakan, Sungai Sirilanggai di Kecamatan Siberut Utara, Sungai Simalegi, Sungai Simatalu, Sungai Berisigep, dan Sungai Policoman di Kecamatan Siberut Barat.

Kawasan rawan abrasi terdapat di Pantai Muara Sikabaluan (Kecamatan Siberut Utara), Pantai Muara Siberut (Kecamatan Siberut Selatan), Pantai Mapaddegat dan Pantai Tuapejat (Kecamatan Sipora Utara), Pantai Sioban, Pantai Beriulou,

Pantai Desa Bosua, Pantai Bandara Rokot Matobe (Kecamatan Sipora Selatan), dan di Pantai Sikakap (Kecamatan Sikakap).

6) Kawasan lindung geologi.

Kawasan lindung geologi yang merupakan kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas kawasan rawan gempa bumi terdapat di terdapat di wilayah pesisir seluruh wilayah daerah. Kawasan rawan tsunami terdapat di seluruh wilayah pesisir seluruh wilayah daerah.

7) Kawasan konservasi perairan.

Kawasan konservasi perairan di Kepulauan Mentawai terdapat pada Kawasan Konservasi Perairan Selat Bunga Laut dengan luas total 123.746,94 hektar.

8) Kawasan lindung lainnya.

Kawasan lindung lainnya terdiri atas kawasan terumbu karang di Pulau Siberut seluas kurang lebih 5.410,7 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Sipora seluas kurang lebih 5.988 hektar, kawasan terumbu karang di Pulau Pagai Utara seluas kurang lebih 733 hektar dan kawasan terumbu karang di Pulau Pagai Selatan seluas kurang lebih 1.099 hektar.

Kawasan budidaya di Kepulauan Mentawai terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 246.011,41 ha, kawasan peruntukan pertanian dengan luas 119.492,20 ha. Kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan

pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi bandar udara (bandara), pertahanan dan keamanan.

Tabel 2.34
Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

	Hutan Lindung	Suaka dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Areal Penggunaan Lainnya	Total
Penggunaan Lahan (ha)	7.217,28	183.378,9	250.971,2	50.727	108.840,62	601.135
Persentase	1,20	30,51	41,75	8,44	18,11	

Peruntukan lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mayoritas merupakan kawasan hutan atau suaka pelestarian alam dengan luas sebesar 492294,38 ha atau sekitar 81,89 persen dari total wilayah, sedangkan untuk areal penggunaan lainnya sebesar 108.804,62 ha atau sebesar 18,11 persen.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu pemerintah daerah juga harus menjamin bahwa rumah yang ditempati masyarakat sudah sesuai dengan struktur geografis di Kepulauan Mentawai dikarenakan bahwa Kepulauan Mentawai adalah daerah rawan gempa. Sebuah rumah harus memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah yang

terdiri dari ruang tidur atau ruang serbaguna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.

Tabel 2.35
Perkembangan Indikator Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

NO	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio rumah layak huni (%)	65	79,8	25	30,98	38,02
2	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman didukung dengan PSU (%)	50	55	62	68	70
3	Lingkungan permukiman kumuh (%)	52,4	50	48,2	45	42,2
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	0	0	0	0	195
5	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	0	0	0	165	69
6	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0	0	0	0	0
7	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	387	350	1.080	360	69
8	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	4.100	4.300	1.220	0	827

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Perkembangan rasio rumah layak huni di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 rasio rumah layak huni telah mencapai 65 persen lalu tahun 2021 menurun menjadi sekitar 38,02 persen dengan jumlah rumah tidak layak huni sebesar 2.917 unit. Begitu juga dengan cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU meningkat dari 50 persen di tahun 2017 menjadi 70 persen pada tahun 2021. Untuk

persentase kawasan lingkungan permukiman kumuh kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu dari 52,4 persen pada tahun 2017 menjadi 42,2 persen tahun 2021, capaian ini tentunya hasil dukungan pembangunan dari masyarakat dalam membenah kawasan permukiman masyarakat yang layak huni.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, selama periode waktu 2017-2021, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.36 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan, sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 2.36
Perkembangan Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	70	72	72	85	88
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (persen)	20	25	30	35	38
Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	80	80	80	30	25
Persentase Penegakan PERDA (persen)	100	100	80	70	65
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.508	3.508	3.508	3.508	3.508
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	508	566	167	9.484	3.856

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
korban bencana					
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Perkembangan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum kondusif dan masih dalam situasi yang terkendali. Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sangat pluralis/majemuk secara prinsip memiliki potensi pada gesekan antar golongan, suku ataupun agama, namun penguatan koordinasi antar pimpinan lembaga pemerintahan dan para pemuka agama, pemuka adat dan masyarakat yang sudah terjalin dan terjaga dengan baik menjadikan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak terjadi atau tidak ada kasus yang serius. Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dim Kepulauan Mentawai dengan tingkat kesulitan geografis mampu diselesaikan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 88 persen. Namun pada cakupan layanan bencana kebakaran masih pada angka 38 persen di tahun 2021, hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana antisipasi kebakaran di setiap kecamatan belum ada (yang ada di Sikakap, Muara Siberut, Tuapejat) sehingga tidak dapat mencakup seluruh wilayah di Kepulauan Mentawai. Untuk respon time kejadian kebakaran sudah semakin

membraik yaitu 25 menit di tahun 2021. Untuk penegakan perda senantiasaa dilakukan dengan mengutamakan sosialisasi dan ajakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan tindakan-tindakan yang mengarah pada preventif dalam upaya menjaga kondusifitas dan kenyamanan masyarakat. Untuk capaian penegakan perda pada tahun 2021 mencapai 65 persen.

Untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana daerah menjadi hal penting dilakukan terutama dalam pengarusutamaan kebencanaan untuk setiap sektor pembangunan. Penguatan kapasitas masyarakat dalam meminimalisir risiko dan memitigasi dampak bencana bagian penting dalam tahapan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bencana. Beberapa indikator terkait kebencanaan yang mejadi bagian dari urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dirangkum dalam tabel 2.36.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pelaksanaan dari pembangunan daerah dalam layanan urusan wajib sosial, selama periode waktu 2017-2021, berdasarkan data yang ada pada Tabel 2.37 sesuai dengan indikator yang tersedia, menunjukkan terjadi peningkatan pada sarana sosial yang direhabilitasi serta indikator lain, sesuai dengan tabel 2.37 dibawah ini.

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Sosial
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
PPKS yang memperoleh bantuan (persen)	100	100	100	100	100
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial (persen)	100	100	100	100	100
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penanganan PPKS (persen)	100	100	100	100	100
Jumlah PPKS	24.413	24.413	30.286	24.636	24.797
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sudah sangat baik, dalam artian setiap kejadian dan kebutuhan PPKS selalu difasilitasi dan dibantu. Begitu juga dengan penanganan korban bencana alam dan sosial terutama pada saat pandemi COVID-19. Untuk jumlah PPKS dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak 24.413 orang dan meningkat di tahun 2019 menjadi 30.286 orang dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 24.797 orang. Untuk cakupan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti serta cakupan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat

dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota telah mencapai 100 persen, artinya untuk setiap kasus yang ada telah ditangani/difasilitasi oleh dinas terkait.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing. Penguatan sumberdaya manusia menjadi penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai tingkat pengangguran terbuka terendah di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Indikator tenaga kerja lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.38 dibawah ini.

Tabel 2.38
Perkembangan Indikator Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	97,73	98,04	83,10	81,65	82,57
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	2,27	1,96	2,92	3,98	2,79
Jumlah pengangguran (orang)	865	980	1.420	2.063	1.485
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	NA	0,1	NA	0,1	2
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	NA	NA	NA	NA	38
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan	NA	NA	NA	NA	NA

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	0	0	0	0	0

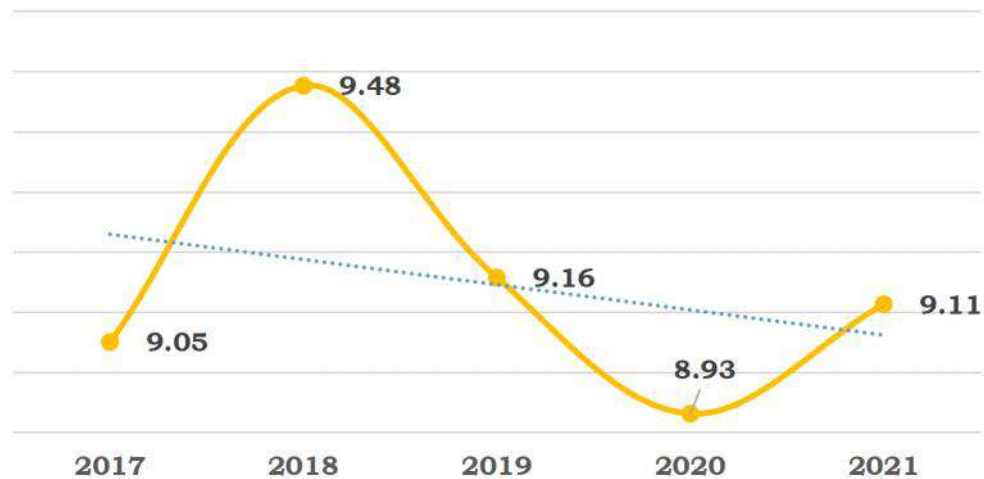
Sumber : BPS Kepulauan Mentawai dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir relatif konstan pada kisaran 2-3 persen. Ada peningkatan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas sosial ekonomi masyarakat, namun pada tahun 2021 kondisinya membaik atau menurun menjadi 2,79 persen. Tingkat partisipasi angkatan sebagai bentuk gambaran ketersediaan angkatan kerja pada kelompok penduduk usia kerja yang produktif menunjukkan perkembangan yang membaik pada tahun 2021 yaitu sebesar 82,57 persen. Untuk jumlah pengangguran di Kabupaten kepulauan Mentawai tahun 2021 sebanyak 1.485 orang berkurang jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada tahun 2020 yaitu sebanyak 2.063 orang.

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator untuk melihat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai

kurun waktu 2017-2021 seperti pada gambar 2.23 menunjukkan tren penurunan.

Gambar 2.23
Produktivitas Tenaga Kerja (miliar rupiah)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

Pada tahun 2017 nilai produktivitas tenaga kerja sebesar 9,05 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun lalu naik pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,48 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun, namun pada tahun 2019 sampai pada tahun 2021 menurun dan menjadi sebesar 9,11 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun pada tahun 2021.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada periode tahun yang sama menunjukkan pesentase yang semakin bertambah, hal ini dapat menggambarkan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sudah cukup memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah persentase partisipasi

perempuan di lembaga pemerintah. Pembangunan gender di Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif, untuk tahun 2017 capaian IPG sebesar 89,13 persen dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2017 menjadi 89,81 persen.

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase pemenuhan hak anak (persen)	100	100	100	100	100
Pencangan kecamatan layak Anak (kec)	NA	NA	NA	4 kec	4 kec
Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan (persen)	100	100	100	100	100
Persentase Kepala Keluarga perempuan yang sejahtera (persen)	8,06	8,22	8,6	8,75	9
Indeks Pembangunan Gender	89,13	89,45	89,33	89,59	89,81
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (persen)	100	100	100	100	100
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	11,22	11,22	11,22	51,03	52
Partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	65,12	65,12	65,12	42,40	42,93
Persentase PNS perempuan dibanding total PNS (persen)	48,81	48,81	49,55	51,03	51,25
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	NA	NA	NA	0,13	0,11
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk pencapaian kabupaten layak anak di Kepulauan Mentawai belum tercapai, bahkan pada predikat pratama juga belum tercapai, hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk membangun komitmen dan mengintegrasikan program-

program pembangunan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kepulauan Mentawai. Dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, setiap kasus yang ada selalu ditangani dengan baik, koordinasi dengan forkopimda dan muspika di kecamatan sangat baik begitu juga dengan peranan pokja P2TP2A sebagai perpanjangan tangan penanganan kasus kekerasan terhadap anak sangat baik sehingga dalam upaya pencegahan dan penanganan kejadian taanggap dan melibatkan berbagai pihak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pada urusan wajib pangan berbagai indikator yang terlihat pada Tabel 2.40 menggambarkan perkembangan yang cukup baik dan mengalami peningkatan pencapaian dalam kurun waktu 2017-2021, begitu juga dengan pengawasan dan pembinaan pangan.

Tabel 2.40
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ketersediaan pangan utama	65	66	67	67	68
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	48.24	48.61	48.81	48.81	52,07
Indeks Ketahanan Pangan	NA	49,92	38,86	46,67	37,67
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	69,1	76	78	80	82

Sumber :Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Perkembangan capaian ketahanan pangan secara nasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah yang dilihat

dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Tahun 2018 Indeks Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Mentawai sebesar 49,92 dan capaian ini terus menurun hingga tahun 2021 capaian indeks ketahanan pangan menjadi sebesar 37,67. Tentu ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam kaitan ketersediaan pangan utama sebagai konsumsi pangan lokal yang tersedia, capaiannya cukup stabil, tahun 2017 sebesar 65 persen dan hingga tahun 2021 capaiannya sebesar 68 persen.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Legalisasi aset berupa tanah sangat penting bagi pemerintah khususnya masyarakat dalam menopang tumbuh kembangnya sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Urusan Pertanahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penanganan sengketa tanah yang dilakukan secara mediasi (persen)	100	100	100	100	100
Persentase luas lahan bersertifikat (persen)	NA	NA	NA	NA	1,14
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	25	28	30	35	38
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0	0	0	0
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	0	0	1.200 ha	1.200 ha
Tersedianya Tanah Obyek	0	0	0	0	0

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					
Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	0	0	0	0

Sengketa pertahanan/lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai selalu menjadi konflik sosial ditengah masyarakat. Tanah hak ulayat (adat) dan sengketa tanah masyarakat menjadi persoalan khususnya menyangkut hak masyarakat miskin selalu dimediasi baik melalui pemerintahan desa, di kecamatan dan bahan tingkat kabupaten melalui koordinasi pemangku kepentingan agar hak-hak kepemilikan pertanahan masyarakat terjamin. Untuk persentase luas lahan yang telah memiliki sertifikat di Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 baru mencapai 1,14 persen atau seluas 69.180.450 m².

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Perkembangan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup selama tahun 2017-2021 ditunjukkan pada Tabel 2.42 kualitas lingkungan hidup di Kepulauan Mentawai semaksimal mungkin tetap dijaga dan dipastikan tetap pada kondisi awal/lestari. Luas kawasan yang mayoritas adalah kawasan hutan dengan persentase 82 persen tentunya sebagai indikator bahwa wilayah Kepulauan Mentawai relatif masih aman dari deforestasi yang akan berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung

lingkungan/kawasan. Dalam kurun 5 tahun terakhir indeks kualitas lingkungan hidup perkembangannya mengalami perbaikan dari tahun 2017 dengan predikat cukup baik meningkat hingga pada tahun 2021 pada predikat baik.

Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penetapan hak MHA	Tidak ada	Tidak ada	4	4	NA
Persentase penanganan sampah (persen)	6	6.2	6,84	7,38	14,35
Penanganan kasus lingkungan hidup	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik
Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota (%)	NA	30	45	50	53,4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Begitu juga respon terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, melalui dukungan seluruh stakeholder, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten permasalahan pencemaran dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik. Untuk penanganan dan pengelolaan sampah juga capaian setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan cakupan layanan persampahan dan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Namun memang intervensi dalam pengelolaan sampah masih sebatas pada kawasan ibukota kabupaten

(Kecamatan Sipora Utara/Tuapejat dan sekitarnya) menjadi indikasi masih rendahnya persentase penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 14,35 persen pada tahun 2021.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan angka yang terlihat pada Tabel 2.43 menunjukkan berbagai indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selalu mengalami kenaikan selama kurun waktu 2017-2021. Indikator pencapaian bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (persen)	45.99	44.96	45.51	64,90	67,77
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	56,54	60,25	61,44	64,25	66,28
Persentase kepemilikan akte kelahiran (persen)	67.26	70.16	63.36	77,34	77,24
Persentase pasangan berakte nikah (persen)	19.69	19.76	20.23	49,79	42,08
Rasio kepemilikan KK	57.98	68.25	74.38	89,82	85,18
Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	19.69	19.76	20.23	49,79	42,08

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian indikator perkembangan kemajuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kepulauan

Mentawai seperti pada tabel 2.43 menunjukkan perkembangan yang baik. Dari sisi rasio penduduk berKTP per satuan penduduk telah mencapai 67,77 persen. Begitu juga dengan kepemilikan akte kelahiran yang telah mencapai 77,24 persen. Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2021 telah mencapai 85,18 persen dan pasangan/keluarga yang telah memiliki akte nikah pada tahun 2021 telah mencapai 42 persen.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikatakan bahwa belum mengalami kemajuan yang cukup berarti hal ini terlihat dari indikator-indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seperti terlihat dari Tabel 2.44.

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	341	341	559	559	559
Jumlah LPM	43	43	43	43	43
PKK aktif	43	43	43	43	43
Posyandu aktif	0	180	180	180	180
IDM (Desa Tertinggal)	NA	23 Desa	18 desa	15 Desa	12 Desa
IDM (Desa Maju)	NA	1 desa	2 desa	6 Desa	5 Desa
Persentase pengentasan desa tertinggal	NA	16	21,73	16,67	20
Persentase peningkatan status desa mandiri	NA	0	0	100	200

Sumber : Dinas PMD, dan Pengendalian Penduduk dan KB

Perkembangan capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021 dari sisi kinerja pembangunan masyarakat dan desa, indikator utama yang dapat dijadikan patokan pembangunannya adalah Indeks Desa Membangun (IDM), dimana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perbaikan capaian. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada lagi status desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan predikat desa sangat tertinggal. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 untuk capaian desa dengan kategori maju mengalami penambahan dari 1 desa tahun 2018 menjadi 5 desa di tahun 2021, begitu juga dengan status desa tertinggal dari 23 desa tertinggal tahun 2018 berkurang menjadi 12 desa di tahun 2021.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mengalami peningkatan walau tidak signifikan, seperti terlihat dari Tabel 2.45. Untuk jumlah rata-rata anak per keluarga relatif stabil untuk setiap tahunnya. Hingga tahun 2021 rata-rata jumlah anak perkeluarga di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 4 orang. Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2017-2021 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dengan capaian

sebesar 51,24 persen meningkat setiap tahun hingga tahun 2021 menjadi sebesar 58,44 persen.

Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	6	5	4	4	4
Rasio akseptor KB	23	54	58	58	62
Cakupan peserta KB aktif (persen)	51.24	54.96	58.39	58.40	58.44
TFR (Angka Kelahiran Total)	1,56	1,82	1,90	2,20	2,35
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	10,25	11,76	13,30	21,27	24,15
Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	0,25	0,43	0,87	0,65	1,12

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk dan KB

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan yang vital dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bercirikan kepulauan. Konektivitas antar pulau di Kepulauan Mentawai dan sebagai penghubung Kepulauan Mentawai dan Padang atau daerah lain di luar Mentawai urusan perhubungan mengambil bagian penting dalam menunjang dan memperlancar arus barang dan arus orang yang pergi dan menuju Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan layanan transportasi (persen)	75	75,3	78,5	80	83
Persentase armada angkutan laik jalan/layar (persen)	75	75	72	70	80
Jumlah orang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun (orang)	200.338	209.768	210.428	149.235	145.206
Jumlah barang melalui dermaga/ pelabuhan per tahun (ton)	63.028	64.847	65.720	47.654	52.669
Rasio konektivitas Kota	46,27	46,71	47,59	51,13	52,19
V/C Ratio di jalan Kota	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Sumber : Dinas Perhubungan

Perkembangan capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat dari cakupan layanan transportasi yang melayani seluruh wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada tahun 2017 cakupan layanan transportasi sebesar 75 persen dan capaian ini meningkat ditahun 2021 menjadi 83 persen, hal ini didukung oleh sudah terbukanya akses transportasi di wilayah pantai barat yaitu Desa Sagulubbeg dan Desa Simalegi. Begitu juga dengan kondisi sarana dan prasarana perhubungan terutama pelabuhan laut sebanyak 7 buah dan pelabuhan penyeberangan sebanyak 3 buah dengan kondisi baik dan masih beroperasi hingga sekarang.

Sebagai bagian dari sistem konektivitas daerah, selain ketersediaan jalan sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah rencana pembangunan pelabuhan menjadi kebutuhan untuk menjawab konektivitas total antar

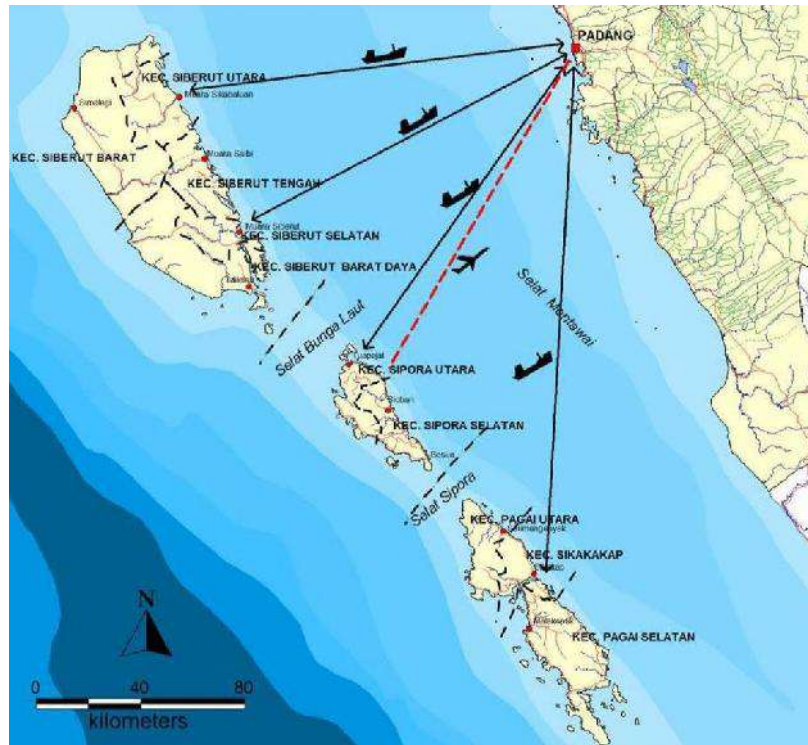
wilayah/antar pulau dan konektivitas regional antar kabupaten dan propinsi.

Tabel 2.47
Perkembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

No	Nama Pelabuhan	Kepemilikan Aset	Pengelola	Status	Kondisi	Ket
1	Pelabuhan Muara Siberut	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
2	Pelabuhan Sikakap	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
3	Pelabuhan Siuban	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
4	Pelabuhan Tuapejat	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
5	Pelabuhan Pasapuat	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
6	Pelabuhan Sikabaluan	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
7	Pelabuhan Labuhan Bajau	Kementerian Perhubungan	KUPP	Beroperasi	Baik	Pelabuhan Laut
8	Pelabuhan Penyeberangan Tuapejat	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab. Kep. Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan
9	Pelabuhan Penyeberangan Siberut	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab. Kep. Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan
10	Pelabuhan Penyeberangan Sikakap	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Kab. Kep. Mentawai	Beroperasi	Rusak Ringan	Pelabuhan Penyeberangan

Sumber : Dinas Perhubungan

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional bahwa rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut/ penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 9 pelabuhan yaitu di Pulau Siberut antara lain Pelabuhan Sikabaluan, Subelen, Mabukkuk, Sirilogui. Pulau Sipora antara lain Pelabuhan Simaoumbuk, Sao, Sagitsi Pulau Pagai Utara Selatan antara lain Pelabuhan Polaga, Sinaka.



10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah didukung oleh sistem teknologi informasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mempunyai website untuk publikasi dan komunikasi proses dan hasil-hasil pembangunan. Untuk mendukung pengelolaan website telah menggunakan jaringan komunikasi ASTINet (*Access Service to Internet*). Perkembangan pelaksanaan *e-goverment* di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikategorikan belum mengalami perkembangan yang signifikan, jika dilihat dari indeks SPBE bahwa pada tahun 2021 untuk SPBE di Kepulauan Mentawai tidak ada nilai oleh Kementerian PANRB dan terakhir data yang diperoleh untuk nilai SPBE yaitu tahun 2019 sebesar 1,9.

Perkembangan sistem komunikasi dan informasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Layanan Telekomunikasi	67	70	86	84,5	85
Nilai SPBE	NA	NA	1,9	NA	NA
OPD yang terhubung oleh akses internet yang disediakan Diskominfo (persen)	NA	27,7	55,5	63,8	69,4
Layanan publik yang dilayani secara Online (persen)	4,2	4,6	4,8	5	5,2
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	NA	60	70	70	70

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kepulauan Mentawai. Akses data dan komunikasi yang sangat terbatas, sarana dan prasarana yang masih minim juga sumberdaya manusia dalam upaya *maintenance* yang belum ada sehingga biaya (*cost*) menjadi sangat besar dan kendala pengembangannya.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Perkembangan indikator urusan wajib koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk persentase koperasi aktif secara tren dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 17,91 persen

tahun 2017 menjadi 20 persen tahun 2021, indikator pelayanan koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah, seperti terlihat pada Tabel 2.49. Untuk jumlah usaha mikro dan kecil juga mengalami tren peningkatan jumlah usaha.

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase koperasi aktif	17,91	36	59,09	25,3	20
2	Jumlah BPR/BPRS	2	2	2	3	3
3	Usaha Mikro dan Kecil					
	- Usaha Mikro	962	1061	1357	1.956	2.508
	- Usaha Kecil	100	135	217	206	240
	- Usaha Menengah dan Besar	11	19	38	41	43
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (perse)	2,50	3	3	3	3,50
	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	4	5	5	4	6

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Tahun 2017, pada tabel 2.49 menunjukkan untuk usaha mikro sebanyak 962 usaha dan mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi sebanyak 2.381 usaha. Untuk usaha kecil juga mengalami peningkatan jumlah usaha kecil yaitu pada tahun 2017 sebanyak 100 unit usaha dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 358 usaha. Dalam upaya menciptakan wirausaha baru (enterprenuer), program kedepan yang disusun adalah pelatihan/ peningkatan kapasitas keterampilan keahlian agar memiliki skil untuk dapat terjun kedunia usaha, begitu juga dengan membangun relasi melalui

perjanjian kerjasama dengan dunia usaha (MoU) sehingga dihilunya pembangunan sumberdaya tenaga kerja yang terampil (skil) didukung dengan dihilirnya adalah terserapnya tenaga kerja sebagai modal awal untuk menjadi wirausaha baru.

Harapannya, dengan dukungan semua sektor dan pendampingan dari pemerintah daerah, untuk usaha mikro dan kecil dapat mengembangkan unit usaha/permodalan dan skala pemasaran serta legalitas sehingga mampu memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian pelbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diorganisir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan rata-rata pengurusan izin sekitar 5-6 hari. Perkembangan realisasi investasi tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih didorong oleh investasi skala kecil berupa resort/homestay dengan realisasinya sekitar Rp.6,48 miliar. Angka ini tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi investasi di

Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan sumber daya alam yang melimpah dan proses perijinan yang sangat mudah dan cepat.

Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase peningkatan investasi di Kota	11,99	13,09	10,78	10,63	11,9

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian indikator urusan kepemudaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada perkembangan jumlah organisasi yang masih bertahan. Pemuda yang diasosiasikan dengan paham idealisme yang dapat melihat setiap perkembangan dan isu daerah secara jernih tentunya akan mampu memberikan pemikiran dan dukungan yang utuh tanpa ada unsur kepentingan. Untuk urusan wajib kepemudaan dan olahraga dari data pada Tabel 2.49, secara umum dapat memberikan gambaran bahwa indikator menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dan terus meningkat selama periode 2017-2021. Hal ini terlihat dari Tabel 2.51 dibawah ini.

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah organisasi pemuda	16	16	9	10	8
Jumlah organisasi olahraga	23	23	10	10	10
Jumlah kegiatan kepemudaan	5	5	5	0	5

Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kegiatan olahraga	12	12	10	3	10
Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	5	5	30	0	0
Lapangan olahraga	209	209	267	5	5
Pertumbuhan wirausaha (enterprenuer)	11,99	10,29	27,90	14,14	21,73
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	6	8	10	14,14	14,14
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	15	15	20	25,28	25,28
Peningkatan prestasi olahraga	12	16	10	10	10

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dari tabel 2.51 perkembangan jumlah organisasi di Kepulauan Mentawai mengalami penurunan dari sisi kuantitas. Pada tahun 2017 jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 16 organisasi dan mengalami penurunan hingga pada tahun jumlah organisasi kepemudaan menjadi sebanyak 8 organisasi. Begitu juga dilihat dari kapasitas ekonomi kepemudaan yang dilihat dari pertumbuhan wirausaha mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 pertumbuhan wirausaha di Kab. Kepulauan Mentawai sebesar 11,99 persen dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 27,9 persen dan pada tahun 2021 mengalami perlambatan menjadi sebesar 21,73 persen.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan wajib statistik berkenaan dengan penyediaan data yang diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan, melihat

perkembangan pembangunan dan dihilirnya sebagai baan evaluasi untuk memberikan sebuah informasi analisis pembangunan.

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Statistik
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Buku "Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah (persen)	64,9	68,5	70	72,1	75
4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	27,78	50,00	55,56	61,11	69,44
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	22,22	38,89	41,67	50,56	58,33

Sumber : BPS dan Bappeda

Perkembangan capaian kinerja urusan statistik erat kaitannya dengan ketersediaan data dan informasi yang digunakan oleh setiap pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah melalui perangkat daerah. Data statistik ini baik statistik dasar maupun statistik sektoral yang berasal dari perangkat daerah tentunya menjadi pedoman dalam merumuskan dan menganalisis sebuah perkembangan indikator pembangunan daerah. Selama periode 2017-2021 secara rutin telah diterbitkan buku Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai dan berbagai dokumen atau buku statistik dasar lainnya yang secara resmi dirilis melalui Badan Pusat

Statistik (BPS) seperti dilihat pada tabel 2.52. Begitu juga dengan data-data statistik sektoral yang dihasilkan oleh instansi atau perangkat daerah juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan khususnya dalam merumuskan indikator kinerja pemerintah daerah sehingga nantinya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan penerapan *e-government* di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya maksimal dilaksanakan. Integrasi sistem informasi pemerintahan masih parsial sehingga perlu dilakukan kesepahaman sistem yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan keamanan dan perlindungan data yang terjamin. Seluruh sistem informasi pembangunan baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, layanan publik harus memenuhi kaidah-kaidah tingkat keamanan dengan menyelenggarakan keamanan persandian sehingga risiko kerusakan sistem, data hilang, *hack* dapat dicegah dan ditangkal.

Tabel 2.53
Perkembangan Indikator Urusan Persandian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat keamanan informasi pemerintah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan persandian yang telah dikukuhkan kedalam susunan struktur organisasi perangkat daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika belum memadai untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pengamanan informasi pemerintah daerah, terutama dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang secara keahlian (sertifikasi) belum ada.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan erat kaitannya dengan eksistensi jati diri kearifan lokal masyarakat. Pembangunan kebudayaan melalui pemajuan kebudayaan menjadi hal penting agar sejarah, nilai-nilai luhur dan kelestarian budaya dapat terjaga dengan baik sehingga kelompok, ras dan masyarakatnya tidak kehilangan identitas dan marwah. Pemajuan kebudayaan di Kepulauan Mentawai telah lama dimulai dengan pelestarian budaya melalui berbagai festival atau even lokal dan regional yang sudah masuk kedalam agenda pariwisata nasional dalam Pesona Indonesia. Selain itu dalam kebijakannya, telah disusun pokok-pokok pikiran kebudayaan pada tahun 2020 serta telah disertifikasi 4 tenaga tim ahli cagar budaya (TACB) untuk memfasilitasi dalam penilaian warisan budaya benda yang ada di Kepulauan Mentawai. Pembangunan kebudayaan yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan, terutama tahun 2020 dan tahun 2021 selama pandemi yang dibatasi pergerakan/mobilitas dan bahkan melarang

berkumpulnya orang, sehingga even dan festival terkait kebudayaan tidak dilaksanakan. Dengan melihat dari perkembangan periode waktu 2017-2021, penyelenggaraan festival seni dan budaya, benda situs budaya yang dilestarikan sama dari tahun 2017, seperti terlihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54
Perkembangan Indikator Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	2	8	0	0
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	5	1	1	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	55	55	55	55	55

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja urusan wajib perpustakaan selama periode 2017-2021 diperlihatkan pada Tabel 2.55 Perkembangan indikator jumlah pengunjung memberi bukti bahwa minat masyarakat untuk memanfaatkan pustaka daerah semakin membaik terutama dalam meningkatkan minat literasi dan numerasi masyarakat.

Jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya rata-rata mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 pada masa pandemi yang mengalami penurunan dari 10.273 pengunjung menjadi sebanyak 8.988 pengunjung di tahun 2020.

Tabel 2.55
Perkembangan Indikator Perpustakaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah perpustakaan	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	4.116	5.327	10.273	8.988	9.842
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	18.065	18.065	19.796	19.796	21.044
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	NA	NA	NA	11
5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (persen)	NA	NA	NA	NA	15

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Untuk pembangunan literasi Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 dengan nilai indeks 11 masih berada dibawah capaian Propinsi Sumatera Barat yang pada angka 14,17. Begitu juga dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 sebesar 15 persen masih berada jauh jika dibandingkan dengan tingkat kegemaran membaca masyarakat secara keseluruhan di Propinsi Sumatera Barat dengan capaian sebesar 56 persen dan secara nasional pada angka 59,52 persen. Upaya untuk meningkatkan literasi dan minat baca di Kepulauan Mentawai seperti perlombaan menulis, bercerita, pidato, cerdas cermat antar jenjang sekolah begitu juga dilakukan program pustaka keliling untuk mempermudah jangkauan anak-anak sekolah/ peserta didik dan

juga masyarakat akan layanan perpustakaan seperti buku, buletin dan bahan pustaka lainnya.



18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja urusan wajib kearsipan dapat diukur dari pembinaan tata kelola arsip secara baku, persentase kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan dan indikator lainnya, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.56. Perkembangan pembangunan kearsipan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dapat dikatakan belum berkembang secara signifikan. Selain dari masih terbatasnya tenaga atau SDM kearsipan yang secara fungsional mengelola dan menata arsip juga masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menata arsip yang baik dan benar. Sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan dan layanan arsip setiap perangkat daerah dan pemerintah daerah tentunya urusan kearsipan sudah mulai menjadi bagian penting yang harus diintervensi sehingga pengelolaan kearsipan daerah semakin lebih baik.

Tabel 2.56
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1	1	1	2,7	5,5
2	Persentase Kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan	NA	NA	1	1	1,5
3	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	NA	NA	NA	NA	25
4	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	NA	NA	NA	NA	5

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Selain urusan wajib, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain meliputi beberapa bidang, yaitu (1) Kelautan dan Perikanan (2) Pariwisata (3) Pertanian (4) Energi dan Sumber Daya Mineral (6) Perdagangan. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah kepulauan yang ditutupi oleh sepanjang garis pantai 1.402,66 km tentunya Kabupaten Kepulauan Mentawai dianugerahi kekayaan laut yang luar biasa. Pengembangan produksi perikanan tangkap memiliki prospek yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan potensi pengembangan perikanan sekitar Rp.1 Triliun memberikan harapan bagi nelayan untuk meningkatkan ekonomi mulai dari peningkatan kapasitas nelayan, sarana dan prasarana, budidaya perikanan, pengolahan bahkan pada pemasaran produk perikanan.

Tabel 2.57
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Jumlah Produksi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perikanan Tangkap (ton)	6.939	7.056	7.543	7.698	8.694,5
2	Perikanan Budidaya (ton)	427,10	184,27	114,44	127,59	215,14
3	Produksi Olahan Ikan (kg)	28.145	31.042	32.538	NA	73.070

Sumber : Dinas Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap sebanyak 6.939 ton dan mengalami peningkatan setiap tahun hingga pada tahun 2021 produksi perikanan tangkap sebesar 8.694,5 ton. Jika dilihat dikonversikan kedalam penghasilan para nelayan maka penghasilan yang didapatkan masing-masing nelayan adalah

Rp.54.708.857/tahun atau sekitar Rp.4,5 juta/bulan. Untuk perikanan budidaya khususnya budidaya wilayah pesisir/terumbu karang dengan luasan lebih dari 17.636,72 ha. Potensi budidaya kawasan pesisir terumbu karang seperti kerapu, lobster dan kepiting bakau sangat menjanjikan dengan pasar kebutuhan domestik dan juga pasar nasional dan luar negeri dengan produksi rata-rata pertahun sebesar 58 ton.

Tabel 2.58
Jumlah Sarana Tangkap Nelayan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Armada Tangkap	2017	2018	2019	2020	2021
1	Perahu tanpa Motor	1.431	1.390	1.081	936	555
2	Long Tail	1.087	1.150	1.231	1.642	1.315
3	Mesin Tempel	764	822	1.050	1.225	1.698
4	Kapal <5 GT	21	48	51	51	58

Sumber : Dinas Perikanan

Peningkatan kapasitas nelayan selalu diupayakan melalui memberikan sarana dan prasarana perikanan seperti alat tangkap perikanan, mesin tempel dan juga peralatan pendukung perikanan lainnya. Hingga tahun 2021 jumlah mesin yang telah disalurkan kepada nelayan sebanyak 1.698 mesin dan perlengkapan long tail sebanyak 1.315 unit. Sebagai daerah kepulauan dengan luas wilayah pesisir yang terbentang sepanjang 1.402 km dengan potensi perikanan yang besar, menjadikan sektor perikanan menjadi sumber kehidupan masyarakat walaupun rantai pasok

sektor ini masih sangat pendek dan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan masih sangat cukup besar yaitu sebanyak 1.988 nelayan yang hampir sama dengan jumlah nelayan penuh ditahun 2021 sebanyak 2.144 nelayan.

Tabel 2.59
Jumlah Nelayan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Jumlah Nelayan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nelayan Penuh	1.250	1.284	1.466	1.641	2.144
2	Nelayan Sambilan Utama	1.215	1.215	1.215	1.215	1.095
3	Nelayan Sambilan Tambahan	1.004	1.004	1.004	1.004	893
	Total	3.469	3.503	3.685	3.860	4.132

Sumber : Dinas Perikanan

Penerapan teknologi tepat guna, kemampuan dan kemauan sumber daya masyarakat yang masih terbatas merupakan kendala utama dalam pengembangan sektor kelautan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Memang disadari bahwa masih banyak potensi kelautan dan perikanan Kepulauan Mentawai yang bisa digali lebih lagi, tentunya ini perlu perhatian dan pmengembangkan strategi pembangunan dan pengembangan perikanan agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat potensial untuk mengembangkan sektor jasa melalui pengembangan sektor

pariwisata. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai *core sector* dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa lainnya bahkan sektor pertanian dan industri. Pengembangan sektor ini juga sangat potensial untuk membangun ekonomi kreatif baik itu bagi ekonomi mikro juga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal. Kabupaten Kepulauan Mentawai dikenal akan potensi pariwisatanya, kabupaten ini memiliki pelbagai kawasan objek wisata yang sudah dikenal hingga penjuru dunia. Banyaknya jenis objek wisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dalam tabel berikut.

Tabel 2.60
Banyaknya dan jenis Objek Wisata
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Tahun	Panorama Alam	Bahari	Sumber Air	Budaya	Jumlah
2017	22	150	9	13	194
2018	22	150	9	3	184
2019	22	150	9	3	184
2020	19	46	9	7	81
2021	19	46	9	7	81

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Jenis kawasan objek wisata yang tersebar di pelbagai tempat/pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memunculkan beberapa industri pariwisata, salah satunya berdirinya pelbagai resort, penginapan, dan wisma. Tabel 2.61 menunjukkan banyaknya resort, penginapan dan wisma yang

telah berdiri sejak tahun 2017 hingga 2021. Tahun 2021 untuk akomodasi yang telah ada di Mentawai sebanyak 91 akomodasi dengan 759 kamar dan sekitar 1.297 tempat tidur.

Tabel 2.61
Banyaknya Resort, Wisma, dan Penginapan
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Tahun	Resort	Wisma	Penginapan	Jumlah
2017	45	8	12	65
2018	48	10	16	74
2019	50	12	18	80
2020	NA	NA	93*	94
2021	NA	NA	91*	91

*= Hotel (2), Penginapan (91)

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tabel 2.62
Perkembangan Indikator Pariwisata
di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Item	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara (orang)	9.203	9.425	9.164	1.315	3.807
Jumlah Kunjungan Wisata Domestik (orang)	898.189	957.477	994.655	122.763	391.228
Lama Kunjungan (Lama tinggal)	±10 hari	±10 hari	±10 hari	±5 hari	±5 hari
Penerimaan Retribusi Daerah	7 M	8 M	7,9 M	1,22 M	4 M
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	242	16	-13	-83	-30
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	142	76	-33	-47	161
Tingkat hunian akomodasi	70	73,58	75,24	1,25	121,43
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	70.449,00	81.821,00	70.924,00	1.226,80	8.587,00
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7.044.900.000	8.182.100.000	7.092.400.000	122.680.000	858.700.000

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Perkembangan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir trennya menunjukkan perkembangan yang positif kecuali pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami kontraksi dikarenakan oleh dampak pandemi COVID-19 yang tentunya membatasi aktifitas masyarakat dan juga larangan untuk melakukan even atau kegiatan yang memicu berkumpulnya masyarakat/orang. Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 9.203 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 898.189 orang dan meningkat hingga tahun 2019 dimana wisatawan nusantara sudah mendekati 100.000 orang atau tepatnya 994.655 orang. Namun pencapaian ini menurun di tahun 2020 dengan jumlah wisatawan mancanegara menjadi berjumlah 1.315 orang dan wisatawan nusantara berjumlah 122.763 orang. Penerimaan pendapatan dari sektor pariwisata memang belum maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dengan rata-rata sebesar 18 persen setiap tahunnya (kondisi normal), tentu strategi pengembangan pariwisata dan program pemasaran yang tepat menjadi hal penting harus diperhatikan dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Hasil pertanian dan perkebunan menjadi andalan dalam perekonomian masyarakat di Kepulauan Mentawai. Dari data BPS didapatkan bahwa dalam 5 tahun terakhir persentase kontribusi

sektor pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah lebih dari 48 persen. Begitu juga isu strategis dalam pengembangan sektor pertanian yang tidak sekedar menjual *raw material* tapi harus mampu memberikan nilai tambah terhadap komoditi pertanian, sehingga mampu menyejahterakan para petani. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan lokal (ketahanan pangan), alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman/perkantoran dan alih fungsi lahan untuk komoditas pertanian lainnya (tidak konsisten) menjadi isu penting dalam mempengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Tabel 2.63 menunjukkan perkembangan produksi tanaman pertanian, perkebunan dan perkembangan ternak yang dibudidayakan oleh masyarakat. Produksi tanaman sagu, kelapa, cengkeh relatif stabil dengan masing-masing pertumbuhan produksi, sagu (17,31 persen), kelapa (35,59 persen), cengkeh (0,73 persen).

Tabel 2.63
Produksi Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Jumlah Produksi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Keladi (kwintal)	97.730	1.155	13.260	1.152	1.041,5
2	Ubi Kayu (kwintal)	18.800	2.290	1.150	333,5	515

No	Jumlah Produksi	2017	2018	2019	2020	2021
3	Ubi Jalar (kwintal)	86.000	22.510	2.630	241,3	362,50
4	Pisang (kwintal)	11.990	22.893	19.506	75.351	139.873
5	Durian (kwintal)	56.780	54.599	20.700	57.801	117.211
6	Kelapa (ton)	9.346	15.113	15.591	13.824	13.854
7	Cengkeh (ton)	1.519	1.524	1.539	1.328	1.481
8	Cacao (ton)	2.330	2.301	133,47	210,8	147,34
9	Sagu (ton)	1.847	958	1.205, 48	1.060,9 9	690,63
10	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	2,42	2,5	2,47	2,5	2,5
11	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	80	80	85	85	85
12	Babi (ekor) --- produksi	30.489	27.598	25.561	31.878	42.510
	Babi (kg) --- pematangan	3.000	4.200	15.625	16.117	NA
13	Ayam Pedaging (ekor) --- pematangan	1.900	2.700	4.371	4.457	NA

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Untuk perkembangan produksi tanaman pertanian/ perkebunan yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pisang, kelapa, sagu relatif terjaga dan cenderung meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 produksi komoditi pisang sebesar 11.990 kwintal dan meningkat hingga tahun 2021 produksi komoditi pisang sebesar 139.873 kwintal, komoditi kelapa pada tahun 2017

sebanyak 9.346 ton meningkat menjadi 13.854 ton pada tahun 2021. namun pada komoditi sagu ada penurunan produksi yaitu pada tahun 2017 produksinya 1.847 ton menurun hingga tahun 2021 produksi komoditinya menjadi 690,63 ton, hal ini disebabkan karena budidaya sagu sudah mulai tidak dikembangkan dan alih fungsi lahan sagu menjadi areal perumahan atau pertanian komoditas lainnya.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai rata-rata 12,5 persen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan walaupun di tahun 2020 dan 2021 sedikit ada perlambatan. Capaian ini tergolong sangat kecil, dikarenakan belum maksimalnya pengembangan sektor perdagangan terutama pusat-pusat perdagangan seperti pasar yang berkembang. Disisi lain sektor perdagangan yang didorong yang tumbuh dari tumbuh kembangnya usaha perdagangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama dalam legalisasi sektor usaha perdagangan.

Tabel 2.64
Perkembangan Indikator Urusan Perdagangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,33	12,66	12,82	12,80	12,72
2	Jumlah Koperasi	82	84	84	83	85
3	Jumlah Perdagangan (Pasar, Toko, Swalayan)	NA	NA	643	880	47
4	Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan	NA	NA	5	6	6
5	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0	0	0	1,07	1,60
6	Persentase kinerja realisasi pupuk	NA	NA	NA	0,42	0,35
7	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	0	0	0,4	0,2

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama 5 tahun terakhir masih sangat konstan diangka 2-2,5 persen terhadap PDRB belum mengalami peningkatan yang signifikan.

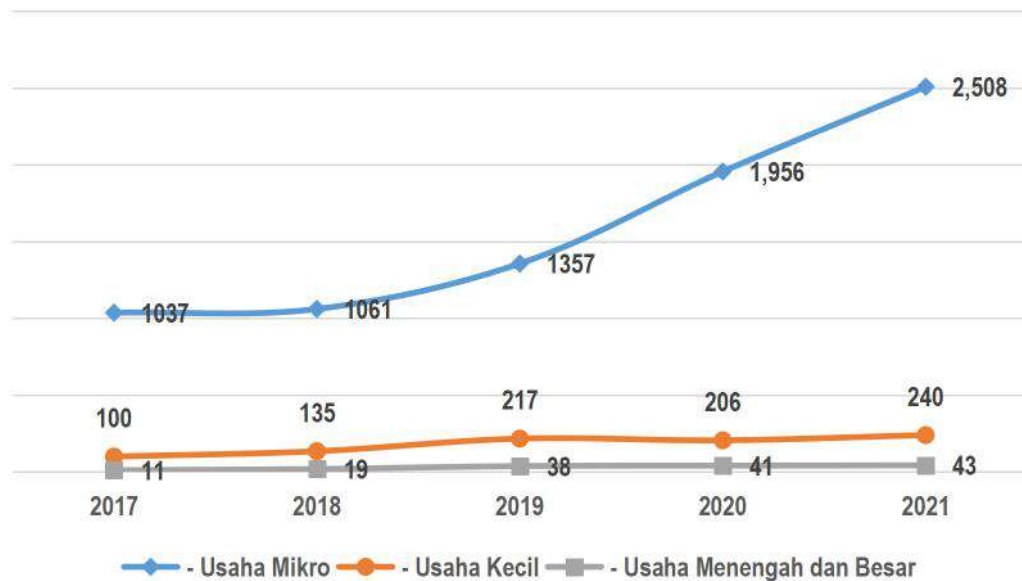
Tabel 2.65
Perkembangan Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	2,80	2,68	2,34	2,43	2,57
Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten				2.07	1.25
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	0	0	0	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	0
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka (diolah)

Kondisi ini memang sangat berbanding terbalik pada kontribusi sektor raw material/primer dengan kontribusi dengan rata-rata 48 persen setiap tahunnya, yang seharusnya sudah mulai reformasi struktural ekonomi ke arah sektor industri/pengolahan.

Gambar 2.24
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Total Jumlah UMKM Tahun 2021 sebanyak 2.791 UMKM usaha mikro sebanyak 2.508 atau 89,86%, usaha kecil sebanyak 240 atau 8,60%, usaha menengah sebanyak 43 atau 1,54%. Gambar 2.24 menunjukkan meningkatnya jumlah usaha kecil di Kepulauan Mentawai kurun waktu 2017-2021, begitu juga dengan jenis usaha mikro yang bergerak pada sektor informal yang meningkat setiap tahun dari 1.037 usaha mikro tahun 2017 bertambah menjadi sebanyak 2.508 usaha mikro pada tahun 2021, tentunya berbagai program pendampingan dan akses permodalan yang harus dibuka bagi masyarakat agar usaha mikro dapat beralih pada usaha kecil dan memiliki legalitas usaha.

2.1.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Penunjang Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down* untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner dan implementatif. Kurun waktu hingga tahun 2021, perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin baik. Hal ini terlihat dari pencapaian beberapa penghargaan yang diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak tahun 2018, antara lain:

1. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2018.
2. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2019.
3. Perencanaan Terbaik III se-Sumatera Barat Tahun 2019.
4. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2020.

5. Perencanaan Terbaik Harapan III se Sumatera Barat Tahun 2020.
6. Nilai SAKIP dengan predikat B Tahun 2021.
7. Perencanaan Terbaik Harapan III se Sumatera Barat Tahun 2021.

Begitu juga dengan proses dan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022, Penyusunan Rencana Kerja Pamarintah Daerah setiap tahunnya telah disusun dan batas waktu penetapannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Unsur Penunjang Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi,

akuntabilitas, dan partisipatif. Capaian target indikator kinerja penunjang pada urusan keuangan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. APBD merupakan instrumen fiskal di daerah yang digunakan dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Sejak tahun 2018 kinerja penyelenggaraan keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah pada pencapaian tertinggi yaitu dengan opini keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diperoleh pertama kali sejak kabupaten berdiri yaitu tahun 2019. Namun, pencapaian ini mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 untuk pengelolaan keuangan tahun 2020 dengan opini keuangan dengan predikat WDP.

Tabel 2.66
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini Keuangan	NA	WTP	WTP	WDP	WDP
2	Realisasi PAD (persen)	80,02	96,03	47,0	62,25	69,78

Sumber: Badan Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa menargetkan maksimal dalam pencapaian kinerja opini keuangan terhadap hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan setiap tahunnya dengan opini wajar tanpa pengecualian.

3. Unsur Penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Suksesnya pencapaian kinerja pembangunan daerah sangat tergantung dengan kualitas sumber daya manusia yang ada. Perhatian pada unsur kepegawaian menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan, juga sebagaimana amanat Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, seluruh Pemerintah Daerah diamanahkan untuk menerapkan Sistem Merit dilingkungannya. Penerapan sistem merit sebagai salah satu strategi dalam manajemen SDM ASN tentunya bukanlah hal yang mudah. Pada perjalanannya, banyak tantangan dan inkonsistensi yang ditemui dalam pelaksanaan sistem ini. Tantangan dan inkonsistensi datang tidak hanya dari dalam ekosistem birokrasi semata, namun juga dari ekosistem di luar birokrasi yang secara tidak langsung mempengaruhi.

Sejak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mulai penerapan dan penilaian Sistem Merit dengan indikator Nilai Penerapan Sistem Merit. Penilaian tersebut didasarkan pada aspek antara lain Perencanaan Kebutuhan ASN, Pengadaan ASN, Pengembangan Karir, Promosi dan Rotasi, Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan Serta Sistem Informasi. Penerapan Sistem Merit akan diukur dengan Penilaian Sistem Merit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil

Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya menjadi indikator dalam urusan penunjang kepegawaian menggantikan indikator Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%. Peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui sertifikasi pendidik masih belum dipenuhi sebagai syarat guru/pendidik dengan kisaran baru 16 persen. Begitu juga dengan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan dan juga dalam jabatan struktural dan fungsional yang diselenggarakan dalam upaya menyesuaikan kapasitas sumber daya dengan jabatan yang diemban sehingga mempercepat tercapainya tujuan organisasi.

4. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan urusan penunjang yang sangat vital dalam proses penyusunan perencanaan terutama dalam perumusan strategi/ kebijakan dengan penarikan kesimpulan secara ilmiah yang dijadikan pedoman dan dasar/rujukan pengambilan kebijakan.

Masih belum adanya SDM dalam bidang kelitbangan (peneliti) yang kompeten di dalam bidangnya. Selain itu juga disebabkan oleh permasalahan mengenai hasil penelitian dan pengembangan yang belum optimal sedangkan itu digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan dalam penetapan suatu kebijakan. Begitu juga dengan perkembangan inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih fluktuatif, inovasi yang

diartikan sebagai pembaharuan tata kelola dan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2021 telah mencapai predikat inovatif walaupun ditahun 2020 mengalami penurunan pada predikat kurang inovatif. Kebijakan pengembangan inovasi belum sepenuhnya menjadi bagian capaian kinerja pemerintah daerah terlebih pada perangkat daerah.

5. Unsur Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kedudukan inspektorat daerah adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Perkembangan indikator pengawasan di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan. Penguatan unsur pengawasan tidak dapat hanya berada pada unsur pengawasan atau berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan, yang lebih penting adalah penguatan tata kelola, tertib administrasi dan penguatan

sumberdaya manusia sehingga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan tertib dan taat azas.

Tabel 2.67
Perkembangan Indikator Unsur Pengawasan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Uraian	2018	2019	2020	2021
1	Persentase tindak lanjut temuan	65,80	69,70	77,76	86,25
2	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	88,20	96	97,25	97,58
3	Maturitas SPIP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2

Sumber: Inspektorat

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) merupakan jenis komponen pengeluaran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.68
Angka Konsumsi RT
Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Pengeluaran RT	2.066.326	2.249.953	2.484.444	2.365.148	2.473.204
	Pertumbuhan pengeluaran RT (persen)	6,63	8,89	10,42	-4,80	4,57
2	Jumlah RT	21.153	21.554	21.950	20.843	21.085
3	Rata-Rata	97,68	104,39	113,19	113,47	117,30

Sumber: PDRB Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pengeluaran 2017-2021

Tabel 2.68 menunjukkan pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan. Peningkatan konsumsi ini dipengaruhi oleh beberapa indikator ekonomi makro salah satunya adalah naiknya pendapatan masyarakat dan peningkatan konsumsi rumah tangga juga menggambarkan peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19 dimana masyarakat lebih hati-hati/menjaga dalam melakukan pengeluaran/konsumsi khususnya untuk jenis konsumsi non pangan. Pertumbuhan angka konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang positif dan dengan tren walaupun di tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup dalam diangka minus 4,80 persen dan kembali positif di tahun 2021 pada angka 4,57 persen.

b. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah RT. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.69
Rasio Angka Konsumsi RT Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2017-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2021
1.	Total Pengeluaran RT pangan	1.031.177	1.107.845	1.227.068	1.178.828	1.253.566
2.	Total Pengeluaran	2.066.326	2.249.953	2.484.444	2.365.148	2.473.204
Persentase		49,90	49,24	49,39	49,84	50,69

Sumber: PDRB Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pengeluaran 2017-2021

Tabel 2.69 menunjukkan rasio konsumsi rumah tangga non pangan terhadap total pengeluaran rumah tangga setiap tahunnya mengalami peningkatan. Ini terlihat pada tahun 2017 persentase total pengeluaran non pangan terhadap pengeluaran rumah tangga sebesar 49,90 persen seterusnya hingga tahun 2021 sekitar menjadi 50,69 persen. Hal ini menjadi perhatian khusus, artinya tingkat konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi oleh konsumsi pangan (lebih dari 50 persen), artinya pola konsumsi masyarakat Mentawai masih sangat

konsumsi dan belum produktif. Tentu konsumsi selain pangan dapat didorong dalam meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, kualitas lingkungan dan kesehatan. Secara rinci pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021 dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 2.70
Angka Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Kepulauan Mentawai (juta rupiah), 2017-2021

No	Komponen Pengeluaran Rumah Tangga	2017	2018	2019	2020	2021
1	Makanan Minuman dan Rokok	1.035.148,65	1.142.108,08	1.251.273,85	1.183.267,34	1.219.638,15
2	Pakaian dan Alas Kaki	70.641,94	77.337,88	85.391,67	79.540,35	84.332,90
3	Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan RT	151.670,37	164.170,25	176.122,87	171.355,62	176.195,79
4	Kesehatan dan Pendidikan	142.274,29	153.549,65	168.412,77	179.426,29	192.167,53
5	Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	462.519,86	494.021,37	548.440,09	501.961,02	542.810,25
6	Hotel dan Restoran	82.433,48	90.568,77	98.238,79	94.629,75	96.661,90
7	Lainnya	121.637,44	128.197,98	150.462,59	151.915,26	161.398,15

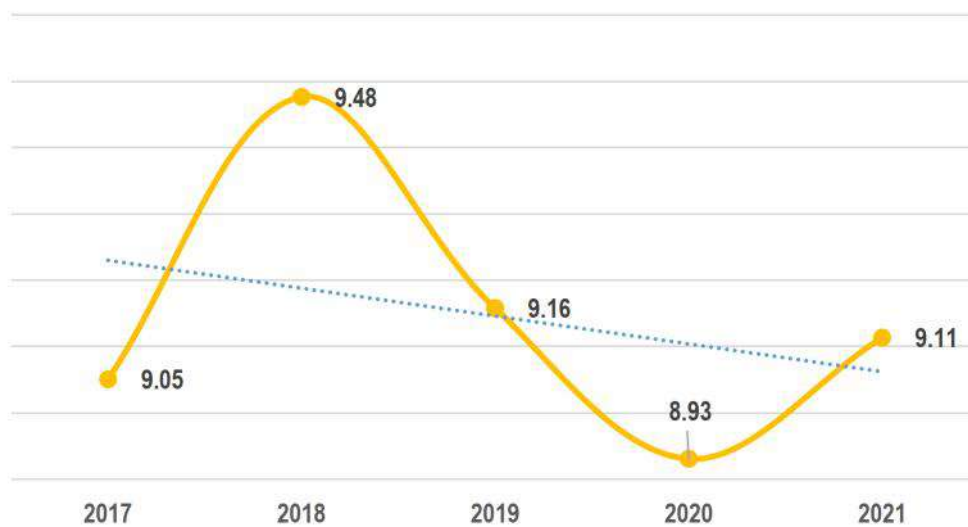
Sumber: PDRB Kepulauan Mentawai Berdasarkan Pengeluaran 2017-2021 (diolah)

c. Produktifitas Total Daerah

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator untuk melihat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2017-2021 seperti pada gambar 2.25 menunjukkan

tren penurunan. Pada tahun 2017 nilai produktivitas tenaga kerja sebesar 9,05 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun lalu naik pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,48 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun, namun pada tahun 2019 sampai pada tahun 2021 menurun dan menjadi sebesar 9,11 miliar rupiah/tenaga kerja/tahun pada tahun 2021.

Gambar 2.25
Produktivitas Total Daerah (miliar rupiah)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021



Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2022

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Salah satu capaian yang dapat dijadikan ukuran dalam daya saing daerah adalah ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung kegiatan sektor riil masyarakat. Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih,

ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya.

a. Aksesibilitas

Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

a) Sarana jalan yang tersedia dalam kondisi baik sepanjang 107,9 km atau sekitar 9,54 persen dari total jalan yang tersedia, sedangkan panjang jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 405,4 km atau sekitar 35,86 persen dari total panjang jalan tersedia.

b) Bandar Udara Rokot melayani penerbangan domestik Padang-Rokot (Tuapejat) dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Pelayanan penerbangan Padang-Tuapejat telah memiliki rute penerbangan tetap (2 kali seminggu) dengan kapasitas pesawat 15 s/d 20 orang.

c) Pelabuhan Laut sebanyak 5 buah, yaitu Pelabuhan Tuapejat, Pelabuhan Sioban, Pelabuhan Sikakap, Pelabuhan Sikabalu, Pelabuhan Maileppet.

Untuk pelayaran Padang-Mentawai dapat dilalui oleh kelima pelabuhan tersebut dengan rute sudah terjadwal. Kapal ASDP yang tersedia sebanyak 3 buah (KMP Gambolo, KMP Ambu-Ambu, KMP Tanjung Burang) dan 2 unit Mentawai Fast juga melayani pelayaran rute Padang-Mentawai. Pelayaran antar pulau dalam wilayah Kepulauan Mentawai tersedia kapal

penyeberangan antar pulau antara lain KM Simasin, KM Nade, KM Beriloga, KM Simatalu, LCT Teluk Katurei, KM Bakkat Menuang dengan rute sudah terjadwal.

b. Penataan Wilayah

Penataan ruang dan wilayah mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035 menjadi acuan hukum dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat. Rencana kawasan tata ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam jangka waktu 20 tahun di bagi dalam 2 kawasan antara lain kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung terdiri:

- a) Kawasan hutan lindung.
- b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya antara lain adalah kawasan resapan air.
- c) Kawasan perlindungan setempat.
- d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.
- e) Kawasan rawan bencana alam.

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan gempa dan tsunami, kawasan rawan banjir, kawasan rawan abrasi.

- f) Kawasan lindung geologi.
- g) Kawasan konservasi perairan.
- h) Kawasan lindung lainnya.

Kawasan budidaya di Kepulauan Mentawai terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi dengan luas 246.011,41 ha, kawasan peruntukan pertanian dengan luas 119.492,20 ha. Kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi bandar udara (bandara), pertahanan dan keamanan.

c. Air Bersih

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih secara agregat masih sekitar 55,46 persen. Hal ini menjadi perhatian serius karena kebutuhan akan air bersih akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Oleh karena itu, perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pelayanan air minum seperti yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengembangkan SPAM untuk kawasan di 10

kecamatan dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

d. Listrik dan Komunikasi

Rasio elektrifikasi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 masih rendah sekitar 83,72 persen. Kendala utama adalah infrastruktur jalan yang masih sangat terbatas dan juga kemampuan ekonomi masyarakat calon pelanggan yang tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik. Jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Kepulauan Mentawai tercatat sebanyak 14.717 pelanggan. Untuk 4 wilayah antara lain Tuapejat, Sioban, Sikakap, Muara Siberut, Sikabalu telah beroperasi PLN selama 24 jam, sedangkan di daerah lain masih sekitar 10-12 jam/hari. Pengembangan sektor energi terutama energi baru dan terbarukan kedepan menjadi alternatif pilihan dalam rangka pembangunan energi yang berkelanjutan terutama dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang telah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 23% hingga tahun 2025.

Layanan surat menyurat juga sudah tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai, antara lain di Sikakap, Sioban, Tuapejat, Muara Siberut, Sikabalu. Begitu juga untuk akses telekomunikasi sudah dapat melayani konsumen di 10 kecamatan.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk pelbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan pelbagai jenis kejahatan lainnya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Tabel 2.71
Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2021

No	Jenis Kriminal	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kasus Narkoba	4	5	6	4	5
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	3	2	2	24	21
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	6	7	1	8	6
5.	Jumlah kasus Pencurian	19	17	12	20	13
6.	Jumlah kasus Penipuan	4	5	4	5	6
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	61	56	31	61	51
9.	Jumlah Penduduk	88.692	90.373	92.021	87.623	88.389
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	4,06	3,98	2,72	6,96	5,76

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Mentawai cenderung mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 tingkat kriminalitas sebesar 4,06 persen dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 5,76 persen. Harapannya dengan penguatan forum komunikasi pimpinan daerah dan

seluruh unsur masyarakat menjaga ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat.

b. Layanan Perizinan

Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian pelbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diorganisir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu pendekatan proses pembangunan adalah dengan peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Peningkatan sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya mewujudkan manusia yang seutuhnya dan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subjek dan objek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan

memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional.

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas kerja yang mengacu pada kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja dapat dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.72 menunjukkan adanya peningkatan rasio lulusan sarjana pada jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 kurun waktu 2018-2021, persentase penduduk 15 tahun keatas ijazah S1, S2, dan S3 tahun 2018 sebesar 4,79 persen dan mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebesar 8,53 persen.

Tabel 2.72
Jumlah Lulusan S1/S2/S3
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas berijazah S1/S2/S3	2.768	3.361	3.512	5.494
Jumlah penduduk 15 tahun keatas	57.790	58.745	63.474	64 370
Persentase penduduk 15 tahun keatas berijazah S1/S2/S3 (1/2)	4,79	5,72	5,53	8,53

Sumber: BPS Kepulauan Mentawai (diolah)

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan, pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah agar visi misi yang tertuang dalam RPJMD dapat tercapai. Evaluasi pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan melalui pencapaian indikator kinerja RKPD yang sesuai/selaras dengan yang tertuang dalam RPJMD.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12			15=14/5x100
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah terbayarnya honor ASN di lingkungan Disdikbud	300	orang	13.800.000.000	240	9.497.887.200	60	2.499.444.000	60	2.499.444.000	100,00	100,00	300	11.997.331.200	100,00	86,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja guru	3600	dok	1.500.000.000	2400	973.178.000	600	446.043.000	600	446.043.000	100,00	100,00	3000	1.419.221.000	83,33	94,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat kebersihan kantor	100	jenis	1.500.000.000	75	1.009.990.350	22	409.997.350	22	409.997.350	100,00	100,00	97	1.419.987.700	97,00	94,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	55	jenis	240.000.000	40	169.999.700	10	47.397.000	10	47.397.000	100,00	100,00	50	217.396.700	90,91	90,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan ASN	6	jenis	25.000.000	2	3.000.000	2	12.000.000	2	12.000.000	100,00	100,00	4	15.000.000	66,67	60,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100	kali	770.000.000	60	407.514.800	30	234.675.000	30	234.675.000	100,00	100,00	90	642.189.800	90,00	83,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	15	rekening	290.000.000	9	139.415.264	3	90.000.000	3	90.000.000	100,00	100,00	12	229.415.264	80,00	79,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								592.638.000									

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapainya pemeliharaan kendaraan mobil dinas operasional Tercapainya pemeliharaan kendaraan motor dinas operasional	48	unit	505.000.000	36	349.100.000	12	139.840.000	12	139.840.000	100,00	100,00	48	488.940.000	100,00	96,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	4	ruang	830.000.000	3	600.000.000	1	228.413.000	1	228.413.000	100,00	100,00	4	828.413.000	100,00	99,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan kantor	4	buah	780.000.000	2	403.893.000	1	224.385.000	1	224.385.000	100,00	100,00	3	628.278.000	75,00	80,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penataan Organisasi								2.000.000.000									
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksana Operasional AKN	3	Tahun	4.000.000.000	1	1.404.429.362	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	100,00	100,00	3	3.404.429.362	100,00	85,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terbangunnya unit sekolah baru	1	sekolah	400.000.000	0	-	1	333.790.800	1	333.790.800	100,00	100,00	1	333.790.800	100,00	83,45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB yang dibangun pada sekolah dasar	6	RKB	3.215.000.000	1	466.575.000	5	2.440.532.800	5	2.440.532.800	100,00	100,00	6	2.907.107.800	100,00	90,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun pada sekolah dasar	12	sekolah	3.500.000.000	8	2.006.715.500	4	1.213.571.200	4	1.213.571.200	100,00	100,00	12	3.220.286.700	100,00	92,01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang pustaka yang dibangun pada sekolah dasar	12	sekolah	2.780.000.000	5	1.243.536.616	6	1.454.638.400	6	1.454.638.400	100,00	100,00	11	2.698.175.016	91,67	97,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya jamban sekolah/WC, pagar pada sekolah dasar	14	sekolah	2.615.000.000	3	522.828.668	11	1.939.839.720	11	1.939.839.720	100,00	100,00	14	2.462.668.388	100,00	94,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas yang dibangun	5	sekolah	2.311.000.000	2	874.265.000	1	483.821.000	1	483.821.000	100,00	100,00	3	1.358.086.000	60,00	58,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya pengadaan mobilier sekolah dasar	10	sekolah	1.030.000.000	0	-	6	526.320.000	6	526.320.000	100,00	100,00	6	526.320.000	60,00	51,10	Dinas Pendidikan dan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4																16
																	Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Terpenuhinya kebutuhan biaya pengelolaan pendidikan di SD	432	sekolah	53.000.000.000	270	29.296.498.884	135	17.513.066.000	135	17.513.066.000	100,00	100,00	405	46.809.564.884	93,75	88,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya ujian sekolah berstandar nasional dan try out SD	335	sekolah	700.000.000	135	366.052.000	135	203.719.300	135	203.719.300	100,00	100,00	270	569.771.300	80,60	81,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah jasa guru kontrak SD yang dibayarkan	540	sekolah	17.500.000.000	405	9.035.053.500	135	7.887.498.000	135	7.887.498.000	100,00	100,00	540	16.922.551.500	100,00	96,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya SDM bagi tenaga kependidikan	100	orang	53.000.000	0	-	100	52.228.300	100	52.228.300	100,00	100,00	100	52.228.300	100,00	98,54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terkelolanya Aneka Tunjangan Guru, Pengawas, Kepala Sekolah Jenjang SD	615	orang	215.000.000	310	99.409.000	305	108.091.000	305	108.091.000	100,00	100,00	615	207.500.000	100,00	96,51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terkelolanya BOS SD	540	sekolah	350.000.000	270	127.822.700	135	146.171.000	135	146.171.000	100,00	100,00	405	273.993.700	75,00	78,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																	
Penambahan Ruang Kelas Baru	Tersedianya ruang kelas baru	2	sekolah	1.500.000.000	0		1	859.144.200	1	859.144.200	100,00	100,00	1	859.144.200	50,00	57,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbangunnya ruang guru/ TU/ Kepala sekolah	2	sekolah	500.000.000	0		1	29.250.000	1	29.250.000	100,00	100,00	1	29.250.000	50,00	5,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tersedianya ruang perpustakaan	5	sekolah	3.300.000.000	3	2.389.447.000	1	659.858.800	1	659.858.800	100,00	100,00	4	3.049.305.800	80,00	92,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium	Tersedianya laboratorium sekolah	6	sekolah	4.300.000.000	3	2.461.917.500	3	1.672.931.200	3	1.672.931.200	100,00	100,00	6	4.134.848.700	100,00	96,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Tersedianya rumah dinas guru	10	sekolah	2.200.000.000	4	1.129.976.500	4	964.401.800	4	964.401.800	100,00	100,00	8	2.094.378.300	80,00	95,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya jamban sekolah/WC, pagar pada sekolah menengah atas	7	sekolah	900.000.000	5	420.328.000	1	292.167.600	1	292.167.600	100,00	100,00	6	712.495.600	85,71	79,17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terehabnya ruang kelas	4	sekolah	1.800.000.000	0	-	4	1.796.455.600	4	1.796.455.600	100,00	100,00	4	1.796.455.600	100,00	99,80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terehabnya rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah	1	sekolah	300.000.000	0	-	1	286.589.200	1	286.589.200	100,00	100,00	1	286.589.200	100,00	95,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya mebel sekolah	3	sekolah	300.000.000	0	-	2	190.597.000	2	190.597.000	100,00	100,00	2	190.597.000	66,67	63,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menengah pertama yang menerima dana BOS	136	sekolah	13.000.000.000	68	5.000.000.000	34	7.040.161.000	34	7.040.161.000	100,00	100,00	102	12.040.161.000	75,00	92,62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya ujian nasional sekolah dasar	136	sekolah	600.000.000	68	290.463.000	34	212.631.000	34	212.631.000	100,00	100,00	102	503.094.000	75,00	83,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan	68	sekolah	120.000.000	0		34	83.581.000	34	83.581.000	100,00	100,00	34	83.581.000	50,00	69,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya tenaga kependidikan	580	orang	10.200.000.000	290	4.291.006.500	145	4.753.186.000	145	4.753.186.000	100,00	100,00	435	9.044.192.500	75,00	88,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya SDM pendidik dan tenaga kependidikan	200	orang	200.000.000	0	0	200	184.602.000	200	184.602.000	100,00	100,00	200	184.602.000	100,00	92,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terkelolanya Aneka Tunjangan Guru, Pengawas, Kepala Sekolah Jenjang SMP	65	orang	110.000.000			65	100.759.000	65	100.759.000	100,00	100,00	65	100.759.000	100,00	91,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terkelolanya BOS SMP	136	sekolah	918.905.000	68	367.562.000	34	183.781.000	34	183.781.000	100,00	100,00	102	551.343.000	75,00	60,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terlaksananya tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan paud	20	lembaga	100.000.000	0	-	20	76.820.160	20	76.820.160	100,00	100,00	20	76.820.160	100,00	76,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah PTK PAUD yang mengikuti pelatihan	180	guru paud	250.000.000	0	-	180	235.049.200	180	235.049.200	100,00	100,00	180	235.049.200	100,00	94,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100	paud	250.000.000	0	-	100	160.243.740	100	160.243.740	100,00	100,00	100	160.243.740	100,00	64,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terkelolanya dana BOP PAUD	460	lembaga paud	2.916.180.000	276	1.715.400.000	92	571.800.000	92	571.800.000	100,00	100,00	368	2.287.200.000	80,00	78,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								1.324.447.196									
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terselenggara ranya pbm dan ujian pendidikan non formal	60	PKBM	918.750.700	36	540.441.588	12	180.147.196	12	180.147.196	100,00	100,00	48	720.588.784	80,00	78,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terkelolanya Dana BOP sekolah nongormal/kesetaraan	60	PKBM	5.607.070.000	36	3.204.040.000	12	1.144.300.000	12	1.144.300.000	100,00	100,00	48	4.348.340.000	80,00	77,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN																	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penilaian kenaikan pangkat guru, pengawas, dan kepala sekolah	1400	orang	220.000.000	1050	86.372.000	350	99.148.000	350	99.148.000	100,00	100,00	1400	185.520.000	100,00	84,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Belanja Transfer DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya administrasi keuangan	4.600	Orang	80.830.914.500	2.760	49.488.315.000	920	16.496.105.000	920	15.796.628.386	100,00	95,76	3680	65.284.943.386	80,00	80,77	Dinas Kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Kantor	29	Jenis	109.400.000	15	60.000.000	5	5.949.800	5	5.931.000	100,00	99,68	20	65.931.000	68,97	60,27	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	153	jenis	483.825.510	90	296.219.700	30	98.739.900	30	98.739.900	100,00	100,00	120	394.959.600	78,43	81,63	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
	Tersedianya Makan Minum Pegawai																
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak	30	jenis	142.100.000	24	87.000.000	6	30.000.000	6	29.700.000	100,00	99,00	30	116.700.000	100,00	82,13	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	96	Dokumen	36.500.000	56	24.600.000	19	8.200.000	18	8.100.000	93,75	98,78	74	32.700.000	76,75	89,59	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	110	kali	1.133.100.000	72	542.454.300	24	200.909.000	20	195.367.099	83,33	97,24	92	737.821.399	83,64	65,12	Dinas Kesehatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	8	unit	179.902.800	2	87.952.480	3	39.978.400	3	39.147.273	100,00	97,92	5	127.099.753	62,50	70,65	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telekomunikasi berupa internet, informasi, sumberdaya air dan listrik	12	rekening	379.400.000	9	284.580.000	3	91.800.000	3	57.199.942	100,00	62,31	12	341.779.942	100,00	90,08	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUmlah kendaraan dinas yang dipelihara	15	unit	102.400.000	9	64.000.000	3	20.000.000	2	15.283.000	66,67	76,42	11	79.283.000	73,33	77,42	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Pajak kendaraan	144	unit	258.000.000	86,4	165.000.000	27	50.000.000	25	45.735.000	92,59	91,47	111	210.735.000	77,36	81,68	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di pelihara	7	Unit	771.124.000	3	520.000.000	1	11.988.000	1	11.924.000	100,00	99,47	4	531.924.000	57,14	68,98	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan	Jumlah Rakit dan prasarana pendukung	3	unit	53.950.584.853			1	11.251.248.183	1	6.791.476.645	100,00	60,36	1	6.791.476.645	33,33	12,59	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Prasarana Pendukungnya	yang dibangun																
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	2	Unit	7.294.845.000		1	1.994.647.800	1	1.801.849.350	100,00	90,33	1	1.801.849.350	50,00	24,70	Dinas Kesehatan	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun	2	Unit	4.778.181.000		1	2.077.470.000	1	1.721.471.600	100,00	82,86	1	1.721.471.600	50,00	36,03	Dinas Kesehatan	
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	4	Unit	1.940.804.000		3	1.465.809.740	2	866.037.900	66,67	59,08	2	866.037.900	50,00	44,62	Dinas Kesehatan	
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	4	Unit	2.200.000.000		4	2.128.390.250	4	1.556.872.000	100,00	73,15	4	1.556.872.000	100,00	70,77	Dinas Kesehatan	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan penunjang yang tersedia	10	Buah	11.100.000.000		5	7.213.561.620	5	6.560.802.219	100,00	90,95	5	6.560.802.219	50,00	59,11	Dinas Kesehatan	
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat, vaksin yang tersedia	322	jenis	17.376.783.788	180	10.025.067.570	60	3.341.689.190	60	2.922.207.473	100,00	87,45	240	12.947.275.043	74,53	74,51	Dinas Kesehatan
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	322	jenis	34.775.085.522	180	20.455.932.660	60	6.818.644.220	60	6.717.503.930	100,00	98,52	240	27.173.436.590	74,53	78,14	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat penunjang medik fasilitas/pelayanan kesehatan	50	Jenis	1.490.633.100	30	906.071.100	10	292.281.000	10	145.115.900	100,00	49,65	40	1.051.187.000	80,00	70,52	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		251	kali	7.430.277.700	150	4.736.432.000	50	1.480.135.000	50	1.217.841.331	100,00	82,28	200	5.954.273.331	79,68	80,14	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		49,8	kali	249.000.000	30	155.000.000	10	50.000.000	10	48.325.000	100,00	96,65	40	203.325.000	80,32	81,66	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		49,8	kali	249.000.000	30	155.000.000	10	50.000.000	10	32.285.000	100,00	64,57	40	187.285.000	80,32	75,21	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		30	Tim	1.700.000.000	0	0	30	1.476.683.400	30	929.028.943	100,00	62,91	30	929.028.943	100,00	54,65	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		10	kali	502.000.000	6	303.000.000	2	100.000.000	2	94.563.400	100,00	94,56	8	397.563.400	80,00	79,20	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		10	kali	251.000.000	6	151.500.000	2	50.000.000	2	20.507.000	100,00	41,01	8	172.007.000	80,00	68,53	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		10	kali	376.500.000	6	227.250.000	2	75.000.000	2	63.267.692	100,00	84,36	8	290.517.692	80,00	77,16	Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		16
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		10	kali	251.000.000	6	151.500.000	2	50.000.000	2	38.568.000	100,00	77,14	8	190.068.000	80,00	75,72	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		10	kali	1.004.000.000	6	606.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	100,00	100,00	8	806.000.000	80,00	80,28	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		200	orang	3.173.346.525	120	1.963.547.750	40	633.402.500	40	444.398.670	100,00	70,16	160	2.407.946.420	80,00	75,88	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		52104	orang	18.460.887.40 ₂	31200	11.109.010.612	10400	3.690.701.200	10.400	3.538.890.200	100,00	95,89	41600	14.647.900.81 ₂	79,84	79,35	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		5	kali	301.640.000	2	217.934.900	1	75.410.000	0	3.409.000	40,00	4,52	2	221.343.900	48,00	73,38	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas		75	jenis Kegiatan	84.477.382.37 ₀	45	50.922.493.963	15	16.861.752.968	15	4.875.856.818	100,00	28,92	60	55.798.350.78 ₁	80,00	66,05	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		10	Layanan Kesehatan	3.281.848.380	6	1.967.535.000	2	655.845.000	2	460.851.541	75,00	70,27	8	2.428.386.541	75,00	73,99	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		25	puskes	3.491.736.570	15	1.995.278.040	5	712.599.300	0	514.507.700	- ,00	72,20	15	2.509.785.740	60,00	71,88	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi																	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1	SI	100.000.000	0	0	1	65.000.000	1	50.518.500	60,00	77,72	1	50.518.500	60,00	50,52	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		50		1.900.000.000	0	0	50	1.853.314.000	50	1.669.432.856	100,00	90,08	50	1.669.432.856	100,00	87,86	Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	orang	666.751.500	60	376.285.500	20	132.030.000	11	65.147.700	55,00	49,34	71	441.433.200	71,00	66,21	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		27	rekomendasi perijinan	251.301.200	14	150.180.000	5	50.060.000	5	50.056.000	100,00	99,99	19	200.236.000	70,37	79,68	Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		27	rekomendasi perijinan	490.679.398	14	293.234.700	5	97.744.900	5	36.676.280	100,00	37,52	19	329.910.980	70,37	67,24	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan/Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		27	rekomendasi perijinan	328.669.440	14	196.416.000	5	65.472.000	3	40.441.000	60,00	61,77	17	236.857.000	62,96	72,07	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
3	4															16	
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		20	kali	627.260.000	10	313.630.000	6	125.452.000	4	110.810.000	66,67	88,33	14	424.440.000	70,00	67,67	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		20	kali	948.025.000	10	474.012.500	6	189.605.000	6	170.004.500	100,00	89,66	16	644.017.000	80,00	67,93	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	1010	Orang	43.250.000.000	606	25.950.000.000	202	8.141.961.048	200	7.605.180.420	99,01	93,41	806	33.555.180.420	79,80	77,58	Rumah Sakit Umum Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	150	Jenis	100.000.000	12	27.885.550	30	25.779.500	30	25.774.950	100,00	99,98	42	53.660.500	28,00	53,66	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	255	Jenis	535.908.500	51	59.737.700	57	115.481.700	57	115.367.668	100,00	99,90	108	175.105.368	42,35	32,67	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Bahan da Perlengkapan Kebersihan Kantor	110	Jenis	664.750.000	22	398.850.000	22	132.950.000	22	130.305.150	100,00	98,01	44	529.155.150	40,00	79,60	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	140	Jenis	392.200.000	28	53.968.500	2	60.000.000	2	60.000.000	100,00	100,00	30,00	113.968.500	21,43	29,06	Rumah Sakit Umum Daerah
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	225	Jenis	1.646.102.500	45	300.345.000	3	329.220.500	3	306.597.143	100,00	93,13	48,00	606.942.143	21,33	36,87	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175	Kali	720.000.000	34	142.097.950	35	143.208.000	26	107.150.918	74,29	74,82	60	249.248.868	34,29	34,62	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya rekening listrik dan air	10	Rekening	1.950.000.000	3	349.497.485	2	419.500.000	2	408.340.679	85,31	97,34	4,71	757.838.164	47,06	38,86	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarkannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50	Unit	1.590.000.000	20	236.529.643	10	317.000.000	3	296.453.470	28,00	93,52	22,80	532.983.113	45,60	33,52	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terbayarnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15	Jenis	230.000.000	9	138.000.000	3	45.100.000	3	43.773.250	100,00	97,06	12,00	181.773.250	80,00	79,03	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terbayarkannya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15	Jenis	5.504.000.000	12	3.302.400.000	1	1.100.786.000	1	1.003.592.336	100,00	91,17	13	4.305.992.336	86,67	78,23	Rumah Sakit Umum Daerah
Pengadaan Obat, Vaksin	Terbayarkan obat dan vaksin	10	Jenis	2.025.000.000	6	1.215.000.000	2	386.355.141	2	381.856.595	83,00	98,84	7,66	1.596.856.595	76,60	78,86	Rumah Sakit Umum Daerah
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terbayarkan bahan habis pakai	30	Jenis	5.425.000.000	18	3.255.000.000	6	1.100.763.762	5	1.083.812.545	91,00	98,46	23,46	4.338.812.545	78,20	79,98	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terbayarkannya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20	Jenis	2.180.000.000	12	1.308.000.000	4	494.080.000	4	478.794.000	100,00	96,91	16	1.786.794.000	80,00	81,96	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terbayarkannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	20	yankes	858.109.790	-	-	20	858.109.790	20	841.893.598	100,00	98,11	20	841.893.598	100,00	98,11	Rumah Sakit Umum Daerah
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terbayarkannya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	15	Rekening	3.615.000.000	9	2.169.000.000	3	965.655.262	2	827.966.268	55,33	85,74	10,66	2.996.966.268	71,07	82,90	Rumah Sakit Umum Daerah
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terbayarkannya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	5	Dok	1.125.000.000	3	675.000.000	1	126.500.000	1	46.214.417	100,00	36,53	4,00	721.214.417	80,00	64,11	Rumah Sakit Umum Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota																	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terbayarkannya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	205	SDM	10.640.392.000	130	6.358.800.000	40	2.119.600.000	40	1.614.214.289	100,00	76,16	170,00	7.973.014.289	82,93	74,93	Rumah Sakit Umum Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA																	
PERENCANAAN,PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja																
Peyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokume Rencana OPD	2	Dok	35.000.000	0	0	1	31.507.500	1	31.507.500	100,00	100,00	1	31.507.500	50,00	90,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Data Pelaksanaan Kinerja	1	Dok	270.970.500			1	231.384.000	1	223.819.000	100,00	96,73	1	223.819.000	100,00	82,60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	340	Orang	30.332.245.625	204	18.211.480.273	68	6.066.449.125	68	5.972.858.683	100,00	98,46	272	24.184.338.956	80,00	79,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium pegawai Kontrak	1005	Orang	13.611.317.714	600	3.792.074.400	201	5.072.856.000	201	4.984.793.418	100,00	98,26	801	8.776.867.818	79,70	64,48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penerangan Bangunan Kantor	27	Jenis	64.436.488	12	28.114.394	5	10.040.855	5	10.037.700	100,00	99,97	17	38.152.094	62,96	59,21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Makan dan Minum																	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	155	Jenis		54		38		35		92,11		89		57,42		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Jumlah Bahan dan Peralatan kebersihan Kantor	130	Jenis	471.764.740	78	114.654.000	26	149.988.740	20	133.350.200	76,92	88,91	98	248.004.200	75,38	52,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Jumlah Makanan dan Minuman	60	kali		36		12		11		91,67		47		78,33		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	21	Jenis	203.992.750	12	133.074.500	7	44.992.750	7	42.849.500	100,00	95,24	19	175.924.000	90,48	86,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	19	Buku	75.930.000	9	29.600.000	7	20.000.000	5	15.000.000	71,43	75,00	14	44.600.000	73,68	58,74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi	75	Rapat	876.234.000	31	473.768.587	20	183.620.000	20	180.455.714	100,00	98,28	51	654.224.301	68,00	74,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terpenuhinya BMD Penunja																	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya Peralatan kantor (AC,PC,Printer)	30	Jenis	572.129.100	10	68.319.100	10	387.045.781	10	377.638.000	100,00	97,57	20	445.957.100	66,67	77,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening	15	Rekening	1.456.804.000	9	870.600.000	3	290.200.000	3	290.200.000	100,00	100,00	12	1.160.800.000	80,00	79,68	Dinas Pekerjaan Umum dan	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		16
																Penataan Ruang	
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	62	Unit	139.111.200	23	44.180.500	18	27.240.000	18	25.404.800	100,00	93,26	41	69.585.300	66,13	50,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Berat dan Kendaraan Dinas yang Dipelihara	50	Unit	1.061.613.300	21	416.209.275	13	434.976.300	13	348.214.650	100,00	80,05	34	764.423.925	68,00	72,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah perizinan Kendaraan	70	Unit		45		18		16		88,89						61
Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	26	Unit	194.850.000	15	119.995.000	5	24.850.000	5	21.195.000	100,00	85,29	20	141.190.000	76,92	72,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung yang Dipelihara	3	Unit	319.755.740	1	52.220.000	1	237.791.740	1	212.300.266	100,00	89,28	2	264.520.266	66,67	82,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi																
PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Air Baku Berbagai Keperluan dan Terlindunginya Kawasan dari Abrasi Pantai, Banjir dan Longsor																
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	Dok	394.459.940	0	0	2	392.103.940	2	360.832.040	100,00	92,02	2	360.832.040	100,00	91,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	Dok	382.919.940	0	0	2	379.833.660	2	353.968.740	100,00	93,19	2	353.968.740	100,00	92,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Pantai																	
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Cakupan Layanan Irigasi																
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi yang terbangun	200	Ha	6.783.272.896	0	0	171	6.781.712.783	171	5.047.549.935	100,00	74,43	171	5.047.549.935	85,50	74,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya jaringan irigasi	15	Paket	5.437.403.526	1	1.399.358.906	10	1.444.447.560	10	1.396.018.032	100,00	96,65	11	2.795.376.938	73,33	51,41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentasi Rumah Tinggal Berakses Air Minum																
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih bagi Masyarakat																
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR yang dilayani	2150	SR	9.550.446.880	1500	5.509.873.200	530	1.836.624.400	530	1.826.884.128	100,00	99,47	2030	7.336.757.328	94,42	76,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan SPAM Perpipaan Dikawasan Perkotaan	Jumlah baru SR yang dilayani	200	SR	6.283.294.800			200	6.251.582.300	200	5.691.381.801	100,00	91,04	200	5.691.381.801	100,00	90,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah UPTD PAM yang diberoperasi	50	UPT	13.008.917.894	30	8.130.573.684	10	2.710.191.228	10	2.492.969.016	100,00	91,98	40	10.623.542.700	80,00	81,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentasi Rumah Tangga Bersanitasi																
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
» Pembangunan/ Penyediaan Sitem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah MCK Yang Dibangun	628	unit	9.087.036.480	350	5.679.397.800	125	1.893.132.600	120	1.840.384.192	96,00	97,21	470	7.519.781.992	74,84	82,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																	
PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DIDERAH KAB/KOTA	Tersedianya bangunan gedung daerah siap pakai																
» Penataan Bangunan dan lingkungan	Tersedianya bangunan gedung negara (kantor camat pagai selatan) tersedianya dokumen izin mendirikan bangunan (IMB), tersedianyadokumen perencanaan kawasan perkantoran	10	gedung	10.397.428.700	6	5.321.217.805	3	2.459.190.000	3	2.086.822.282	100,00	84,86	9	7.408.040.087	90,00	71,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																	
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Prosentase Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten																
» Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	25	dok	4.790.820.152	15	70.503.500	5	850.834.940	5	743.114.340	100,00	87,34	20	813.617.840	80,00	16,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
» Pembangunan Jalan	Panjang jalan Yang Dibangun	91,11	km	114.310.155.116	61,0	44.013.649.619	30,5	70.434.356.841	30	59.560.941.113	98,36	84,56	91	103.574.590.732	99,88	90,61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
» Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Yang Mengalami Peningkatan/Rekonstruksi	41,15	km	99.762.871.397	18,5	18.908.584.010	8,9	49.959.189.501	8	43.846.981.617	89,89	87,77	26,5	62.755.565.627	64,40	62,90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
» Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang dipelihara	182,7	km	9.964.760.706	62	6.065.535.000	45	1.828.196.200	44	1.702.828.500	97,78	93,14	106	7.768.363.500	58,02	77,96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
» Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan Yang Dibangun	120	meter	3.884.735.000	84	3.000.000.000	10	8.275.000	10	8.270.000	100,00	99,94	94	3.008.270.000	78,33	77,44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
• Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan Yang Dipelihara	7080	meter	2.912.422.236	1200	1.598.907.708	350	532.969.236	340	516.460.000	97,14	96,90	1540	2.115.367.708	21,75	72,63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																	
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertanganinya kasus pelanggaran tataruang																
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi Penataan Ibu Kota Tuapejat/Green Smart City (Mentawai Boulevar)	2	dok	288.687.630			2	288.130.000	2	245.148.993	100,00	85,08	2	245.148.993	100,00	84,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5	Dokumen	150.000.000	3	90.000.000	1	15.000.000	1	14.956.000	100,00	99,71	4	104.956.000	80,00	69,97	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Dokumen	557.596.500	3	335.446.500	1	111.075.000	1	109.522.800	100,00	98,60	4	444.969.300	80,00	79,80	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	26	Jenis	64.548.180	12	6.000.000	6	9.992.180	6	7.103.780	100,00	71,09	18	13.103.780	69,23	20,30	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan Kantor	15	Unit	169.996.300	6	108.277.832	3	41.645.320	3	39.953.508	100,00	95,94	9	148.231.340	60,00	87,20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	325	Jenis	649.211.472	195	338.130.975	65	135.252.390	57	134.333.560	87,69	99,32	252	472.464.535	77,54	72,78	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	52000	Lembar	214.424.000	32000	122.528.000	10000	43.760.000	10000	43.743.390	100,00	99,96	42000	166.271.390	80,77	77,54	Dinas Perumahan dan Kawasan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
																Permukiman	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	59	Surat Kabar	79.448.000	28	13.658.000	8	18.400.000	7	18.400.000	87,50	100,00	35	32.058.000	59,32	40,35	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	76	Kali	349.954.000	35	210.035.200	14	65.636.000	12	64.775.100	85,71	98,69	47	274.810.300	62,17	78,53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Mebel	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	11	Kegiatan	220.176.362			5	120.176.362	5	120.053.200	100,00	99,90	5	120.053.200	45,45	54,53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terseainya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15	Rekening	385.923.426	9	238.200.000	3	95.280.000	2	95.047.500	80,00	99,76	11,4	333.247.500	76,00	86,35	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah																	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	10	Unit	249.052.240	6	153.797.200	2	49.612.000	2	45.292.430	100,00	91,29	8	199.089.630	80,00	79,94	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan jasa pemeliharaan, dan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	83	Unit	26.850.000	42	0	16	18.750.000	14	18.568.200	87,50	99,03	55,6	18.568.200	66,83	69,16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5	Unit	84.948.000	3	41.854.400	1	14.948.000	1	14.906.168	100,00	99,72	4	56.760.568	80,00	66,82	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																	
Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha																	
Perbaikan Rumah Tidak layak huni	Terlaksananya rumah layak huni	373	Unit	12.433.698.000	193	6.631.305.600	69	2.072.283.000	69	2.059.974.419	100,00	99,41	262,2	8.691.280.019	70,37	69,90	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																	
Penyediaan prasarana, dan sarana dan utilitas umum perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Tersedianya perencanaan PSU untuk Perumahan	6200	Meter	2.481.699.823	0	0	4967	1.378.722.124	4967	1.128.177.821	100,00	81,83	4967	1.128.177.821	80,11	45,46	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	149	orang	15.055.542.121	86,8	9.255.456.222	31	3.085.152.074	31	2.720.083.892	100,00	88,17	117,8	11.975.540.114	79,17	79,54	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan jasa administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya jasa administrasi keuangan dan honorarium tidak tetap	990	orang	24.105.897.600	606	13.057.361.200	202	5.022.062.000	200	4.328.494.736	99,01	86,19	806	17.385.855.936	81,43	72,12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	48	jenis	41.847.910	28	20.923.955	10	8.047.675	10	8.029.500	100,00	99,77	38	28.953.455	79,17	69,19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya isi ulang gas dan peralatan rumah tangga	23	jenis	65.000.000	0	-	23	63.704.828	22	50.999.000	95,65	80,06	22	50.999.000	95,65	78,46	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan bahan logistik Kantor	tersedianya atk,perabot kantor,Natura dan pakan natura dan makan minum rapat	320	jenis	428.816.648	200	257.805.600	70	85.935.200	59	84.500.200	84,29	98,33	259	342.305.800	80,94	79,83	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	48	jenis	93.015.240	25	49.863.840	8	19.178.400	8	16.933.400	100,00	88,29	33	66.797.240	68,75	71,81	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18	jenis	230.000.000	12	50.000.000	4	13.750.000	4	12.400.000	100,00	90,18	16	62.400.000	88,89	27,13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi lintas sektor	70	kali	343.441.000	36	224.288.000	15	70.090.000	15	70.025.500	100,00	99,91	51	294.313.500	72,86	85,70	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		16
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, internet, air dan telepon	4	rekening	0	0	-	4	39.000.000	4	4.848.988	100,00	12,43	4	4.848.988	100,00	#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	22	unit	1.179.164.000	12	769.020.000	4	256.340.000	4	213.569.860	100,00	83,32	16	982.589.860	72,73	83,33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terciptanya situasi atau kondisi suasana yang tenang dan tertib	48	kali	3.485.277.054	30	2.157.552.462	10	829.827.870	9	804.943.700	90,00	97,00	39	2.962.496.162	81,25	85,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kebakaran	14	kecamatan	44.000.000	0	-	14	40.291.700	11	34.883.000	78,57	86,58	11	34.883.000	78,57	79,28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4																	16
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya Honorarium PNS dan Pegawai Kontrak	308	Orang	3.744.384.000	136	1.466.215.836	64	780.080.000	64	747.674.700	100,00	95,85	200	2.213.890.536	64,94	59,13	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah																		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibutuhkan	50	Jenis	23.976.300	20	12.555.000	9	3.996.050	9	3.996.050	100,00	100,00	29	16.551.050	58,00	69,03	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah dan jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan, jumlah Pertemuan/ rapat yang diadakan	64	Bulan	323.274.640	24	186.504.600	15	62.168.200	14	60.355.528	93,33	97,08	38	246.860.128	59,38	76,36	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		172	jenis		82		33		33		40,24		115		67,02			
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang dibutuhkan	12	Jenis	76.104.000	8	40.568.000	2	12.684.000	2	12.684.000	90,00	100,00	10	53.252.000	81,67	69,97	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilakukan / Dihadiri	132	kali	551.289.600	48	253.183.206	27	114.852.000	27	114.430.700	100,00	99,63	75	367.613.906	56,82	66,68	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Yang Tersedia	21	Jenis	102.000.000	7	56.000.000	10	20.000.000	8	18.000.000	80,00	90,00	15	74.000.000	71,43	72,55	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																		
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (mobil, bodi boat)	3	unit	371.520.000	0	0	2	328.380.000	2	322.325.550	100,00	98,16	2	322.325.550	66,67	86,76	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar	15	Rekening	224.840.000	9	155.944.015	3	40.150.000	3	37.526.580	100,00	93,47	12	193.470.595	80,00	86,05	Dinas Sosial Pemberdayaan	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
																	Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor	85	Jenis	600.000.000	46	385.597.440	16	120.499.200	16	112.499.200	100,00	93,36	62	498.096.640	73,11	83,02	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																	
Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan, kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara dan layak jalan	65	Unit	166.400.000	30	95.250.000	17	31.750.000	17	27.052.900	100,00	85,21	47	122.302.900	72,31	73,50	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15	unit	583.000.000	6	277.236.495	2	198.889.000	2	158.200.000	100,00	79,54	8	435.436.495	53,33	74,69	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program pemberdayaan sosial																	
Kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)																	
Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Fasilitasi dalam pemetaan lokasi dan pembangunan rumah KAT	150	unit	395.000.000	133	153.925.500	5	69.970.000	5	69.621.700	100,00	99,50	138	223.547.200	92,00	56,59	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota																	
Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah PSKS keluarga yang dibina	276	KPM	379.943.200	159	124.707.750	53	73.066.000	49	62.432.651	92,45	85,45	208	187.140.401	75,47	49,25	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	Jumlah pengurus dan pengelola LK3 yang terbina	20	orang	50.000.000	0	0	12	29.520.000	12	28.281.700	100,00	95,81	12	28.281.700	60,00	56,56	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
																Anak	
Program rehabilitasi sosial																	
Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat																	
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar. Serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah peserta(lansia miskin potensial) yang mendapatkan bimbingan sosial	90	Orang	60.000.000	0	0	60	37.924.300	54	29.588.000	90,00	78,02	54	29.588.000	60,00	49,31	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberian layanan rujukan	Jumlah Anak Putus Sekolah Yang dirujuk ke PSBR	50	Orang	860.583.000	25	432.068.000	20	166.180.000	19	151.360.400	95,00	91,08	44	583.428.400	88,00	67,79	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program perlindungan dan jaminan sosial																	
Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota																	
Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah data masyarakat miskin yang valid	10	kali	759.954.000	6	529.122.086	2	146.145.000	2	121.983.758	100,00	83,47	8	651.105.844	80,00	85,68	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Penerima Bantuan Jaminan Sosial	2000	Orang	1.806.000.000	1200	688.315.500	400	430.000.000	398	365.000.000	99,50	84,88	1598	1.053.315.500	79,90	58,32	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Terlaksananya pemberian PKH	5607	KPM	347.000.000	513	90.427.750	5007	221.769.236	5007	199.378.675	100,00	89,90	5520	289.806.425	98,45	83,52	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Tersedianya penerangan kepada masyarakat miskin	361	KK	757.440.000	0	0	289	603.870.942	268	538.839.250	92,73	89,23	268	538.839.250	74,19	71,14	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Program penanganan bencana																	
Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota																	
Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani	1000	KK	124.479.000	200	35.300.000	594	30.701.000	594	30.108.800	100,00	98,07	794	65.408.800	79,40	52,55	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	125	Rekening	15.000.000.000	75	9.000.000.000	25	2.688.423.318	25	2.615.079.200	100,00	97,27	100	11.615.079.200	80,00	77,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak	460	Orang	7.500.000.000	276	4.500.000.000	92	1.488.134.000	92	1.472.977.195	100,00	98,98	368	5.972.977.195	80,00	79,64	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	50	Jenis	75.000.000	30	45.000.000	10	12.446.500	10	9.376.708	100,00	75,34	40	54.376.708	80,00	72,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum, Bahan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor	100	Jenis	750.000.000	60	450.000.000	20	77.361.800	20	72.387.037	100,00	93,57	80	522.387.037	80,00	69,65	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	50	Macam	100.000.000	30	60.000.000	10	17.005.800	10	16.722.177	100,00	98,33	40	76.722.177	80,00	76,72	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	25	Jenis	50.000.000	15	30.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	100,00	100,00	20	35.000.000	80,00	70,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar	75	Kali	1.000.000.000	45	600.000.000	15	104.560.000	15	104.464.044	100,00	99,91	60	704.464.044	80,00	70,45	Badan Penanggulangan Bencana

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
	daerah															Daerah	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarkannya rekening listrik, internet, dan ijin stasiun radio	15	Rekening	450.000.000	9	270.000.000	3	62.000.000	3	49.834.810	83,33	80,38	12	319.834.810	76,67	71,07	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		10	Unit	275.000.000	6	165.000.000	2	55.100.000	2	49.727.899	100,00	90,25	8	214.727.899	80,00	78,08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		50	Unit	1.050.000.000	30	165.000.000	10	185.541.600	8	145.644.975	82,00	78,50	38	310.644.975	76,40	29,59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		50	Unit	250.000.000	30	165.000.000	10	14.410.000	13	12.221.000	132,00	84,81	43	177.221.000	86,40	70,89	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		4	dokumen	250.000.000	2	150.000.000	1	22.958.200	1	22.291.000	100,00	97,09	3	172.291.000	75,00	68,92	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terhadap Bencana																	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		75	kejadian	1.750.000.000	45	1.050.000.000	15	148.694.000	10	140.377.450	66,67	94,41	55	1.190.377.450	73,33	68,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		3	kejadian	500.000.000	1	250.000.000	1	181.858.000	1	166.802.500	100,00	91,72	2	416.802.500	66,67	83,36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		2	kali	2.200.000.000	1	0	1	2.201.821.870	1	1.813.910.469	100,00	82,38	2	1.813.910.469	100,00	82,45	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		16	jenis	6.250.000.000	8	2.500.000.000	7	2.596.868.554	6	2.523.041.335	85,71	97,16	14	5.023.041.335	87,50	80,37	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran																	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		14	kecamatan	600.000.000		0	10	520.119.454	9	450.357.300	90,00	86,59	9	450.357.300	64,29	75,06	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja																
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan																
Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	6	pelatihan	450.450.000	0	0	3	280.870.500	3	275.083.500	100,00	97,94	3	275.083.500	50,00	61,07	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan struktur serta sarana dan prasarana	Tersediannya struktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	10	kali	130.000.000	0	0	5	68.437.600	5	62.245.150	100,00	90,95	5	62.245.150	50,00	47,88	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
lembaga pelatihan kerja																Pintu	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan																	
Kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota																	
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan PUG	10	Kali	45.000.000	0	0	2	14.579.000	2	14.114.300	100,00	96,81	2	14.114.300	20,00	31,37	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG dan termasuk PPRG	72	OPD	50.000.000	0	0	36	30.760.970	36	30.328.300	100,00	98,59	36	30.328.300	50,00	60,66	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk nPPRG	Terlaksananya sosialisasi PUG termasuk PPRG di OPD terkait	3	Kali	50.000.000	0	0	1	30.304.000	1	25.760.000	100,00	85,01	1	25.760.000	33,33	51,52	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial,dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota																	
Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi perempuan yang difasilitasi	49	Organisasi	3.709.676.000	30	1.011.190.474	4	572.974.700	4	572.690.000	100,00	99,95	34	1.583.880.474	69,39	42,70	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)																	
Kegiatan pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota																	
Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga	Jumlah advokasi dan pendampingan pemenuhan hak anak	2	kali	50.000.000	0	0	1	22.194.600	1	21.529.300	100,00	97,00	1	21.529.300	50,00	43,06	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	dilaksanakan																dan Perlindungan Anak
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah rakor gugus tugas KLA	7	kali	109.450.000	4	37.452.500	1	16.345.000	1	14.954.700	100,00	91,49	5	52.407.200	71,43	47,88	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota																	
Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pertemuan forum anak	3	Kali	282.225.500	0	0	1	112.544.800	1	110.600.000	100,00	98,27	1	110.600.000	33,33	39,19	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program perlindungan khusus anak																	
Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota																	
Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan	18	Kasus	650.000.000	6	294.933.000	4	111.330.000	4	105.644.200	100,00	94,89	10	400.577.200	55,56	61,63	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota																	
Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan unit layanan pengaduan masyarakat bagi anak	2	UPTD	42.000.000	0	0	1	34.845.652	1	31.179.407	100,00	89,48	1	31.179.407	50,00	74,24	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan yang dilatih (P2TP2A)	1	Lembaga	165.000.000	0	0	1	161.870.400	1	160.375.500	100,00	99,08	1	160.375.500	100,00	97,20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Cadangan Pangan Utama																
PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya jumlah stok pasikan dan harga pangan yang dipantau																
Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Meningkatnya jumlah stok pasikan dan harga pangan yang dipantau	7	lokasi	525.047.100	0	-	7	525.047.100	7	492.812.100	100,00	93,86	7	492.812.100	100,00	93,86	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												0,00	0				
Administrasi Umum Perangkat Daerah												0,00	0				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen listrik yang dibutuhkan	36	Jenis	12.742.080	21	8.494.720	7	2.654.600	7	2.654.600	100,00	100,00	28	11.149.320	77,78	87,50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di butuhkan	30	Jenis	205.695.000	13	66.089.000	13	49.059.880	13	49.042.380	100,00	99,96	26	115.131.380	86,67	55,97	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan	65	Jenis		21		21		21		100,00		42		64,62		
	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, peserta rapat dan tamu	12	Bulan		12		12		12		100,00		24		200,00		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan/surat kabar yang dibutuhkan	16	Jenis	56.800.000	6	16.050.000	4	16.800.000	4	16.700.000	100,00	99,40	10	32.750.000	62,50	57,66	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan/surat kabar yang dibutuhkan	60	Kali	300.000.000	32	93.703.852	12	118.332.000	11	90.789.006	91,67	76,72	43	184.492.858	71,67	61,50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan listrik yang dibayarkan	3	Rekening	50.000.000	1	14.670.839	1	18.000.000	1	16.166.968	100,00	89,82	2	30.837.807	66,67	61,68	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Jumlah	321	Orang	3.424.081.110	183	1.250.820.200	73	1.218.139.600	73	1.107.486.493	100,00	90,92	256	2.358.306.693	79,55	68,87	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Jenis Peralatan Kebersihan yang di Butuhkan	30	Jenis		14		8		8		100,00		22		73,33		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	50	kali/unit	113.539.900	17	42.117.545	17	18.480.000	17	15.657.000	100,00	84,72	34	57.774.545	68,00	50,88	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas yang di pelihara	55	Unit	150.000.000	17	10.796.550	17	73.600.000	17	73.185.000	100,00	99,44	34	83.981.550	61,82	55,99	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5	Unit	109.627.500	1	42.299.340	2	7.800.000	2	7.800.000	100,00	100,00	3	50.099.340	60,00	55,99	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																	
Koordinasi Sinsronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air Udara dan Laut	Terlaksananya koordinasi penghentian sumber pencemaran	8	Dokumen	105.000.000	0	-	5	60.153.000	4	55.241.000	80,00	91,83	4	55.241.000	50,00	52,61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		16
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																	
Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																	
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Terlaksananya Pengelolaan Keekaragaman Hayati	12	Dokumen	1.500.000.000	1	482.748.342	8	714.766.000	7	643.519.778	87,50	90,03	8	1.126.268.120	66,67	75,08	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda	200	Objek	200.000.000	159	58.203.600	106	46.510.000	106	41.870.000	100,00	90,02	265	100.073.600	132,50	50,04	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH																	
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH																	
Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan ham MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	12	Dokumen	220.000.000	4	183.277.780	5	15.401.900	5	12.435.800	100,00	80,74	9	195.713.580	75,00	88,96	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																	
Pengelolaan Sampah																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana dan sarana persampahan yang tersedia	62	ton/hari	459.000.000	49	199.358.772	8	244.772.500	8	242.704.000	100,00	99,15	57	442.062.772	92,39	96,31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	42	Unit	659.807.901	4	580.448.136	8	5.640.000	8	5.010.000	100,00	88,83	12	585.458.136	28,57	88,73	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil																	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota																	
administrasi keuangan perangkat daerah																	
administrasi umum perangkat daerah																	
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya komponen listrik atau sarana penerangan	12	Jenis	37.750.000	2	17.750.000	7	8.235.000	6	7.235.000	85,71	87,86	8	24.985.000	66,67	66,19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	5	unit	150.000.000			2	111.100.000	2	104.940.000	100,00	94,46	2	104.940.000	40,00	69,96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
penyediaan bahan logistik kantor	terlaksananya atk dan makan minum pegawai	18	jenis	350.000.000	10	225.000.000	4	94.645.700	4	91.644.200	100,00	96,83	14	316.644.200	77,78	90,47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya cetak dan penggandaan	14	Jenis	86.900.000	8	46.900.000	2	14.900.000	2	14.830.000	100,00	99,53	10	61.730.000	71,43	71,04	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	7	Jenis	29.600.000	2	9.600.000	2	12.000.000	2	12.000.000	100,00	100,00	4	21.600.000	57,14	72,97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi skpd	terlaksananya rapat koordinasi antar skpd	32	kali	285.960.000	12	185.960.000	10	66.060.000	8	59.137.400	80,00	89,52	20	245.097.400	62,50	85,71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																	
penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening air dan listrik	8	Jenis	217.600.000	3	123.600.000	2	37.200.000	2	32.562.972	100,00	87,53	5	156.162.972	62,50	71,77	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
penyediaan jasa pelayanan umum kantor	terlaksananya alat kebersihan kantor	40	Jenis	63.829.000	12	43.829.000	17	11.913.600	16	10.913.800	94,12	91,61	28	54.742.800	70,00	85,76	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah																	
penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	16	unit	164.900.000	7	51.600.000	6	48.260.000	6	45.718.500	100,00	94,73	13	97.318.500	81,25	59,02	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
pemeliharaan /rehabilitasigedung kantor dan bangunan lainnya	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1	unit	109.854.000			1	107.700.000	1	106.455.544	100,00	98,84	1	106.455.544	100,00	96,91	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk																	
pelayanan pendaftaran penduduk																	
peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	6	Jenis	1.344.181.250	2	354.181.250	2	439.032.700	2	429.157.500	100,00	97,75	4	783.338.750	66,67	58,28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
penataan pendaftaran penduduk																	
pengadaan dokumen kependudukan selain blangko ktp el formulir buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	tersedianya dokumen kependudukan	8	jenis	400.000.000	3	175.000.000	3	192.900.000	3	173.925.000	100,00	90,16	6	348.925.000	75,00	87,23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil																	
Pelayanan Pencatatan Sipil																	
peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	20	jenis	2.100.000.000	7	502.281.250	7	629.569.700	7	575.783.740	100,00	91,46	14	1.078.064.990	70,00	51,34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
																	Sipil
Penyelenggaraan pencatatan sipil																	
komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil	tersedianya komunikasi dan informasi kepada masyarakat	5	jenis	650.000.000	1	20.000.000	2	465.470.800	2	383.247.200	100,00	82,34	3	403.247.200	60,00	62,04	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/kabupaten																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	48	bln	13.397.034.367	36	9.396.101.245	12	3.490.215.674	12	3.296.769.268	100,00	94,46	48	12.692.870.513	100,00	94,74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Terbayarnya honorarium PNS dan Pegawai Kontrak	48	bln	6.518.404.000	36	4.418.790.363	12	1.832.011.000	12	1.796.656.768	100,00	98,07	48	6.215.447.131	100,00	95,35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan logistik kantor	48	bln	249.211.800	36	183.602.580	12	64.997.900	12	59.893.000	100,00	92,15	48	243.495.580	100,00	97,71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	50	bln	91.560.500	36	57.862.300	12	22.999.900	12	16.629.800	100,00	72,30	48	74.492.100	96,00	81,36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
Penyediaan bacaan peraturan dan PerUndang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan per-Undang-undangan	26	bln	17.500.000	12	12.000.000	12	5.500.000	11	4.800.000	91,67	87,27	23	16.800.000	88,46	96,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan rapat rapat koordinasi	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	48	bln	655.978.000	36	504.210.362	12	50.078.000	12	46.463.800	100,00	92,78	48	550.674.162	100,00	83,95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa Listrik dan Internet	50	bln	192.000.000	36	112.094.468	12	26.400.000	10	24.480.811	83,33	92,73	46	136.575.279	92,00	71,13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	48	bln	127.243.500	36	93.905.000	12	24.990.500	12	23.039.400	100,00	92,19	48	116.944.400	100,00	91,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																	
Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional yang Layak Pakai	44	unit	109.170.000	33	69.047.800	4	15.000.000	4	13.000.000	100,00	86,67	37	82.047.800	84,09	75,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Administrasi Pemerintahan Desa																	
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya Perencanaan Pembangunan Desa	2	kali	90.314.000	0	-	2	86.314.000	2	72.640.000	100,00	84,16	2	72.640.000	100,00	80,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa	3	kali	113.599.800	0	-	3	113.599.800	2	96.839.958	66,67	85,25	2	96.839.958	66,67	85,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	15	kali	599.846.400	0	-	15	599.846.400	15	535.544.000	100,00	89,28	15	535.544.000	100,00	89,28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat																	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah, serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten																	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya kegiatan PKK	38	kali	3.015.449.000	32	2.216.417.031	6	465.375.200	5	414.345.400	83,33	89,03	37	2.630.762.431	97,37	87,24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
Program Pembinaan Keluarga Berencana																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terbayarnya honorarium PPKBD dan Sub PPKBD	30	bln	1.133.500.000		12	299.225.000	12	765.600.000	11	680.038.200	91,67	88,82	23	979.263.200	76,67	86,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																		
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Terbayarnya honorarium Kader	15	balai	306.400.000		0	-	10	216.719.848	9	201.719.848	90,00	93,08	9	201.719.848	60,00	65,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk PKB/PLKB	Tersedianya Layanan KB di Balai KB	14	balai	705.913.830		0	-	10	636.133.830	9	577.710.000	90,00	90,82	9	577.710.000	64,29	81,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten																		
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terdistribusikannya Alokasi Disetiap Balai KB	25	kali	97.070.000		9	35.600.000	10	18.030.000	9	17.600.000	90,00	97,62	18	53.200.000	72,00	54,81	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	4	jenis	815.094.400		1	357.564.500	3	318.973.920	3	297.544.270	100,00	93,28	4	655.108.770	100,00	80,37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
																Berencana	
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Terfasilitasinya Pelatihan Tenaga Pelayanan KB	3	kali	182.209.900	0	-	3	170.265.900	3	142.623.400	100,00	83,77	3	142.623.400	100,00	78,27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB pasca Persalinan dan Keguguran	12	bln	6.550.000	0	-	12	5.775.000	12	5.500.000	100,00	95,24	12	5.500.000	100,00	83,97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																	
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terbinanya Kampung KB secara Terpadu	22	kali	1.507.040.000	7	324.942.000	12	532.391.900	10	438.123.400	83,33	82,29	17	763.065.400	77,27	50,63	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	Dok	12.000.000	0	-	2	11.365.000	2	11.024.600	100,00	97,00	2	11.024.600	100,00	91,87	Dinas Perhubungan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan																
Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium dan Vakasi Non PNS	157	Peg	3.600.000.000	0	-	157	3.098.026.000	157	2.753.479.000	100,00	88,88	157	2.753.479.000	100,00	76,49	Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang yang disediakan																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85	Jenis	16.000.000	36	5.963.300	36	3.489.000	36	3.364.888	100,00	96,44	72	9.328.188	84,71	58,30	Dinas Perhubungan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15	Jenis	160.000.000	5	-	5	98.909.408	5	87.558.000	100,00	88,52	10	87.558.000	66,67	54,72	Dinas Perhubungan
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	Unit	16.000.000			5	14.300.000	5	12.600.000	100,00	88,11	5	12.600.000	62,50	78,75	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	80	Jenis	115.000.000	45	23.197.950	15	53.373.800	13	52.835.360	86,67	98,99	58	76.033.310	72,50	66,12	Dinas Perhubungan
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	36		65.800.000	12	28.900.000	12	29.160.000	10	26.396.202	83,33	90,52	22	55.296.202	61,11	84,04	Dinas Perhubungan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	65	Jenis	60.000.000	28	23.197.950	28	20.600.000	23	17.349.792	82,14	84,22	51	40.547.742	78,46	67,58	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	14	Jenis	35.000.000	5	12.000.000	5	12.000.000	4	11.700.000	80,00	97,50	9	23.700.000	64,29	67,71	Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah	45	Kali	500.000.000	19	249.140.000	27	167.970.000	25	167.606.098	92,59	99,78	44	416.746.098	97,78	83,35	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Listrik	20	Jenis	430.000.000	8	192.000.000	8	162.000.000	7	158.682.051	87,50	97,95	15	350.682.051	75,00	81,55	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor Terpelihara Peralatan Kerja	20	Jenis	45.000.000	8	5.000.000	8	20.925.000	8	20.520.500	100,00	98,07	16	25.520.500	80,00	56,71	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpentuhnya Jasa Administrasi Umum																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	32	Unit	151.000.000	12	62.150.000	12	49.995.000	11	36.744.700	91,67	73,50	23	98.894.700	71,88	65,49	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	Jumlah angkutan untuk jasa angkutan orang dan/atau barang																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	antar kota dalam 1 (satu) 3 unit daerah kabupaten/kota																
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) 3 unit daerah kabupaten/kota	3	Unit	620.000.000	0	8.996.000	3	588.522.000	3	541.210.997	100,00	91,96	3	550.206.997	100,00	88,74	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	TERJAGANYA DAN TERKENDALINYA KEAMANAN LALU LINTAS DARAT																
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota																
Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	10	Kali	285.000.000	0	-	10	280.641.600	8	241.241.188	80,00	85,96	8	241.241.188	80,00	84,65	Dinas Perhubungan
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasional Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota																
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasional Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	9	Kapal	12.350.000.000	0	192.910.000	6	9.709.839.075	6	8.220.283.648	100,00	84,66	6	8.413.193.648	66,67	68,12	Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal																
Koordinasi dan Sinronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	20	Kali	60.000.000	0	-	10	34.500.000	10	33.372.000	100,00	96,73	10	33.372.000	50,00	55,62	Dinas Perhubungan
Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																
Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	40	Orang	150.000.000	0	-	5	52.547.000	4	51.129.000	80,00	97,30	4	51.129.000	10,00	34,09	Dinas Perhubungan
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	2	Lokasi	80.000.000	0	-	1	63.174.800	1	56.738.800	100,00	89,81	1	56.738.800	50,00	70,92	Dinas Perhubungan
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	5	Lokasi	52.000.000	0	-	5	39.775.000	0	-	- ,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Dinas Perhubungan
Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau																
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Tambatan Perahu yang dibangun	10	Unit	4.210.000.000	2	585.628.000	5	2.505.980.386	5	2.358.054.290	100,00	94,10	7	2.943.682.290	70,00	69,92	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah																
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	60	Jenis	75.000.000	12	34.597.400	12	13.065.500	12	12.563.500	100,00	96,16	24	47.160.900	40,00	62,88	Dinas Komunikasi dan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
	bangunan kantor																Informatika
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	285	Jenis	355.645.000	57	74.280.500	35	76.327.600	35	75.797.600	100,00	99,31	92	150.078.100	32,28	42,20	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengandaan	55	Buah	51.054.750	24	23.361.000	14	9.020.500	14	8.165.000	100,00	90,52	38	31.526.000	69,09	61,75	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	Media/ Surat kabar	80.000.000	6	32.800.000	2	15.000.000	2	12.000.000	100,00	80,00	8	44.800.000	66,67	56,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	45	Kali	900.000.000	25	504.852.000	15	168.284.000	15	154.754.556	100,00	91,96	40	659.606.556	88,89	73,29	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemngadaan Barang Milik Daerah																
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan	20	Set	230.000.000	8	109.188.400	4	26.958.300	3	24.729.300	75,00	91,73	11	133.917.700	55,00	58,23	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya rekening listrik,internet	14	Rekening	1.041.600.000	6	694.400.000	4	217.000.000	4	201.081.129	100,00	92,66	10	895.481.129	71,43	85,97	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alat Pelayanan Umum	100	Jenis	125.000.000	33	64.668.000	30	24.999.000	30	24.999.000	100,00	100,00	63	89.667.000	63,00	71,73	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah																
Peyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Operasional kantor Sebanyak 1 unit kendaraan roda 4 dan roda 2	5	Unit	250.000.000	3	150.288.000	1	46.320.000	1	43.785.895	100,00	94,53	4	194.073.895	80,00	77,63	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara	5	Unit	510.000.000	3	259.797.000	1	190.110.000	1	189.690.000	100,00	99,78	4	449.487.000	80,00	88,13	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Media Informasi																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fungsi pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemeintah Daerah																
Pengelolaan Media komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Yang Dikelola	6	Media	660.000.000	3	440.444.900	1	93.019.574	1	88.773.300	100,00	95,44	4	529.218.200	66,67	80,18	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Yang Tersedia	3	Jenis	25.000.000	0	-	1	9.117.500	1	9.117.500	100,00	100,00	1	9.117.500	33,33	36,47	Dinas Komunikasi dan Informatika
Layanan Hubungan Media	Jumlah Kerjasama Kemitraan Dengan Media Komunikasi Publik Non Pemerintah	3	Media masa	15.000.000	0	-	1	7.591.000	1	7.568.500	100,00	99,70	1	7.568.500	33,33	50,46	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Juknis Layanan Informasi Publik Yang Ditetapkan	5	Dok	55.000.000	1	31.038.800	1	8.280.500	1	8.223.000	100,00	99,31	2	39.261.800	40,00	71,39	Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Forum KIM	4	Kali	40.000.000	0	-	1	10.666.000	1	9.992.500	100,00	93,69	1	9.992.500	25,00	24,98	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPBE																
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain Yang Dikelola																
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem Jaringan Internet Satu Pintu	125	OPD	10.500.000.000	78	6.289.926.279	26	2.754.461.540	26	2.655.270.477	100,00	96,40	104	8.945.196.756	83,33	85,19	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tata Kelola E-Government																
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan BTS dan Akses Internet Daerah	120	Kali	3.704.733.600	78	2.161.094.600	30	771.819.500	30	683.467.900	100,00	88,55	108	2.844.562.500	90,00	76,78	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECHL, DAN MENENGAH																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	unit	137.640.800	0	-	2	137.640.800	2	131.580.000	100,00	95,60	2	131.580.000	100,00	95,60	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya Pelayanan Umum Kantor	62	jenis	121.164.000	45	79.020.000	15	26.340.000	15	25.409.000	100,00	96,47	60	104.429.000	96,77	86,19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian																	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopmpetensi SDM Koperasi	Terlaksananya pelatihan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	5	kali	2.060.805.600	2	1.202.136.600	1	429.334.500	1	373.384.720	100,00	86,97	3	1.575.521.320	60,00	76,45	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya gaji pegawai kontrak dan honor pegawai ASN	46	orang	2.441.812.800	24	1.395.321.600	12	581.384.000	12	572.100.000	100,00	98,40	36	1.967.421.600	78,26	80,57	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen listrik	48	jenis	42.190.720	27	25.963.520	9	8.113.600	9	6.882.250	100,00	84,82	36	32.845.770	75,00	77,85	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Bahan logistik kantor	Terlaksananya atk dan makan minum pegawai	90	jenis	428.300.160	60	231.995.920	30	89.229.200	30	77.181.800	100,00	86,50	90	309.177.720	100,00	72,19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya cetak dan penggandaan	60	jenis	167.475.168	36	93.041.760	13	33.229.200	12	32.016.300	92,31	96,35	48	125.058.060	80,00	74,67	Dinas Koperasi Usaha Kecil

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
																	dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	63	kali	355.471.200	43	236.980.800	16	84.636.000	14	74.636.000	87,50	88,18	57	311.616.800	90,48	87,66	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik dan air	10	jenis	319.680.000	6	202.464.000	2	66.600.000	2	54.648.908	100,00	82,06	8	257.112.908	80,00	80,43	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan	10	jenis	52.100.000	8	52.100.000	3	52.100.000	3	46.640.000	93,33	89,52	11	98.740.000	108,00	189,52	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Rata-rata pengurusan izin investasi																
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan																
Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan kemasyarakatan secara elektronik	4	Kecamatan	77.000.000			2	66.925.000	2	66.610.400	100,00	99,53	2	66.610.400	50,00	86,51	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	105	Org	12.927.500.000	60	6.480.749.214	20	2.341.786.920	20	2.253.634.171	100,00	96,24	80	8.734.383.385	76,19	67,56	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Terbayarnya honorarium aparatur DPMPITSP (honor PNS dan Pegawai Kontrak)	231	orang	3.750.000.000	137	1.738.027.541	47	636.468.000	46	605.294.955	97,87	95,10	183	2.343.322.496	79,22	62,49	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum																
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	51	jenis	64.908.000	16	27.964.720	8	9.987.400	8	9.970.750	100,00	99,83	24	37.935.470	47,06	58,44	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	63	jenis	169.943.700	28	70.057.950	13	17.989.000	13	17.979.000	100,00	99,94	41	88.036.950	65,08	51,80	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya ATK dan makanan dan minuman	200	jenis	527.524.000	132	298.218.545	45	93.054.900	45	92.517.200	100,00	99,42	177	390.735.745	88,50	74,07	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		225	org		135		46		43		93,48	178					79,11
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30	jenis	37.500.000	18	16.275.000	6	5.425.000	5	4.800.000	83,33	88,48	23	21.075.000	76,67	56,20	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40	kali	1.250.000.000	21	506.633.264	7	138.596.000	6	135.141.300	85,71	97,51	27	641.774.564	67,50	51,34	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda																
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik, Air dan Internet	15	rekening	885.118.700	9	652.018.710	3	101.550.000	3	79.860.473	100,00	78,64	12	731.879.183	80,00	82,69	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor	175	jenis	225.000.000	86	135.621.100	31	38.543.500	31	38.518.500	100,00	99,94	117	174.139.600	66,86	77,40	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	60	unit	350.000.000	33	156.847.053	10	57.200.000	10	50.415.118	100,00	88,14	43	207.262.171	71,67	59,22	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	62	jenis	75.000.000	14	29.430.900	20	14.200.000	20	13.439.818	100,00	94,65	34	42.870.718	54,84	57,16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan/Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	4	paket	563.052.035	2	493.037.404	1	11.500.000	1	11.200.000	100,00	97,39	3	504.237.404	75,00	89,55	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	Perengkapan Kantor yang dipelihara	75	thn	90.000.000	36	35.939.900	15	9.150.000	15	9.150.000	100,00	100,00	51	45.089.900	68,00	50,10	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet																Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetesi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan atlet	36	organisasi	40.830.000			17	28.166.000	16	28.166.000	94,12	100,00	16	28.166.000	44,44	68,98	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Terbentuknya Kapasitas SDM Pemuda dan Organisasi Kepemudaan																
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									0								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Terbentuknya Kapasitas SDM Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	7	organisasi	58.260.000			7	44.320.000	7	44.320.000	100,00	100,00	7	44.320.000	100,00	76,07	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN																	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								150.000.000									
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terbinanya SDM, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5	dokumen	500.000.000	3	295.985.000	1	150.000.000	1	150.000.000	100,00	100,00	4	445.985.000	80,00	89,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								407.630.148									
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terbentuknya tim ahli cagar budaya tingkat kabupaten	3	jenis	500.000.000	0	-	3	407.630.148	3	407.630.148	100,00	100,00	3	407.630.148	100,00	81,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								101.266.000									
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terbinanya SDM, Lembaga, dan Pranata Tradisional	24	Orang	206.582.640	-		10	101.266.000	10	101.266.000	100,00	100,00	10	101.266.000	41,67	49,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								54.368.240									

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							54.368.240											
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya kesenian tradisional	58	SDM kesenian	97.862.832	-	40	54.368.240	40	54.368.240	100,00	100,00	40	54.368.240	68,97	55,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							177.090.000											
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							177.090.000											
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya sarana dan prasarana pembinaan sejarah	3	Jenis	460.434.000	-	1	177.090.000	1	177.090.000	100,00	100,00	1	177.090.000	33,33	38,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																	
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Terkelolanya Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan	115	Orang	13.498.862.640		67	7.559.363.078	24	2.699.772.528	24	2.699.772.528	100,00	100,00	91	10.259.135.606	79,17	76,00	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	240	Orang	3.413.710.450		127	662.271.000	49	628.644.000	49	628.644.000	100,00	100,00	176	1.290.915.000	73,47	37,82	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tersediannya Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Kebutuhan Komponen instalasi listrik Kantor	72	Item	81.531.000		36	34.267.500	12	7.378.550	12	7.378.550	100,00	100,00	48	41.646.050	66,67	51,08	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor	138	item	245.649.100		60	133.066.416	28	47.523.720	28	47.028.600	100,00	98,96	88	180.095.016	64	73,31	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
	Tersediannya makanan dan minuman rapat, harian pegawai dan tamu	69	kali		45	15		15		100,00		60				86,96		Dinas Kearsipam dan Perpustakaan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan Penggandaan	56	Item	89.639.000	27	49.785.000	9	16.055.700	9	16.055.700	100,00	100,00	36	65.840.700	64	73,45	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan	
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72	kali	1.128.850.000	12	521.086.800	36	200.418.000	36	167.448.650	100,00	83,55	48	688.535.450	67	60,99	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersediannya layanan administrasi umum																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	Rekening	64.800.000	6	30.240.000	2	10.800.000	2	9.478.395	100,00	87,76	8	39.718.395	67	61,29	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan	
Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	65	item	25.000.000	30	9.200.000	12	6.896.500	12	6.491.300	100,00	94,12	42	15.691.300	65	62,77	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan	
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersediannya layanan administrasi umum																	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya pemeliharaan mobil jabatan	6	Unit	200.000.000	3	93.620.800	1	36.008.000	1	34.520.250	100,00	95,87	4	128.141.050	67	64,07	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	11	Unit	100.000.000	0	0	9	43.000.000	9	38.291.150	100,00	89,05	9	38.291.150	82	38,29	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan dan peralatan kerja	28	Unit	78.000.000	12	56.600.000	6	14.150.000	6	13.690.000	100,00	96,75	18	70.290.000	64	90,12	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersediannya pemeliharaan gedung kantor	10	Unit	25.000.000	0	-	10	19.999.980	10	18.900.000	100,00	94,50	10	18.900.000	100	75,60	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun																	
PENGLOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase terkelolanya perpustakaan tingkat daerah																	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan inovasi dan fasilitasi didalam pengembangan	10	Unit	110.000.000	0	0	5	54.355.000	5	45.735.000	100,00	84,14	5	45.735.000	50	41,58	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
	perpustakaan daerah																
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku																
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten																
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terlaksananya pembinaan / penataan serta pengawasan tata kelola kearsipan pada OPD/Desa	15	SKPD	804.540.900	2	104.238.500	3	56.346.000	3	56.191.000	100,00	99,72	5	160.429.500	33	19,94	Dinas Kearsipam dan Perpustakaan
Urusan Pilihan																	
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah																
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	5	dokumen	995.500.000	3	137.702.000	1	213.550.000	1	210.546.000	100,00	98,59	4	348.248.000	80,00	34,98	Dinas Perikanan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	69	ASN	20.900.000.000	43	10.002.966.748	14	3.782.928.115	14	3.718.859.559	100,00	98,31	57	13.721.826.307	82,61	65,65	Dinas Perikanan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Kegiatan dan Tenaga Kontrak	60	Pengelola Kegiatan	12.100.000.000	36	4.129.953.994	12	1.506.616.000	12	1.384.603.826	100,00	91,90	48	5.514.557.820	80,00	45,57	Dinas Perikanan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Operasional Perkantoran																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat Listrik	15	Jenis	45.750.000	9	17.500.000	3	10.477.500	3	10.213.500	100,00	97,48	12	27.713.500	80,00	60,58	Dinas Perikanan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	5	Jenis	13.750.000			5	5.100.000	5	5.100.000	100,00	100,00	5	5.100.000	100,00	37,09	Dinas Perikanan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Kebersihan, ATK dan Makan Minum Kantor	189	Jenis	1.593.601.000	119	491.878.467	25	150.230.750	25	149.462.850	100,00	99,49	144	641.341.317	76,19	40,24	Dinas Perikanan
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya baran cetak dan pengadaan	40	Jenis	263.000.000	16	65.737.900	8	45.400.000	8	45.360.000	100,00	99,91	24	111.097.900	60,00	42,24	Dinas Perikanan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	60	buku	218.800.000	36	112.483.000	12	30.000.000	12	27.900.000	100,00	93,00	48	140.383.000	80,00	64,16	Dinas Perikanan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan atau dihadiri	192	kali	1.685.000.000	88	785.789.041	40	232.896.000	40	231.199.388	100,00	99,27	128	1.016.988.429	66,67	60,36	Dinas Perikanan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Lancarannya Pelayanan urusan penunjang Pemerintah daerah																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik dan air	15	rekening	1.698.145.000	9	975.309.060	3	350.500.000	3	342.318.716	100,00	97,67	12	1.317.627.776	80,00	77,59	Dinas Perikanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	75	unit	860.800.000	44	313.255.021	17	151.652.000	17	141.210.000	100,00	93,11	61	454.465.021	81,82	52,80	Dinas Perikanan
Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terpelihara	9	unit	955.000.000	5	500.020.000	2	200.008.000	2	199.516.954	100,00	99,75	7	699.536.954	77,78	73,25	Dinas Perikanan
Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	175		261.000.000	70	175.659.000	35	54.400.000	35	44.608.200	100,00	82,00	105	220.267.200	60,00	84,39	Dinas Perikanan
Pengolahan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap																
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota																	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelompok Nelayan	65	Kelompok nelayan	14.501.682.000	34		13	12.753.458.093	13	12.176.377.600	100,00	95,48	47	12.176.377.600	72,00	83,97	Dinas Perikanan
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																	
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Sarana /Prasarana TPI yang dibangun	5	unit	1.283.053.000	3		1	370.032.128	1	330.875.334	100,00	89,42	4	330.875.334	80,00	25,79	Dinas Perikanan
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya																
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sarana Pendukung Untuk Pembenihan dan Budidaya	66	paket	832.000.000	32		10	324.565.980	9	315.780.300	90,00	97,29	41	315.780.300	62,12	37,95	Dinas Perikanan
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Operasional BBIP	24500	Benih	2.645.450.000	13000	1.410.299.591	5000	682.402.933	4500	653.945.877	90,00	95,83	17500	2.064.245.468	71,43	78,03	Dinas Perikanan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
Diam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																		
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kelompok Pembudidaya Air Payau	103		6.442.000.000		10	113.767.000	10	107.897.000	100,00	94,84	10	107.897.000	9,71	1,67	Dinas Perikanan		
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Perikanan																	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelatihan Kelompok pengolahan	60	Kelompok	850.000.000		20	233.950.500	18	218.412.100	90,00	93,36	18	218.412.100	30,00	25,70	Dinas Perikanan		
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah rekening yang dibayarkan	15	Jenis	26.716.800		9	15.180.000	3	6.072.000	3	6.072.000	100,00	100,00	12	21.252.000	80,00	79,55	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia, Makan Minum Kantor, Peraltan kebersihan kantor	83	Jenis	295.235.300		40	155.387.000	14	77.693.500	14	77.693.500	100,00	100,00	54	233.080.500	65,06	78,95	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya koordinasi kepariwisataan dan olah raga	64	kali	572.746.421		30	238.644.342	12	170.000.000	11	165.000.000	91,67	97,06	41	403.644.342	64,06	70,48	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	10	rekening	379.661.700		4	120.594.802	2	103.800.000	2	96.800.000	100,00	93,26	6	217.394.802	60,00	57,26	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah Paajak Kendaraan Dinas yabg dibayarkan	18	Unit	153.400.000		5	52.468.300	11	59.000.000	10	58.000.000	90,91	98,31	15	110.468.300	83,33	72,01	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
operasional atau lapangan																	
PROGRGAM PEMASARAN PARIWISATA																	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran yang difasilitasi	4	kali	443.154.000		4	443.154.000	4	443.154.000	100,00	100,00	4	443.154.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Kunjungan Wisata																
PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/ /KOTA																	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan	10	hari	85.955.000		10	85.955.000	10	85.955.000	100,00	100,00	10	85.955.000	100,00	100,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terbayarnya honorarium Aparatur PNS dan Non PNS																
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH																	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	655	orang	1.224.720.000	406	816.480.000	156	291.600.000	156	291.600.000	100,00	100,00	562	1.108.080.000	85,71	90,48	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Sebagai pedoman untuk Penyusunan kebijakan retribusi daerah																
ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH																	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen/kebijakan yang disusun	5	dokumen	259.715.000		5	211.943.000	5	202.948.000	100,00	95,76	5	202.948.000	100,00	78,14	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		16
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	34190	lembar	21.307.100		34190	21.307.100	34190	21.307.100	100,00	100,00	34190	21.307.100	100,00	100,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan																
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH																	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	56	Buku	52.000.000	36	31.000.000	12	11.000.000	12	11.000.000	100,00	100,00	48	42.000.000	85,71	80,77	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tersedianya Alat Penerangan Kantor																
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	60	buah	25.502.400	30	19.430.400	10	6.072.000	9	5.872.000	90,00	96,71	39	25.302.400	65,00	99,22	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tersedianya ATK Mamin Kantor																
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH																	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	74	kali	404.006.200	45	233.080.500	14	77.693.500	13	77.693.500	92,86	100,00	58	310.774.000	78,11	76,92	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Koordinasi Kepariwisata Pemuda dan Olahraga																
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH																	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat konsultasi yang dilakukan	69	kali	782.000.000	39	476.000.000	14	170.000.000	13	167.000.000	92,86	98,24	52	643.000.000	76,09	82,23	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Tepat Waktu																
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Meningkatnya layanan operasional perkantoran	51	unit	271.400.000	26	165.200.000	11	59.000.000	11	57.000.000	100,00	96,61	37	222.200.000	73,91	81,87	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Operasional atau Lapangan																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dengan baik																
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya layanan operasional perkantoran																
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	24	jenis	793.680.000	14	496.050.000	6	165.350.000	5	132.041.500	83,33	79,86	19	628.091.500	80,83	79,14	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Perkantoran terlaksananya kegiatan administrasi keuangan																
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kelancaran administrasi perkantoran lancarnya adinistrasi perkantoran																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Meningkatnya kesejahteraan aparatur	312	Orang	31.125.514.350	156	21.652.531.722	65	6.766.416.163	65	6.766.416.163	100,00	100,00	221	28.418.947.885	70,83	91,30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya kesejahteraan aparatur	462	Orang	11.843.597.000	336	7.209.146.000	105	2.574.695.000	105	2.574.695.000	100,00	100,00	441	9.783.841.000	95,45	82,61	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lancarnya administrasi perkantoran	15	jenis	60.000.000	9	31.998.880	3	9.999.650	3	8.112.500	100,00	81,13	12	40.111.380	80,00	66,85	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya kelancaran rapat perkantoran	49	jenis	397.895.400	22	268.146.900	10	86.499.000	10	74.067.680	100,00	85,63	32	342.214.580	65,31	86,01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	26	jenis	80.000.000	12	26.482.500	10	33.600.000	9	29.342.700	90,00	87,33	21	55.825.200	80,77	69,78	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	meningkatkan informasi/wawasan ASN	32	jenis	50.000.000	14	16.800.000	10	15.000.000	8	12.400.000	80,00	82,67	22	29.200.000	68,75	58,40	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar kab./propinsi dan pemerintah pusat	62	kali	1.282.915.200	36	668.185.000	14	267.274.000	13	248.401.800	92,86	92,94	49	916.586.800	79,03	71,45	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	lancarnya administrasi perkantoran																
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	lancarnya administrasi perkantoran	15	Jumlah rekening yang dibayarkan	288.000.000	9	150.000.000	3	60.000.000	3	58.835.721	100,00	98,06	12	208.835.721	80,00	72,51	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	lancarnya administrasi perkantoran																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terkelolanya aset kendaraan dinas operasional	60	unit	300.577.800	36	209.097.600	12	65.343.000	10	52.538.000	83,33	80,40	46	261.635.600	76,67	87,04	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	12	unit	39.000.000	6	19.000.000	2	9.953.500	2	9.000.000	100,00	90,42	8	28.000.000	66,67	71,79	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PENATAAN ORGANISASI	menjadi pedoman penyusunan program tahun berikutnya																
Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	menjadi pedoman penyusunan program tahun berikutnya	5	Dok	1.351.313.940	3	705.033.360	1	293.763.900	1	272.326.000	100,00	92,70	4	977.359.360	80,00	72,33	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																	
PENGAWASAN PENGGUNA SARANA PERTANIAN	tersedianya sarana pertanian																
Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian	tersedianya sarana pertanian	28	lokasi	4.167.403.800	13	2.381.373.600	7	992.239.000	6	885.408.900	85,71	89,23	19	3.266.782.500	67,86	78,39	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAINNYA	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4																16
Pengadaan benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	tersedianya bibit benih sapi,kerbau,itik dan ayam	365	ekor	3.981.443.000	215	1.981.443.000	70	1.214.305.150	70	999.022.200	100,00	82,27	285	2.980.465.200	78,08	74,86	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prasarana yang dibangun																
PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	panjang irigasi yang terbangun																
Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	terbangunnya jaringan irigasi	602	Meter	4.700.000.000	320	1.259.895.000	100	2.699.660.516	97	2.676.872.129	97,00	99,16	417	3.936.767.129	69,27	83,76	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	terpeliharanya gedung kantor BPP	3	Unit	350.000.000	0	0	3	300.000.000	3	288.000.000	100,00	96,00	3	288.000.000	100,00	82,29	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	terbangunnya jalan usaha tani	1500	Meter	2.349.785.000	450	1.349.785.000	300	753.191.667	300	743.191.667	100,00	98,67	750	2.092.976.667	50,00	89,07	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri																	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																	
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	terlaksananya Subsidi PLTBM	100	persen	1.267.962.000	100	1.267.962.000	100	1.267.962.000	97	1.266.856.570	97,00	99,91	197	2.534.818.570	197,00	199,91	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
SEKRETARIAT DAERAH																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Aparatur SETDA yang dibayar honorariumnya	966	PNS/ Non PNS	30.726.033.600	507	16.192.648.228	285	5.202.924.168	284	4.546.579.539	99,65	87,39	791	20.739.227.767	81,88	67,50	Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia	430	Jenis	1.672.502.880	30	674.404.630	15	178.135.000	15	155.103.300	100,00	87,07	45	829.507.930	10,47	49,60	Sekretariat Daerah
	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, peserta rapat dan tamu yang tersedia	132	kali	4.507.265.000	36	1.481.331.543	24	455.250.000	24	446.160.700	100,00	98,00	60	1.927.492.243	45,45	42,76	Sekretariat Daerah
	jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia	156	Jenis	637.520.500	60	439.211.950	30	93.033.200	30	83.400.000	100,00	89,65	90	522.611.950	57,69	81,98	Sekretariat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	62	Jenis	1.179.339.000	36	656.383.760	18	130.460.000	16	117.428.520	88,89	90,01	52	773.812.280	83,87	65,61	Sekretariat Daerah
Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu Sekretariat Daerah	82	kali	2.829.320.000	37	1.456.226.093	12	211.053.600	11	205.569.456	91,67	97,40	48	1.661.795.549	58,54	58,73	Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Kabag, Kasubag dan Staf	550	Kali	6.721.200.000	223	5.089.958.674	134	808.214.000	114	807.353.392	85,07	99,89	337	5.897.312.066	61,27	87,74	Sekretariat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	92	Jenis	1.215.070.000	69	774.127.985	12	132.534.101	12	122.347.500	100,00	92,31	81	896.475.485	88,04	73,78	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon seluler, listrik, air, indovision dan internet yang terbayar	52	Rekening	3.340.425.457	28	1.827.190.541	18	785.760.000	17	755.294.315	94,44	96,12	45	2.582.484.856	86,54	77,31	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala	65	Unit	2.854.026.500	34	1.154.991.898	10	298.331.200	10	293.219.679	100,00	98,29	44	1.448.211.577	67,69	50,74	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan bermotor apung terpelihara secara rutin/berkala	30	Unit	13.030.490.000	15	7.139.930.157	5	3.100.100.000	9	3.036.082.875	180,00	97,93	24	10.176.013.032	80,00	78,09	Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2,3 dana 4 yang terpelihara secara rutin/berkala	198	Unit	5.607.720.000	86	2.887.428.195	35	1.233.050.000	32	1.035.674.247	91,43	83,99	118	3.923.102.442	59,60	69,96	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36	Unit	3.420.685.500	20	1.177.403.060	10	1.084.147.250	10	1.081.938.432	100,00	99,80	30	2.259.341.492	83,33	66,05	Sekretariat Daerah
	Jumlah rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan SEKDA secara rutin/berkala yang dipelihara	26	Jenis	3.230.080.000	10	1.315.502.468	4	750.500.000	4	634.500.000	100,00	84,54	14	1.950.002.468	53,85	60,37	Sekretariat Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	276	Jenis	1.747.210.000	108	614.510.000	8	236.190.000	8	232.502.600	100,00	98,44	116	847.012.600	42,03	48,48	Sekretariat Daerah
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	Orang	2.802.736.053	6	1.368.954.606	2	464.019.481	2	456.318.202	100,00	98,34	8	1.825.272.808	80,00	65,12	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	104	Stel	575.470.000	59	336.682.729	9	70.676.000	8	70.450.000	88,89	99,68	67	407.132.729	64,42	70,75	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	Kepala daerah	8.160.957.400	6	5.854.408.657	2	1.401.358.000	2	1.355.051.196	100,00	96,70	8	7.209.459.853	80,00	88,34	Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah																
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	84	Jenis	2.516.697.500	46	1.534.965.300	12	400.782.000	12	365.274.800	100,00	91,14	58	1.900.240.100	69,05	75,51	Sekretariat Daerah
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	248	Jenis	3.456.027.500	150	1.418.711.000	12	319.655.900	12	319.615.850	100,00	99,99	162	1.738.326.850	65,32	50,30	Sekretariat Daerah
	Penataan Organisasi																
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	54	Dokument	2.200.000.000	36	852.727.254	6	329.416.184	5	312.542.063	83,33	94,88	41	1.165.269.317	75,93	52,97	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	180	Dokument	336.000.000	108	209.843.420	36	60.968.848	28	59.580.960	77,78	97,72	136	269.424.380	75,56	80,19	Sekretariat Daerah
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5	Dokument	200.000.000	3	104.968.464	1	76.026.348	1	70.289.660	100,00	92,45	4	175.258.124	80,00	87,63	Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																	
Fasilitasi Keprotokolanan	Terlaksananya kegiatan keprotokolanan daerah	410	Kali	726.374.400	246	471.479.896	82	160.085.000	80	156.910.000	97,56	98,02	326	628.389.896	79,51	86,51	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya komunikasi pimpinan	120	Kali	562.622.000	62	306.815.235	24	150.166.100	22	145.456.898	91,67	96,86	84	452.272.133	70,00	80,39	Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Liputan kegiatan pimpinan daerah	145	Kali	2.843.500.000	74	1.542.842.000	48	555.652.500	42	484.956.000	87,50	87,28	116	2.027.798.000	80,00	71,31	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	
Administrasi Tata Pemerintahan																	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya peningkatan administrasi pemerintahan	22	Dokument	852.025.200	12	524.323.200	4	163.851.000	3	161.200.500	75,00	98,38	15	685.523.700	68,18	80,46	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi dalam proses penataan desa	215	Kali	1.316.385.725	129	789.831.435	43	263.277.145	39	245.277.059	90,70	93,16	168	1.035.108.494	78,14	78,63	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Melaksanakan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	32	Dokument	1.650.000.000	16	462.809.310	4	161.127.500	3	131.127.500	75,00	81,38	19	593.936.810	59,38	36,00	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan/agenda keagamaan yang terfasilitasi	64	Kali	7.636.390.080	36	3.337.533.400	12	1.735.543.200	10	1.732.491.200	83,33	99,82	46	5.070.024.600	71,88	66,39	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah terselenggaranya pembinaan dan seleksi UKS di tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai	44	Kecamatan	1.047.822.300	25	798.340.800	8	249.481.500	7	228.663.400	87,50	91,66	32	1.027.004.200	72,73	98,01	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah mahasiswa penerimaan pembiayaan pendidikan Tugas Belajar Non PNS	1390	Orang	24.940.148.000	785	16.410.763.785	426	5.878.962.500	423	5.467.981.900	99,30	93,01	1208	21.878.745.685	86,91	87,73	Sekretariat Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum																	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah berupa Perda, Perbup dan keputusan yang difasilitasi	1200	Produk Hukum	1.112.000.000	620	693.180.050	240	252.472.500	231	251.148.300	96,25	99,48	851	944.328.350	70,92	84,92	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus terselesaikan	63	Kasus	4.000.000.000	45	1.674.245.850	15	513.098.900	14	494.911.300	93,33	96,46	59	2.169.157.150	93,65	54,23	Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk hukum daerah yang dapat diakses oleh masyarakat	180	Produk Hukum	550.000.000	214	382.968.800	400	176.762.500	380	159.236.250	95,00	90,08	594	542.205.050	330,00	98,58	Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Fasilitasi Kerjasama Daerah																	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kerjasama dengan BPN dalam Sertifikasi tanah Pemerintah Daerah	115	Setifikasi	1.250.000.000	75	700.572.400	25	343.842.500	24	313.825.500	96,00	91,27	99	1.014.397.900	86,09	81,15	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	26	Kali	1.004.533.066	15	627.833.166	5	209.277.722	4	197.448.600	80,00	94,35	19	825.281.766	73,08	82,16	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tersusunnya kebijakan, pengendalian dan distribusi perekonomian	6	Dokument	450.000.000	3	148.141.500	1	59.478.400	1	54.813.000	100,00	92,16	4	202.954.500	66,67	45,10	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan																	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan	6	Dokument	668.600.000	3	390.328.750	1	80.807.600	1	74.846.100	100,00	92,62	4	465.174.850	66,67	69,57	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan	5	Dokument	2.195.163.000	3	1.317.097.800	1	439.032.600	1	431.889.900	100,00	98,37	4	1.748.987.700	80,00	79,67	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	5	kali	650.000.000	3	341.470.900	1	141.304.296	1	128.920.000	100,00	91,24	4	470.390.900	80,00	72,37	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan barang - barang jasa pemerintah yang dikelola	2322	Paket	4.396.807.266	1375	2.579.835.447	400	816.441.360	351	676.896.331	87,75	82,91	1726	3.256.731.778	74,33	74,07	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang masuk dalam layanan LPSE	2322	Paket	4.919.165.211	1375	2.894.931.206	400	745.331.065	322	657.119.000	80,50	88,16	1697	3.552.050.206	73,08	72,21	Sekretariat Daerah
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah aparatür yang mengikuti bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	120	Orang	1.150.000.000	43	395.198.838	27	216.654.600	23	185.346.600	85,19	85,55	66	580.545.438	55,00	50,48	Sekretariat Daerah
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersedianya data energi, sumber daya alam dan air	1	Perbup/SK Bupati	68.000.000		1	64.423.000	1	62.601.500	100,00	97,17	1	62.601.500	100,00	92,06	Sekretariat Daerah	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah																
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi perangkat daerah																
Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	430	Org	1.601.968.000	258	1.501.444.000	86	1.553.646.000	76	1.282.636.921	88,37	82,56	334	2.784.080.921	77,67	173,79	Sekretariat DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi perangkat daerah																
Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	30	Jenis	90.344.640	18	56.465.400	6	18.821.800	4	15.474.585	66,67	82,22	22	71.939.985	73,33	79,63	Sekretariat DPRD
Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	30	Jenis	288.203.846	18	180.127.404	6	60.042.468	3	54.257.900	50,00	90,37	21	234.385.304	70,00	81,33	Sekretariat DPRD
Penyedia Bahan logistik Kantor	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	30	Jenis	2.429.243.520	18	1.518.277.200	6	506.092.400	4	440.925.350	66,67	87,12	22	1.959.202.550	73,33	80,65	Sekretariat DPRD
Penyedia Barang Catakkan dan Pengadaan	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	30	Jenis	734.496.000	18	459.060.000	6	153.020.000	5	139.400.500	83,33	91,10	23	598.460.500	76,67	81,48	Sekretariat DPRD
Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	30	Jenis	600.000.000	18	375.000.000	6	125.000.000	1	123.300.000	16,67	98,64	19	498.300.000	63,33	83,05	Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	30	Tahun	2.332.262.400	18	1.457.664.000	6	485.888.000	6	442.016.151	100,00	90,97	24	1.899.680.151	80,00	81,45	Sekretariat DPRD
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	meningkatnya sarana pendukung pelaksanaan tugas																
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	5	Unit	3.557.803.200	3	2.223.627.000	1	741.209.000	1	625.394.000	100,00	84,37	4	2.849.021.000	80,00	80,08	Sekretariat DPRD
Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	terpeliharanya barang milik daerah																
Penyedia Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	15	Rek	1.396.800.000	9	873.000.000	3	291.000.000	2	227.134.583	66,67	78,05	11	1.100.134.583	73,33	78,76	Sekretariat DPRD
Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	terpeliharanya barang milik daerah																
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	110	Unit	2.005.872.000	66	1.253.670.000	22	417.890.000	17	393.846.103	77,27	94,25	83	1.647.516.103	75,45	82,13	Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan																	
Pemeliharaan / Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	5	Unit	149.280.000	3	93.300.000	1	31.100.000	1	19.534.000	100,00	62,81	4	112.834.000	80,00	75,59	Sekretariat DPRD
Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya layanan administrasi DPRD																
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	meningkatnya pelayanan administrasi da kesejahteraan DPRD	100	Org	43.989.706.560	60	27.493.566.600	20	9.164.522.200	16	8.891.669.537	80,00	97,02	76	36.385.236.137	76,00	82,71	Sekretariat DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Meningkatnya disiplin pimpinan dan anggota DPRD	720	Org	730.041.600	432	456.276.000	144	152.092.000	140	140.116.000	97,22	92,13	572	596.392.000	79,44	81,69	Sekretariat DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya layanan administrasi DPRD																
Fasilitasi fraksi DPRD	meningkatnya pengelolaan administrasi DPRD	5	Kali	68.400.000	3	42.750.000	1	14.250.000	1	13.775.000	100,00	96,67	4	56.525.000	80,00	82,64	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rata-rata waktu fasilitasi rapat-rapat fraksi baleg dan paripurna																
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembentukanperda dan peraturan DPRD																
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	adanya dokumen ranperda yang di bahas oleh DPRD	5	Perda	2.241.720.000	3	1.401.075.000	1	467.025.000	1	395.250.500	100,00	84,63	4	1.796.325.500	80,00	80,13	Sekretariat DPRD
Pembahasan rancangan Peraturan Daerah	adanya dokumen ranperda yang di bahas oleh DPRD	5	Perda	3.952.516.800	3	2.470.323.000	1	823.441.000	1	662.054.300	100,00	80,40	4	3.132.377.300	80,00	79,25	Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	adanya hasil kajian ranperda yang di bahas oleh DPRD	5	Dok	922.372.800	3	576.483.000	1	192.161.000	1	167.891.000	100,00	87,37	4	744.374.000	80,00	80,70	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan Naskah Akademik	tersusunannya dokumen dan draf Ranperda	5	Dok	247.800.000	3	154.875.000	1	51.625.000	1	49.000.000	100,00	94,92	4	203.875.000	80,00	82,27	Sekretariat DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran																
Pembahasan KUA dan PPAS	adanya dokumen KUA dan PPAS yang di sepakati	5	Dok	232.344.000	3	145.215.000	1	48.405.000	1	40.238.700	100,00	83,13	4	185.453.700	80,00	79,82	Sekretariat DPRD
Pembahasan APBD	adanya dokumen pembahasanAPBD yang di sepakati	5	Dok	2.383.497.600	3	1.489.686.000	1	496.562.000	1	416.073.855	100,00	83,79	4	1.905.759.855	80,00	79,96	Sekretariat DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	adanya dokumen pembahasan pertanggungjawaban APBD	5	Dok	94.627.200	3	59.142.000	1	19.714.000	1	17.713.500	100,00	89,85	4	76.855.500	80,00	81,22	Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	meningkatkan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan																
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	meningkatkan pengawasan urusan bidang pemerintan dan hukum	75	Kali	2.742.192.000	45	1.713.870.000	15	571.290.000	12	522.024.180	80,00	91,38	57	2.235.894.180	76,00	81,54	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	meningkatkan pengawasan urusan bidang kesejahteraan Rakyat	30	Kali	2.551.946.400	18	1.594.966.500	6	531.655.500	5	421.253.451	83,33	79,23	23	2.016.219.951	76,67	79,01	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	meningkatkan pengawasan urusan bidang Perekonomian	30	Kali	3.213.331.200	18	2.008.332.000	6	669.444.000	5	564.607.816	83,33	84,34	23	2.572.939.816	76,67	80,07	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber daya Alam	meningkatkan pengawasan urusan bidang sumber daya alam	30	Kali	2.787.516.000	18	1.742.197.500	6	580.732.500	6	572.372.800	100,00	98,56	24	2.314.570.300	80,00	83,03	Sekretariat DPRD
Pengawasan Penggunaan Anggaran	meningkatkan pengawasan urusan bidang anggaran	15	Kali	79.809.600	9	49.881.000	3	16.627.000	3	15.136.000	100,00	91,03	12	65.017.000	80,00	81,47	Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	meningkatkan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur																
Bimbingan Teknis DPRD	Meningkatnya Kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	30	Kali	6.685.612.800	18	4.178.508.000	6	1.392.836.000	6	1.351.555.160	100,00	97,04	24	5.530.063.160	80,00	82,72	Sekretariat DPRD
Publikasi dan dan Dokumentasi Dewan	Tersampainya informasi dari DPRD ke Masyarakat	30	Jenis	386.880.000	18	241.800.000	6	80.600.000	5	71.500.000	83,33	88,71	23	313.300.000	76,67	80,98	Sekretariat DPRD
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	adanya kelompok pakar dan Tim Ahli	15	Org	288.000.000	9	180.000.000	3	60.000.000	2	51.000.000	80,00	85,00	11	231.000.000	76,00	80,21	Sekretariat DPRD
Penyediaan Tenaga Ahli fraksi	Adanya tenaga ahli fraksi	20	Org	1.152.000.000	12	720.000.000	4	240.000.000	4	195.000.000	100,00	81,25	16	915.000.000	80,00	79,43	Sekretariat DPRD
Penyusunan Program Kerja DPRD	Adanya jadwal kegiatan yang disepakati	5	Dok	44.640.000	3	27.900.000	1	9.300.000	1	8.076.000	100,00	86,84	4	35.976.000	80,00	80,59	Sekretariat DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya aspirasi Masyarakat																
Kunjungan Kerja dalam daerah	Terhimpunnya aspirasi Masyarakat melalui movev	30	Kali	11.855.904.000	18	7.409.940.000	6	2.469.980.000	6	2.367.246.000	100,00	95,84	24	9.777.186.000	80,00	82,47	Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Reses	Terhimpunnya aspirasi Masyarakat melalui Reses	15	Kali	10.754.524.800	9	6.721.578.000	3	2.240.526.000	3	2.038.525.000	100,00	90,98	12	8.760.103.000	80,00	81,46	Sekretariat DPRD
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan kode Etik																
Penyusunan kode Etik DPRD	Acuan standar dalam pelaksanaan dan	15	Org	10.754.524.800	9	6.721.578.000	3	2.240.526.000	3	2.036.517.500	100,00	90,89	12	8.758.095.500	80,00	81,44	Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
	pengawasan DPRD			0													
Pengawasan Kode Etik DPRD	Meningkatnya pengawasan anggota DPRD	20	Org	10.754.524.805	12	6.721.578.003	4	2.240.526.001	4	1.969.700.000	100,00	87,91	16	8.691.278.003	80,00	80,82	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD																
Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi alat kelengkapan DPRD	20	Kali	10.754.524.805	12	6.721.578.003	4	2.240.526.001	3	2.206.774.700	75,00	98,49	15	8.928.352.703	75,00	83,02	Sekretariat DPRD
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya laporan kinerja DPRD	25	Dok	10.754.524.810	15	6.721.578.006	5	2.240.526.002	4	2.029.607.500	80,00	90,59	19	8.751.185.506	76,00	81,37	Sekretariat DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	40	Stel	36.960.000	24	23.100.000	8	7.700.000	6	6.400.000	75,00	83,12	30	29.500.000	75,00	79,82	Inspektorat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	50	Orang	362.059.200	30	226.287.000	10	75.429.000	10	48.414.500	100,00	64,19	40	274.701.500	80,00	75,87	Inspektorat
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang dibutuhkan	30	Jenis	33.600.000	18	21.000.000	6	7.000.000	5	6.863.200	83,33	98,05	23	27.863.200	76,67	82,93	Inspektorat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang dibutuhkan	75	Kali		45		15		15		100,00		60	80,00			Inspektorat
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan	200	Jenis	1.025.000.000	120	615.000.000	40	125.758.180	40	124.649.410	100,00	99,1	160	739.649.410	80,00	72,16	
	Jumlah pertemuan/rapat yang dilaksanakan	60	Jenis		36		12		12		100,00		48	80,00			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	30	Jenis	96.096.000	18	60.060.000	6	20.020.000	5	17.073.400	83,33	85,28	23	77.133.400	76,67	80,27	Inspektorat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15	Jenis	49.036.800	9	30.648.000	3	10.216.000	3	10.016.000	100,00	98,04	12	40.664.000	80,00	82,93	Inspektorat

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
	yang dibutuhkan																
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan/dihadiri	60	Kali	835.144.320	36	521.965.200	12	173.988.400	9	155.553.859	75,00	89,40	45	677.519.059	75,00	81,13	Inspektorat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin yang dibutuhkan	15	Jenis	394.582.646	9	246.614.154	3	82.204.718	3	76.264.500	100,00	92,77	12	322.878.654	80,00	81,83	Inspektorat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan	15	Jenis	176.515.200	9	110.322.000	3	36.774.000	3	36.135.000	100,00	98,26	12	146.457.000	80,00	82,97	Inspektorat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Daerahan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	15	Rek	460.608.000	9	287.880.000	3	95.960.000	3	89.720.150	100,00	93,50	12	377.600.150	80,00	81,98	Inspektorat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan layak jalan	50	Unit	366.638.400	30	229.149.000	10	76.383.000	10	72.805.250	100,00	95,32	40	301.954.250	80,00	82,36	Inspektorat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	15	Jenis	94.128.000	9	58.830.000	3	19.610.000	3	18.030.000	100,00	91,94	12	76.860.000	80,00	81,65	Inspektorat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5	Unit	242.874.624	3	151.796.640	1	50.598.880	1	50.492.050	100,00	99,79	4	202.288.690	80,00	83,29	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal																	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	80	Lap	3.000.000.000	48	1.800.000.000	16	443.621.000	16	302.040.000	100,00	68,09	64	2.102.040.000	80,00	70,07	Inspektorat
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah lapran hasil pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50	Lap	3.000.000.000	30	1.800.000.000	10	361.767.000	10	320.910.000	100,00	88,71	40	2.120.910.000	80,00	70,70	Inspektorat
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Jenis reviu kinerja	60	Jenis	2.500.000.000	36	1.500.000.000	12	391.486.000	12	391.191.000	100,00	99,92	48	1.891.191.000	80,00	75,65	Inspektorat
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu	185	Lap	750.000.000	108	450.000.000	37	45.879.900	37	38.610.000	100,00	84,15	145	488.610.000	78,38	65,15	Inspektorat
Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan Desa	215	Lap	7.312.611.000	129	2.026.075.000	43	1.048.781.000	43	1.012.351.000	100,00	96,53	172	3.038.426.000	80,00	41,55	Inspektorat

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan kerjasama pengawasan internal	15	Level	1.293.043.500	2	538.409.800	3	159.550.000	3	99.471.300	100,00	62,34	5	637.881.100	33,33	49,33	Inspektorat
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan TLHP	10	Lap	1.603.802.880	6	1.002.376.800	2	334.125.600	2	315.827.800	75,00	94,52	8	1.318.204.600	75,00	82,19	Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	60	Lap	2.853.561.600	36	1.783.476.000	12	594.492.000	12	509.511.700	100,00	85,71	48	2.292.987.700	80,00	80,36	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan																	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dirumuskan	25	Dok	16.968.000	15	10.605.000	5	3.535.000	5	2.778.000	100,00	78,59	20	13.383.000	80,00	78,87	Inspektorat
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan Bidang Fasilitasi Pengawasan	10	Lap	2.426.509.440	6	1.516.568.400	2	505.522.800	2	459.724.500	100,00	90,94	8	1.976.292.900	80,00	81,45	Inspektorat
Pendampingan dan Asistensi																	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan dan pendampingan dan asistensi yang dilakukan	20	Lap	765.141.494	12	478.213.434	4	159.404.478	4	116.589.178	100,00	73,14	16	594.802.612	80,00	77,74	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Jumlah laporan pelaksanaan ZI - Jumlah laporan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	5	Lap	347.601.600	3	217.251.000	1	72.417.000	1	65.484.400	100,00	90,43	4	282.735.400	80,00	81,34	Inspektorat
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Jumlah laporan klinik konsultasi 2. Jumlah laporan LHKASN 3. Jumlah laporan pelaksanaan LHKPN 4. Jumlah laporan renaksi KPK 5. Jumlah laporan UPG	25	Lap	929.443.200	15	580.902.000	5	193.634.000	5	171.079.966	100,00	88,35	20	751.981.966	80,00	80,91	Inspektorat

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah																
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Lancarnya Operasional Kantor																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Listrik yang dibutuhkan	70	Jenis	114.009.600	42	71.256.000	14	23.752.000	14	23.752.000	100,00	100,00	56	95.008.000	80,00	83,33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat kebersihan yang dibutuhkan	90	Jenis	1.485.303.360	54	928.314.600	18	309.438.200	15	225.398.490	83,33	72,84	69	1.153.713.090	76,67	77,68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan	30	Jenis	582.367.200	18	363.979.500	6	121.326.500	6	113.375.700	100,00	93,45	24	477.355.200	80,00	81,97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan/surat kabar yang dibutuhkan	30	Jenis	168.000.000	18	105.000.000	6	35.000.000	5	25.000.000	83,33	71,43	23	130.000.000	76,67	77,38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilakukan/dihadiri	120	Kali	1.904.208.000	72	1.190.130.000	24	396.710.000	21	365.569.977	87,50	92,15	93	1.555.699.977	77,50	81,70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Lancarnya Operasional Kantor																
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Tersedianya Mesin Boat	5	Unit	946.279.930	3	591.424.956	1	197.141.652	1	177.873.000	100,00	90,23	4	769.297.956	80,00	81,30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Lancarnya Operasional Kantor																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Bahan Bakar untuk operasional Perkantoran	60	Bulan	526.560.000	36	329.100.000	12	109.700.000	10	89.768.497	83,33	81,83	46	418.868.497	76,67	79,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	60	Bulan	522.744.000	36	326.715.000	12	108.905.000	7	99.912.300	58,33	91,74	43	426.627.300	71,67	81,61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Kantor	5	Bulan	900.456.000	3	562.785.000	1	187.595.000	1	162.383.000	100,00	86,56	4	725.168.000	80,00	80,53	Badan Perencanaan Pembangunan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
																Daerah	
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor	5	Bulan	396.491.232	3	247.807.020	1	82.602.340	1	74.760.000	100,00	90,51	4	322.567.020	80,00	81,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lancarnya Operasional Kantor																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang di Bayarkan	15	Rek	2.045.280.000	9	1.278.300.000	3	426.100.000	3	381.870.516	100,00	89,62	12	1.660.170.516	80,00	81,17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RENSTA OPD																
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja OPD	5	dok	1.228.800.000	3	768.000.000	1	256.000.000									
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	50	Kali	4.240.000.000	4	413.449.218	10	361.604.000	8	289.991.100	80,00	80,20	12	703.440.318	24,00	16,59	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2021	10	Dok	531.000.000	1	164.872.500	2	187.223.000	2	178.000.800	100,00	95,07	3	342.873.300	30,00	64,57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah																
Pembinaan dan pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Terkelolanya Aplikasi Perencanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	30	Aplikasi	531.000.000	1	164.872.500	6	205.775.000	5	179.517.800	83,33	87,24	6	344.390.300	20,00	64,86	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah																
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring Pembangunan Daerah	180	OPD	1.000.000.000	25	280.955.500	36	376.013.200	36	357.114.700	100,00	94,97	61	638.070.200	33,89	63,81	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program Prioritas OPD Dengan Program OPD Pendukung																
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dapat dijadikan sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16
	Pembangunan Bidang Pemerintahan															
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2022 dan Perubahan 2021	10	Dokumen	288.000.000	115.200.000	1	61.994.000	1	55.748.589	100,00	89,93	1	170.948.589	10,00	59,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2022 dan Perubahan 2021	50	Kali	192.000.000	76.000.000	12	90.335.500	12	88.317.994	100,00	97,77	12	164.317.994	24,00	85,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Selarasnya Perencanaan Pembangunan Daerah															
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	40	Kali	320.000.000	79.876.626	4	109.411.000	3	88.507.600	75,00	80,89	3	168.384.226	7,50	52,62	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Tersusunnya Dokumen Kerja Pemerintahan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	10	Dok	160.000.000	39.938.313	1	107.408.000	1	84.278.400	100,00	78,47	2	124.216.713	20,00	77,64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Inspratur dan Wilayah	Menjadi Pedoman dalam Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan															
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Inspratur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Kebinaragaaan dan Perhubungan	20	Kali	150.000.000	47.071.316	2	74.173.000	2	61.306.400	100,00	82,65	4	108.377.716	20,00	72,25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Cipta Karya dan Kewilayahan	40	Kali	300.000.000	94.142.633	4	74.336.000	4	71.499.419	100,00	96,18	4	165.642.052	10,00	55,21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebijakan Inovasi yang di terapkan di Daerah															
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Menjadi Pedoman dalam Pengembangan Pertanian Pangan dan Kehutanan															
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kajian Tentang Sagu,Pisang	1	Dok	450.000.000		1	449.364.100	1	430.481.554	100,00	95,80	1	430.481.554	100,00	95,66	Badan Perencanaan Pembangunan

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
																Daerah	
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Tersedianya Perencanaan Pengelolaan TAHURA	5	Dok	700.000.000		5	685.674.000	5	669.377.555	100,00	97,62	5	669.377.555	100,00	95,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
KEUANGAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja																
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Dokumen	2.715.396.700	1	133.478.500	1	301.937.000	1	299.517.000	100,00	99,20	2	432.995.500	40,00	15,95	Badan Keuangan Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	255	Orang	76.817.737.550	153	48.011.085.969	51	16.003.695.323	51	13.892.987.213	100,00	86,81	204	61.904.073.182	80,00	80,59	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Aparatur BKD	385	Pegawai	10.245.244.800	231	6.403.278.000	77	2.134.426.000	77	1.578.890.000	100,00	73,97	308	7.982.168.000	80,00	77,91	Badan Keuangan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	65	Jenis	175.414.800	39	109.634.250	13	36.544.750	12	36.544.750	92,31	100,00	51	146.179.000	78,46	83,33	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	40	Jenis	1.700.432.160	24	1.062.770.100	8	354.256.700	7	353.032.760	82,61	99,65	31	1.415.802.860	76,52	83,26	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	50	Jenis	488.839.200	30	305.524.500	10	101.841.500	8	91.364.400	82,47	89,71	38	396.888.900	76,49	81,19	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10	Jenis	172.800.000	6	108.000.000	2	36.000.000	2	28.050.000	100,00	77,92	8	136.050.000	80,00	78,73	Badan Keuangan Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi	40	Kali	2.830.675.200	24	1.769.172.000	8	589.724.000	7	588.202.118	81,70	99,74	31	2.357.374.118	76,34	83,28	Badan Keuangan Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran																
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	15	Jenis	2.806.226.861	9	1.753.891.788	3	584.630.596	2	483.276.500	66,67	82,66	11	2.237.168.288	73,33	79,72	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15	Rekening	3.124.569.600	9	1.952.856.000	3	650.952.000	3	578.665.421	100,00	88,90	12	2.531.521.421	80,00	81,02	Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	15	Unit	1.202.112.000	9	751.320.000	3	250.440.000	3	230.583.900	100,00	92,07	12	981.903.900	80,00	81,68	Badan Keuangan Daerah
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	5	Tahun	845.634.816	3	528.521.760	1	176.173.920	1	159.844.355	69,95	90,73	4	688.366.115	73,99	81,40	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pedoman Pelaksanaan APBD																
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Pelaksanaan APBD																
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen KUA-PPAS	10	Dokumen	629.745.600	6	393.591.000	2	131.197.000	2	130.358.431	100,00	99,36	8	523.949.431	80,00	83,20	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya Dokumen Perubahan KUA-PPAS	10	Dokumen	578.707.200	6	361.692.000	2	120.564.000	2	118.117.510	100,00	97,97	8	479.809.510	80,00	82,91	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya Perda dan Perbup tentang Penyusunan APBD	10	Dokumen	4.468.593.504	6	2.792.870.940	2	930.956.980	2	921.154.393	100,00	98,95	8	3.714.025.333	80,00	83,11	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya Perda dan Perbup tentang Penyusunan Perubahan APBD	10	Dokumen	4.721.750.400	6	2.951.094.000	2	983.698.000	2	954.650.534	78,67	97,05	8	3.905.744.534	75,73	82,72	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersedianya Regulasi dan Kebijakan Anggaran	5	Dokumen	1.495.924.800	3	934.953.000	1	311.651.000	1	302.961.163	52,90	97,21	4	1.237.914.163	70,58	82,75	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah	180	OPD	1.648.865.520	108	1.030.540.950	36	343.513.650	30	318.706.500	83,33	92,78	138	1.349.247.450	76,67	81,83	Badan Keuangan Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Syarat Penyaluran DAU, DAK, dan DID																
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	20	Dokumen	1.424.865.600	12	890.541.000	4	296.847.000	3	283.793.375	82,99	95,60	15	1.174.334.375	76,60	82,42	Badan Keuangan Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D yang Diproses	60	Kali	902.198.400	36	563.874.000	12	187.958.000	12	187.940.200	100,00	99,99	48	751.814.200	80,00	83,33	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	60	Kali	1.193.647.200	36	746.029.500	12	248.676.500	11	245.688.332	91,67	98,80	47	991.717.832	78,33	83,08	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	60	Kali	1.724.784.000	36	1.077.990.000	12	359.330.000	10	346.698.963	83,33	96,48	46	1.424.688.963	76,67	82,60	Badan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	60	Kali	1.213.639.200	36	758.524.500	12	252.841.500	10	231.607.950	80,37	91,60	46	990.132.450	76,07	81,58	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pedoman Pengambilan Keputusan Daerah dalam Penyusunan Anggaran dan Salah Satu Syarat Opini BKP																
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan OPD	60	Kali	201.768.000	36	126.105.000	12	42.035.000	11	36.045.100	91,67	85,75	47	162.150.100	78,33	80,36	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Semesteran Pemerintah Daerah, Perbup Pertanggungjawaban dan LKPD	10	Dokumen	114.575.040	6	71.609.400	2	23.869.800	2	23.869.800	80,01	100,00	8	95.479.200	76,00	83,33	Badan Keuangan Daerah
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan LKPD	5	LKPD	1.238.866.080	3	774.291.300	1	258.097.100	1	246.140.796	100,00	95,37	4	1.020.432.096	80,00	82,37	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan	Tersedianya Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10	Dokumen	1.159.229.179	6	724.518.237	2	241.506.079	2	194.649.196	100,00	80,60	8	919.167.433	80,00	79,29	Badan Keuangan Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																	
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Tindaklanjuti LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	Dokumen	122.553.600	3	76.596.000	1	25.532.000	1	17.748.800	100,00	69,52	4	94.344.800	80,00	76,98	Badan Keuangan Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Tersedianya Laporan Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5	Laporan	640.670.400	3	400.419.000	1	133.473.000	1	27.667.700	100,00	20,73	4	428.086.700	80,00	66,82	Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pedoman Laporan Keuangan	10	Dokumen	666.864.000	6	416.790.000	2	138.930.000	2	136.694.500	100,00	98,39	8	553.484.500	80,00	83,00	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi	5	Tahun	807.043.200	3	504.402.000	1	168.134.000	1	162.534.000	67,77	96,67	4	666.936.000	73,55	82,64	Badan Keuangan Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan Baik																
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang dan Jasa yang Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik																
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara Baik dan Benar																
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan RKBMD dan DKPBMD	10	Kali	206.347.200	6	128.967.000	2	42.989.000	1	40.447.700	72,77	94,09	7	169.414.700	74,55	82,10	Badan Keuangan Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pencatatan dan Inventaris BMD OPD	30	Dokumen	322.346.400	18	201.466.500	6	67.155.500	5	63.416.400	83,33	94,43	23	264.882.900	76,67	82,17	Badan Keuangan Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun	5	Dokumen	443.294.400	3	277.059.000	1	92.353.000	1	81.406.800	72,84	88,15	4	358.465.800	74,57	80,86	Badan Keuangan Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan BMD	10	Kali	499.147.200	6	311.967.000	2	103.989.000	2	97.372.000	93,99	93,64	8	409.339.000	78,80	82,01	Badan Keuangan Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	30	Kali	948.585.600	18	592.866.000	6	197.622.000	5	177.650.900	79,37	89,89	23	770.516.900	75,87	81,23	Badan Keuangan Daerah

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya rekonsiliasi BMD OPD	60	Kali	272.606.400	36	170.379.000	12	56.793.000	10	50.252.900	83,33	88,48	46	220.631.900	76,67	80,93	Badan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD	10	Kali	108.168.000	6	67.605.000	2	22.535.000	2	20.090.100	100,00	89,15	8	87.695.100	80,00	81,07	Badan Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Terlaksananya Sosialisasi, Intensifikasi dan Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi, Intensifikasi dan Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Pembayaran Pajak Daerah bagi setiap Wajib Pajak yang Belum Patuh	375	WP	106.725.600	225	66.703.500	75	22.234.500	73	19.370.000	97,33	87,12	298	86.073.500	79,47	80,65	Badan Keuangan Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Intensifikasi Pajak Daerah	95	Jenis	1.185.168.000	57	740.730.000	19	246.910.000	17	242.319.100	89,47	98,14	74	983.049.100	77,89	82,95	Badan Keuangan Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kebijakan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5	Dokumen	611.039.520	3	381.899.700	1	127.299.900	1	122.234.500	96,02	96,02	4	504.134.200	79,20	82,50	Badan Keuangan Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Sistem Informasi yang Dilaksanakan	5	SI	747.340.800	3	467.088.000	1	155.696.000	1	141.149.194	100,00	90,66	4	608.237.194	80,00	81,39	Badan Keuangan Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengelolaan PBB dan Rekonsiliasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah	215	Desa	623.805.600	129	389.878.500	43	129.959.500	43	122.366.000	100,00	94,16	172	512.244.500	80,00	82,12	Badan Keuangan Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Monitoring Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	60	Kali	2.292.024.000	36	1.432.515.000	12	477.505.000	11	437.937.518	91,67	91,71	47	1.870.452.518	78,33	81,61	Badan Keuangan Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Kegiatan Perkantoran	532															

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Ruang Kantor Yang Terang	66	Jenis	115.258.571	6	6.000.000	6	2.858.100	6	2.645.000	100,00	92,54	12	8.645.000	18,18	7,50	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	50	Jenis	275.255.726	45	70.937.000	41	7.822.400	41	6.142.200	100,00	78,52	86	77.079.200	172,00	28,00	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum ASN	64	Jenis	971.521.636	9	57.324.400	8	44.318.900	8	40.783.470	100,00	92,02	17	98.107.870	26,56	5,21	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Tersedianya alat tulis kantor	110	Jenis		35		30		30		100,00		65				
Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran	66	Jenis	686.166.556	16	20.000.000	6	15.178.500	6	11.850.000	100,00	78,07	22	31.850.000	33,33	4,64	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pemahaman Aparatur tentang peraturan perundang-undangan	62	Jenis	180.633.731	2	15.600.000	6	6.200.000	6	6.200.000	100,00	100,00	8	21.800.000	12,90	12,07	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Singkronisasi Informasi dan Pemahaman terhadap pelaksanaan Kegiatan	114	Jenis	1.729.608.611	25	349.850.000	25	131.785.000	25	121.365.299	100,00	92,09	50	471.215.299	43,86	27,24	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Kegiatan Perkantoran	66	Rekening	1.569.508.477	6	90.300.000	3	97.800.000	3	84.391.634	100,00	86,29	9	174.691.634	13,64	11,13	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Lancarnya Kegiatan Perkantoran dan terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	3	Unit	425.005.877	12	57.050.000	12	17.120.000	12	16.105.000	100,00	94,07	24	73.155.000	800,00	17,21	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Kepegawaian Daerah																	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4															16
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terpenuhinya ASN sesuai dengan formasi jabatan dan analisis kebutuhan	160	PNS 1.800.000.000	160	494.200.000	160	209.096.740	160	198.679.515	100,00	95,02	320	692.879.515	200,00	38,49	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Koordinasi pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dapat digunakan untuk pencairan taspen dan gaji pensiun	20	PNS 920.116.000	20	79.925.000	120	30.004.000	120	29.650.300	100,00	98,82	140	109.575.300	700,00	11,91	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Data Kepegawaian	Dapat digunakan untuk kenaikan pangkat dan pengurusan pensiun	2550	PNS 735.000.000	2550	81.892.500	100	38.216.900	100	37.526.593	100,00	98,19	2650	119.419.093	103,92	16,25	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Mutasi dan Promosi ASN																
Pengelolaan Mutasi ASN	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SDM	20	PNS 4.595.250.000	20	208.595.500	50	1.202.260.300	50	1.179.042.217	100,00	98,07	70	1.387.637.717	350,00	30,20	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan karir asn	300	PNS 654.098.000	300	119954000	300	64.716.000	300	63.985.700	100,00	98,87	600	183.939.700	200,00	28,12	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Kompetensi ASN																
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan terpenuhinya persyaratan dalam penyusunan ijazah dan pindah golongan ruang ASN	378	Orang 14.380.161.263	378	1.844.477.000	400	1.136.198.500	400	1.019.331.200	100,00	89,71	778	2.863.808.200	205,82	19,91	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Indek RB, Indek Kepuasan masyarakat, Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah															
PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pekerjaan	24	Desa	1.105.750.000	4	90.000.000	23	87.490.000	23	87.455.000	100,00	99,96	27	177.455.000	112,50	16,05	Kec. Pagel	
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	28	Bulan	3.560.574.552	14	-	14	1.509.946.638	14	1.428.428.423	99,52	94,60	28	1.428.428.423	99,76	40,12	Kec. Pagel	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35	orang	4.477.047.500	1	727.298.000	12	647.133.000	11	638.246.732	91,67	98,63	12	1.365.544.732	34,29	30,50	Kec. Pagel	
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Lancarnya penerangan dan aktifitas kantor	51	Jenis	67.200.000	5	4.000.000	6	8.685.800	6	8.639.000	100,00	99,46	11	12.639.000	21,57	18,81	Kec. Pagel	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pelayanan kantor Kecamatan Pagai Selatan	30	Unit	323.680.000			6	82.496.192	6	82.010.000	100,00	99,41	6	82.010.000	20,00	25,34	Kec. Pagel	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor																	
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	174	jenis	182.630.000	12	10.000.000	21	15.234.700	21	15.204.700	100,00	99,80	33	25.204.700	18,97	13,80	Kec. Pagel	
	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	102	item	133.000.000	10	8.000.000	17	7.281.100	17	7.281.100	100,00	100,00	27	15.281.100	26,47	11,49	Kec. Pagel	
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	138	kali	315.563.500	25	9.800.000	20	8.500.000	20	8.500.000	100,00	100,00	45	18.300.000	32,61	5,80	Kec. Pagel	
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi	171	Kali	1.725.250.000	1	57.650.000	32	162.618.000	32	153.135.709	100,00	94,17	33	210.785.709	19,30	12,22	Kec. Pagel	
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Barang Milik Daerah																	
Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja, Kursi Kerja Camat, Kasi, Kasubbag dan Staf dan Lemari Arsip	67	Unit	80.570.000	0	-	62	76.580.000	62	75.678.000	100,00	98,82	62	75.678.000	92,54	93,93	Kec. Pagel	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5125	liter	522.000.000	0	-	12	4.800.000	10	4.526.000	83,33	94,29	10	4.526.000	0,20	0,87	Kec. Pagel	
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG	Jumlah pelayanan administrasi umum yang																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
URUSAN PEMERINTAH DAERAH	dilaksanakan																
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	114	unit	325.000.000	8	51.950.000	8	35.960.000	8	35.960.000	100,00	100,00	16	87.910.000	14,04	27,05	Kec. Pagel
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	16	unit	325.000.000	0		11	7.910.000	11	7.910.000	100,00	100,00	11	7.910.000	68,75	2,43	Kec. Pagel
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
KOORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa								0								
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Kali	503.000.000	1	49.610.000	1	25.290.000	1	25.290.000	100,00	100,00	2	74.900.000	33,33	14,89	Kec. Pagel
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	500	persen	1.790.000.000	0	-	4	14.683.000	4	14.628.000	100,00	99,63	4	14.628.000	0,80	0,82	Kec. Pagel
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah																
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Terlaksananya Perayaan HUT RI	6	Kali	1.693.940.000	0	-	1	10.625.000	1	10.625.000	100,00	100,00	1	10.625.000	16,67	0,63	Kec. Pagel
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pelayanan masyarakat																
FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa dan Pemilihan Kepala Desa																
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	24	Desa	494.000.000	4	70.000.000	4	54.950.000	4	51.862.500	100,00	94,38	8	121.862.500	33,33	24,67	Kec. Pagel
Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan kepala desa	3	Desa	63.943.000	0	-	3	63.943.000	3	63.740.000	100,00	99,68	3	63.740.000	100,00	99,68	Kec. Pagel
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATEN/KOTA	Indek RB, Indek Kepuasan masyarakat, Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan							2.178.509.143									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	28	Bulan	3.560.574.552	14	-	14	1.568.029.143	14	1.403.167.992	100,00	89,49	28	1.403.167.992	100,00	39,41	Kec. Pagut
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35	orang	4.477.047.500	1	727.298.000	12	610.480.000	11	602.845.280	91,67	98,75	12	1.330.143.280	34,29	29,71	Kec. Pagut
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan							106.720.850									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Lancarnya penerangan dan aktifitas kantor	51	Jenis	67.200.000	5	4.000.000	6	4.050.750	6	4.010.800	100,00	99,01	11	8.010.800	21,57	11,92	Kec. Pagut
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor	74	jenis	237.784.637	8	7.730.000	3	37.677.100	3	35.026.700	100,00	92,97	11	42.756.700	14,86	17,98	Kec. Pagut
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Pelayanan kantor Kecamatan Pagai	12	Bulan	3.833.000			12	3.833.000	12	3.833.000	100,00	100,00		3.833.000	0,00	100,00	Kec. Pagut
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi	105	kali	1.470.477.274	45	56.560.000	24	61.160.000	20	51.545.000	83,33	84,28	65	108.105.000	61,90	7,35	Kec. Pagut
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Barang Milik Daerah							68.919.000									

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	Unit	80.570.000	0	-	2	68.919.000	2	57.999.000	100,00	84,16	2	57.999.000	66,67	71,99	Kec. Pagut
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan							73.700.000									
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Alat Besar	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	114	unit	325.000.000	8	51.950.000	4	14.500.000	4	12.970.000	100,00	89,45	12	64.920.000	10,53	19,98	Kec. Pagut
Pemeliharaan Bangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Bangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							59.200.000									
KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa							16.000.000	0								
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Kali	503.000.000	1	49.610.000	1	8.500.000	1	8.500.000	100,00	100,00	2	58.110.000	33,33	11,55	Kec. Pagut
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	500	persen	1.790.000.000	0	-	4	7.500.000	3	6.375.000	75,00	85,00	3	6.375.000	0,60	0,36	Kec. Pagut
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah																
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Terlaksananya Perayaan HUT RI	6	Kali	1.693.940.000	0	-	1	8.500.000	1	8.500.000	100,00	100,00	1	8.500.000	16,67	0,50	Kec. Pagut

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan ADD/APBDesa dan Pemilihan Kepala Desa																
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	24	Desa	494.000.000	4	70.000.000	4	24.920.000	4	21.930.000	87,50	88,00	8	91.930.000	31,25	18,61	Kec. Pagut
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksanannya Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3	Desa	50.790.000	0	-	12	30.000.000	11	27.730.000	91,67	92,43	11	27.730.000	366,67	54,60	Kec. Pagut
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATIEN/KOTA	Indek RB, Indek Kepuasan masyarakat, Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan																
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	70	ASN	10.984.003.675	42	2.522.003.130	14	2.196.800.735	14	2.126.519.939	100,00	96,80	56	4.648.523.069	80	42,32	Kec. Sikakap
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lancarnya Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45	orang	4.579.920.000	40	475.304.000	45	381.660.000	44	380.744.000	97,78	99,76	84	856.048.000	187	18,69	Kec. Sikakap
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor																
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	34	jenis	50.000.000	34	10.000.000	15	10.516.400	13	10.496.360	86,67	99,81	47	20.496.360	138	40,99	Kec. Sikakap
	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	10	jenis	107.340.000	10	21.468.000	14	3.066.900	13	2.616.900	92,86	85,33	23	24.084.900	230	22,44	Kec. Sikakap
	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	60	kali	100.000.000	12	20.000.000	12	16.420.000	10	14.295.000	83,33	87,06	22	34.295.000	37	34,30	Kec. Sikakap

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Koordinasi dan Konsultasi	760	Kali	250.000.000	152	50.000.000	28	71.100.000	28	71.100.000	100,00	100,00	180	121.100.000	24	48,44	Kec. Sikakap
Pnyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bulan	165.000.000	12	36.000.000	12	33.000.000	12	26.340.561	100,00	79,82	24	62.340.561	40	37,78	Kec. Sikakap
Pmeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	9	unit	10.000.000	9	12.400.000	1	2.000.000	1	2.000.000	100,00	100,00	10	14.400.000	111	144,00	Kec. Sikakap
Peeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	unit	105.210.410	1		1	21.042.082	1	21.042.082	100,00	100,00	2	21.042.082	200	20,00	Kec. Sikakap
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK																	
Plaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat																	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1	kali	149.690.000	1		88	29.938.000	77	28.370.000	87,50	94,76	78	28.370.000	7800	18,95	Kec. Sikakap
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa																
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Kali	185.880.000	1	37.176.000	1	20.000.500	1	19.990.500	100,00	99,95	2	57.166.500	200	30,75	Kec. Sikakap
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1	kali	198.450.000	0	39.690.000	36	27.650.000	35	27.187.500	97,22	98,33	35	66.877.500	3500	33,70	Kec. Sikakap
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan sesuai penugasan kepala daerah																
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Terlaksananya Perayaan HUT RI	1	Kali	103.800.000	0	20.760.000	1	14.662.500	1	14.662.500	100,00	100,00	1	35.422.500	100	34,13	Kec. Sikakap
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan pelaksanaan ADD/APBDesa dan Pemilihan Kepala Desa																
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	3	Desa	204.500.000	3	40.900.000	3	45.750.000	3	45.750.000	100,00	100,00	6	86.650.000	100	100	Kec. Sikakap
UNSUR KEWILAYAHAN																	
KECAMATAN SIPORA SELATAN																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah																
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Kegiatan														

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Kali	102.540.000		12	102.540.000	12	102.540.000	10	102.480.000	83,33	99,94	22	205.020.000	100	100	Kec. Sipora Selatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	100	Persen															
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	40	Orang	672.621.000		40	672.621.000	40	672.621.000	37	564.008.000	92,50	83,85	77	1.236.629.000	100	100	Kec. Sipora Selatan
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum	100	persen															
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan	1	Jenis	5.970.000		1	5.970.000	1	5.970.000	1	4.680.000	100,00	78,39	2	10.650.000	100	100	Kec. Sipora Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang Dibutuhkan	35	Jenis	77.964.900		35	77.964.900	35	77.964.900	31	62.389.160	88,57	80,02	66	140.354.060	100	100	Kec. Sipora Selatan
	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor yang Disediakan	8	Jenis	13.005.000		8	13.005.000	8	13.005.000	7	10.549.000	87,50	81,11	15	23.554.000	100	100	Kec. Sipora Selatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	26	Kali	69.700.000		26	69.700.000	26	69.700.000	26	56.294.000	100,00	80,77	52	125.994.000	100	100	Kec. Sipora Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	1	Rekening															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayar	12	Bulan	24.000.000		12	24.000.000	12	24.000.000	11	23.479.750	91,67	97,83	23	47.479.750	100	100	Kec. Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat	85	Persen															
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan	100	Persen															
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman e-KTP	750	Meter	63.437.696		750	63.437.696	750	63.437.696	650	53.389.300	86,67	84,16	1400	116.826.996	100	100	Kec. Sipora Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat	85	Persen															
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	7	Desa															

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4															16		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1	Kali	44.690.000		1	44.690.000	1	44.690.000	1	39.905.000	100,00	89,29	2	84.595.000	100	100	Kec. Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	persen															
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya HUT-RI	1	Kali	12.677.500		1	12.677.500	1	12.177.500	1	12.177.500	100,00	96,06	2	24.855.000	100	100	Kec. Sipora Selatan
UNSUR KEWILAYAHAN																		
KECAMATAN SIPORA UTARA																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah																	
Evaluasi Kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	36	dokumen	455.000.000		6	46.137.500	6	82.395.000	6	80.360.000	100,00	97,53	12	126.497.500	33,33	27,80	Kec. Sipora Utara
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	95	Orang	7.500.000.000		19	1.554.090.011	19	1.749.842.676	18	1.666.990.086	94,74	95,27	37	3.221.080.097	38,95	42,95	Kec. Sipora Utara
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya honorarium pelaksana kegiatan dan gaji pegawai kontrak	235	Orang	2.750.000.000		47	589.689.000	47	542.328.000	47	533.501.231	100,00	98,37	94	1.123.190.231	40,00	40,84	Kec. Sipora Utara
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	5	Jenis	97.905.500		15	2.990.000	5	6.984.500	5	6.904.500	100,00	98,85	20	9.894.500	400,00	10,11	Kec. Sipora Utara

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	296	jenis	364.888.500	30	59.830.500	28	53.144.500	28	53.066.950	100,00	99,85	58	112.897.450	19,59	30,94	Kec. Sipora Utara	
	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	54	kali	299.720.000	9	14.532.500	300	9.625.000	150	5.005.000	50,00	52,00	159	19.537.500	294,44	6,52	Kec. Sipora Utara	
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	65	jenis	167.942.500	12	5.590.000	5	15.618.100	5	15.608.100	100,00	99,94	17	21.198.100	26,15	12,62	Kec. Sipora Utara	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	175	kali	598.695.000	30	41.900.000	71	59.439.000	70	59.390.000	98,59	99,92	100	101.290.000	57,14	16,92	Kec. Sipora Utara	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Administrasi Umum																	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin yang dibutuhkan	175	kali	-	0	-	2	22.870.422	2	22.850.000	100,00	99,91	2	22.850.000	1,14	16,92	Kec. Sipora Utara	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik	12	bulan	768.036.000	12	48.680.350	12	30.000.000	12	27.325.200	100,00	91,08	24	76.005.550	200,00	9,90	Kec. Sipora Utara	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat dan bahan pembersih yang tersedia	183	jenis	115.110.000	38	10.054.000	13	4.688.300	13	4.681.000	100,00	99,84	51	14.735.000	27,87	12,80	Kec. Sipora Utara	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	87	unit	720.000.000	10	40.118.300	14	55.881.000	14	53.853.500	100,00	96,37	24	93.971.800	27,59	13,05	Kec. Sipora Utara	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10	unit	115.110.000	3	8.000.000	6	4.380.000	6	4.380.000	100,00	100,00	9	12.380.000	90,00	10,75	Kec. Sipora Utara	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat																	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan																	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen perizinan yang diurus	550	berkas	233.999.500	85	23.933.000	85	18.300.000	85	17.960.000	100,00	98,14	170	41.893.000	30,91	17,90	Kec. Sipora Utara	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah penduduk yang terekam KTP-EL	1700	orang	97.905.500	300	59.915.000	100	34.435.000	100	34.335.000	100,00	99,71	400	94.250.000	23,53	96,27	Kec. Sipora Utara	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan																
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan	6	kali	346.589.500	1	29.893.000	1	16.134.800	1	16.134.800	100,00	100,00	2	46.027.800	33,33	13,28	Kec. Sipora Utara
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi PKK	46	kali	523.188.000	1	2.775.000	1	4.950.000	1	4.950.000	100,00	100,00	2	7.725.000	4,35	1,48	Kec. Sipora Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan																
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya HUT-RI	5	kali	350.000.000	0	-	1	16.952.500	1	16.952.500	100,00	100,00	1	16.952.500	20,00	4,84	Kec. Sipora Utara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkat Pelaksanaan APBDesa yang efektif dan efisien																
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi ADD	108	kali	905.237.000	18	58.577.500	18	29.919.000	18	29.379.000	100,00	98,20	36	87.956.500	33,33	9,72	Kec. Sipora Utara
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan desa	0		-	0	0	6	55.334.000	6	54.614.000	100,00	98,70	6	54.614.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Kec. Sipora Utara

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
UNSUR KEWILAYAHAN																	
KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah																
Evaluasi Kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	36	dokumen	455.000.000	6	41.640.000	6	36.070.000	6	36.070.000	100,00	100,00	12	77.710.000	33,33	17,08	Kec. Siberut Barat Daya
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan																
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya honorarium pelaksana kegiatan dan gaji pegawai kontrak	141	org	424.453.000	27	448.570.500	29	421.299.000	26	396.819.573	89,66	94,19	53	845.390.073	37,59	199,17	Kec. Siberut Barat Daya
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		26	jenis	97.905.500	12	10.000.000	10	5.997.650	10	5.497.650	100,00	91,66	22	15.497.650	84,62	15,83	Kec. Siberut Barat Daya
Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetak dan pengandaan yang tersedia	65	jenis	167.942.500	12	5.590.000	5	7.000.100	5	5.997.100	100,00	85,67	17	11.587.100	26,15	6,90	Kec. Siberut Barat Daya
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	175	kali	598.695.000	12	149.775.000	40	49.950.000	35	39.760.000	87,50	79,60	47	189.535.000	26,86	31,66	Kec. Siberut Barat Daya
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Administrasi Umum																
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin yang dibutuhkan	175	kali	-	0	-	2	18.000.275	2	14.870.000	100,00	82,61	2	14.870.000	1,14	100,00	Kec. Siberut Barat Daya
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya administrasi umum	100	persen		0	-	2	33.089.000									
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik	12	bulan	768.036.000	12	55.195.350	12	49.000.000	12	48.980.000	100,00	99,96	24	104.175.350	100,00	13,56	Kec. Siberut Barat Daya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	7	unit	720.000.000	10	40.118.300	7	15.000.000	7	12.000.000	100,00	80,00	17	52.118.300	242,86	7,24	Kec. Siberut Barat Daya
Peemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunannya lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunannya lainnya	1	unit	115.110.000	0	-	1	47.153.000	1	40.153.000	100,00	85,15	1	40.153.000	100,00	34,88	Kec. Siberut Barat Daya
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung	1	unit	100.000.000			1	26.000.000	1	19.050.000	100,00	73,27	1	19.050.000	100,00	19,05	Kec. Siberut Barat Daya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan																
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah penduduk yang terekam KTP-EL	1700	orang	97.905.500	300	20.000.000	300	30.280.000	300	29.140.000	100,00	96,24	600	49.140.000	35,29	50,19	Kec. Siberut Barat Daya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan																
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan	6	kali	346.589.500	1	20.680.000	1	23.965.000	1	20.465.000	100,00	85,40	2	41.145.000	33,33	11,87	Kec. Siberut Barat Daya
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkat Pelaksanaan APBDesa yang efektif dan efisien	100	persen														
koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi ADD	108	kali	905.237.000	1	50.000.000	18	26.520.000	16	22.520.000	88,89	84,92	17	72.520.000	15,74	8,01	Kec. Siberut Barat Daya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAN BUPATIEN/KOTA	Indek RB, Indek Kepuasan masyarakat, Persentase peningkatan pelayanan dan																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
	kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi perangkat Daerah				-												
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	Kali	61.800.000	0	-	1	30.800.000	1	30.800.000	100,00	100,00	1	30.800.000	100	49,84	Kec. Sibereng
ADAMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi perangkat Daerah																
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		125	org	3.319.070.000	75	1.991.442.000	25	663.814.000	25	646.762.000	100,00	97,43	100	2.638.204.000	80,00	79,49	Kec. Sibereng
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		50	Jenis	10.002.500	30	6.001.500	1	2.000.500	1	2.000.500	100,00	100,00	31	8.002.000	62,00	80,00	Kec. Sibereng
Penyediaan Logistik	Tersedianya ATK	150	Jenis	272.504.611	25	8.434.000	25	14.083.500	21	13.976.100	84,00	99,24	46	22.410.100	30,67	8,22	Kec. Sibereng
	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	108	Jenis	442.574.098	18	1.521.000	18	1.536.700	13	1.060.700	72,22	69,02	31	2.581.700	28,70	0,58	Kec. Sibereng
	Tersedianya Makan dan Minum	21	Jenis	124.824.923	6	8.024.000	6	13.800.000	4	13.192.100	66,67	95,59	10	21.216.100	47,62	17,00	Kec. Sibereng
Penyediaan barang cetak dan penggandaan		30	Jenis	17.517.000	18	10.510.200	6	3.503.400	2	2.232.000	33,33	63,71	20	12.742.200	66,67	72,74	Kec. Sibereng
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		48	Kali	347.790.000	26	208.674.000	12	84.757.000	11	83.171.000	91,67	98,13	37	291.845.000	77,08	83,91	Kec. Sibereng
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		60	Rekening	30.000.000	36	18.000.000	12	6.000.000	1	6.000.000	8,33	100,00	37	24.000.000	61,67	80,00	Kec. Sibereng
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan																
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20	Unit	30.000.000	12	18.000.000	4	6.000.000	3	6.000.000	75,00	100,00	15	24.000.000	75,00	80,00	Kec. Sibereng
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
	Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
COORDINASI PEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa																
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		5	Kali	100.000.000	3	60.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	100,00	100,00	4	80.000.000	80,00	80,00	Kec. Sibereng
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan		5	Kali	99.999.500	3	59.999.700	1	19.999.900	1	16.329.900	100,00	81,65	4	76.329.600	80,00	76,33	Kec. Sibereng
PROGRGAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek RB, Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan masyarakat																
FASILITASI REKOMENDASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang di dampingi pada kegiatan pendampingan pelaksanaan pelaksanaan ADD/APBDesa dan Pemilihan Kepala Desa																
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		20	Kali	382.770.000	12	229.662.000	4	76.554.000	4	74.097.000	100,00	96,79	16	303.759.000	80,00	79,36	Kec. Sibereng
Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa		1	Kali	80.000.000	0	-	1	76.171.000	1	76.144.000	100,00	99,96	1	76.144.000	100,00	95,18	Kec. Sibereng
UNSUR KEWILAYAHAN																	
KECAMATAN SIBERUT UTARA																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah																
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Laporan	127.865.000	10	127.865.000	10	127.865.000	10	127.765.500	100,00	99,92	20	255.630.500	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Siberut Utara	14	bln	1.816.150.010	14	1.816.150.010	14	1.816.150.010	12	1.755.506.558	85,71	96,66	26	3.571.656.568	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang dibutuhkan untuk Menunjang Administrasi Kantor	44	Orang	580.228.000	44	580.228.000	44	580.228.000	44	580.232.000	100,00	100,00	88	1.160.460.000	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara	
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum																	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Listrik Yang dibutuhkan yang Dibutuhkan	8	Jenis	1.515.100	8	1.515.100	8	1.515.100	8	1.515.100	100,00	100,00	16	3.030.200	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Baan Logistik yang Dibutuhkan																	
	Jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor Yang Dibutuhkan	27	jenis	19.389.100	27	19.389.100	27	19.389.100	27	19.389.100	100,00	100,00	54	38.778.200	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara	
	Jumlah dan Jenis Peralatan Kebersihan yang dibutuhkan	14	Jenis	2.657.300	14	2.657.300	14	2.657.300	14	2.657.300	100,00	100,00	28	5.314.600	101,00	101,00	Kec. Siberut Utara	
	Jumlah Makanan dan Minuman Kantor dan Rapat yang di butuhkan	5	jenis	12.215.000	5	12.215.000	5	12.215.000	5	12.215.000	100,00	100,00	10	24.430.000	102,00	102,00	Kec. Siberut Utara	
	Jumlah Makan Minum Rapat yang dibutuhkan	2	Jenis	9.350.000	2	9.350.000	2	9.350.000	2	9.350.000	100,00	100,00	4	18.700.000	103,00	103,00	Kec. Siberut Utara	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang di butuhkan	3	Item	2.656.300	3	2.656.300	3	2.656.300	3	2.656.300	100,00	100,00	6	5.312.600	104,00	104,00	Kec. Siberut Utara	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	8	kali	97.589.000	8	97.589.000	8	97.589.000	8	97.589.000	100,00	100,00	16	195.178.000	105,00	105,00	Kec. Siberut Utara	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang Di bayarkan	15	Rekening	26.000.000	9	26.000.000	3	26.000.000	3	22.689.093	100,00	87,27	12	48.689.093	80,00	187,27	Kec. Siberut Utara	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Operasioal perkantoran																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Mobil Jabatan yang di Service	1	Unit	27.800.000		27.800.000	2	27.800.000	2	25.800.000	100,00	92,81	2	53.600.000	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	4															16
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	4	unit	4.000.000		4	4.000.000	4	4.000.000	100,00	100,00	4	8.000.000	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6		19.720.000		2	19.720.000	2	19.720.000	100,00	100,00	2	39.440.000	100,00	100,00	Kec. Siberut Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat							0	-							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan							0	-							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman E-KTP	500	orang	18.191.424		500	18.191.424	500	18.191.000	100,00	100,00	1000	36.382.424	200,00	200,00	Kec. Siberut Utara
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat							0	-							
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan							0	-							
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	34.709.000		1	34.709.000	1	32.719.000	100,00	94,27	2	67.428.000	200,00	194,27	Kec. Siberut Utara
Peningkatan EfektipitasKeegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan PKK di Wilayah Kecamatan	1	Kegiatan	48.403.000		1	48.403.000	1	48.393.000	100,00	99,98	2	96.796.000	200,00	199,98	Kec. Siberut Utara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat							0	-							
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan				0		-	0	-							
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Terlaksananya HUT-RI	1	Kegiatan	38.589.000		1	38.589.000	1	38.589.000	100,00	100,00	2	77.178.000	200,00	200,00	Kec. Siberut Utara

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat																
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pengetahuan dan Kapasitas Aparatur Desa																
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Ferifikasi Pemerintahan Desa	6	Desa	37.520.000	6	37.520.000	6	37.520.000	6	37.125.000	100,00	98,95	12	74.645.000	200,00	198,95	Kec. Siberut Utara
UNSUR KEWILAYAHAN																	
KECAMATAN SIBERUT BARAT																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah																
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah																
Evaluasi Kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	60	Dok	425.039.000	15	165.805.000	15	165.805.000	15	160.037.000	100,00	96,52	30	325.842.000	50,00	76,66	Kec Sibarat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan																
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terbayarnya honorarium pelaksana kegiatan dan gaji pegawai kontrak	104	orang	2.843.560.000	26	649.530.000	26	649.530.000	26	626.499.000	100,00	96,45	52	1.276.029.000	50,00	44,87	Kec Sibarat
Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya layanan administrasi umum																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	37	Item	32.129.500	20	3.960.000	20	3.960.000	20	3.948.450	100,00	99,71	40	7.908.450	108,11	24,61	Kec Sibarat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	80	Item	94.576.100	57	18.272.100	57	18.272.100	57	16.272.100	100,00	89,05	114	34.544.200	142,50	36,53	Kec Sibarat
	Jumlah Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	94	Item	142.097.500	49	7.131.000	49	7.131.000	49	6.401.000	100,00	89,76	98	13.532.000	104,26	9,52	Kec Sibarat

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
	Jumlah Natura dan Pakan Natura	38	item	14.540.000	38	14.540.000	38	14.540.000	34	12.540.000	89,47	86,24	72	27.080.000	189,47	186,24	Kec Sibarat
	Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia	1050	Bks	102.472.000	200	8.500.000	200	8.500.000	200	8.500.000	100,00	100,00	400	17.000.000	38,10	16,59	Kec Sibarat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	48	Kali	629.390.000	13	133.600.000	13	133.600.000	13	132.850.000	100,00	99,44	26	266.450.000	54,17	42,33	Kec Sibarat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik	48	bulan	216.480.000	12	24.000.000	12	24.000.000	12	24.000.000	100,00	100,00	24	48.000.000	50,00	22,17	Kec Sibarat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum																
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perizinannya	28	unit	89.725.000	6	11.000.000	6	11.000.000	5	10.000.000	83,33	90,91	11	21.000.000	39,29	23,40	Kec Sibarat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan	1300	Berkas	345.339.900	300	74.420.000	300	74.420.000	300	74.410.000	100,00	99,99	600	148.830.000	46,15	43,10	Kec Sibarat
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	4	Kegiatan	217.678.000	1	41.903.000	1	41.903.000	1	41.803.000	100,00	99,76	2	83.706.000	50,00	38,45	Kec Sibarat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat																
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat																
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkat Pelaksanaan APBDesa yang efektif dan efisien	85	persen	437.608.000	85	80.438.000	85	80.438.000	75	80.220.000	88,24	99,73	160	160.658.000	188,24	36,71	Kec Sibarat
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi ADD	12	Desa	437.608.000	4	80.438.000	4	80.438.000	4	80.220.000	100,00	99,73	8	160.658.000	66,67	36,71	Kec Sibarat

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
Urusan Pemerintahan Umum																	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																	
Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik																	
Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik Daerah	Terbayarnya Bantuan Partai politik	45	Kali	3.210.000.000	33	150.000.000	9	642.228.000	9	642.228.000	100,00	100,00	42	792.228.000	93,33	24,68	Kesbangpolinmas
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN																	
Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa orma, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Terawasinya ormas di Kabupaten Kepulauan Mentawai	50	kejadian	1.650.000.000	30	1.050.000.000	10	90.658.000	8	88.928.200	80,00	98,09	38	1.138.928.200	76,00	69,03	Kesbangpolinmas
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA																	
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan Budaya																	

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	4															16	
Pelaksanaan kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Terjciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama	20	kali	100.000.000	1	100.000.000	1	75.252.300	1	68.399.800	100,00	90,89	2	168.399.800	10,00	168,40	Kesbangpolin mas
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																	
Pelaksanaan kebijakan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Pencegahaan dini gejala di masyarakat	10	kecamatan	278.200.000	10	222.560.000	10	55.640.000	8	51.716.200	80,00	92,95	18	274.276.200	180,00	98,59	Kesbangpolin mas
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terkendalinya cegah dini konflik di Masyarakat	20	kecamatan	234.437.500	10	187.550.000	10	46.887.500	4	36.330.000	40,00	77,48	14	223.880.000	70,00	95,50	Kesbangpolin mas
Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Terpantauannya tenaga kerja asing	20	kecamatan	257.680.000		206.144.000	10	51.536.000	6	40.298.500	60,00	78,19	6	246.442.500	30,00	95,64	Kesbangpolin mas
Jumlah										94,73	91,68						
Rata-Rata Capaian Realisasi Keuangan (%)										91,68							

Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		
3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi						

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

1. Merupakan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 telah menetapkan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satu-satunya kabupaten tertinggal di Propinsi Sumatera Barat.

Penetapan ini menjadi pertanda bahwa masih terbatasnya/rendahnya capaian pembangunan terkait perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Hingga tahun 2021, berdasarkan hasil Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa desa mandiri sudah ada 3 desa, desa maju sudah ada 5 desa, desa berkembang sebanyak 22 desa, dan desa tertinggal sebanyak 13 desa.

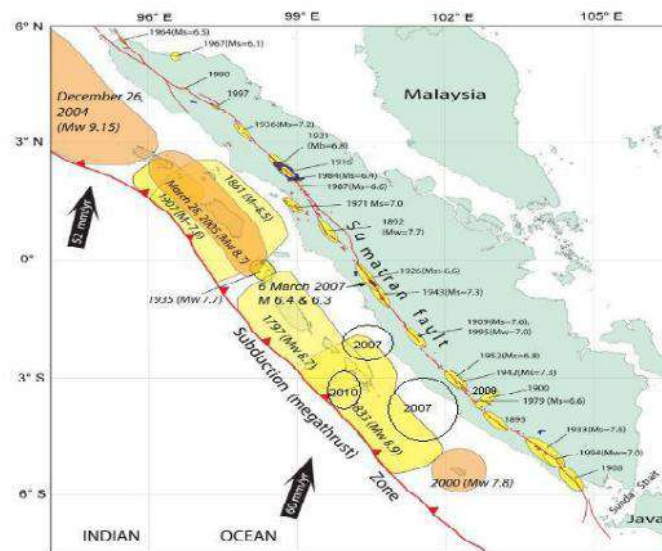
Indikator daerah tertinggal yang masih sangat perlu perhatian dan intervensi program pembangunan antara lain pada aksesibilitas, sarana dan prasarana, perekonomian masyarakat dan sumber daya manusia. Terkait dengan infrastruktur jalan dengan kondisi jalan Trans Mentawai sebagai bagian dari sistem transportasi daerah yang menunjang aksesibilitas tiap pulau (empat pulau besar) dengan capaian hingga saat ini dengan kondisi mantap (rabat beton) sepanjang 72,10 km atau 18,35

persen dari panjang trans Mentawai dan masih ada panjang trans Mentawai yang belum terbuka yaitu sepanjang 38,9 km atau 9,89 persen dan telah dibuka sepanjang 282 km. Sebagai koridor jalan utama maka dibutuhkan jalan penghubung Trans Mentawai dengan permukiman masyarakat yang menjadi pusat aktivitas sosial ekonomi, melalui Pembangunan Jalan Simpang II-Kantor Camat-Berkat sebagai penghubung/akses sosial ekonomi masyarakat antar desa yang selama ini masih menggunakan transportasi laut (boat). Sebagai bagian dari sistem konektivitas daerah, selain ketersediaan jalan sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah rencana pembangunan pelabuhan menjadi kebutuhan untuk menjawab konektivitas total antar wilayah/antar pulau dan konektivitas regional antar kabupaten dan propinsi sehingga nantinya memudahkan dalam aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang didukung sarana/armada tol laut dan angkutan perintis.

2. Merupakan Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang berisiko tinggi gempa dan tsunami karena terletak di lempeng *Sundaland* di sepanjang pantai barat Sumatera memanjang hingga Selat Sunda. LIPI (2012) mencatat kejadian gempa besar di Mentawai diantaranya terjadi pada tahun 1935 di Pulau Siberut dan Pulau Nias (7,7 SR), tahun 2007 diantara Pulau Sipora dan Pulau Painan (7,7 SR), dan tahun 2010 di Pagai Selatan (7,7 SR).

Namun, masih ada potensi gempa berkekuatan sekitar 8,8 SR di bagian bawah Pulau Siberut, Sipora, dan Pagai Utara, dan gempa bumi ini akan mengancam Mentawai, Kota Padang, dan Bengkulu (Chlieh, Avouac, Sieh, Natawidjaja, & Galetzka, 2008).



Gambar 4.1
Segmentasi Sumber Gempa di Jalur *Megathrust* Sumatra dan Pegunungan Bukit Barisan

Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan potensi yang rawan bencana baik berupa gempa bumi (tektonik), gelombang besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Dari 43 desa yang ada, 33 desa diantaranya merupakan desa pesisir, yang pada kondisi saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana terhadap bahaya tsunami. Sebagaimana yang telah terjadi pada tanggal 25 Oktober 2010, bencana gempa bumi berkekuatan 7,2 SR (atau 7,5 SR menurut USGS) telah memicu terjadinya gelombang tsunami.

Jika dilihat dari analisis kecenderungan kejadian bencana yang terjadi di Kepulauan Mentawai, gempa bumi, tsunami, banjir, cuaca ekstrem, dan abrasi memiliki kecenderungan peningkatan intensitas.

Tabel 2.73
Kecenderungan Kejadian Bencana
di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	JENIS BENCANA	KECENDERUNGAN KEJADIAN
1	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Meningkat
2	Gempa Bumi	Meningkat
3	Tsunami	Meningkat
4	Banjir	Meningkat
5	Epidemi dan Wabah Penyakit	Meningkat
6	Cuaca Ekstrim	Tetap
7	Tanah Longsor	Tetap
8	Kekeringan	Tetap
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tetap

Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kecenderungan kejadian bencana yang meningkat di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi bencana gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tsunami, banjir serta epidemi dan wabah penyakit sedangkan kecenderungan kejadian bencana yang tetap meliputi bencana cuaca ekstrim, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Analisis kecenderungan ini merupakan dasar dalam menentukan bencana prioritas yang akan berpengaruh terhadap kebijakan penanggulangannya untuk masing-masing ancaman. Begitu juga jika dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas

bahaya terdampak paling besar. Skala indeks bahaya yang digunakan dibagi kedalam beberapa 3 kategori yaitu rendah (0,0 - 0,33), sedang (>0,33 – 0,66) dan tinggi (>0,66 – 1,00).

Tabel 2.74 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrim, tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Tingkat bahaya sedang berpotensi terhadap bencana gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan sedangkan tingkat bahaya rendah terhadap bencana epidemi dan wabah penyakit. Indeks bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

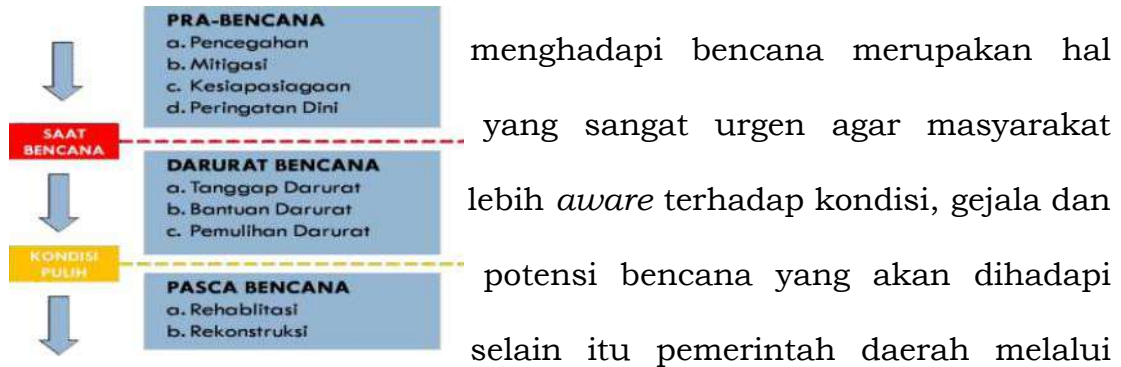
Tabel 2.74
Tingkat Bahaya Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	BENCANA	TINGKAT BAHAYA
1	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi
2	Gempa Bumi	Tinggi
3	Tsunami	Tinggi
4	Cuaca Ekstrim	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi
6	Banjir	Tinggi
7	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tinggi
8	Kekeringan	Sedang
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

Sumber: Indeks Risiko Bencana Nasional, 2021

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana (IRBI) Tahun 2021 yang dirilis oleh BNPB bahwa untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih masuk pada bencana dengan kategori tinggi dengan nilai 197,20. Penyelenggaraan penanggulangan

bencana telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Memastikan kesiapan masyarakat dalam



menghadapi bencana merupakan hal yang sangat urgen agar masyarakat lebih *aware* terhadap kondisi, gejala dan potensi bencana yang akan dihadapi selain itu pemerintah daerah melalui

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa melakukan pendampingan, penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat juga penyediaan infrastruktur kebencanaan baik yang didanai oleh APBD dan diluar APBD sebagai upaya untuk pencegahan dan mitigasi resiko bencana.

3. Tingkat Kemiskinan yang Tinggi

Salah satu indicator ditetapkananya Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah tertinggal adalah karena tingkat kemiskinannya yang sangat tinggi yaitu 14,84 persen pada tahun 2021 sebagai dampak pandemik COVID-19 yang melanda seluruh daerah tak terkecuali Kepulauan Mentawai. Penanganan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya sektor sosial saja, penyelesaiannya harus terintegrasi dan terpadu (lintas sektor) dengan basis data yang akurat dan tepat sasaran. Penuntasan

atau pengurangan kemiskinan menjadi tujuan dan cita-cita pembangunan daerah, program pembangunan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya beli dan mengurangi beban hidup masyarakat miskin menjadi pilihan terbaik dalam mengentaskan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Mentawai. Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah bahkan tidak atau belum menempuh jenjang sekolah sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi yang menjadikannya miskin seperti pada pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh negara dan daerah tak terkecuali Kepulauan Mentawai. Masyarakat Mentawai dengan lapangan pekerjaan utama didominasi pada sektor pertanian yaitu 66,45 persen atau sebanyak 31.504 jiwa sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi yang terjadi terutama pada pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas orang sehingga distribusi barang/orang menjadi terganggu dan beberapa mata pencarian perorangan, usaha mikro, kecil menjadi terhenti. Oleh karena itu, melalui program pemerintah dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat untuk menjaga daya beli adalah melalui pemberian jaring pengaman sosial. Untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 telah dikucurkan bantuan langsung tunai dari Dana Desa untuk 48.000 jiwa. Begitu juga dengan program dari pemerintah pusat melalui Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako) menysasar sekitar 4.161 kepala keluarga, Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak

3.835 kepala keluarga, Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS sebanyak 2.442 kepala keluarga, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3.604 kepala keluarga dan jaminan kesehatan daerah baik JKN, Jamkesda dengan total sekitar 44.672 jiwa. Harapannya dengan jaring pengaman sosial ini maka dapat menjaga ketahanan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam menghadapi gejolak sosial ekonomi yang terjadi khususnya pada pandemi COVID-19.

Kemiskinan akan sangat dekat kaitannya dengan rendahnya partisipasi sekolah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu kemampuan dan kemauan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya kecukupan asupan gizi menjadi hal yang akan sulit dipenuhi jika masyarakat atau keluarga tersebut dalam keadaan miskin.

Prevalensi stunting sebagai indikator untuk melihat permasalahan kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sangat rentan terjadi pada masyarakat atau keluarga miskin, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Dengan capaian prevalensi stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 sebesar 27,3 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan menjadi isu strategis dalam pembangunan manusia kedepan.

4. Tingginya Kesenjangan Wilayah Baik di Dalam Pulau Maupun antar Daerah Juga Kesejangan Sosial Ekonomi Seperti Pendapatan, Gender, Pengangguran serta Sarana Infrastruktur Publik

Pertumbuhan ekonomi yang diartikan sebagai peningkatan produktivitas suatu daerah yang diyakini menjadi gambaran peningkatan ekonomi daerah ternyata tidak serta merta berbanding lurus dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi menurunnya angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, dan menurunnya disparitas pendapatan begitu juga semakin bekurangnya kesenjangan sosial lainnya seperti gender, kemiskinan antar wilayah dan PMKS.

Indikator untuk melihat perkembangan capaian kinerja pembangunan gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender. Nilai IPG di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 berada pada angka 89,81 (BPS, 2022) dan menempai posisi 18 diantara 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat di atas Kabupaten Dharmasraya. Nilai ini menunjukkan Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada pencapaian yang rendah dimana deviasi antara IPM Laki-laki dan IPM Perempuan > 10%. Namun di sisi lain, nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif sama dengan kondisi di Sumatera Barat dimana pada tahun 2021. Angka IDG Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai angka 47,36 (BPS, 2022) yang

menempati posisi 19 diantara 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Begitu juga dari perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di 4 pulau besar di Kepulauan Mentawai menunjukkan belum meratanya pembangunan jalan, persentasenya antara lain di Pulau Sipora sebesar 92,20 persen, di Pulau Pagai 63,49 persen, di Pulau Pagai Selatan sebesar 87,88 persen dan di Pulau Siberut sebesar 72,75 persen.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun, bukan berarti pertumbuhan ekonomi menjamin kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan pembangunan diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat ke arah lebih baik. Ukuran keberhasilan pembangunan idealnya harus menyejahterakan masyarakat di wilayah tersebut, bukan segelintir kelompok atau orang saja.

5. Memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum dikelola dengan (Hulu-Hilir) baik itu Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata

Masyarakat Mentawai secara sosial budaya telah menjadikan alam sebagai bagian dari kehidupan. Hasil kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan ekonomi masyarakat berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan tanpa ada pengolahan yang

menciptakan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Produk komoditi pertanian belum dikembangkan secara terpadu/terintegrasi baik di hulu, hilir hingga pada pemasarannya begitu juga belum pada *market oriented*, belum lagi jika dilihat dari kapasitas penyusul dan petani yang masih sangat tradisional. Indikator ini dapat dilihat dari kontribusi industri pengolahan dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar 2,84 persen.

Pengembangan sektor jasa terutama pariwisata juga belum menunjukkan pencapaian yang berarti. Dilihat dari sarana dan prasarana, infrastruktur pariwisata yang dibangun baik dari sisi amenities, atraksi dan aksesibilitas masih sangat rendah. Begitu juga dengan *branding* dan promosi yang masih sangat terbatas, juga terdapat kelemahan dalam pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif sebagai unsur pendukung pemasaran dan pengembangan pariwisata. Hal penting lainnya adalah kelembagaan pariwisata yang belum terbentuk untuk mengelola unit usaha pariwisata yang profesional yang memberikan kontribusi pada perekonomian daerah dan masyarakat. Indikator pencapaian ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi sektor jasa dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor jasa dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar 0,77 persen.

6. Daya saing yang rendah (SDM, Infrastruktur, Inovasi, Regulasi, Tata Kelola Pemerintah, Stabilitas Sosial Ekonomi, Litbang, Tenaga Kerja Terampil, Telekomunikasi)

Peningkatan daya saing daerah tidak hanya menyangkut pembenahan infrastruktur, akan tetapi juga pembenahan pada sumber daya manusia, kelembagaan dan perilaku masyarakat dalam merespon program dan kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu peningkatan daya saing daerah perlu dirumuskan sedemikian rupa dengan mengintegrasikan dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi, yang dicirikan persaingan bebas yang bersifat global, dimana suatu masyarakat hanya akan eksis atau bertahan apabila mereka mempunyai daya saing tinggi. Dilihat dari indikator makro terhadap pencapaian kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, reformasi birokrasi, perekonomian daerah, tenaga kerja terampil, kapasitas inovasi, kesiapan teknologi masih sangat rendah.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan capaian kinerja yang kemudian dilakukan telaah lebih mendalam dengan perangkat daerah pengampu urusan, berdasarkan capaian tersebut menjadi catatan terhadap permasalahan yang akan ditarik dan diidentifikasi pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan selama 4 tahun kedepan.

2.3.2.1 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Rata lama sekolah yang masih sangat rendah.
- 2) Masih rendahnya capaian SPM urusan pendidikan.
- 3) Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah anak usia dini.
- 4) Masih rendahnya kualitas/mutu tenaga pendidik (sertifikasi).
- 5) Masih rendahnya kualitas peserta didik (belum pernah juara tingkat propinsi bahkan nasional).
- 6) Belum adanya kurikulum muatan lokal sebagai pengenalan dan pengembangan budaya Menyawai.
- 7) Belum ada konsep pendidikan berasrama dalam upaya menjawab kondisi geografis Kepulauan Mentawai yang tersebar dengan akses layanan pendidikan yang terbatas.

- 8) Belum memadainya kualitas dan ketersediaan sarana layanan dan fasilitas pendidikan.
- 9) Masih terdapatnya lembaga pendidikan yang belum terakreditasi maupun masih terakreditasi B
- 10) Masih lambatnya transformasi digital dalam implementasi proses belajar mengajar dan administrasi pendidikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan.
- 2) Masih adanya kasus angka kematian bayi dan angka kematian balita.
- 3) Masih tingginya angka prevalensi stunting.
- 4) Belum adanya rumah sakit di setiap pulau besar (Siberut, Sikakap) sebagai bagian dari sistem kesehatan daerah.
- 5) Masih terbatasnya tenaga dokter umum, dokter spesialis dan alat-alat kesehatan hingga ke pusat-pusat layanan kesehatan di desa (Poskesdes).
- 6) Belum tercapainya (100 persen) Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan.
- 7) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kasus penyakit menular dan tidak menular.
- 8) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Masih rendahnya kondisi jalan mantap (dengan spesifikasi beton/aspal)
- 2) Belum terbukanya akses darat (Jalan) Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan.
- 3) Masih rendahnya panjang jalan lingkungan yang dibangun.
- 4) Masih rendahnya panjang jalan koridor/jalan penghubung antar desa yang dibangun.
- 5) Masih rendahnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak.
- 6) Masih rendahnya cakupan layanan air bersih
- 7) Belum adanya infrastruktur persampahan (TPA, TPS)
- 8) Belum optimalnya pengendalian abrasi pantai pada daerah yang berada pada kawasan pantai.
- 9) Masih banyaknya target pada urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang belum tercapai khususnya capaian SPM.
- 10) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum adanya dasar hukum yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran (RRTR yang belum dibuat dan dilegalisasi).

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Belum adanya adanya desa yang memiliki Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- 2) Masih rendahnya kawasan permukiman yang dilengkapi dengan PSU.
- 3) Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh.
- 4) Masih banyaknya permukiman potensi bencana alam belum di relokasi.
- 5) Belum adanya hamparan lahan/tanah yang dikuasai pemerintah untuk kepentingan pembangunan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Masih belum adanya strategi mitigasi bencana kebakaran, serta minimnya sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran.
- 3) Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan masih terjadinya gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum.

- 4) Masih tingginya indeks resiko bencana Kepulauan Mentawai.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Masih maksimalnya pengelolaan dan updating data DTKS.
- 2) Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dan stakeholder dalam penggunaan data DTKS.
- 3) Kurangnya penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana.
- 4) Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin maupun rentan melalui bantuan sosial yang tepat sasaran

2.3.2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Belum optimalnya pengembangan dan pendampingan kewirausahaan (*entrepreneurship*) mulai dari hulunya pengembangan dan peningkatan kapasitas sampai pada hilirnya yaitu bisa mengembangkan usaha atau berwirausaha (mandiri).
- 2) Belum adanya rencana pembangunan tenaga kerja kabupaten.
- 3) Masih rendahnya kompetensi/skill tenaga kerja.

- 4) Masih terbatasnya akses pencari kerja terhadap lapangan pekerjaan.
 - 5) Belum adanya pendampingan terhadap akses tenaga kerja dan enterprenuer ke dunia usaha, permodalan dan pasar.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Masih rendahnya sosialisasi dan pengawasan terhadap perlindungan anak.
 - 3) Belumnya optimalnya pemenuhan hak-hak anak
 - 4) Kurangnya keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Masih tingginya ketergantungan pangan dari luar Mentawai.
- 2) Masih rentannya ketahanan pangan daerah.
- 3) Masih perlu ditingkatkannya panganekaragaman pangan dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah masih di iukota kabupaten (tuapejat sekitarnya), sarana dan prasarana yang belum memadai dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah.
- 3) Masih terbatasnya aparaturnya dalam melakukan pengawasan, pengujian dan penegakan lingkungan hidup.
- 4) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Belum optimalnya penggunaan data kependudukan untuk perumusan kebijakan daerah.
- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Kematian, Akta Perceraian dan dokumen kependudukan lainnya.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Masih rendahnya peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat.
- 2) Masih lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Lembaga Desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa.
- 3) Kurang optimalnya peran lembaga ekonomi desa (BUMDes) dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan kerjasama desa.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait informasi kependudukan.
- 2) Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
- 3) Masih kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga.
- 4) Masih Kurangnya sosialisasi terkait kualitas dan ketahanan keluarga.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan seperti di pelabuhan, PJU, rambu-rambu.
- 2) Belum terbangunnya 5 pelabuhan penyeberangan sebagai simpul konektivitas sistem transportasi daerah.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan pelayaran dalam wilayah kabupaten (antar pulau).
- 4) Masih terbatasnya jalur/trayek pelayaran menuju Kepulauan Mentawai.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Belum adanya grand design pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE.
- 2) Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.
- 3) Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet
- 4) Belum optimalnya pelayanan, publikasi dan penyebarluasan informasi publik berbasis elektronik.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Masih banyaknya lembaga koperasi yang tidak aktif.
- 2) Minimnya diversifikasi usaha koperasi.
- 3) Minimnya pelaku usaha mikro yang tumbuh menjadi wirausaha mandiri.

- 4) Masih rendahnya pendampingan kewirausahaan dan kepada pelaku usaha mikro.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan regulasi tentang Pemberian Kemudahan dan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal.
- 2) Sulitnya mengurus kerjasama atau pembebasan lahan untuk investasi disebabkan lahan berpotensi investasi pada umumnya adalah tanah adat/ulayat.
- 3) Belum optimalnya penataan regulasi daerah untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah.
- 4) Belum lengkapnya data kajian terkait potensi dan peluang investasi.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Belum optimalnya SDM keolahagaan.
- 2) Terbatasnya ruang kreatif untuk menumbuhkan talenta pemuda pada berbagai bidang.
- 3) Belum optimalnya peran dan fungsi Organisasi Kepemudaan.
- 4) Masih minimnya event yang bermuatan kompetisi kepemudaan dan keolahragaan.
- 5) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga.

- 6) Masih rendahnya pembinaan terhadap bibit atlet potensial dan pembinaan bagi atlet.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Belum defenitifnya SOTK yang mengurus statistik daerah.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah.
- 2) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah.
- 3) Belum adanya SDM persandian yang kompeten dalam memastikan keamanan sistem infirmasi pemerintah daerah.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Rendahnya pengenalan dan pemahaman budaya daerah oleh kalangan muda.
- 2) Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan sehingga belum terintegrasi dengan sektor lainnya.
- 3) Belum terselenggaranya event atraksi kebudayaan secara kontiniu.
- 4) Masih sedikitnya pengakuan dan penetapan cagar budaya.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Rendahnya indeks kegemaran membaca masyarakat.
- 2) Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
- 3) belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat (Pengembangan perpustakaan berbasis digital/e-Book), pustaka keliling

q. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah.
- 2) Terbatasnya tempat penyimpanan arsip, pengelola dan keamanan penyimpanan arsip.
- 3) Keterbatasan ketersediaan SDM pengelola kearsipan.

2.3.2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Urusan Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan tangkap.
- 2) Masih terbatasnya sarana dan penguasaan teknologi perikanan budidaya.
- 3) Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan usaha kelompok (KUB, kelompok nelayan).
- 4) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan (TPI dan pabrik es).
- 5) Masih rendahnya pendampingan bagi kelompok nelayan tangkap dan budidaya serta pendampingan pada industri pengolahan ikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Belum optimalnya pengembangan destinasi prioritas 3M1K.
- 2) Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan desa wisata.
- 3) Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang menyelenggarakan even/festival.
- 4) Promosi kepariwisataan masih belum efektif dan efisien.

- 5) Belum tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif menunjang pariwisata.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani.
- 2) Belum optimalnya peningkatan produktifitas produksi pertanian.
- 3) Belum optimalnya pendampingan petanin dan kelembagaan tani (kelompok tani).
- 4) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pertanian (jalan pertanian, irigasi), sarana prasarana, lahan, pupuk dan air.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- 2) Belum optimalnya penggunaan pasar sebagai sarana perdagangan.
- 3) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan.
- 4) Minimnya SDM penera alat UTTP.
- 5) Belum Optimalnya Pengawasan Barang Beredar.

- 6) Rendahnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
- Identifikasi permasalahannya adalah:
- 1) Belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten.
 - 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana sentra IKM (revitalisasi IKM Target).
 - 3) Belum optimalnya keterkaitan sektor pertanian dan perikanan dengan sektor industri pengolahan dan sektor industri lainnya.
 - 4) Belum optimalnya pendampingan calon dan pelaku industri mikro dan kecil dalam hal bisnis proses, sertifikasi, manajemen mutu, akses pasar, permodalan.

2.3.2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah pada Unsur Penunjang

a. Unsur Penunjang Perencanaan

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Regulasi pedoman penyusunan perencanaan terbit setelah RKPD mau ditetapkan sehingga seringkali tidak tepat waktu dan membutuhkan usaha lagi untuk menyelaraskan.
- 2) Dokumen perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah;

- 3) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

b. Unsur Penunjang Keuangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.
- 2) Masih rendahnya kontribusi pendapatan daerah diluar pajak dan retribusi daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.
- 3) Belum teradministrasinya aset dengan baik.

c. Unsur Penunjang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN.
- 2) Sistem penilaian kinerja ASN yang belum akurat.
- 3) Rendahnya kualitas dan produktifitas kerja ASN.
- 4) Belum terlaksana sepenuhnya merit sistem.
- 5) Masih terdapatnya ASN yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi dibidangnya.
- 6) Masih belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan.
- 7) Belum dilakukannya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan kepada ASN.

d. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Belum tersedianya tenaga/ SDM peneliti.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan.
- 3) Masih kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 4) Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam pemanfaatan kelitbangan dan berinovasi.

e. Unsur Penunjang Pengawasan

Identifikasi permasalahannya adalah:

- 1) Perlunya peningkatan kualitas SDM auditor melalui pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian temuan yang ada serta peningkatan sosialisasi kepada penyelenggaraan negara terkait tertib administrasi keuangan.
- 2) Masih rendahnya penguatan tata kelola pemerintah melalui pendampingan reformasi birokrasi, penerapan ZI, WBK/WBBM, SAKIP dan berbagai penilaian tata kelola pemerintah lainnya.
- 3) Masih rendahnya kapabilitas APIP dan maturitas SPIP.
- 4) Belum optimalnya peran dan layanan APIP pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah

2.3.3 Standar Pelayanan Minimal

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Seluruh jenis pelayanan pasar dapat terlaksana dengan baik dengan pencapaian setiap Indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.75
Pencapaian SPM
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 persen	108 persen	108 persen
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat setiap tahun	<50	Dibawah kompetensi minimum
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 persen	103 persen	103 persen
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat setiap tahun	<50	Dibawah kompetensi minimum
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 persen	19,05 persen	19,05 persen
2	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	98,8 persen	98,8 persen
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	92,9 persen	92,9 persen
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	94,6 persen	94,6 persen
		Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	120,9 persen	120,9 persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	61 persen	61 persen
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	67 persen	67 persen
		Pelayanan Kesehatan	Jumlah warga negara usia lanjut yang	100 persen	322,2 persen	322,2 persen

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Pada Usia Lanjut	mendapatkan pelayanan kesehatan			
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	28,8 persen	28,8 persen
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	10,9 persen	10,9 persen
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	100 persen	100 persen
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara dengan terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen	88 persen	88 persen
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100 persen	100 persen	0 (tidak ada) kasus
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 persen	55,46 persen	55,46 persen
		Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100 persen	71,05 persen	71,05 persen
4	Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 persen	65 persen	65 persen
		Fasilitasi Penyediaan Rumah yang	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program	100 persen	100 persen	Tidak ada program relokasi

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni			akibat program pemerintah
5	Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/ kota	100 persen	100 persen	100 persen
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	100 persen	100 persen	100 persen
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	100 persen	100 persen
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	100 persen	100 persen
	Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	100 persen	100 persen
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100 persen	100 persen	0 (tidak ada) kasus
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100 persen	100 persen	0 (tidak ada) kasus
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100 persen	100 persen	0 (tidak ada) kasus
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 persen	100 persen	0 (tidak ada) kasus

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100 persen	100 persen	0 (tidak ada) kasus

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,2-5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi ditengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru COVID-19, permanent scar yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok dan krisis energi.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat dan dunia usaha yang kemudian akan dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Komponen konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 5,0-5,2 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diperkirakan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi dan alat kesehatan) serta peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Pemulihan ekonomi yang kuat disertai dengan agenda reformasi struktural pada tahun 2022 diperkirakan memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2022 tumbuh sebesar 5,01 persen, hal ini menunjukkan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I tahun 2021 pada angka minus 0,74 persen. Kondisi perekonomian masyarakat diyakini akan mendekati kondisi normal pada tahun 2022 dan menjadi pondasi kuat untuk melakukan akselerasi pencapaian target pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 menekankan pada peningkatan produktivitas untuk

transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema RKP Tahun 2023 disusun sebagai respon terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021 dan triwulan I tahun 2022. Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat tergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial dalam jangka panjang. Selain itu, pemerintah saat ini perlu meninggalkan *legacy* pembangunan sebagai landasan bagi pemerintahan berikutnya untuk lepas landas sehingga penciptaan lapangan kerja, penciptaan efek pengganda dan peningkatan produktivitas perekonomian jangka menengah-panjang tetap berkelanjutan. Memperhatikan beberapa hal tersebut, maka tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan tersebut menekankan pada pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job* serta percepatan pembangunan pembangunan infrastruktur dasar meliputi penyediaan air bersih, dan sanitasi yang layak.

Kebijakan ekonomi daerah sangat dipengaruhi kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah. Begitu juga untuk kebijakan pembangunan nasional 2023 yang menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dalam upaya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi bagian penting Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam merumuskan strategi pembangunan untuk tahun 2023. Percepatan pemulihan ekonomi menjadi upaya yang dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi daerah menjadi fokus pembangunan guna mendorong terbukanya lapangan pekerjaan, terciptanya wirausaha/UMK dan terwujudnya hilirisasi komoditi unggulan di Kepulauan Mentawai.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional

Pembangunan ekonomi tahun 2023 akan dilaksanakan dalam mendukung proses transformasi ekonomi setelah dua tahun terakhir dihadapkan pada upaya pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Tahun 2023 merupakan momentum untuk menciptakan horizon baru pembangunan dengan menekankan pada strategi mewujudkan sumber daya yang berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi perekonomian domestik, dan pemindahan IKN. Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,9 persen pada tahun 2023. tingkat pertumbuhan tersebut akan meningkatkan nilai GNI per kapita menjadi US\$ 4.720-4.840 pada tahun 2023, dan mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0-4,0 (*yoy*), dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada 13.500-15.000 per US\$.

Arah kebijakan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah panjang serta

menghadapi tantangan yang ada pasca pandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan sehingga akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, 2023

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT (%))	5,3-6,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31-73,49
5	Rasio Gini (nilai)	0,375-0,378
6	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	106-107
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	103-105
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02

Sumber: Ranwal RKP 2023

3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat

Pemulihan ekonomi tahun 2021 terkendala masih merebaknya virus COVID-19 varian delta dan pada tahun 2022 menyebarnya varian omicron. Pelaksanaan vaksinasi yang intens dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat mengendalikan penyebaran dan menurunnya kasus kematian sehingga memberika darapan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi wilayah sumatera secara agregat diperkirakan tumbuh sebesar 5,2-5,7 persen dengan memacu pertumbuhan sektor industri khususnya hilirisasi industri

berbasis komoditas unggulan dan pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan kawasan pariwisata berdaya saing internasional, mempercepat pemerataan pembangunan wilayah pesisir dan daerah 3T.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,60	3,29	3,40	4,57
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	30,64	31,35	32,04	33,12
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	43,75	45,29	48,29	50,6
4	TPT (%)	6,88	6,52	6,25	5,97
5	IPM	72,38	72,65	72,74	73,18
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,47	69,59	69,80	69,98
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	14,09	14,05	14,06
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,99	9,07	9,18	9,28
	- Pengeluaran per Kapita (Rp.Ribu)	10.733	10.790	10.916	11.108
6	Kemiskinan (%)	6,56	6,63	5,70	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin	364,79	370,67	356,45	353,69
8	Gini Rasio	0,301	0,306	0,298	0,296

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah yang termuat pada RPJMD 2021-2026 yaitu difokuskan peningkatan produktivitas sehingga memberikan nilai tambah sektor strategis daerah yaitu pada sektor pertanian, perkebunan pertanian dengan meningkatkan kontribusi sebesar 5,86 persen, sektor industri pengolahan/manufaktur dengan meningkatkan kontribusi sebesar 12,46 persen serta sektor pariwisata dengan meningkatkan kontribusi sebesar 5,80 persen.

3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah

Pemulihan ekonomi yang dapat dilihat dari semakin membaiknya indikator ekonomi makro secara nasional dan regional yaitu pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2022 yang positif (Nasional = 5,01 persen dan Propinsi Sumatera Barat = 3,64 persen) menunjukkan semakin terkendalnya penyebaran COVID-19 dengan berbagai intervensi kebijakan dan terakhir adalah dengan pelaksanaan vaksinasi yang secara masif dilaksanakan. Kebijakan pembangunan tahun 2023 yang fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting bagi daerah dalam pemulihan ekonomi selama terjadinya pandemi COVID-19. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengotimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah.

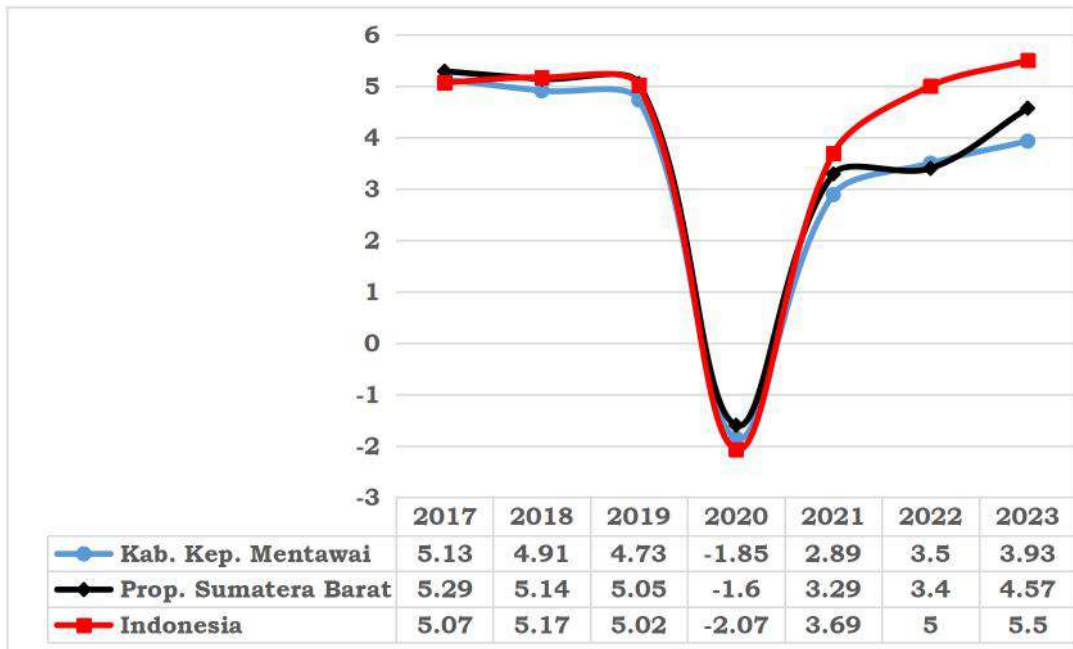
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai terkoreksi cukup dalam di tahun 2021 sebagai dampak COVID-19. sektor-sektor yang diprediksi produktif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap totalitas produktivitas daerah belum maksimal dalam membangun postur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, Namun tahun 2022 menjadi tahun akselerasi pertumbuhan ekonomi dimana aktivisasi sosial ekonomi

masyarakat sudah berjalan pulih seiring dengan semakin taat dan patuhnya masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupan normal baru terutama dengan melakukan vaksinasi.

Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh keadaan, kondisi serta kebijakan ekonomi nasional sebagai dampak penyebaran COVID-19. Muncul dan menyebarnya varian delta COVID-19 menjadi kondisi yang memberikan dampak bagi kondisi ekonomi masyarakat, dimulainya kehidupan normal baru sebagai adaptasi kebiasaan atas pandemi COVID-19 menjadi angin segar mulai berangsur pulihnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 3.1
Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, 2017-2023

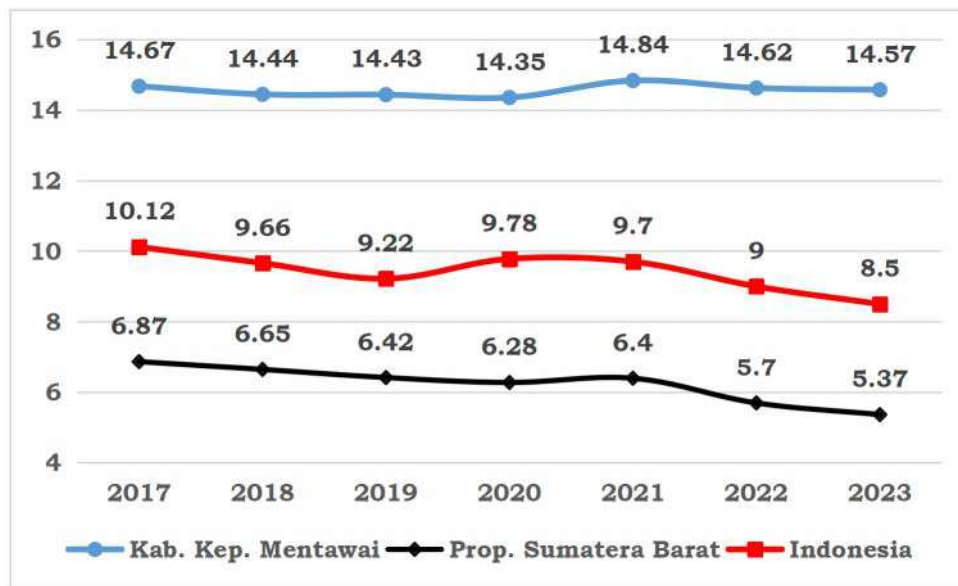


Gambar 3.1 menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 sebesar 2,89 persen.

Capaian ini sudah sangat baik mengingat kondisi ekonomi masih dibayang-bayangi pandemi COVID-19 baik secara nasional hingga ke daerah, terutama jika dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada posisi minus 1,85 persen. Begitu juga dengan capaian pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2021 telah bertumbuh positif yaitu pada angka 3,29 persen untuk Propinsi Sumatera Barat dan Nasional sebesar 3,69 persen.

Pengendalian penyebaran COVID-19 yang semakin baik dan pelaksanaan vaksinasi yang gencar dilaksanakan menjadi asumsi membaiknya sektor riil dan aktivitas sosial masyarakat. Akselerasi pertumbuhan ekonomi bertumpu pada kebijakan ekonomi yang mulai tampak pada tahun 2022 dan selanjutnya pada tahun 2023 sebagai kehidupan normal dan pondasi peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dan tahun 2023 diproyeksikan bertumbuh positif seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19 baik secara nasional juga di daerah. Tahun 2023 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tumbuh sebesar 3,93 persen, proyeksi ini didasari potret pertumbuhan ekonomi triwulan I di Propinsi Sumatera Barat sebesar 3,64 persen dan nasional sebesar 5,01 persen dengan prediksi tahun 2023 Propinsi Sumatera Barat sebesar 4,57 persen dan nasional sebesar 5,5 persen.

Gambar 3.2
Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, 2017-2023



Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara tren penurunan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab semakin melebarnya usaha perbaikan ekonomi masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang meningkat di tahun 2021 yaitu sebesar 14,84 persen. Arah pembangunan nasional yang menjadi perhatian bagi daerah akan menekankan integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Semakin membaiknya kondisi ekonomi dan terkendalinya penyebaran COVID-19 mulai

tahun 2022 dan 2023 membuka harapan menurunnya angka kemiskinan daerah yang diperkirakan turun pada tahun 2023, begitu juga dengan capaiannya di Propinsi Sumatera Barat dan nasional. Untuk tahun 2023 diproyeksikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,57 persen dan di Propinsi Sumatera Barat sebesar 5,37 persen dan Nasional sebesar 8,5 persen.

Secara umum, gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2023

Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	53,18	54,8	56,2	58,47
PDRB Per Kapita (Harga Konstan)	Rp (dalam Juta)	33,83	34,41	35,02	35,38
IPM	indeks	61,09	61,35	61,49	61,98
Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,85	2,89	3,5	3,93
Tingkat Kemiskinan	%	14,35	14,84	14,62	14,67
Tingkat Pengangguran	%	3,98	2,79	2,77	2,75
Gini Rasio	%	0,273	0,321	0,321	0,320

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Pengendalian terhadap penyebaran COVID-19 menjadi salah satu faktor utama dalam percepatan capaian pertumbuhan

ekonomi daerah, Tahun 2023 menjadi kunci mengejar pencapaian pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Potensi varian baru COVID-19, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan dan juga potensi isu global yang berkembang hingga saat ini terutama potensi perang rusia dan NATO. Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi dalam pembangunan tahun 2022 dan 2023 adalah:

- 1) Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Hal ini akan berpengaruh pada kebijakan dana transfer ke daerah yang akan mengalami penyesuaian yang ketat sedangkan sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan masih sangat terbatas.
- 2) Kemampuan daerah dalam meredam dan mengendalikan penyebaran COVID-19 sehingga dapat memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kepastian berusaha/investasi daerah.
- 3) Optimalisasi pengembangan IPTEK dan inovasi dalam mengikuti perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat.
- 4) Potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang melimpah tetapi belum memiliki nilai tambah sehingga perlu integrasi

pengembangan komoditi unggulan hulu hilir hingga pada pemasarannya.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan ekonomi daerah sangat dipengaruhi kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah. Begitu juga untuk kebijakan pembangunan nasional 2022-2023 yang menitikberatkan pada pemulihan ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan menjadi pijakan untuk reformasi struktural sebagai bentuk transformasi ekonomi nasional dan percepatan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan keuangan nasional juga memperhatikan kondisi yang tengah terjadi secara nasional dan global, namun tetap bertumpu pada keadaan fiskal yang sehat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju.

Melihat perkembangan nilai DOF Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa sedang terjadi perkembangan ekonomi yang menurun. Demikian, tingkat ketergantungan Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi dan menunjukkan tren negatif dalam aspek kemandirian. Kondisi seperti ini sebenarnya masih bisa dianggap wajar khususnya bagi daerah yang sedang berkembang yang membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah.

Perkembangan DOFD Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4
Derajat Otonomi Fiskal Daerah, 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	DOFD (%)	Pertumbuhan DOFD (%)
2017	67.862.676.598,42	917.793.849.299,42	7,39	
2018	45.358.184.273,56	913.545.022.458,56	4,97	(32,85)
2019	40.203.645.065,98	1.011.417.211.764,98	3,97	(19,94)
2020	34.905.673.555,51	832.886.813.996,51	4,19	5,43
2021	31.638.013.029,37	830.153.085.297,37	3,81	(9,06)
Rata-Rata			4,87	(14,11)

Sumber: Laporan Keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2017-2021

Pada Tabel 3.4 tampak bahwa Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode tahun 2017-2021 rata-rata 4,87 persen. Secara keseluruhan, DOFD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang cenderung menurun dari tahun 2017 hingga 2021. DOFD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2017 sebesar 7,39 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 4,97 persen dan menurun lagi hingga tahun 2021 menjadi sebesar 3,81 persen.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui revisi peraturan daerah dan peraturan turunannya (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan beberapa peraturan daerah terkait dengan retribusi (Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda

Nomor 7 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 8 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga) sehingga lebih relevan, akurat dan menyesuaikan kebutuhan daerah.

2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi sistem informasi *online* bekerja sama dengan Bank Nagari, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.
3. Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail, seperti: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada.
4. Melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/ memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang

cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian *reward and punishment*.

6. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif, begitu juga dengan percepatan pengelolaan RSUD melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat memberikan kontribusi pendapatan dari layanan kesehatan.
7. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	34.905.673.555	31.638.013.029	39.795.085.597	35.102.072.940	39.260.058.823
Pajak Daerah	3.531.794.196	3.860.497.217	6.774.251.385	6.774.251.835	7.112.963.954
Retribusi Daerah	5.976.710.358	3.033.172.955	8.976.710.358	6.283.697.251	9.425.545.876
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.591.521.757	10.684.123.854	11.589.123.854	11.589.123.854	11.927.836.423
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.805.647.244	14.060.219.003	12.455.000.000	10.455.000.000	10.793.712.569
Pendapatan Transfer	716.767.569.335	775.266.457.268	797.922.597.285	799.823.382.131	801.881.142.782
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	651.902.981.143	682.711.606.781	721.547.682.000	728.141.341.769	729.745.316.319
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.981.503.128	22.052.156.406	14.896.719.000	15.045.686.190	15.196.143.052
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	556.457.541.000	548.987.977.000	549.794.757.000	550.344.551.757	550.894.896.309
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.701.316.885	69.985.666.825	82.004.624.000	82.824.670.240	83.652.916.942
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	32.762.620.130	41.685.806.550	74.851.582.000	74.926.433.582	75.001.360.016
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000
DID	-	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Dana Desa	57.229.421.106	60.246.587.200	44.929.317.000	45.378.610.170	45.832.396.272
Dana Desa	57.229.421.106	60.246.587.200	44.929.317.000	45.378.610.170	45.832.396.272
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.303.430.192	32.308.263.287	31.445.598.285	26.303.430.192	26.303.430.192
Pendapatan Bagi Hasil	29.303.430.192	32.308.263.287	31.445.598.285	26.303.430.192	26.303.430.192
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.303.430.192	32.308.263.287	31.445.598.285	26.303.430.192	26.303.430.192
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	81.213.571.106	23.248.615.000	6.817.957.663	6.817.957.663	6.817.957.663
Hibah		23.248.615.000	-	-	-
Dana Darurat		-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan	81.213.571.106	-	6.817.957.663	6.817.957.663	6.817.957.663
PENDAPATAN	832.886.813.996	830.153.085.297	844.535.640.545	841.743.412.734	847.959.159.268

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

1. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
2. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
3. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
4. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah diantaranya Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas), Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat), Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap), Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih), Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing), Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas), Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja), Kedaulatan Energi (Mentawai Terang), Pembangunan

Kebudayaan (Mentawai Beradab), Penataan Birokrasi (Mentawai Prima).

5. Melakukan koordinasi (kontrol) secara rutin dengan seluruh OPD dan *stakeholder* untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah (efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja).

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Belanja Operasi	539.416.327.902	544.000.215.852	621.907.626.848	605.933.317.573	571.351.056.492
Belanja Pegawai	247.582.508.950	284.566.995.633	325.003.701.706	334.308.699.947	317.593.264.949
Belanja Barang dan Jasa	280.774.442.528	243.479.793.619	273.144.346.431	252.337.706.044	231.311.197.198
Belanja Bunga		-	-	-	-
Belanja Subsidi	6.734.707.000	9.585.794.613	11.000.000.000	6.000.000.000	11.000.000.000
Belanja Hibah	3.853.184.836	5.491.419.256	11.262.328.711	12.388.561.582	10.530.277.345
Belanja Bantuan Sosial	471.484.588	876.212.731	1.497.250.000	898.350.000	916.317.000
Belanja Modal	142.003.462.707	164.639.582.130	157.012.401.692	157.012.401.692	183.940.111.849
Belanja Modal Tanah	-	-	50.000.000	50.000.000	2.500.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.871.620.930	25.876.770.459	25.527.441.782	25.527.441.782	25.054.001.289
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.557.717.902	21.708.856.761	40.977.132.611	40.977.132.611	43.886.509.026

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.035.794.152	115.471.089.584	87.867.827.299	87.867.827.299	111.152.801.533
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.538.329.723	1.582.865.326	2.590.000.000	2.590.000.000	1.346.800.000
Belanja Tidak Terduga	24.195.818.997	1.587.597.109	2.220.398.523	12.485.992.060	1.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	24.195.818.997	1.587.597.109	2.220.398.523	12.485.992.060	1.000.000.000
Belanja Transfer	115.966.872.197	119.166.749.510	103.473.560.773	103.473.560.773	104.016.596.381
Belanja Bagi Hasil	1.563.200.931	2.446.929.619	1.575.096.173	1.575.096.173	1.575.096.173
Belanja Bantuan Keuangan	114.403.671.266	116.719.819.891	101.898.464.600	101.898.464.600	102.441.500.208
BELANJA DAERAH	705.615.609.606	829.394.144.601	884.613.987.836	878.905.272.098	860.307.764.721

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah.
2. SILPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran (surplus/defisit). Apabila SILPA tahun berjalan yang dihasilkan positif/surplus, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. Sedangkan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel 3.7
 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi/Target pada Tahun	
	2021	2021	2022	2023	2024
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.950.726.933	32.987.630.424	42.078.347.291	37.161.859.364	15.348.605.453
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.950.726.933	32.987.630.424	42.078.347.291	37.161.859.364	15.348.605.453
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.950.726.933	32.987.630.424	42.078.347.291	37.161.859.364	15.348.605.453
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	2.000.000.000	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	-	2.000.000.000	-	3.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Poyeksi/Target pada Tahun	
	2021	2021	2022	2023	2024
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	2.000.000.000	-	3.000.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	29.950.726.933	32.987.630.424	40.078.347.291	37.161.859.364	12.348.605.453

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tahun 2023 menjadi tahun akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional untuk mendorong transformasi ekonomi. Stabilitas ekonomi makro tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi yang secara masif terus dilakukan pada tahun 2020 diyakini dapat membentuk kekebalan komunitas (*herd immunity*) sehingga mempermudah pemerintah dalam mempersiapkan transisi ekonomi nasional.

Sebagai peta jalan menuju 100 tahun Indonesia merdeka (tahun 2045) serta mempercepat pencapaian tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden mengamanatkan penyusunan visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Amanat ini ditujukan untuk meneguhkan kembali tujuan pembangunan yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 menjadi momentum awal upaya pencapaian visi Indonesia 2045 melalui pilar visi Indonesia Maju 2045 antara lain; Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemerataan ketahanan nasional dan tata kelola

pemerintahan. Pada visi Indonesia 2045 ditetapkan cita-cita untuk lepas dari jebakan *middle income trap* dan menjadi negara maju atau *high income country* sebelum tahun 2045.

Gambar 4.1
 Sasaran PDB per Kapita menuju *High Income Country* Pasca COVID-19



Sumber: Rancangan Awal RKP Tahun 2023

Sebagai wujud operasional RPJMN Tahun 2020-2024 ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang meliputi (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7)

Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tantangan besar masih dihadapi Indonesia dalam menjaga momentum dan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi antara lain masih terdapatnya *scars* akibat krisis COVID-19 yaitu *learning loss*, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal. Oleh karena itu, sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Nasional, 2023

No	Indikator Sasaran	Target 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,3-6,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31-73,49
5	Rasio Gini (nilai)	0,375-0,378
6	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	106-107
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	103-105
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02

Sumber: Ranwal RKP 2023

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2023

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD Propinsi Sumatera Barat mengemban 7 (tujuh) misi dijabarkan menjadi 7 (tujuh) tujuan dan 27 sasaran, yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.

Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (i) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (ii) menurunnya prevalensi stunting, (iii) meningkatnya kualitas Pendidikan, dan (iv) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK).

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : (i) meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, (ii) meningkatnya budaya Literasi, dan (iii)

meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Misi ketiga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sasaran yang ingin dicapai, yaitu : (i) meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan), (iii) meningkatnya pendapatan petani hutan.

Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.

Misi keempat ini bertujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Terdapat 6 Sasaran yang akan dicapai pada misi ini, yaitu : (i) Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan; (ii) terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera, (iii) terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, (iv) meningkatnya pertumbuhan investasi, (v) Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah, dan (vi) meningkatnya peran ekonomi digital.

Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.

Tujuan yang diupayakan dari misi 5 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari misi ini meliputi : (i) meningkatnya kontribusi

pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat, (ii) meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.

Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 yaitu terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata. Misi ini diuraikan menjadi 5 sasaran,, yaitu : (i) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, (ii) meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, (iii) mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, (iv) meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, (vi) meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Misi ketujuh ini memiliki tujuan berupa terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Selanjutnya dirinci 3 sasaran yaitu : (i) terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, (ii) meningkatnya kapabilitas birokrasi, (iii) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sasaran pembangunan tahun 2023 selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah yang termuat pada RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu difokuskan peningkatan produktivitas sehingga memberikan nilai tambah sektor strategis daerah yaitu pada sektor pertanian, perkebunan pertanian dengan

meningkatkan kontribusi sebesar 5.86 persen, sektor industri pengolahan/manufaktur dengan meningkatkan kontribusi sebesar 12,46 persen serta sektor pariwisata dengan meningkatkan kontribusi sebesar 5,80 persen.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera secara agregat diperkirakan tumbuh sebesar 5,2-5,7 persen dengan memacu pertumbuhan sektor industri khususnya hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan dan pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan kawasan pariwisata berdaya saing internasional, mempercepat pemerataan pembangunan wilayah pesisir dan daerah 3T.

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	
		2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,40	4,65
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,04	33,58
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	48,29	48,86
4	TPT (%)	6,25	5,72
5	IPM	72,74	73,46
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,80	69,97
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,05	14,43
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,18	9,25
	- Pengeluaran per Kapita (Rp.Ribu)	10.916	10.997
6	Kemiskinan (%)	5,70	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin	356,45	306,71
8	Gini Rasio	0,298	0,296

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 dan menjadi rentang perencanaan teknokratik dalam menjembatani perencanaan pembangunan nantinya setelah kepala daerah terpilih melalui pilkada serentak di tahun 2024.

Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 merupakan jabaran dari tujuan dan sasaran pada RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	1.1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan
		1.2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan
		1.3	Meningkatnya keterampilan hidup (<i>life skill</i>) sumber daya manusia
2	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	2.1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas
		2.2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air
		2.3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah

Tujuan		Sasaran	
		2.4	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi
		2.5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika
		2.6	Meningkatkan ratio elektrifikasi daerah
3	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	3.1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni
		3.2	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
		3.3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana
4	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	4.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat
		4.2	Meningkatkan kesempatan kerja
		4.3	Terkendalinya inflasi daerah
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		5.2	Meningkatnya kapabilitas pemerintahan
		5.3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
6	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa	6.1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya
		6.2	Meningkatnya budaya literasi
7	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	7.1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang ramah anak dan gender

Kebijakan pembangunan tahun 2023 yang fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting bagi daerah dalam pemulihan ekonomi selama terjadinya pandemi COVID-19. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengotimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah.

Secara umum, gambaran sasaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Proyeksi	
		Tahun 2022	Tahun 2023
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	56,2	58,47
PDRB Per Kapita (Harga Konstan)	Rp (dalam Juta)	35,02	35,38
IPM	indeks	61,49	61,98
Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5	3,93
Tingkat Kemiskinan	%	14,62	14,67
Tingkat Pengangguran	%	2,77	2,75
Gini Rasio	%	0,321	0,320

Tabel 4.5
Sasaran Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran RKP	Sasaran RKPD Propinsi Sumatera Barat	Sasaran RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3-5,9	4,65	3,93
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,5-8,5	5,37	14,67
Rasio Gini	Rasio	0,375-0,378	0,296	0,320
Indeks Pembangunan Manusia	Persen	73,31-73,49	73,46	61,98
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,3-6,0	5,72	2,75

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan harus selaras dan mendukung sasaran dan prioritas pembangunan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, sinergi prioritas pembangunan daerah dengan nasional dan Propinsi Sumatera Barat melalui pendekatan perencanaan THIS (tematik, holistik, integratif, dan tematik) untuk mendukung tujuan utama pembangunan.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024, menetapkan Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Dalam mencapai visi RPJMN 2020-2024 dituangkan dalam sembilan poin Nawacita yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;

serta (9) SINergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Arahan presiden dalam melaksanakan misi Nawacita dan upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 mencakup Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Penyusunan tema pembangunan RKP tahun 2023 mempertimbangkan arahan presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020-2024, dinamika pandemi COVID-19 dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berkontraksi 2,07 persen, pertama kali sejak krisis 1998. Belajar dari pengalaman tersebut, diperlukan upaya yang kuat dan konsisten untuk mengambalikan trajektori pertumbuhan ekonomi seperti sebelum krisis. Jika upaya pemulih yang dilakukan *business as usual* pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca COVID-19 diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan, hal ini disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesign transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesign transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya

bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah dan jangka panjang. Setelah tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih dari rata-rata 5,7 persen menjadi 6 persen sampai tahun 2045 untuk keluar dari MIT dan menjadi negara maju.

Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada peningkatan produktivitas terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, produktivitas dan daya saing Indonesia diperkirakan akan semakin menurun. Oleh karena itu, untuk mengejar gap pertumbuhan agar tetap sejalan dengan target keluar dari *middle income trap* maka transformasi ekonomi yang didorong melalui peningkatan produktivitas menjadi semakin penting.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut menekankan pentingnya produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu

Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job* serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespon tantangan-tantangan perubahan iklim yang dapat dilakukan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Gambar 4.2
Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2023



Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan peoduktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah dan tingkat pemerintahan, sehingga tema

RPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam menjewantahkan tema RKP Tahun 2023 disusun arah kebijakan dan strategi pembangunan yang saling memiliki keterkaitan sehingga fokus dalam penanganan dan pemecahan permasalahan pembangunan, antara lain:

1. Arah kebijakan: Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
Strategi : Penguatan sistem jaminan sosial, percepatan modernisasi pertanian, peningkatan pemerataan pembangunan.
2. Arah kebijakan: Peningkatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)
Strategi : penguatan sistem kesehatan nasional, peningkatan kualitas pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter)
3. Arah kebijakan: Penanggulangan dan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*.
Strategi : Perluasan penyediaan lapangan usaha.
4. Arah kebijakan: Mendorong pemulihan dunia usaha.
Strategi : Percepatan revitalisasi pariwisata, memperkuat UMKM dalam perekonomian nasional.

5. Arah kebijakan: Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Strategi : Percepatan revitalisasi dan hilirisasi industri, penguatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam pembangunan.

6. Arah kebijakan: Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim).

Strategi : Mendorong aktivitas ekonomi rendah karbon, percepatan transisi energi.

7. Arah kebijakan: Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.

Strategi : Peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi, percepatan pemerataan infrastruktur digital, percepatan pemerataan infrastruktur konektivitas.

8. Arah kebijakan: Pengembangan Ibu Kota Nusantara.

Strategi : percepatan penyediaan fasilitas dasar di IKN

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan serta untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan optimalisasi efektivitas pengendalian sasaran pembangunan jangka menengah.

1. Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Sasaran PN 1:

- a. Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;
- b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

Dalam mewujudkan prioritas nasional 1 disusun 9 (sembilan) major project sebagai langkah konkret pencapaian sasaran pembangunan, antara lain:

- a. Akselerasi pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi.
 - b. *Food estate* kawasan sentra produksi pangan.
 - c. Jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan.
 - d. Revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng.
 - e. Integrasi pelabuhan perikanan dan *fish market* bertaraf internasional.
 - f. Pengelolaan terpadu UMKM.
 - g. Industri 4.0 di 6 sub sektor prioritas.
 - h. Kawasan industri prioritas dan smelter.
 - i. Destinasi pariwisata prioritas.
2. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Sasaran PN 2:

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- b. Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b)

IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin (KBI)

Dalam menerapkan prioritas nasional 2 pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan wilayah, didukung 5 kegiatan prioritas, antara lain:

a. Pengembangan kawasan strategis.

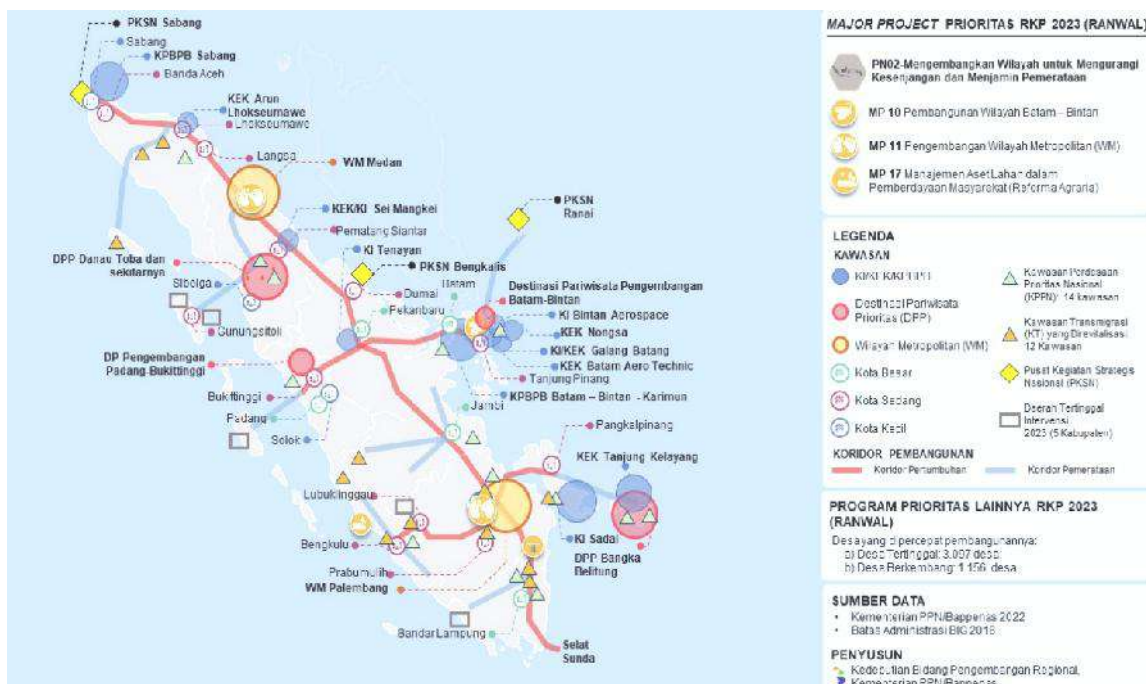
Meliputi kawasan strategis berbasis industri, kawasan strategis berbasis pariwisata.

b. Pengembangan sektor unggulan.

c. Pengembangan kawasan perkotaan.

d. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan dan transmigrasi.

e. Kelembagaan dan keuangan daerah.



3. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran PN 3:

- a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga angka kelahiran total (total fertility rate/TFR dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah.
- c. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (a) menurunkan angka kematian ibu/AKI, (b) menurunkan angka kematian bayi/AKB, (c) Menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberculosis, (e) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase perokok penduduk usia 10-18 tahun, (j) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata lama sekolah

penduduk usia 15 tahun keatas, dan (k) harapan lama sekolah.

- d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- e. Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif.
- f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah keatas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam daftar *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

Dalam menerapkan prioritas nasional 3 meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing disusun 5 (lima) langkah konkret ke dalam major project antara lain:

- a. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
- b. Pembangunan *science technopark*.
- c. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
- d. Reformasi sistem perlindungan sosial.
- e. Reformasi sistem kesehatan nasional.

4. Prioritas Nasional 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Sasaran PN 4:

- a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan indeks capaian revolusi mental, dan (b) peningkatan indeks aktualisasi nilai-nilai pancasila;
- b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indeks pembangunan kebudayaan;
- c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian indeks pembangunan masyarakat.
- d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan indeks kerukunan umat beragama;
- e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) indeks pembangunan keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- f. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif dengan mendorong pencapaian nilai budaya literasi.

Pencapaian sasaran prioritas nasional 4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilakukan kedalam 4 (empat) program prioritas antara lain:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
 - c. Memperkuat moderasi beragama.
 - d. Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
5. Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Sasaran PN 5:

- a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) menurunnya rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- b. Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh jalan lintas utama pulau (jam/100 km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) peningkatan kondisi jalur kereta api sesuai standar *track*

quality index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian on time performance (OTP) transportasi udara;

- c. Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;
- d. Meningkatkan layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kwh/kapita), dan (c) penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (juta ton);
- e. Meningkatnya layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pta lebar (4G).

Dalam mendukung pencapaian sasaran pada PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar maka major project yang rancang antara lain (1) rumah susun perkotaan sebanyak 1 juta unit; (2) akses air minum perpipaan untuk 10 juta sambungan rumah; (3) akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman untuk 90

persen rumah tangga; (11) jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar dan terdepan; (19) transformasi digital.

6. Prioritas Nasional 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Sasaran PN 6:

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);
- b. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap PDB;
- c. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

Pada PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim disusun 2 (dua) *major project* sebagai langkah konkret pencapaian sasaran, antara lain pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3, penguatan sistem peringatan dini bencana.

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran PN 7:

- a. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- b. Optimalisasi kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;
- c. Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;
- e. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 mengacu kepada Visi Pemerintah

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, “Mewujudkan SDM Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing” terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengkedepankan karakter berakhlak mulia sebagai perwujudan karakter yang madani, serta memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tanggu dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, “Mewujudkan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat” terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling

menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu strategis dalam tujuan ini adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, “Mewujudkan Kesejahteraan Petani” terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, “Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing” terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap guncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, “Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat” terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor

untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, “Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata” terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketahanan bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawab kepada generasi selanjutnya.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Arah kebijakan pembangunan Propinsi Sumatera Barat tahun 2023 selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah yang termuat pada RPJMD Propinsi Sumatera Barat 2021-2026 yaitu difokuskan peningkatan produktivitas pada sektor strategis daerah, sehingga tema pembangunan tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis menuju Transformasi Ekonomi”. Peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian,

sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata yang diarahkan pada peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan sebesar 5,86 persen, sektor industri pengolahan/manufaktur dengan meningkatkan kontribusi sebesar 12,46 persen serta sektor pariwisata dengan meningkatkan kontribusi sebesar 5,80 persen. Sebagai bentuk penjabaran secara detail prioritas pembangunan dalam mewujudkan tema peningkatan produktivitas sektor strategis menuju transformasi ekonomi antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing, melalui arah kebijakan:
 - a. Efektifitas dan efesiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan.
 - b. Percepatan Vaksinasi menuju *Herd Immunity*.
 - c. Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SLB.
 - d. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial.
 - e. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi.
 - f. Meningkatkan kualitas dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas.

- g. Meningkatkan hasil penelitian yang berorientasi pada kebijakan strategis daerah.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, melalui arah kebijakan:
- a. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbunlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar).
 - b. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan.
 - c. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dengan meningkatkan aktifitas keagamaan dan kebudayaan.
 - d. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masarakat.
 - e. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama.
 - f. Meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - g. Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua.

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, melalui arah kebijakan antara lain:
 - a. Alokasi anggaran sektor pertanian sebesar 10% dari APBD.
 - b. Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan).
 - c. Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan
 - d. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan,
 - e. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam.
 - f. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan.
 - g. Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
 - h. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan.
 - i. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian

- j. Mempertahakan produksi padi sebagai lumbung nasional.
 - k. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital, melalui arah kebijakan antara lain:
- a. Penciptaan iklim investasi.
 - b. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian.
 - c. Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif.
 - d. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
 - e. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan, melalui arah kebijakan antara lain:
- a. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan.
 - b. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional.

- c. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pada destinasi wisata.
 - d. Meningkatkan atraksi seni dan budaya.
 - e. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestik.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan, melalui arah kebijakan antara lain:
- a. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - b. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan).
 - c. Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada Kawasan sentra pertanian, industri dan pariwisata.
 - d. Menurunkan biaya produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan industri melalui efisiensi biaya *logistic*.
 - e. Mendukung peningkatan daya saing Kawasan wisata.
 - f. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi bencana.
 - g. Meningkatkan indeks ketahanan daerah.
 - h. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan.
 - i. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - j. Mengurangi luasan Kawasan kumuh.

- k. Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah.
 - l. Pemenuhan terhadap infrastruktur pelayanan dasar.
 - m. Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak bencana akibat gempa bumi Pasaman dan Pasaman Barat.
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas, melalui arah kebijakan antara lain:
- a. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi.
 - c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 - d. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
 - e. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah.
 - f. Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah.
 - g. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

- h. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.
- i. Peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

4.2.3.1 10 Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dirumuskan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah dan telah dirumuskan dalam 10 prioritas pembangunan yang disebut, antara lain:

1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)

Prioritas ini diarahkan pada pembangunan pendidikan yaitu peningkatan kualitas dan akses pendidikan dengan mengalokasikan minimal 20 persen anggaran pendidikan setiap tahunnya. Pembangunan pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang meliputi pencapaian tujuan ranah afeksi, kognisi dan psikomotor yaitu pendidikan untuk mengembangkan karakter yang beriman, bertakwa dan berakhlak, berpengetahuan, cerdas secara intelektual, emosional dan sosial, serta terampil dan memiliki etos kerja dan daya saing. Dengan prioritas ini diharapkan meningkatnya

Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang pendidikan, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah guru mencukupi, tidak ada yang putus sekolah, kualitas guru meningkat, beasiswa pendidikan perguruan tinggi.

Program prioritas antara lain alokasi belanja pendidikan minimal 20 persen, pembangunan USB dan ruang kelas beserta utilitas lainnya, rehabilitasi sekolah, pembangunan rumah dinas guru, pembangunan asrama dengan disertai kurikulum dan pembangunan karakter, beasiswa miskin dan berprestasi, peningkatan jenjang pendidikan tenaga pendidik PAUD, SD, SMP dari D2, D3 ke jenjang pendidikan S1, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pengembangan muatan lokal, pelaksanaan Kurikulum Merdeka, fasilitasi sertifikasi guru/tenaga pendidik.

2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)

Prioritas ini diarahkan pada penguatan sistem kesehatan daerah terutama dalam penanggulangan penyakit/wabah, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Capaian dari prioritas ini antara lain meningkatnya angka harapan hidup, memastikan jaminan kesehatan diterima oleh masyarakat miskin, alokasi belanja kesehatan minimal 10 persen, perbaikan gizi masyarakat, pola hidup bersih dan sehat diterapkan, penanganan intensif bagi bayi balita dan ibu melahirkan, pengentasan prevalensi (stunting), *sister hospital*,

peningkatan pelayanan puskesmas, pembentukan BLUD RSUD, pembangunan RS Pratama Sikakap, pembangunan puskesmas (Desa Sagulubbeg, Desa Sinaka, Desa Silabu), distribusi tenaga dan alat kesehatan secara proporsional.

3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)

Pengembangan jaringan jalan dan transportasi daerah merupakan program pada prioritas ini. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan Trans Mentawai dengan spesifikasi dan ruas tertentu dalam mendukung sistem transportasi daerah yang bercirikan kepulauan, pembangunan jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. pembangunan jalan pendukung kawasan strategis daerah, membangun pelabuhan penyeberangan (interkoneksi jalan trans Mentawai), fasilitasi pengembangan jaringan transportasi laut (antar pulau dan Mentawai-Padang), fasilitasi pengembangan Bandara Rokot, fasilitasi pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet ke semua wilayah Mentawai, pembangunan jaringan irigasi, fasilitasi pembangunan TPA Berkat, pembangunan TPS kecamatan (Sipora Selatan, Sikakap, Siberut Selatan, Siberut Utara) dan penataan kawasan perkotaan dan strategis daerah, revisi RTRT dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.

4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)

Prioritas ini diarahkan pada peningkatan kualitas pemukiman, tersedianya air bersih (Sikabalu, Saibi, Sirilogui, Malakopa), pembangunan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus, penyediaan Bank Tanah, mendorong relokasi pemukiman kumuh dan rawan bencana, membangun drainase untuk pengendalian banjir, pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, peningkatan kualitas kawasan permukiman, mengupayakan Area Penggunaan Lainnya (APL) lebih optimal, melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat.

5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)

Prioritas ini diarahkan dengan pendekatan agribisnis maupun agroindustri (ekonomi kerakyatan), peningkatan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan perikanan dan perluasan pemasaran, Pengembangan Kawasan Strategis (Komoditas Unggulan); Kelapa (Taraet, Siberut Barat Daya), Pisang (Sikabalu, Pagai Selatan), Ikan (Bose), Cengkeh Organik (Saliguma, Sirilogui). Penguatan perdagangan melalui revitalisasi pasar prioritas (Tuapejat, Sipora Selatan, Sikakap, Sikabalu), pengembangan Kawasan Holtikultura (Sikakap, Sipora Utara, Siberut Selatan, Siberut Utara).

6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)

Prioritas ini diarahkan pada tujuan menjadikan Mentawai menjadi pariwisata kelas dunia melalui pembangunan dan penataan destinasi pariwisata baik dengan skema investasi maupun melalui pemberdayaan masyarakat untuk kawasan pariwisata prioritas daerah 3M1K (Muntei, Madobag, Mapadegat, Katiet), pembinaan dan pendampingan desa wisata, penguatan kelembagaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata lokal serta fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Siberut.

7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)

Prioritas ini dilaksanakan melalui pengembangan industri berbasis produk lokal dengan memanfaatkan BUMD atau BUMDes, dalam prioritas ini diharapkan munculnya wirausaha muda (enterprenuer), hilirisasi produk pertanian dan perikanan hingga pada akses pasar/pemasaran, Pendampingan UMKM dan IKM (Kelembagaan, Kapasitas SDM, Bisnis Plan/ Proses, Permodalan, Kerjasama Pasar)

8. Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)

Prioritas ini dilakukan melalui dukungan peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai, penguatan kinerja PLTBM, fasilitasi koordinasi dan bekerjasama dengan PLN.

9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)

Prioritas ini dilakukan pemerintah dengan mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi pembangunan rumah ibadah, pembinaan generasi muda, pembinaan ormas, pembinaan, perlindungan perempuan dan anak, pengembangan seni budaya, pelestarian budaya, mengembangkan dialog-dialog antar umat beragama, tokoh agama. Tokoh adat/budaya, tokoh masyarakat, serta pembinaan Masyarakat Hukum Adat, penegakan perda serta penguatan Forkopimda.

10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)

Prioritas ini dilakukan dengan menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, menata kembali struktur pemerintah, penerapan sistem merit dalam pemerintahan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, penuntasan kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewujudkan WTP atas laporan keuangan daerah, penerapan *e-Government*, penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan penguatan inovasi daerah dengan menerapkan setiap OPD minimal 2 Inovasi.

Tabel 4.6
Persandingan Tema Pembangunan Tahun 2023

Tema RKP Tahun 2023	Tema RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Tema RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis menuju Transformasi Ekonomi	Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan SDM dan Infrastruktur Ekonomi Daerah

4.2.3.2 Arah Kebijakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah terdiri dari 7 (tujuh) pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian.

Penguatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah harus dimulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dan saling memiliki keterkaitan/kesinambungan. Arah kebijakan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain:

- a. Mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai bagian pemerintahan umum-sekretariat daerah;
- b. Melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah dan provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan

SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- g. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
- h. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah;
- i. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah;
- j. Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. Melakukan rapat secara berkala; dan
- n. Melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Tabel 4.7
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Matobe	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Sinaka	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Utara	Saumanganya	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Sinaka	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Taikako	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Sikakap	Sikakap	1 SET	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Sikakap	Sikakap	1 SET	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Sikakap	50 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Sikakap	50 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Matobe	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Sikakap	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Utara	Silabu	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Bulasat	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Sinaka	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Seluruh Kecamatan	Makalo	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Utara	Saumanganya	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian	Pagai Utara	Betumonga	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			beasiswa PT bagi masyarakat					
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Malakopa	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Seluruh Kecamatan	Makalo	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Seluruh Kelurahan/Desa	1 SET	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Pemeliharaan anak terlantar, pendataan fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Sikakap	Sikakap	100 ORANG	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Sikakap	100 ORANG	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Matobe	1 SET	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	1 SET	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Matobe	1 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pagai Utara	Silabu	5 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Sikakap	10 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Matobe	15 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Taikako	5 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Sikakap	5 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Matobe	5 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Sikakap	1 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Seluruh Kelurahan/Desa	1 UNIT	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	A.K Roberthyl Saogo	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pagai Utara	Silabu	5 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Taikako	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Sikakap	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Matobe	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			masyarakat					
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Sikakap	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Utara	Saumanganya	75000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Sinaka	75000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Utara	Saumanganya	12 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	17 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	11 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Taikako	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Utara	Saumanganya	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Utara	Saumanganya	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Makalo	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Utara	Saumanganya	75000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Utara	Betumonga	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	Alisandre Zalukhu	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Taikako	75000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Nasdem	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah	Siberut Barat	Simatalu	2 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
23-03-2022	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Nasdem	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat	Seluruh Kelurahan/Desa	2 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Nasdem	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat	Simatalu	300000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-03-2022	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Nasdem	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Utara	Bojakan	5 Lokal	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24-03-2022	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Nasdem	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Siberut Barat	Simalegi	200000000 0 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24-03-2022	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Nasdem	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	12 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	Bruno Guimek Sagalak, S. Pd	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Siberut Barat	Simatalu	450 watt	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Selatan	Muntei	100000000 Rp	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Selatan	Muntei	100000000 Rp	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Selatan	Muntei	75000000 Rp	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	20 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	14 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Malancan	26 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Selatan	Madobag	16 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Selatan	Madobag	16 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan	Siberut Selatan	Muntei	16 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupat

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pertanian					en/Kota
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Tengah	Saliguma	150000000 Rp	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Selatan	Muara Siberut	75000000 Rp	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Selatan	Muntei	70000000 Rp	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,	Seluruh Kecamatan	Muntei	200 METER	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,	Siberut Selatan	Muntei	200 METER	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,	Sipora Utara	Tuapejat	200 METER	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Siberut Selatan	Muntei	1050 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Siberut Selatan	Muntei	50 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang/berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat Daya	Katurei	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Selatan	Muara Siberut	150000000 Rp	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Tengah	Saliguma	50000000 Rp	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muntei	2 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Selatan	Maileppet	58440000 Rp	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Selatan	Muntei	50000 BATANG	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Fernando Sabajou, S. Pd	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Selatan	Muara Siberut	80000 BATANG	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Musara Kasimae ru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Selatan	Maileppet	14 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	H. Rasyidin Syaiful, SH., MH	Musara Kasimae ru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Selatan	Seluruh Kelurahan/Desa	14 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Matobe	11 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Mara	13 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Bosua	12 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Betumonga	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan	Sipora Selatan	Nemnemleleu	52 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			n embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,					
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Saureinu	47 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Matobe	8 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Nemnemeleu	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Matobe	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Saureinu	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Matobe	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Hendri Dunand, S.	3GP	Penyediaan, Pengelolaan, Pengembangan Sistem	Sipora Selatan	Saureinu	1 unit	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	Diteruskan ke Musrenbang

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sos		Penyediaan Air Minum				PENATAAN RUANG	Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang/berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Sipora Selatan	Saureinu	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Sioban	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Sipora Selatan	Saureinu	1 unit	DINAS KESEHATAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sipora Selatan	Sioban	200 juta	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sipora Selatan	Saureinu	50 juta	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sipora Selatan	Sioban	50 juta	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	Hendri Dunand, S. Sos	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sipora Selatan	Matobe	50 juta	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Perbaiki rumah tidak layak huni	Sipora Selatan	Bosua	25 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Perbaiki rumah tidak layak huni	Sipora Selatan	Bosua	50 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Perbaiki rumah tidak layak huni	Sipora Utara	Goisooinan	50 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN	Diteruskan ke Musrenbang

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		an					PERMUKIMAN	Provinsi/Kabupaten/Kota
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Sipora Selatan	Mara	1000 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Penyediaan perlengkapan prasarana jalan (penerangan jalan umum, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas)	Sipora Selatan	Nemnemleleu	1 unit	DINAS PERHUBUNGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Penyediaan perlengkapan prasarana jalan (penerangan jalan umum, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas)	Sipora Utara	Goisooinan	1 unit	DINAS PERHUBUNGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Mara	200 Ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
15-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Bosua	200 Ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Perbaiki rumah tidak layak huni	Sipora Utara	Betumonga	40 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Mara	12 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Matobe	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Betumonga	12 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Beriolou	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Sioban	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Sido Makmur	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Betumonga	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Seluruh Kecamatan	Bosua	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Sioban	51 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan	Sipora Selatan	Nemnemeleu	106 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		an	pangan ternak, peralatan pertanian				PERTANIAN	
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Matobe	50 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Goisooinan	50 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Mara	100 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Seluruh Kecamatan	Matobe	30 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,	Sipora Selatan	Matobe	2 KM	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Matobe	50000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Mara	40000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Mara	40000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Selatan	Mara	100000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Seluruh Kecamatan	Sioban	3 Ruangan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Sipora Selatan	Sioban	190000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang/berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Sipora Utara	Betumonga	700000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Sioban	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Selatan	Bosua	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Ibrani Sababalat, SH	PDI - Perjuangan	Pemeliharaan anak terlantar, pendataan fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Sipora Selatan	Sioban	5 Ton	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Sinaka	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Bulasat	13 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Matobe	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Seluruh Kecamatan	Malakopa	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Bulasat	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Malakopa	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Malakopa	20 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Malakopa	35 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Malakopa	15 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Malakopa	20 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Malakopa	25 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Bulasat	30 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Bulasat	15 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Malakopa	30 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Bulasat	15 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Bulasat	20 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Bulasat	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Taikako	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Bulasat	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pagai Selatan	Bulasat	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Isar Taileleu, S. PAK	Nasdem	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pagai Selatan	Bulasat	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabalu	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabalu	18 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop	3GP	Bantuan armada dan alat	Siberut Utara	Muara	10 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saguruk, SE		tangkap nelayan kecil		Sikabalu			Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabalu	13 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Tengah	Cimpungan	17 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Tengah	Cimpungan	17 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Seluruh Kecamatan	Muara Sikabalu	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Utara	Sotboyak	100000000 Rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Utara	Sotboyak	1 Unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabalu	10 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabalu	12 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Tengah	Cimpungan	232000000 Rupiah	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Tengah	Saibi Samukop	10 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Sirilogui	10 Unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabalu	220000000 Rupiah	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Penyediaan, Pengelolaan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Siberut Utara	Malancan	1000000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Penyediaan, Pengelolaan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Siberut Tengah	Cimpungan	2000000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Seluruh Kecamatan	Malancan	1800000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Siberut Utara	Sirilogui	2000000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Siberut Utara	Sotboyak	10000000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Fasilitasi kemitraan kelembagaan/usaha, bantuan pendanaan/pembiayaan	Siberut Utara	Seluruh Kelurahan/Desa	500000000 Rupiah	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di kawasan Perumahan Permukiman	Siberut Tengah	Cimpungan	6740000000 Rupiah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang/berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat	Sigapokna	400000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang	Siberut Barat	Sigapokna	350000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			/berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan	Siberut Barat	Sigapokna	700000000 Rupiah	DINAS KESEHATAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Fasilitas Pengelolaan transportasi umum (angkutan darat)	Siberut Barat	Sigapokna	100000000 Rupiah	DINAS PERHUBUNGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang	Siberut Barat	Sigapokna	140000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			/berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
23-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat	Sigapokna	100000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,	Siberut Utara	Muara Sikabalu	750000000 Rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Jakop Saguruk, SE	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat	Sigapokna	3500000000 Rupiah	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Barat	Simatalu	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Barat	Simatalu	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Seluruh Kecamatan	Simatalu	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang/berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat	Simalegi	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang/berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pemeliharaan anak terlantar, pendataan fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan	Siberut Barat	Simatalu	50 TON	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pengembangan ekonomi masyarakat					
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	100 UNIT	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Siberut Barat	Simatalu	100 UNIT	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	Julius Tairarak, S. Pt	PDI - Perjuangan	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Seluruh Kecamatan	Simatalu	1 UNIT	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musarakasimae ru	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Sipora Selatan	Beriulou	1700000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musarakasimae ru	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Sipora Utara	Betumonga	2000000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musarakasimae	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan	Sipora Utara	Seluruh Kelurahan/De	800000000 Rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ru	pangan ternak, peralatan pertanian		sa		PERTANIAN	
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Betumonga	100 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Bosua	200000000 Rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Utara	Tuapejat	300000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae ru	Penyediaan, Pengelolaan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Sipora Selatan	Beriulou	5000000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae ru	Penyediaan, Pengelolaan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Sipora Selatan	Beriulou	3000000000 Rupiah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae ru	Perbaikan rumah tidak layak huni	Sipora Utara	Betumonga	4000000000 Rupiah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musara kasimae ru	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani,	Sipora Selatan	Nemnemleleu	3000000000 Rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,					
19-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musarakasimae ru	Pembangunan/pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan/pemeliharaan irigasi usaha tani, pembangunan/pemeliharaan embung pertanian, pembangunan/pemeliharaan DAM parit pertanian,	Sipora Utara	Betumonga	300000000 Rupiah	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
20-03-2022	Juni Arman, S. IP	Musarakasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Tuapejat	600000000 Rupiah	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Utara	Sirilogui	1 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	1 unit lengkap	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Utara	Malancan	1 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Barat	Sigapokna	1 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Utara	Muara Sikabaluhan	1 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Malancan	5 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Sirilogui	5 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Utara	Muara Sikabaluhan	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Utara	Malancan	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jembatan	Siberut Utara	Sirilogui	500 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan	Siberut Barat	Simalegi	5 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pertanian					
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Utara	Malancan	50 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Utara	Bojakan	50 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Utara	Muara Sikabalu	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Siberut Utara	Mongan Poula	37 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Siberut Utara	Malancan	38 kk	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Utara	Malancan	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman,	Siberut Utara	Muara Sikabalu	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			selasar, jalan lingkungan sekolah)					en/Kota
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Utara	Mongan Poula	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
23-03-2022	Maru, SH	3GP	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Utara	Malancan	3 lokal	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24-03-2022	Maru, SH	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Utara	Seluruh Kelurahan/Desa	50 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Nelsen Sakerebau, S. Th	PDI - Perjuangan	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pagai Selatan	Bulasat	12 UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Nelsen Sakerebau, S. Th	PDI - Perjuangan	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Sikakap	Sikakap	9 UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-03-2022	Nelsen Sakerebau, S. Th	PDI - Perjuangan	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pagai Utara	Silabu	9 UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	Nelsen Sakerebau, S. Th	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pagai Selatan	Makalo	2 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
18-03-2022	Nelsen Sakerebau, S. Th	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pagai Selatan	Sinaka	2 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-03-2022	Nelsen Sakerebau, S. Th	PDI - Perjuangan	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pagai Selatan	Makalo	600000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Pagai Selatan	Sinaka	2 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pagai Utara	Saumanganya	50 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Sinaka	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Sinaka	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Sikakap	Sikakap	1 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pagai Selatan	Sinaka	2 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Seluruh Kecamatan	Sinaka	2 UNIT	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Pelatihan tenaga kerja	Sikakap	Sikakap	25000000 Rp	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN MODAL TERPADU SATU PINTU	Diteruskan ke Forum SKPD
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Perbaikan rumah tidak layak huni	Pagai Utara	Betumonga	62 UNIT	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
17-03-2022	Parsaoran Simanjuntak, S. Th	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Pagai Selatan	Sinaka	50000000 Rp	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	80 Ribu	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	20 Ribu	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	100 Juta	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	100 Juta	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	50 Juta	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	50 Juta	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	50 Juta	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
16-03-2022	Salimi, A. Md	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	3 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	3 lokal	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 Unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala	Seluruh Kecamatan	Sagulubbeg	3 Unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	3 Unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang	Siberut Barat Daya	Seluruh Kelurahan/Desa	3 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			/berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	60 rumah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Perbaiki rumah tidak layak huni	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	60 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Perbaiki rumah tidak layak huni	Seluruh Kecamatan	Maileppet	60 unit	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Seluruh Kecamatan	Pasakiat Taileleu	3 kopel	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang	Siberut Barat Daya	Pasakiat Taileleu	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			/berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah					
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Barat Daya	Seluruh Kelurahan/Desa	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Selatan	Madobag	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Selatan	Madobag	3 kopel	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Barat Daya	Katurei	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Katurei	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Siberut Barat Daya	Seluruh Kelurahan/Desa	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Barat Daya	Katurei	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Selatan	Madobag	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Barat Daya	Katurei	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan sekolah)	Siberut Barat Daya	Katurei	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Katurei	4500 batang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Katurei	3000 batang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Fasilitasi kemitraan kelembagaan/usaha, bantuan pendanaan/pembiayaan	Siberut Selatan	Madobag	150 juta	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Katurei	3000 batang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	15 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	15 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Katurei	4000 batang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Seluruh Kecamatan	Katurei	10 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan peralatan alat/mesin industri kecil	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	15 unit	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	20 set	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	20 set	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	4 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	2400 batang	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Seluruh Kecamatan	Sagulubbeg	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	15 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	300 kg	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	34 buah	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Barat Daya	Katurei	120 kg	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah (MCK, Pagar, penataan halaman, selasar, jalan lingkungan	Siberut Selatan	Madobag	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sekolah)					
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	8 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Selatan	Madobag	10 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Siberut Selatan	Madobag	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan	Siberut Barat Daya	Katurei	1 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Perlengkapan Sekolah					
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	1 unit	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	1 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
25-03-2022	Stevanus Victorianus, S, SH	Musara Kasimae ru	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Siberut Selatan	Muara Siberut	14 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Tuapejat	17 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Beriuou	40 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan	Seluruh Kecamatan	Bosua	60 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pertanian					
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Goisooinan	36 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Tuapejat	45 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Pembangunan Unit Sekolah Baru, Pembangunan RKB, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, Pembangunan Perpustakaan, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, Rehab sedang /berat Sekolah, Pengadaan Mebel, Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Sipora Utara	Tuapejat	250000000 Rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Pembangunan Puskesmas, Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, Pengadaan sarpras kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat,, rehab	Sipora Utara	Tuapejat	300000000 Rupiah	DINAS KESEHATAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			puskesmas/RS, layanan ibu bersalin, peningkatan mutu layanan kesehatan					
18-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sipora Utara	Tuapejat	60000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
24-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Tuapejat	36 unit	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
24-03-2022	SUHENDRA SABABALAT	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Tuapejat	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
20-03-2022	Syafridin	Nasdem	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Sido Makmur	10 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
20-03-2022	Syafridin	Nasdem	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sipora Utara	Tuapejat	20 UNIT	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
20-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Tuapejat	13 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Seluruh Kelurahan/Desa	20 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan	Sipora Utara	Bukit Pamewa	20 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pertanian					
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Goisooinan	30 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Matobe	30 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Seluruh Kelurahan/Desa	20 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Nemnemeleleu	10 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Bosua	10 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Betumonga	35 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
21-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Betumonga	15 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Bosua	15 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	Syafridin	Nasdem	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Selatan	Saureinu	21 UNIT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Taikako	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	11 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	10 set	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Taikako	10 set	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Utara	Silabu	11 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Utara	Saumanganya	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Malakopa	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Pagai Selatan	Sinaka	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Sikakap	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan armada dan alat tangkap nelayan kecil	Sikakap	Taikako	10 unit	DINAS PERIKANAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pagai Utara	Saumanganya	100 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pagai Utara	Saumanganya	50 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sikakap	Taikako	50 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Sipora Utara	Tuapejat	70 ekor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Bantuan pembangunan rumah ibadah, pemberian beasiswa PT bagi masyarakat	Sikakap	Sikakap	1 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Utara	Saumanganya	50 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Sikakap	Sikakap	50 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan PLTS, PLN, Penambahan jaringan transmisi PLN, Pengadaan penerangan Jalan Umum PLN	Pagai Selatan	Malakopa	50 unit	SEKRETARIAT DAERAH	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pemeliharaan anak terlantar, pendataan fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Pagai Utara	Saumanganya	75 Kepala Keluarga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pemeliharaan anak terlantar, pendataan fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Sikakap	Taikako	75 Kepala Keluarga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Diteruskan ke Forum SKPD
22-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pemeliharaan anak terlantar, pendataan fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Pagai Selatan	Sinaka	75 Kepala Keluarga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Diteruskan ke Forum SKPD
23-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pemeliharaan anak terlantar, pendataan fakir miskin, fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan bantuan	Sikakap	Taikako	75 Kepala Keluarga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Diteruskan ke Forum SKPD

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Usulan	Kecamatan	Desa	Koefisien	Organisasi Perangkat Daerah	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pengembangan ekonomi masyarakat					
23-03-2022	T. F Yohanes Pardede	3GP	Pengadaan bibit ternak, bibit pertanian, hijauan pangan ternak, peralatan pertanian	Pagai Utara	Saumanganya	1 ton	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Diteruskan ke Forum SKPD

Berikut disajikan persandingan keselarasan prioritas pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

Tabel 4.8
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Propinsi Sumatera Barat dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah, 2023

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pembangunan Pertanian Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
			Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPDP Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Penetapan Birokrasi (Mentawai Prima)

Tabel 4.9
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah
dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2023
Tujuan 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	61,98	
Sasaran 1	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Rata Lama sekolah	7,36 tahun	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)
		Harapan Lama Sekolah	13,09 tahun	
Sasaran 2	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,55	Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)
		Angka Harapan Hidup	65,19 tahun	
		Prevalensi Stunting	20,00%	
Sasaran 3	Meningkatnya keterampilan hidup (<i>life skill</i>) sumber daya manusia	Persentase Penduduk Miskin	14,57%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
Tujuan 2:	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kinerja Infrastruktur	10%	
Sasaran 1	Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	15%	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Sasaran 2	Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	70%	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2023
				Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
		Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	70%	
Sasaran 3	Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Sasaran 4	Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	Cakupan Layanan Transportasi	80%	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika	Cakupan layanan telekomunikasi	85%	Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)
Sasaran 6	Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah	Rasio Elektrifikasi	85%	Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)
Tujuan 3 :	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	>80	
Sasaran 1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	40%	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
Sasaran 2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan	Jumlah Desa STBM	2 desa	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
Sasaran 3	Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	197	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Pemukiman (Mentawai Bersih)
Tujuan 4 :	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	3,93%	
		Indek Gini	0,320	
Sasaran 1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Perkapita	Rp.58,47 jt	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)

TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN / SASARAN/ PROGRAM)	TARGET CAPAIAN 2023	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2023
		Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4 ton	
Sasaran 2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Nilai Investasi	20 miliar rupiah	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
		Tingkat Pengangguran Terbuka	2,75%	
Sasaran 3	Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	3,80%	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)
Tujuan 5 :	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	Indek RB	B	
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	30	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Indek Kepuasan masyarakat	80	
Sasaran 2	Meningkatnya Kapabilitas Pemerintahan	Indeks Profesional ASN	80	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	
		Indeks SPBE	2	
		Maturitas SPIP	Level 3	
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK	WTP	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)
		WBK/WBBM	2 OPD	
		Nilai SAKIP	B	
Tujuan 6 :	Terwujudnya pelestarian dan pengamalan nilai- nilai luhur budaya bangsa	Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,5	
Sasaran 1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya	Jumlah MHA yang dilestarikan	5 MHA	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
Sasaran 2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,3	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
Tujuan 7 :	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	Tingkat Kriminalitas	3,5 persen	
Sasaran 1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Ramah Anak dan Gender	Tingkat Kabupaten layak Anak	400	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)
		Indek Pembangunan Gender	89,90	

Tabel 4.10
Dukungan Program Daerah (RKPD) Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2023

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	380.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	150.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.099.289.305	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	350.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	700.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PERTANIAN		Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		
							3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	800.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	280.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		PERTANIAN
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100.000.000	DINAS PERIKANAN
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	500.000.000	DINAS PERIKANAN
							3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000	DINAS PERIKANAN
							3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan	200.000.000	DINAS PERIKANAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pendidikan dan Pelatihan		
						3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	DINAS PERIKANAN
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS PERIKANAN
						3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	500.000.000	DINAS PERIKANAN
						3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS PERIKANAN
							3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000.000	DINAS PERIKANAN
		Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM),	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	478.600.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan koperasi	wirausaha	USAHA KECIL, DAN MENENGAH		Kabupaten/Kota	Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	150.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	400.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	600.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
						3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	300.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
							3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	200.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
							3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	220.216.210	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Penyediaan air untuk pertanian	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan								
				2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah	50.000.000	DINAS PEMBERDAYA

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	286.878.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan	81.530.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		
						2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	72.963.450	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	400.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	125.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	84.180.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	112.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	144.283.680	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	135.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	28.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.06.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.02.2.03.03 Peningkatan	50.000.000	DINAS SOSIAL,

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan	50.000.000	DINAS SOSIAL,

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									AN ANAK
					2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas	70.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	90.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.789.600	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.02.2.01.03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.02.2.01.10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.02.2.01.14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	147.279.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	24.978.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.01.05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	192.335.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	171.187.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	29.970.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Lapangan oleh PKB/PLKB		MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	41.676.984	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									BERENCANA
				1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	15.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.08 Pembangunan Asrama Sekolah	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Perpustakaan Sekolah		KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.569.235.628	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	175.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
							1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.000.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	500.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.000.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan	100.000.000	DINAS KESEHATAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
						1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	650.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	70.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	70.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	50.000.000	DINAS KESEHATAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	60.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	150.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	650.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	75.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	300.000.000	DINAS KESEHATAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	60.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	75.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	600.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3.200.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan	600.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.250.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	20.193.203.448	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	600.000.000	DINAS KESEHATAN
							1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS KESEHATAN
						1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100.000.000	DINAS KESEHATAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	300.000.000	DINAS KESEHATAN
				2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	200.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	312.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	66.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	84.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
				5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN		650.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									MANUSIA
						5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	75.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	700.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	500.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	75.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan	95.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		POLITIK
							8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85.800.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
							8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
				8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
							8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai		
							1.03.02.2.01.33 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							1.04.02.2.02.02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	249.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.04.02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	150.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	3.918.838.127	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	400.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.747.117.437	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.04.05.2.01.05 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.01.33 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan	3.700.000.000	DINAS PEKERJAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Irigasi Permukaan		UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	990.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	510.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	70.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	430.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Implementasi SIMBG		
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.216.345.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	5.960.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	30.664.643.111	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala	3.517.668.000	DINAS PEKERJAAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jalan		UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	2.832.150.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	6.893.527.946	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	325.532.736	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.487.473.890	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	375.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan	55.726.947	DINAS PERHUBUNGAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Perlengkapan Jalan		
						2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	90.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
							2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		
							3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	800.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	375.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	55.726.947	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis	90.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		N
							2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
					2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.15.03.2.07.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.950.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
						2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	2.15.03.2.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan	120.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengumpan Lokal	dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		
				2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.060.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dan Komunikasi Pemerintah Daerah		
6	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.631.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
					2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.631.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
					2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	78.860.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
							2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	131.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
							2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	876.289.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
						2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	2.11.11.2.03.03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	109.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.450.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
							8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	85.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
					8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
					8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
							8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	85.800.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							serta Penanganan Konflik di Daerah		
							8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
				2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	125.491.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
						5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,	61.209.200	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		
							5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	59.391.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
							5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	201.787.800	BADAN KEUANGAN DAERAH
							5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	206.211.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
							5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	122.609.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
							5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	148.186.000	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	RKP 2023			RKPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023					
	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pemerintah Daerah		
				4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	312.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	66.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	84.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
							4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
				5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	75000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 4.11
Dukungan Program Daerah (RKPD) Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat (RKPD) Tahun 2023

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	15.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pertama			
					1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.08 Pembangunan Asrama Sekolah	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.569.235.628	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	175.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
					1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.000.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.200.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	500.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.000.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	3.000.000.000	DINAS KESEHATAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	DINAS KESEHATAN
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	650.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	70.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	70.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	50.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	60.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	150.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	650.000.000	DINAS KESEHATAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	75.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	300.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	60.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	75.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	600.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3.200.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	50.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan	600.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.250.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	20.193.203.448	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	600.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS KESEHATAN
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100.000.000	DINAS KESEHATAN
					1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	300.000.000	DINAS KESEHATAN
		2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda	2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	200.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.06.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
					1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN	2.08.02.2.01 Pelembagaan	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota		PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan	90.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.789.600	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.02.2.01.03 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.02.2.01.10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
							PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.02.2.01.14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	147.279.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
							PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	24.978.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.01.05 Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	192.335.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	171.187.500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	29.970.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					(PKB/PLKB)		
					2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	41.676.984	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - syara' Basandi Kitabullah	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	15.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.08 Pembangunan Asrama Sekolah	700.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.569.235.628	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	600.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	120.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	320.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	450.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	286.878.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
							KELUARGA BERENCANA
		2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	81.530.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	72.963.450	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	312.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	66.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	84.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	650.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	75.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	700.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	500.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	75.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
					8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85.800.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
					8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
		8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
					8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	120.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
					8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	160.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
3	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	380.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	150.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.099.289.305	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	350.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	700.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	800.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	280.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung,	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		PENATAAN RUANG	(SDA)	Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dan Bangunan Penampung Air Lainnya		
					1.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.01.33 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
			2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.631.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100.000.000	DINAS PERIKANAN
			3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	500.000.000	DINAS PERIKANAN
					3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100.000.000	DINAS PERIKANAN
					3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000	DINAS PERIKANAN
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	DINAS PERIKANAN
			3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	DINAS PERIKANAN
				3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	500.000.000	DINAS PERIKANAN
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS PERIKANAN
					3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.200.000.000	DINAS PERIKANAN
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	478.600.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
	kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	LATIHAN PERKOPERASIAN	Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	150.000.000	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	400.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	600.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	300.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.250.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	200.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	220.216.210	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1.04.02.2.02.02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	249.500.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.04.02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	150.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	250.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	3.918.838.127	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.01 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.000.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	400.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.747.117.437	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					1.04.05.2.01.05 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	200.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengaman Pantai		
					1.03.02.2.01.33 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	3.700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	990.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	510.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah	1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			PERSAMPAHAN REGIONAL	Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota		
			1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	70.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	430.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.216.345.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	5.960.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	30.664.643.111	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	3.517.668.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	2.832.150.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	6.893.527.946	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	325.532.736	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2.487.473.890	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	800.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
					3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	375.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
					2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	55.726.947	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	90.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
					2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
			2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.15.03.2.07.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.950.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan	2.15.03.2.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	120.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			
		2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.060.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.02 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	300.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	5.450.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			POLITIK	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Daerah		
					8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	85.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
			8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
			8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
					8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	85.800.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK
					8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	290.000.000	KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kabupaten/Kota		
		2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	150.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	350.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					2.16.02.2.01.13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	375.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
					2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	55.726.947	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	90.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
					2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
				2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu)	2.15.02.2.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Daerah Kabupaten/Kota			
				2.15.02.2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.16.01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	125.491.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	61.209.200	BADAN KEUANGAN DAERAH
					5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	59.391.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
					5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	201.787.800	BADAN KEUANGAN DAERAH
					5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	206.211.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
					5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	122.609.000	BADAN KEUANGAN DAERAH
					5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	148.186.000	BADAN KEUANGAN DAERAH

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	312.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	66.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	84.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	78.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
					4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	60.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
		5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	75000000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	400.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
				2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	125.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	84.180.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku	112.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kepentingan dan Masyarakat		
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	144.283.680	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	135.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	28.200.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	250.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
			2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	116.631.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
			2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	78.860.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
					2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	131.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
					2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	876.289.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
				2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan	2.11.11.2.03.03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar	50.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	RKPD PROP. SUMATERA BARAT TAHUN 2023	RKPD 2023					
		Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Pelayanan Pengelolaan Sampah		
		1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	109.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4.3 Inovasi Pembangunan Daerah

Inovasi menjadi kunci dalam upaya percepatan pemecahan permasalahan pembangunan di daerah melalui pembaharuan layanan, alur, sistem kerja dan paradigma dalam menghantarkan/*deliver* manfaat (*benefit*) dengan cepat, tepat dan terukur kepada masyarakat. Percepatan pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan metode dan cara yang lama (konvensional), diperlukan strategi yang tentunya efektif dan mengedepankan inovasi. Beberapa inovasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

1. Forum UMKM Sikereita

Didasari dengan adanya niat yang sama dari beberapa pelaku usaha di Kecamatan Sipora Selatan, khususnya Desa Sioban untuk mempermudah mendapatkan layanan bantuan modal, layanan perizinan, fasilitas pelatihan dan juga pendampingan, pengembangan usaha serta perluasan pemasaran. Yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Apalagi terjadi di masa COVID-19, jadi masyarakat banyak mengeluh tentang ekonomi usaha mereka dari berbagai bidang, di mana para pelaku usaha mengalami penurunan ekonomi.



Gambar 4.3 Pelaku usaha

Dimulai dengan adanya keluhan – keluhan dari para pelaku usaha di daerah Sioban khususnya tentang menurunnya ekonomi mereka. Maka itu kami mulai mencari solusi bagaimana keluar dari situasi paceklik tersebut. Dengan mengumpulkan beberapa pelaku usaha, kami mencoba meminta pendapat dan keinginan dari pelaku usaha tersebut, maka muncullah ide untuk membentuk kelompok kecil sebagai wadah menampung aspirasi dari pelaku usaha. Seiring berjalannya waktu maka kelompok yang awalnya kecil, mulai mencoba mengembangkan diri karena situasi yang menuntut.

Kelompok yang kecil ini pun mencoba menjangkau Pemerintah Daerah Mentawai dengan mendatangi Kantor Dinas Koperindag di Tuapejat Kab. Kep. Mentawai, dengan tujuan berdiskusi tentang kelompok kecil yang kami buat, maka atas

saran – saran dari Dinas Koperindag maka dimulailah rencana pembentukan wadah atau forum UMKM untuk daerah Sioban.



Gambar 4.4 Peresmian Forum Sikereita oleh Bupati

Pembentukan forum UMKM ini adalah sebagai perpanjangan tangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan juga sebagai wadah diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah, serta pencairan informasi dalam pengembangan UMKM.



Gambar 4.5 Pelatihan e-commerce

Dengan adanya forum UMKM Sikereita, diharapkan adanya perubahan dan peningkatan ekonomi bagi pelaku usaha, dan juga sebagai wadah diskusi. Manfaat lainnya adalah, adanya Kerjasama dengan Pemerintah dan Dinas terkait, berupa pelatihan – pelatihan kepada pelaku UMKM Sikereita. Tidak hanya itu, dengan ikutnya pelatihan UMKM, diharapkan adanya kemajuan baik secara individu, kelompok, maupun dalam Forum UMKM Sikereita sendiri. Tahun 2023, forum UMKM Sikereita akan mendeklarasikan eksistensinya untuk wilayah Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Sikakap, Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Utara, sehingga pelaku UMK dapat dibina, dimatangkan dan difasilitasi akses pasar dan finansial. Harapannya dampak UMKM SIKEREITA bisa sebagai jembatan penghubung kepada Pemerintah, swasta, badan usaha dan akses pasar.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan prioritas merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023

Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 terdiri dari program prioritas yang menunjang pencapaian tujuan pembangunan. Rincian program prioritas, dihubungkan dengan prioritas nasional tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		195,275,224,019							204,916,235,628					
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	140,660,224,019					100 Persen	143,332,000,000				
1	1	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Telaksananya Administrai Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	138,638,224,019					100 Persen	140,350,000,000			
1	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1208 Orang/b ulan	138,438,224,019	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Pegawai Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1208 Orang/bulan	140,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 orang	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Pegawai Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60 orang	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	250,000,000						100 persen	300,000,000	
1	1	1	02:05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11 Dokumen	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Dokumen	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	542,000,000					100 persen	852,000,000		
1	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 paket	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	21 paket	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 Paket	40,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Dokumen	12,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	30 Laporan	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	990,000,000						12 bulan	1,470,000,000	
1	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	90,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	12 bulan	90,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	900,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten	12 Laporan	1,380,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
							Semua Kelurahan				Kepulauan Mentawai					
1	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	240,000,000					100 Persen	360,000,000		
1	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Unit	80,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Kendaraan	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	13 Kendaraan	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	20 Unit	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	1	02:09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	90,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Mentawai	1 unit	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD	100 persen	54,315,000,000						100 persen	61,284,235,628	
1	1	2	02:01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	100 persen	28,770,000,000						100 persen	32,070,000,000	
1	1	2	02:01	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (SD Fransiskus Simatalu)	1 Unit	1,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten	1 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	1	2	02:01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	1,400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	8 Ruang	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna							
1	1	2	02:01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Dibangun (SDN 27 Simatalu)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Dibangun (SDN 27 Simatalu)	1 Ruang	700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Ruang	700,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu							
1	1	2	02:01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Ruang	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun (SDN 29 Simatalu, SDN 17 Simatalu, SDN 26 Simalegi, SDN Matotonan	4 Unit	1,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	4 Unit	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Kab. Kepulauan Mentawai,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
								Siberut Selatan, Matotonan								
								Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu								
								Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi								
1	1	2	02:01	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Unit	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat (SDN 26 Tuapejat, SDN 11 Tuapejat)	8 ruang	1,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	8 ruang	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
								Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat								
1	1	2	02:01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	8 Paket	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	8 Paket	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13000 Peserta Didik	14,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	13000 Peserta Didik	15,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10 Paket	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	1	2	02:01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	13000 peserta didik	300,000,000	Kecamatan, Semua Kelurahan	Khusus Fisik		Cerdas)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	13000 peserta didik	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	400 Guru	6,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	400 Guru	6,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah yang mengikuti pengembangan karir	50 Orang	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	50 Orang	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	134 Satuan Pendidikan	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	134 Satuan Pendidikan	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	134 Satuan Pendidikan	120,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	134 Satuan Pendidikan	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	100 Persen	21,670,000,000						100 Persen	25,089,235,628	
1	1	2	02:02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	1,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	8 Ruang	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	1	2	02:02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Ruang	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Ruang	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	600,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Ruang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Ruang	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	8	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang akan Dibangun	2 Unit	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Unit	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	6 Unit	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	1	2	02:02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Unit	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	600,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Ruang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Ruang	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Ruang	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pe njaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Unit	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (SMPN 2 Siberut Barat)	10 paket	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 paket	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
								Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna								
1	1	2	02:02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah	6000 Peserta Didik	7,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana		1. Pembangunan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan	6000 Peserta Didik	8,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Pertama	Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum		(Mentawai Cerdas)	Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai			KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	350,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 Paket	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	6000 Peserta Didik	350,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	6000 Peserta Didik	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	34 Satuan Pendidikan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	34 Satuan Pendidikan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200 Orang	4,300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	200 Orang	4,569,235,628	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	100 Orang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	41	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah Sekolah Menengah	34 Satuan	120,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		1. Pembangunan	Dinas Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Manajemen Sekolah	Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Pendidikan		Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan (Mentawai Cerdas)	dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai			DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	34 Satuan Pendidikan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	60 Persen	2,475,000,000						60 Persen	2,575,000,000	
1	1	2	02:03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 Paket	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 Paket	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	20 Satuan Pendidikan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	20 Satuan Pendidikan	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100 Orang	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	100 Orang	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	150 Orang	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:03	17	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah PAUD yang	50 Satuan	175,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		1. Pembangunan	Dinas Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	175,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Manajemen PAUD	Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pendidikan		Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan (Mentawai Cerdas)	dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai			DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	70 Satuan Pendidikan	1,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	70 Satuan Pendidikan	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kelulusan Kesetaraan	100 persen	1,400,000,000						100 persen	1,550,000,000	
1	1	2	02:04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	11 Paket	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Paket	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	0 Peserta Didik	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	4 lembaga							4 lembaga		
1	1	2	02:04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	11 Satuan Pendidikan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Satuan Pendidikan	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55 Orang	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	55 Orang	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga	0 Orang	150,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		1. Pembangunan	Dinas Pendidikan	0 Orang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
	Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan (Mentawai Cerdas)	dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai			DAN KEBUDAYAAN				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang							50 Orang						
1	1	2	02:04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Satuan Pendidikan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Satuan Pendidikan	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	02:04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Satuan Pendidikan	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	2 persen	150,000,000						2 persen	150,000,000	
1	1	3	02:02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	25 Persen	150,000,000						25 Persen	150,000,000	
1	1	3	02:02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal	Jumlah Silabus Muatan Lokal	2 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		1. Pembangunan	Dinas Pendidikan	2 Dokumen	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun			Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		Pendidikan (Mentawai Cerdas)	dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai			DAN KEBUDAYAAN
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	100 persen	150,000,000						100 persen	150,000,000	
						Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi	17 persen							17 persen		
						Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	90 persen							90 persen		
1	1	4	02:01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Tersedianya Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	500 Dokumen	150,000,000						500 Dokumen	150,000,000	
1	1	4	02:01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	500 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	500 Dokumen	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			728,050,900							920,000,000	
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN	Presentase budaya Benda	60 Persen	578,050,900						60 Persen	770,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					KEBUDAYAAN	dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)										
2	22	2	02:01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Sertifikasi Tenaga Permuseuman	3 Objek	278,050,900						3 Objek	320,000,000	
2	22	2	02:01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	278,050,900	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Objek	320,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Sertifikasi Tenaga Permuseuman	2 Orang							2 Orang		
2	22	2	02:02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	300,000,000						2 Objek	450,000,000	
2	22	2	02:02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Objek	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 Unit							5 Unit		
2	22	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah sanggar yang dibina	4 sanggar	150,000,000						4 sanggar	150,000,000	
2	22	3	02:01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan	10 Orang	150,000,000						10 Orang	150,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
						Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)											
2	22	3	02:01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	10 Orang	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 Orang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										119,438,516,233		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	59,979,555,239							100 Persen	63,092,516,233	
1	2	1	02:01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Sub Kegiatan	60,000,000							2 Sub Kegiatan	66,000,000	
1	2	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	5 Dokumen	33,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	5 Laporan	33,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Sub Kegiatan	59,234,555,239							2 Sub Kegiatan	62,019,516,233	
1	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	389 Orang/b ulan	44,524,210,875	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi			2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai)	0	389 Orang/bulan	45,083,902,373	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
								Tuapejat	Umum		Sehat)					
1	2	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	657 Dokumen	14,710,344,364	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	657 Dokumen	16,935,613,860	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	425,000,000						7 Sub Kegiatan	603,500,000	
1	2	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	7 Paket	16,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	50 Paket	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	15 Paket	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	36 Paket	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	10 Paket	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	12 Dokumen	22,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	24 Laporan	300,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Sub Kegiatan	80,000,000					1 Sub Kegiatan	132,000,000		
1	2	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	12 Laporan	132,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Sub Kegiatan	180,000,000					2 Sub Kegiatan	271,500,000		
1	2	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	30 Unit	71,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah	70 persen	20,610,000,000					70 persen	55,977,500,000		
1	2	2	02:01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10 Sub Kegiatan	12,600,000,000					10 Sub Kegiatan	20,660,000,000		
1	2	2	02:01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur	1 Unit	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai	0	1 Unit	2,200,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			Selatan, Muara Siberut	Umum						
1	2	2	02:01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Pustu Saurenu dan Pustu Pukarayut)	2 Unit	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	2 Unit	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	2 Unit	550,000,000	DINAS KESEHATAN
								Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar							
1	2	2	02:01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Paket	5,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	15 Paket	8,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	3,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Paket	3,300,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	15 Paket	2,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	15 Paket	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN
									DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
									Dasar							
									DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							
1	2	2	02:01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	10 Unit	110,000,000	DINAS KESEHATAN
									DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28 SubKegiatan	7,760,000,000						28 SubKegiatan	34,837,500,000	
						Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28 Sub Kegiatan							28 Sub Kegiatan		
						Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28 Sub Kegiatan							28 Sub Kegiatan		
1	2	2	02:02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2853 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	2853 Orang	165,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2724 Orang	650,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	2724 Orang	710,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang	2724 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan	DAK Non Fisik-BOKKB-		2. Pembangunan	0	2724 Orang	165,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Lahir	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	BOK						
1	2	2	02:02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9922 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK		0	9922 Orang	990,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	02:02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11036 Orang	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK		0	11036 Orang	275,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	02:02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65963 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK		0	65963 Orang	110,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	02:02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5737 Orang	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK		0	5737 Orang	77,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	02:02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5551 Orang	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	5551 Orang	110,000,000	DINAS KESEHATAN	
									DAK Non Fisik-BOKKB- BOK							
1	2	2	02:02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	217 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK		0	217 Orang	55,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	2	02:02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Jumlah Orang yang Mendapatkan	223 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK		0	223 Orang	110,000,000	DINAS KESEHATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			Sipora Utara, Tuapejat							
1	2	2	02:02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	567 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	567 Orang	110,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	575 Orang	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	575 Orang	88,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	165,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	10 Dokumen	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	10 Dokumen	880,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	82,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	2	02:02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	330,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	70,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	80,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	820,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Hibah PMI (200)	2 Dokumen	3,200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	2 Dokumen	3,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	1,750,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional	15 Dokumen	300,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		2. Pembangunan	0	15 Dokumen	660,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Lainnya	Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Umum-Dana Alokasi Umum						
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB						
1	2	2	02:02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	5 Unit	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	5 Unit	550,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2 Sub Kegiatan	250,000,000						2 Sub Kegiatan	480,000,000	
						Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2 Sub Kegiatan							2 Sub Kegiatan		
						Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2 Sub Kegiatan							2 Sub Kegiatan		
1	2	2	02:03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	5 Unit	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	5 Unit	330,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	12 Puskesmas	110,000,000						12 Puskesmas	121,000,000	
1	2	3	02:01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan yang diterbitkan	2 Sub Kegiatan	60,000,000						2 Sub Kegiatan	66,000,000	
						Jumlah Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan yang diterbitkan	2 Sub Kegiatan							2 Sub Kegiatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Tersedianya Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	2 Sub Kegiatan						2 Sub Kegiatan			
1	2	3	02:01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10 Dokumen	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	10 Dokumen	27,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	02:01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10 Dokumen	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	10 Dokumen	38,500,000	DINAS KESEHATAN
1	2	3	02:03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 Sub Kegiatan	50,000,000						1 Sub Kegiatan	55,000,000	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 Sub Kegiatan							1 Sub Kegiatan		
1	2	3	02:03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	40 Orang	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rata-rata lama pasien dirawat	5 Hari	100,000,000						5 Hari	110,000,000	
1	2	4	02:01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	1 Sub Kegiatan	50,000,000						1 Sub Kegiatan	55,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Tradisional (UMOT)	Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Sub Kegiatan						1 Sub Kegiatan			
1	2	4	02:01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	3 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	4	02:03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	1 Sub Kegiatan	50,000,000					1 Sub Kegiatan	55,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Rumah Tangga										
						Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Sub Kegiatan						1 Sub Kegiatan			
1	2	4	02:03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	0	3 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah desa dengan PHBS	20 Desa	125,000,000					20 Desa	137,500,000		
1	2	5	02:02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Persen	75,000,000					100 Persen	82,500,000		
1	2	5	02:02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	75,000,000	Kab. Kepulauan	DAK Non Fisik-BOKKB-	2. Pembangunan	0	1 Dokumen	82,500,000	DINAS KESEHATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	BOK						
1	2	5	02:03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen	50,000,000					100 Persen	55,000,000		
1	2	5	02:03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		0	1 Dokumen	55,000,000	DINAS KESEHATAN	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			29,141,956,716						37,706,698,268		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24,641,036,132						30,336,780,010		
1	2	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18,831,654,972						22,800,489,630		
1	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	14,783,137,402				ASN RSUD Kab Kep Mentawai	200 Orang/bulan	14,330,859,508	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4,048,517,570				ASN RSUD Kab Kep Mentawai	1 Dokumen	8,469,630,122	DINAS KESEHATAN	
1	2	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			762,381,160						1,066,654,380		
1	2	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			37,227,160				Penerima Layanan Kesehatan dan Pemberi		31,586,800	DINAS KESEHATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	600,000,000					Layanan Kesehatan Penerima Layanan Kesehatan dan Pemberi Layanan Kesehatan	10 Paket	859,851,980	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			125,154,000					Penerima Layanan Kesehatan dan Pemberi Layanan Kesehatan		175,215,600	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,460,500,000							5,644,700,000	
1	2	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			460,500,000					Penerima dan Pemberi Layanan Kesehatan		644,700,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4,000,000,000					Penerima dan Pemberi Layanan Kesehatan		5,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			586,500,000							824,936,000	
1	2	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			286,500,000					Penerima dan Pemberi Layanan Kesehatan		401,100,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	300,000,000					Penerima dan Pemberi Layanan Kesehatan	5 Unit	423,836,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			4,500,920,584							7,369,918,258	
1	2	2	02:01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah			3,926,820,584							6,378,482,258	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Kabupaten/Kota											
1	2	2	02:01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan	1 Unit	1,400,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	1,682,882,326	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan	0 Unit	1,400,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:01	16	Pengadaan Obat, Vaksin			862,420,915					Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan		992,420,915	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			620,157,343					Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan		820,157,343	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			261,360,000					Pemberi dan Penerima Layanan Kesehatan		365,904,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			574,100,000							991,436,000	
1	2	2	02:02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			374,100,000					Penerima dan Pemberi Layanan Kesehatan		523,740,000	DINAS KESEHATAN
1	2	2	02:02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	200,000,000					Penerima dan Pemberi Layanan Kesehatan	1 Unit	467,696,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN			1,808,683,106							2,200,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					BIDANG KESEHATAN											
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,808,683,106						2,200,000,000		
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,808,683,106						2,200,000,000		
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,808,683,106	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Betumonga	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	5 Dokumen	2,200,000,000	DINAS KESEHATAN	
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Goisooinan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Bukit Pamewa							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,970,805,106						1,970,805,106		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,970,805,106						1,970,805,106		
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,970,805,106						1,970,805,106		
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,970,805,106	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemmemleleu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	1,970,805,106	DINAS KESEHATAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Mara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN			884,859,441							884,859,441	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					BIDANG KESEHATAN											
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			884,859,441					884,859,441			
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			884,859,441					884,859,441			
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	884,859,441	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	5 Dokumen	884,859,441	DINAS KESEHATAN	
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Berulou	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
										DAK Non Fisik-BOKKB- BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,827,003,106						1,827,003,106		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,827,003,106						1,827,003,106		
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,827,003,106						1,827,003,106		
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	5 Dokumen	1,827,003,106	Kab. Kepulauan Mentawai,	Pendapatan Dana Kapitasi JKN		2. Pembangunan Kesehatan	5 Dokumen	1,827,003,106	DINAS KESEHATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Puskesmas			Siberut Selatan, Muara Siberut	pada FKTP		(Mentawai Sehat)				
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,278,599,954							1,278,599,954	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,278,599,954							1,278,599,954	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,278,599,954							1,278,599,954	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,278,599,954	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Katurei	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	5 Dokumen	1,278,599,954	DINAS KESEHATAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Sagulbbeg	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
								Daya, Pasakiat Taileleu								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1,259,963,106						1,500,000,000			
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1,259,963,106						1,500,000,000			
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1,259,963,106						1,500,000,000			
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		1,259,963,106		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,500,000,000	DINAS KESEHATAN		
									DAK Non Fisik-BOKKB- BOK							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		1,837,716,061						2,000,000,000			
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1,837,716,061						2,000,000,000			
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1,837,716,061						2,000,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,837,716,061	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Bojakan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	5 Dokumen	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sotboyak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Mongan Poula	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabalu							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Sirilogui							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,240,183,106						1,300,000,000		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,240,183,106						1,300,000,000		
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,240,183,106						1,300,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,240,183,106	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	5 Dokumen	1,300,000,000	DINAS KESEHATAN	
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
										DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,816,403,106						2,000,000,000		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,816,403,106						2,000,000,000		
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,816,403,106						2,000,000,000		
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,816,403,106	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	5 Dokumen	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Matobe	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,199,903,106						1,500,000,000		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,199,903,106						1,500,000,000		
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,199,903,106						1,500,000,000		
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,199,903,106	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	1,500,000,000	DINAS KESEHATAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
										DAK Non Fisik-BOKKB- BOK						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,112,047,106						1,300,000,000		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,112,047,106						1,300,000,000		
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,112,047,106						1,300,000,000		
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional	5 Dokumen	1,112,047,106		Pendapatan Dana		2. Pembangunan		5 Dokumen	1,300,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Pelayanan Puskesmas					Kapitasi JKN pada FKTP		Kesehatan (Mentawai Sehat)			
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
											DAK Non Fisik-BOKKB- BOK					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,021,153,733							1,300,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,021,153,733							1,300,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,021,153,733							1,300,000,000	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,021,153,733	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	5 Dokumen	1,300,000,000	DINAS KESEHATAN
											Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
											DAK Non Fisik-BOKKB- BOK					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			967,525,170						1,000,000,000		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			967,525,170						1,000,000,000		
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			967,525,170						1,000,000,000		
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	967,525,170	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simatalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
										DAK Non Fisik-BOKKB- BOK						
										Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			933,835,125						1,000,000,000		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			933,835,125						1,000,000,000		
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			933,835,125						1,000,000,000		
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	933,835,125	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,034,523,106							1,100,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,034,523,106							1,100,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,034,523,106							1,100,000,000	
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,034,523,106	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		5 Dokumen	1,100,000,000	DINAS KESEHATAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1,034,523,106							1,200,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,034,523,106							1,200,000,000	
1	2	2	02:02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah			1,034,523,106							1,200,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Kabupaten/Kota											
1	2	2	02:02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	5 Dokumen	1,034,523,106	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Betumonga	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	5 Dokumen	1,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
								Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
								Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			68,469,062,463						100,548,394,210		
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	12,723,821,757					100 Persen	16,289,000,000		
1	3	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Tahapan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi	7 Dokumen	50,000,000					7 Dokumen	130,000,000		
1	3	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aparatur Sipil Negara	4 Dokumen	130,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	3	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	11,665,421,757						100 Persen	13,970,000,000	
1	3	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/b ulan	7,165,421,757	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aparatur Sipil Negara	72 Orang/bulan	8,690,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	293 Orang	4,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aparatur Sipil Negara	293 Orang	5,280,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Umum SKPD	100 Persen	550,000,000						100 Persen	924,000,000	
1	3	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 Paket	330,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	3	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	165,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10 Dokumen	44,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Laporan	330,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya operasional penunjang kegiatan	100 Persen	98,400,000						100 Persen	108,240,000	
1	3	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	98,400,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Laporan	108,240,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100 Persen	360,000,000						100 Persen	1,156,760,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	3	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umu dan Penataan Ruang	4 Unit	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umu dan Penataan Ruang	18 Unit	606,760,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umu dan Penataan Ruang	30 Unit	110,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Dinas Pekerjaan Umu dan Penataan Ruang	1 Unit	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Jaringan Irigasi	23 HA	1,400,000,000						23 HA	8,800,000,000	
						Persentase Kurangnya Wilayah rawan abrasi, longsor, erosi	7,30 Persen							7,30 Persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	3	2	02:01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir, abrasi, erosi, dan ekresi yang terlindungi	2 Km	500,000,000					2 Km	3,025,000,000		
1	3	2	02:01	33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0.8 KM	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuaepejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	0.8 KM	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2	02:02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah kewenangan kabupaten	49.31 Persen	900,000,000					49.31 Persen	5,775,000,000		
1	3	2	02:02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3.5 KM	900,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3.5 KM	1,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Nemmemleu							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu							
									Kab. Kepulauan Mentawai,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	45 persen	8,350,000,000						45 persen	11,050,000,000	
1	3	3	02:01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SR Penuna Air Bersih	1800 SR	8,350,000,000						1800 SR	11,050,000,000	
1	3	3	02:01	2	Supervisi Pembangunan/Peningk atan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Pe ningkatan/Perlua san/Optimalisasi SPAM	3 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Dokumen	561,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	3	3	02:01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	40 Liter/Detik	1,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	40 Liter/Detik	2,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	3	02:01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	180 SR	700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Betumonga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	180 SR	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Bosua								
								Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu								
1	3	3	02:01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	200 SR	5,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	200 SR	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	3	3	02:01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	10 Unit	1,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Saibi Samukop	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 Unit	1,650,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	4			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase kawasan permukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	50 persen	340,000,000						50 persen	550,000,000	
1	3	4	02:01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya acuan pendukung pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	1 Dokumen	340,000,000						1 Dokumen	550,000,000	
1	3	4	02:01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	4 Dokumen	340,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	4 Dokumen	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikap, Semua Kelurahan							
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan sistem	30 persen	500,000,000						30 persen	550,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						pengelolaan air limbah										
1	3	5	02:01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tangga yang memiliki tangki septik	15 Persen	500,000,000					15 Persen	550,000,000		
1	3	5	02:01	6	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	50 Rumah Tangga	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	50 Rumah Tangga	440,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	5	02:01	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	18 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	18 Orang	110,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Berkurangnya titik genangan air	70 persen	500,000,000					70 persen	550,000,000		
1	3	6	02:01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Drainase sesuai kebutuhan	0 Meter	500,000,000					0 Meter	550,000,000		
1	3	6	02:01	10	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	1 Dokumen	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	77,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	6	02:01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase	300 M	430,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer	3. Pembangunan	Kabupaten Kepulauan	300 M	473,000,000	DINAS PEKERJAAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
						Lingkungan yang Dibangun			Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka	Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Mentawai			UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	75 Persen	3,700,000,000							75 Persen	4,220,000,000	
1	3	8	02:01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah IMB yang diterbitkan	2 Dokumen	3,700,000,000							2 Dokumen	4,220,000,000	
1	3	8	02:01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	220,000,000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	8	02:01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Dokumen	4,000,000,000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Kawasan Strategis Yang Ditata bangunan dan Lingkungan	1 Kawasan	500,000,000						1 Kawasan	550,000,000	
1	3	9	02:01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia acuan kawasan penataan bangunan dan lingkungannya	2 Dokumen	500,000,000						2 Dokumen	550,000,000	
1	3	9	02:01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Mantap	10 Persen	39,805,240,706						10 Persen	55,094,394,210	
1	3	10	02:01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jaringan Jalan Kabupaten	5.48 Km	39,805,240,706						5.48 Km	55,094,394,210	
1	3	10	02:01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2.5 KM	3,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabalu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	2.5 KM	6,556,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
									Sirilogui							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo							
1	3	10	02:01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	5.15 KM	26,636,180,024		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	5.15 KM	33,731,107,422	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	02:01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	6 KM	1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	6 KM	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	02:01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 KM	1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 KM	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	02:01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	160 M	4,693,527,946		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	160 M	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
									Sipora Utara, Sido Makmur							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Taikako							
1	3	10	02:01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	708 M	325,532,736	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	708 M	358,086,009	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kelurahan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	3	10	02:01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	0.5 KM	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	0.5 KM	165,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	10	02:01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	7 Dokumen	2,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai	7 Dokumen	2,736,221,279	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
								Tengah, Semua Kelurahan								
								Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan								
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	100 Persen	650,000,000					100 Persen	2,565,000,000		
1	3	12	02:01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW dan RTRR Kabupaten yang ditetapkan dan disosialisasikan	3 Dokumen	250,000,000					3 Dokumen	260,000,000		
1	3	12	02:01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	12	02:01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	3	12	02:01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	2 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Dokumen	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
															Kab. Kepulauan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	3	12	02:03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	2 Dokumen	300,000,000	Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan					2 Dokumen	495,000,000	
1	3	12	02:03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	385,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	02:03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	110,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	02:04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah	4 Dokumen	100,000,000						4 Dokumen	110,000,000	
1	3	12	02:04	3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	2 Kasus	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Kasus	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	12	02:04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
							Semua Kelurahan									
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			700,000,000						770,000,000		
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	700,000,000					100 Persen	770,000,000		
1	3	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100 Persen	700,000,000					100 Persen	770,000,000		
1	3	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aparatur Sipil Negara	18 Unit	770,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			9,297,394,855						600,000,000		
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran	100 persen	4,347,394,855						100 persen	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					KABUPATEN/KOTA	pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah										
1	4	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Kegiatan	30,000,000					2 Kegiatan	0		
1	4	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	2 Jenis	2,948,796,355					2 Jenis	0		
1	4	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2,845,836,355	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25 Orang/bulan	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	102,960,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Kegiatan	290,000,000					6 Kegiatan	0		
1	4	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	1 Paket	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	4	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	2 Paket	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	3 Paket	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	4 Paket	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	20 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	1 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya pengadaan barang milik daerah	1 Kegiatan	88,258,500						1 Kegiatan	0	
1	4	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	10 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	4	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38,258,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	1 Paket	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Kegiatan	808,364,000						1 Kegiatan	0	
1	4	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	95,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	3 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	713,364,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas perumahan dan kawasan permukiman	0 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Terbayarnya honorarium pegawai kontrak	32 orang							32 orang		
1	4	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 Kegiatan	181,976,000						4 Kegiatan	0	
1	4	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	4	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	18,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	83,976,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase lingkungan permukiman kumuh	50 persen	400,000,000						50 persen	0	
1	4	2	02:02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	100,000,000						2 Kegiatan	0	
1	4	2	02:02	1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	mayarakat KKM	0 Orang	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	20 Orang						20 Orang			
1	4	2	02:04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terlaksananya pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	200,000,000					1 Kegiatan	0		
1	4	2	02:04	2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat KKM	2 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	2	02:06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase lingkungan permukiman kumuh	30 persen	100,000,000						30 persen	0	
1	4	2	02:06	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	kab.kep.mentawai	1 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan permukiman kumuh	55 persen	3,900,000,000						55 persen	0	
1	4	3	02:02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	600 unit	150,000,000						600 unit	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	4	3	02:02	8	Penyusunan/ Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevie w/ Terlegalisasi	1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Kab. kep.mentawai	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	02:03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Kegiatan peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	2 Kegiatan	3,750,000,000						2 Kegiatan	0	
1	4	3	02:03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	50 Unit Rumah	600,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Mayarakat KKM	50 Unit Rumah	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo							
1	4	3	02:03	3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Mayarakat KKM	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	02:03	7	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	jumlah dokumen data permukiman kumuh yang terferivikasi	1 dokumen	250,000,000				4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Mayarakat KKM	1 dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	4	3	02:03	8	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	jumlah rumah baru layak huni yang dibangun	87 Unit	2,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Mongan Poula	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan	Mayarakat KKM	87 Unit	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persenntase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman	70 persen	650,000,000						70 persen	600,000,000		
1	4	5	02:01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan PSU Perumahan	1 Kegiatan	650,000,000						1 Kegiatan	600,000,000		
1	4	5	02:01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	450,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Malancan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat KKM	2 Lokasi	600,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi								
1	4	5	02:01	5	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat KKM	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN			9,303,267,238							9,351,758,186		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	8,462,552,746					100 Persen	8,489,123,186		
1	5	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100 persen	3,383,711,168					100 persen	3,384,711,168		
1	5	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/b ulan	3,242,711,168	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	31 Orang/bulan	3,242,711,168	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	141,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	142,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	12 Bulan	310,662,010					12 Bulan	312,672,450		
1	5	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 jenis	7,997,450	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambah Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	14 jenis	7,997,450	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	5	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5,175,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	2 Paket	5,175,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	5	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	88,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	5 Paket	88,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	5	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39,489,560	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	2 Paket	41,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	5	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 kali	170,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	15 kali	170,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	5	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Unit Kendaraan	6 unit	263,092,000					6 unit	263,092,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Urusan Pemerintah Daerah	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan										
1	5	1	02:07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	163,092,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	6 Unit	163,092,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 paket	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	4 paket	100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	1 Tahun	4,206,487,568						1 Tahun	4,206,487,568	
1	5	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 rekening	62,527,568	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Satpol PP dan Damkar	2 rekening	62,527,568	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Tahun	4,143,960,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat				Satpol PP dan Damkar	1 Tahun	4,143,960,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase kepatuhan	1 Tahun	298,600,000						1 Tahun	322,160,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Urusan Pemerintahan Daerah	penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah										
1	5	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	1 Unit	33,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	5	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	235,600,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	8 Unit	259,160,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	5	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diservice	7 unit	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	7 unit	25,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	5	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	1 Unit	5,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	85 Persen	249,637,000					85 Persen	249,637,000		
1	5	2	02:01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya suasana aman dan tentram bagi	43 persen	174,637,000					43 persen	174,637,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	masyarakat											
1	5	2	02:01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2 Kasus	89,637,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambah Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	2 Kasus	89,637,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	5	2	02:01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Kasus	85,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambah Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	SATPOL PP DAN DAMKAR	2 Kasus	85,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	5	2	02:03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PPNS	2 orang	75,000,000						2 orang	75,000,000		
1	5	2	02:03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Meningkatnya pengetahuan aparatur	2 orang	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	DAU Tambah Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SATPOL PP DAN DAMKAR	2 orang	75,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100 persen	591,077,492							100 persen	612,998,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	5	4	02:01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan pencegahan kebaran dari bahan bahaya dan beracun	20 persen	205,000,000					20 persen	205,000,000		
1	5	4	02:01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pena nggulan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen	55,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	SATPOL PP DAN DAMKAR	3 Dokumen	55,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	4	02:01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	55,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	SATPOL PP DAN DAMKAR	2 Laporan	55,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap							
1	5	4	02:01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Ev akuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2 Dokumen	55,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	SATPOL PP DAN DAMKAR	2 Dokumen	55,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap							
1	5	4	02:01	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian	1 Dokumen	40,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		4. Pembangunan Kawasan Perumahan	SATPOL PP DAN DAMKAR	1 Dokumen	40,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
	Kabupaten/Kota	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota			Selatan, Sioban	Umum							PEMADAM KEBAKARAN			
					Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat											
1	5	4	02:02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah alat proteksi kebakaran	180 Tabung	66,499,000				180 Tabung	66,499,000			
1	5	4	02:02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	66,499,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	SATPOL PP DAN DAMKAR	1 Dokumen	66,499,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap							
1	5	4	02:03		Investigasi Kejadian Kebakaran			178,079,492						200,000,000		
1	5	4	02:03	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	178,079,492	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5	4	02:04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya kepedulian keikutsertaan masyarakat dalam mencegah bahaya kebakaran	20 persen	141,499,000						20 persen	141,499,000	
1	5	4	02:04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah Warga Masyarakat yang	20 Orang	75,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		4. Pembangunan	SATPOL PP DAN DAMKAR	20 Orang	75,000,000	SATUAN POLISI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Umum-Dana Alokasi Umum					PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap							
1	5	4	02:04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	66,499,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	SATPOL PP DAN DAMKAR	2 Desa/Kelurahan	66,499,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6,565,739,390						11,232,000,000		
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,615,739,390						7,032,000,000		
1	5	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan			25,000,000						30,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
1	5	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		30,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,485,208,649						4,600,000,000		
1	5	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/b ulan	3,335,208,649		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	27 Orang/bulan	2,900,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	12 Dokumen	1,700,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			267,530,741						394,000,000		
1	5	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	5 Paket	8,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	4 Paket	90,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25,030,741	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	5 Paket	26,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	3 Dokumen	20,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
1	5	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	12 Laporan	250,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	5	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,523,000,000						1,573,000,000		
1	5	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Laporan	73,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Laporan	1,500,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			315,000,000							435,000,000	
1	5	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		2 Unit	60,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		16 Unit	250,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
1	5	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		2 Unit	25,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit							10 Unit		
1	5	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Unit	100,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN			950,000,000							2,400,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					BENCANA											
1	5	3	02:01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			150,000,000						500,000,000		
1	5	3	02:01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	80 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)		80 Orang	500,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02:02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			500,000,000						1,000,000,000		
1	5	3	02:02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)		100 Orang	350,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02:02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)		12 Dokumen	300,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02:02	7	Penanganan Pascabencana		0	150,000,000		Dana Transfer		3. Pembangunan		0	350,000,000	BADAN PENANGGULA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
					Kabupaten/Kota					Umum-Dana Alokasi Umum		Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)			NGAN BENCANA DAERAH		
						Telaksananya pelatihan jitu pasna	100 Orang							100 Orang			
1	5	3	02:03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			300,000,000							900,000,000		
1	5	3	02:03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 Orang	200,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)		500 Orang	400,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	02:03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1000 Orang	100,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)		1000 Orang	350,000,000	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			7,118,156,306								8,247,897,216	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan Tupoksi	100 %	4,071,336,306							100 %	4,645,062,196	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	6	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penempatan ASN sesuai dengan Anjab ABK	100 %	2,860,231,726					100 %	3,363,938,795		
1	6	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/b ulan	2,780,231,726	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	31 Orang/bulan	3,273,938,795	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	1 Dokumen	90,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	80 %	361,741,427						80 %	367,015,585	
1	6	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,089,750	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	1 Paket	10,200,737	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	78,298,880	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	5 Paket	79,160,168	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	78,370,997	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	4 Paket	79,233,078	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	6	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14,999,800	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	2 Paket	16,459,800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	179,982,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	1 Laporan	181,961,802	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	80 %	602,890,000						80 %	664,923,458	
1	6	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	49,950,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	1 Laporan	50,499,450	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	552,940,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	1 Laporan	559,022,340	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang dan jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	80 %	246,473,153						80 %	249,184,358	
1	6	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	29,998,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	1 Unit	30,327,978	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
1	6	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	23,180,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	17 Unit	23,434,980	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	16,880,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	14 Unit	17,065,680	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	176,415,153	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	ASN	3 Unit	178,355,720	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang diberdayakan	39.2 %	250,000,000						39.2 %	252,750,000	
1	6	2	02:01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase PPKS yang diberdayakan	100 KK	50,000,000						100 KK	50,550,000	
1	6	2	02:01	2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Keluarga	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat KAT	75 Keluarga	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
											9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)					
1	6	2	02:03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dilatih	137 Orang/lembaga	200,000,000						137 Orang/lembaga	202,200,000	
1	6	2	02:03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan	43 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	9. Pembangunan Kebudayaan	Potensi Sumber Kesejahteraan	43 Orang	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Sipora Utara, Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	(Mentawai Beradab)	Sosial			AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
												9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)				
1	6	2	02:03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	10 Keluarga	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
												9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)				
1	6	2	02:03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	4 Lembaga	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
												9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)				
1	6	2	02:03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Sertifikat	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	40 Sertifikat	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	100 %	246,820,000						100 %	249,535,020	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						tepat sasaran										
1	6	4	02:01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial yang mendapatkan bantuan	430 orang	246,820,000					430 orang	249,535,020		
1	6	4	02:01	1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pemerlu Permasalahan Kesejahteraan Sosial	300 Orang	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	4	02:01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pemerlu Permasalahan Kesejahteraan Sosial	10 Orang	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	4	02:01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	46,820,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pemerlu Permasalahan Kesejahteraan Sosial	100 Orang	47,335,020	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6	4	02:01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	10 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai	Pemerlu Permasalahan Kesejahteraan Sosial	10 Orang	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum					PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK	
1	6	4	02:01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pemerlu Permasalahan Kesejahteraan Sosial	20 Orang	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS menerima jaminan sosial	82.39 %	2,400,000,000						82.39 %	2,950,000,000	
1	6	5	02:02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang valid	100 %	2,400,000,000						100 %	2,950,000,000	
1	6	5	02:02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	200 Keluarga	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	200 Keluarga	450,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	5	02:02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5006 Keluarga	2,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	5006 Keluarga	2,500,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Panyaluran Bantuan Tepat Sasaran	100 %	150,000,000						100 %	150,550,000	
1	6	6	02:01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana mendapatkan bantuan	20 orang	50,000,000						20 orang	50,550,000	
1	6	6	02:01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	20 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat korban bencana	20 Orang	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Kewenangan Kabupaten/Kota			Kelurahan						PERLINDUNG AN ANAK	
1	6	6	02:02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang diberdayakan	20 orang	100,000,000					20 orang	100,000,000		
1	6	6	02:02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	PSKS	20 Orang	100,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			845,789,600						1,026,963,338		
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD dengan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender	20 Persen	295,000,000						20 Persen	298,245,000	
2	8	2	02:01		Pelebagaan Pengarutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pelebagaan PUG	18 OPD	100,000,000						18 OPD	101,100,000	
2	8	2	02:01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	OPD	1 Dokumen	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	8	2	02:01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Jumlah Perangkat Daerah yang	18 Perangka	50,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer	Revolusi Mental dan	9. Pembangunan	OPD	18 Perangkat Daerah	50,550,000	DINAS SOSIAL,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
	Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Daerah		Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan Kebudayaan	Kebudayaan (Mentawai Beradab)				PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK				
					Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan											
2	8	2	02:02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, dan sosial	1 Dokumen	70,000,000					1 Dokumen	70,770,000		
						Jumlah organisasi yang mendapatkan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	3 Organisa si							3 Organisasi		
2	8	2	02:02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Organisasi perempuan	1 Dokumen	35,385,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	8	2	02:02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik,	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat	3 Organisa si	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai	Organisasi perempuan	3 Organisasi	35,385,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Hukum, Sosial dan Ekonomi	Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			Daya, Semua Kelurahan	Umum					PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK	
2	8	2	02:03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (IKE)	3 Lembaga	125,000,000					3 Lembaga	126,375,000		
						Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan dan penebangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	3 Lembaga						3 Lembaga			
2	8	2	02:03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 Orang	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	90 Orang	101,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	8	2	02:03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	25,275,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	cakupan perempuan korban kekerasan yang	100 %	100,000,000						100 %	136,485,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu										
2	8	3	02:01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	5 Kegiatan	100,000,000					5 Kegiatan	101,100,000		
2	8	3	02:01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat	1 Dokumen	30,330,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	8	3	02:01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat Daerah	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat	2 Perangkat Daerah	70,770,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kelurahan							
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Selarasnya data base gender dan anak dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender pada OPD	26 %	50,000,000					26 %	50,550,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	8	5	02:01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data anak dan gender yang dianalisis	1 Dokumen	50,000,000								
2	8	5	02:01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat	1 Dokumen	50,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Jumlah Pencanangan kecamatan layak anak	3 Kecamatan	215,000,000						3 Kecamatan	217,365,000	
2	8	6	02:01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapatkan pelembagaan PHA	4 Lembaga	110,000,000						4 Lembaga	111,210,000	
2	8	6	02:01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	4 Organisasi	75,825,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK
2	8	6	02:01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	1 Dokumen	35,385,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	8	6	02:02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapatkan pelmbagaan PHA	2 Lembaga	105,000,000					2 Lembaga	106,155,000		
2	8	6	02:02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	30 Orang	70,770,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6	02:02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	2 Dokumen	35,385,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100 %	185,789,600						100 %	324,318,338	
2	8	7	02:01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	5 Kegiatan	90,000,000						5 Kegiatan	90,990,000	
2	8	7	02:01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	90,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Masyarakat	10 Perangkat Daerah	90,990,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Kab. Kepulauan Mentawai,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
							Siberut Utara, Semua Kelurahan									
							Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kelurahan									
2	8	7	02:03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus penguatan dan pengembangan tingkat daerah	2 Lembaga	95,789,600					2 Lembaga	96,843,338		
2	8	7	02:03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	95,789,600	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Lembaga penyedia layanan anak	1 Dokumen	96,843,338	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			170,000,000						171,870,000		
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			35,000,000						35,385,000		
2	8	3	02:02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi			35,000,000						35,385,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Kewenangan Kabupaten/Kota											
2	8	3	02:02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)		1 Layanan	35,385,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK	
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			135,000,000						136,485,000		
2	8	7	02:02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			135,000,000						136,485,000		
2	8	7	02:02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)		15 Orang	35,385,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK	
2	8	7	02:02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Layanan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)		1 Layanan	101,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			8,708,843,659						3,652,825,928		
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan non ASN	105 Orang	8,708,843,659					105 Orang	2,602,825,928		
						Peningkatan Pelayanan Tugas ASN	89 Orang						89 Orang			
2	9	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	13 bulan	8,376,843,659					13 bulan	766,825,928		
2	9	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/b ulan	8,376,843,659	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Negeri (ASN) dan Pegawai NON (ASN)	89 Orang/bulan	766,825,928	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 bulan						12 bulan			
2	9	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	248,000,000					12 bulan	551,000,000		
2	9	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100 persen	84,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100 persen	85,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	9	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100 persen	14,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100 persen	16,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	9	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi pelayanan perangkat daerah	12 laporan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 laporan	450,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	9	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84,000,000						85,000,000		
2	9	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Administrasi	100 parsen	84,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai)		100 parsen	85,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Umum			Sipora Utara, Tuapejat	Alokasi Umum		Prima)			PERTANIAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			10,702,999,000						6,107,500,000		
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	3,152,999,000						100 Persen	457,500,000	
3	27	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksannya monitoring kegiatan tahun berjalan	1 tahun	50,000,000						1 tahun	315,000,000	
3	27	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	meningkatnya pelayanan perencanaan dan evaluasi kinerja	2 jenis	50,000,000				5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2 jenis	15,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	13 bulan	2,879,999,000						13 bulan	0	
3	27	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terlaksananya administrasi keuangan	14 bulan	2,879,999,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Negeri (ASN) dan Pegawai NON (ASN)	14 bulan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	141,000,000						12 bulan	0	
3	27	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	93,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100 persen						100 persen			
3	27	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	0 Paket	48,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100 persen							100 persen		
3	27	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi Baik	1 paket	82,000,000						1 paket	82,500,000	
3	27	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0 Unit	75,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						terpeliharanya aset kendaraan dinas operasional	100 persen							100 persen		
3	27	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	7,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9 Unit	7,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cengkeh	1580 ton	5,750,000,000						1580 ton	2,600,000,000	
						kelapa	15500 ton							15500 ton		
						Produktivitas Pertanian dan Peternakan (pisang)	14000 kwintal							14000 kwintal		
3	27	2	02:01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura	75 persen	2,950,000,000						75 persen	1,100,000,000	
3	27	2	02:01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	30 kali	2,950,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan	Kelompok Tani	30 kali	1,100,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
											Nasional					Daerah		
						Pertanian												
3	27	2	02:05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mutu Produk Perternakan	80 persen	300,000,000					80 persen	500,000,000				
3	27	2	02:05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terbelinya bibit ternak	150 ekor	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Peternak	150 ekor	500,000,000			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	2	02:06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya hijauan pakan ternak	50 ha	2,500,000,000					50 ha	1,000,000,000				
3	27	2	02:06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya populasi ternak sapi dan kerbau	40 ekor	2,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Peternak	40 ekor	1,000,000,000			DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Persentase Kawasan	85 persen	1,350,000,000					85 persen	2,100,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian yang dilengkapi dengan Utilitas Pertanian										
3	27	3	02:01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersusunnya Peta L P2B dan Masterplan Pertanian	2 Peta	200,000,000					2 Peta	1,300,000,000		
3	27	3	02:01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B yang Dikelola	1 Dokumen	200,000,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1 Dokumen	450,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	3	02:02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian	85 persen	1,150,000,000						85 persen	800,000,000	
3	27	3	02:02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	1 paket	100,000,000		Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Tani	1 paket	400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	3	02:02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangunnya jalan usaha tani	1 meter	1,050,000,000		Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Silabu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kelompok Tani	1 meter	400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei							
									Kab. Kepulauan Mentawai,							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penyakit Hewan Yang Tertangani	100 persen	150,000,000						100 persen	300,000,000	
3	27	4	02:04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terdampinginya atau Tercegahnya Penyakit Menular ternak	60 Persen	150,000,000						60 Persen	300,000,000	
3	27	4	02:04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12 Laporan	300,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase bencana pertanian yang tertangani	100 persen	100,000,000						100 persen	200,000,000	
3	27	5	02:01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	100 persen	100,000,000						100 persen	200,000,000	
3	27	5	02:01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3 Ha	100,000,000		Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai)	Kelompok Tani	3 Ha	200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Bina Kelompok tani yang produktif	40 persen	200,000,000						40 persen	450,000,000	
3	27	7	02:01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya SDM Penyuluh dan Petani	40 persen	200,000,000						40 persen	450,000,000	
3	27	7	02:01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pelatihan Penyuluh PNS dan Non PNS	2 paket	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Penyuluh Pertanian lapangan PNS, CPNS dan kolompok Tani	2 paket	450,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						Terlaksananya diklat penyuluh	31 Orang							31 Orang		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			7,401,326,828							8,652,533,738	
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	5,254,798,658						100 Persen	6,039,004,665	
2	11	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	32 Orang	3,158,237,598						32 Orang	3,100,082,158	
2	11	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/b ulan	3,075,242,598				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	26 Orang/bulan	3,008,787,658	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	10 Dokumen	82,995,000		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai)	DLHK	10 Dokumen	91,294,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
											Nasional					Daerah		
						Pelaksanaan Tugas ASN					Alokasi Umum						KEBERSIHAN	
2	11	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	79 Paket	659,738,220							79 Paket	823,289,355		
2	11	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	4,731,000					10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	7 Paket	5,788,310		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	250,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	5 Paket	385,000,000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	232,506,720				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	47 Paket	240,506,000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	7,860,000					10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	13 Paket	8,000,000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	23,994,500				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	7 Dokumen	29,284,445		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	140,646,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	50 Laporan	154,710,600		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah untuk Menunjang Urusan Pemerintahan	1 Jenis	83,200,000							1 Jenis	524,032,000		
2	11	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	83,200,000					10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	8 Unit	84,032,000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya Jasa Penunjang	21 Laporan	1,062,665,640							21 Laporan	1,275,592,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah										
2	11	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	49,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	1 Laporan	60,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	1,013,665,640				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	11 Laporan	1,215,092,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 Laporan	290,957,200						21 Laporan	316,009,152	
2	11	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	79,380,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	16 Unit	80,173,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	189,995,200				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	10 Unit	212,095,152	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	21,582,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	DLHK	5 Unit	23,740,200	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pembangunan sesuai dengan daya dukung ruang	100 persen	600,000,000						100 persen	500,000,000	
2	11	2	02:02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS Kabupaten	1 Dokumen	600,000,000						1 Dokumen	500,000,000	
2	11	2	02:02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS	2 Dokumen	600,000,000				4. Pembangunan	DLHK	2 Dokumen	500,000,000	DINAS LINGKUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
					RPJPD/RPJMD	RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun										HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang tindak lanjuti	100 persen	116,631,000					100 persen	217,294,100			
2	11	6	02:01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1 Laporan	116,631,000					1 Laporan	217,294,100			
2	11	6	02:01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	116,631,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	DLHK	1 Laporan	217,294,100		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	7			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan	5 MHA	154,493,950					5 MHA	284,343,345			
2	11	7	02:01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak	Terlaksananya Pengakuan Keberadaan Masyarakat	5 MHA	81,530,500					5 MHA	94,083,550			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					MHA yang Terkait dengan PPLH	Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH										
2	11	7	02:01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	6 Dokumen	81,530,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	6 Dokumen	94,083,550	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	7	02:02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	5 MHA	72,963,450						5 MHA	190,259,795	
2	11	7	02:02	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	6 Dokumen	72,963,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	6 Dokumen	190,259,795	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase sampah yang dikelola	7 persen	1,275,403,220						7 persen	1,238,493,900	
2	11	11	02:01		Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	36 Ton	1,225,403,220						36 Ton	1,128,493,900	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	11	11	02:01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	139,254,220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	0	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11	02:01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	36 Ton	78,860,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	36 Ton	79,576,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11	02:01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	131,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Pembagunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	0	3 Kelompok	165,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11	02:01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6 Unit	876,289,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	6 Unit	883,917,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	11	02:03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	4 Lokasi	50,000,000						4 Lokasi	110,000,000	
2	11	11	02:03	3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	1 Laporan	50,000,000		Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi	0	1 Laporan	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
							Nasional	Daerah						
	Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				Umum-Dana Alokasi Umum		(Mentawai Prima)			HIDUP DAN KEBERSIHAN			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		6,170,492,280						7,843,800,000				
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,683,361,600					5,668,800,000				
2	12	1	02:01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25,000,000				60,000,000				
2	12	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 Dokumen	60,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIL	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen					6 Dokumen			
2	12	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,329,524,856					4,055,000,000			
2	12	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/b ulan	3,279,124,856	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	23 Orang/bulan	4,000,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	50,400,000			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	3 Dokumen	55,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	12	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			392,806,744					613,800,000			
2	12	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	57,158,636		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	7 Paket	7,800,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	8 Paket	150,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	108,991,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	4 Paket	110,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	3 Paket	30,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	1 Dokumen	14,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	16,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	171,016,708		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	12 Laporan	300,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			888,270,000						875,000,000		
2	12	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	62,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	2 Laporan	40,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
2	12	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	825,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	12 Laporan	835,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIIL	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	12	1	02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			47,760,000					65,000,000			
2	12	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	47,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	6 Unit	65,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			675,000,000					1,195,000,000		
2	12	2	02:01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			525,000,000					625,000,000		
2	12	2	02:01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	43 Laporan	525,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	43 Laporan	425,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	2	02:03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			150,000,000					365,000,000		
2	12	2	02:03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Laporan	200,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			306,967,000					300,000,000		
2	12	3	02:01		Pelayanan Pencatatan Sipil			306,967,000					300,000,000		
2	12	3	02:01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	43 Layanan	306,967,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	43 Layanan	300,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			341,213,680					450,000,000		
2	12	4	02:03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			196,930,000					200,000,000		
2	12	4	02:03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	6 Dokumen	84,180,000		Dana Transfer Umum-Dana	10. Penataan Birokrasi (Mentawai)	6 Dokumen	85,000,000	DINAS KEPENDUDU KAN DAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Kependudukan					Alokasi Umum					PENCATATAN SIPIIL
2	12	4	02:03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 Laporan	112,750,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	3 Laporan	115,000,000		DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	4	02:04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			144,283,680						250,000,000		
2	12	4	02:04	1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	144,283,680			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	2 Laporan	250,000,000		DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIIL
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			163,950,000						230,000,000		
2	12	5	02:01		Penyusunan Profil Kependudukan			163,950,000						230,000,000		
2	12	5	02:01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	135,750,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 Dokumen	200,000,000		DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIIL
						Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	5 Dokumen						5 Dokumen			
2	12	5	02:01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	28,200,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	30,000,000		DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATAN SIPIIL
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			8,007,793,567						6,665,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2	13	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,662,793,567						4,975,000,000		
2	13	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,644,755,753						3,500,000,000		
2	13	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/b ulan	3,461,695,753	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Bukit Pamewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		34 Orang/bulan	3,500,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	183,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			660,500,000						675,000,000		
2	13	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Paket	30,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		20 Paket	150,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA,	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
															PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 Paket	50,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 jenis	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25 jenis	160,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)			45,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	80 eksempla r	15,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		80 eksemplar	20,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	13	1	02:06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Paket	20,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		200,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
2	13	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			350,000,000						400,000,000		
2	13	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Unit	250,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	100 Unit	150,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
									Umum						DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	13	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1,692,537,814					105,000,000		
2	13	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			75,000,000			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		24 Laporan	75,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			30,000,000			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Laporan	30,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1,587,537,814			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					285,000,000					295,000,000		
2	13	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	5 Unit			30,000,000			10. Penataan Birokrasi (Mentawai		5 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				Alokasi Umum		Prima)			MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	32 Unit	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	15 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Unit	175,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	1	02:13		Penataan Organisasi			30,000,000						0		
2	13	1	02:13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
															PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA										810,000,000		
2	13	4	02:01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										810,000,000		
2	13	4	02:01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	35,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		5 Dokumen	35,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen	70,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		2 Dokumen	80,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	43 Dokumen	50,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		43 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan	86 Orang	50,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		86 Orang	60,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA,

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
												Nasional	Daerah			
						Kapasitas								PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	13	4	02:01	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	43 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		43 Dokumen	85,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	43 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		43 Dokumen	85,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	15,000,000		DAU Tambah Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	15,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	2 Dokumen	178,122,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Bukit Pamewa	DAU Tambah Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		2 Dokumen	180,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
															BERENCANA	
2	13	4	02:01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	92 Dokumen	100,000,000		Perangkat Desa						DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	92 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	4	02:01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	12 Desa	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			596,878,000								
2	13	5	02:01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta			596,878,000								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota											
2	13	5	02:01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	40,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	5	02:01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga	120,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	20 Lembaga	130,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	5	02:01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	50,000,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	5 Laporan	70,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	5	02:01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Laporan	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
															AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	13	5	02:01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	286,878,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	4 Dokumen	350,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1,657,747,753						1,909,834,800		
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			392,279,800						377,279,800		
2	14	2	02:01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			225,000,000						210,000,000		
2	14	2	02:01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Dokumen	40,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 Dokumen	70,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan	1 Dokumen						1 Dokumen			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)										
2	14	2	02:01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	90,000,000		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	2	02:01	3	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	35,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	2	02:01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Dokumen	20,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 Dokumen	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan	1 Laporan						1 Laporan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Formal dan Nonformal										
2	14	2	02:01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Laporan	20,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Laporan	20,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	2	02:01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	20,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Laporan	50,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	2	02:02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			167,279,800						167,279,800		
2	14	2	02:02	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	2	02:02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	10,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
															BERENCANA	
2	14	2	02:02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	147,279,800			DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	147,279,800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			1,265,467,953							1,532,555,000	
2	14	3	02:01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			565,467,953							682,555,000	
2	14	3	02:01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	8 Organisasi	30,000,000			DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	8 Organisasi	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	02:01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	43 Dokumen	25,000,000			DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	43 Dokumen	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	14	3	02:01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Unit	30,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		5 Unit	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	02:01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	24,978,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	02:01	5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media edukasi	4 jenis	15,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		4 jenis	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	02:01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	1 Laporan	192,335,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Laporan	192,555,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)										
2	14	3	02:01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Laporan	171,187,500				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	10 Laporan	200,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	3	02:01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	76,967,453		DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Laporan	100,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	3	02:02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			700,000,000						850,000,000		
2	14	3	02:02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisa si	300,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	2 Organisasi	350,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	3	02:02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	10 Unit	90,000,000		DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	10 Unit	120,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
															DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	3	02:02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyu- luh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	43 Laporan	60,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	43 Laporan	80,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	3	02:02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	30 Orang	250,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	30 Orang	300,000,000	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			20,585,831,389							22,168,129,929	
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	12,522,603,478						100 Persen	13,177,402,982	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	15	1	02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tesusnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	50,000,000					2 dokumen	125,000,000		
2	15	1	02:01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PERHUBUNG AN
2	15	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Adm. Keuangan	2 Sub Kegiatan	5,913,264,428					2 Sub Kegiatan	6,011,063,932		
2	15	1	02:02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/b ulan	5,776,500,428	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	58 Orang/bulan	5,874,299,932	DINAS PERHUBUNG AN
2	15	1	02:02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	136,764,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	2 Dokumen	136,764,000	DINAS PERHUBUNG AN
2	15	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	3 Kantor	418,026,103					3 Kantor	410,026,103		
2	15	1	02:06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	28,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai	OPD	5 Paket	28,000,000	DINAS PERHUBUNG AN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	15	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	53 Paket	130,026,103	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	53 Paket	130,026,103	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	20 Paket	40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	10 Dokumen	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	12 Laporan	192,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas	1 unit	150,000,000						1 unit	640,000,000	
2	15	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan yang disediakan	15 unit	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan	OPD	15 unit	160,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	15	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	63 ASN	5,931,312,947	Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum				63 ASN	5,931,312,947	
2	15	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	125,726,947	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	1 Laporan	125,726,947	DINAS PERHUBUNG AN
2	15	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,805,586,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	1 Laporan	5,805,586,000	DINAS PERHUBUNG AN
2	15	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya opersional perkantoran	1 tahun	60,000,000						1 tahun	60,000,000	
2	15	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	0 Unit	10,000,000	DINAS PERHUBUNG AN
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 Unit							1 Unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						dan dibayarkan Pajaknya										
						jumlah kendaraan roda 2	8 unit						8 unit			
2	15	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	0 Unit	50,000,000	DINAS PERHUBUNG AN
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit						8 Unit			
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase armada angkutan laut jalan/layar	85 Persen	993,227,911						85 Persen	1,920,726,947	
2	15	2	02:01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Analisis Penyusunan Rencana Induk	3 Dokumen	375,000,000						3 Dokumen	375,000,000	
2	15	2	02:01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	375,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kab. Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	375,000,000	DINAS PERHUBUNG AN
2	15	2	02:02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya rambu-rambu petunjuk jalan	100 unit	128,227,911						100 unit	1,055,726,947	
2	15	2	02:02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	128,227,911	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kab. Kepulauan Mentawai	100 Unit	55,726,947	DINAS PERHUBUNG AN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	15	2	02:05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya sarana dan prasarana serta kapasitas sumber daya manusia	100 persen	140,000,000					100 persen	140,000,000		
2	15	2	02:05	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat kab. kepulauan mentawai	1 Laporan	90,000,000	DINAS PERHUBUNG AN
2	15	2	02:05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat kab. kepulauan mentawai	1 Laporan	50,000,000	DINAS PERHUBUNG AN
2	15	2	02:11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya rencana umum trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 dokumen	100,000,000						1 dokumen	100,000,000	
2	15	2	02:11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat kab. kepulauan mentawai	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERHUBUNG AN
2	15	2	02:12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya peraturan tentang rencana tentang izin angkutan	1 laporan	75,000,000						1 laporan	75,000,000	
2	15	2	02:12	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	1 Dokumen	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan	Masyarakat Kab. Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	75,000,000	DINAS PERHUBUNG AN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota			Semua Kelurahan	Umum						
2	15	2	02:16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya peraturan tentang tarif kelas ekonomi	1 laporan	175,000,000					1 laporan	175,000,000		
2	15	2	02:16	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Pedesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat kab.kepulau n mentawai	3 Dokumen	175,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah barang melalui dermaga/pelabuhan per tahun	702302 ton	7,070,000,000						702302 ton	7,070,000,000	
						Jumlah Orang melalui dermaga/pelabuhan per tahun	319272 Orang							319272 Orang		
2	15	3	02:07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lancarnya transportasi angkutan laut	1 laporan	6,950,000,000						1 laporan	6,950,000,000	
2	15	3	02:07	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	1 Laporan	6,950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Pedesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat kab.kepulau n mentawai	1 Laporan	6,950,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2	15	3	02:12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terpenuhinya pelayanan dinas perhubungan	1 Dokumen	120,000,000					1 Dokumen	120,000,000		
2	15	3	02:12	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Masyarakat Kab. Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	120,000,000	DINAS PERHUBUNG AN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9,232,176,637							1,000,000,000	
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	4,422,176,637						100 Persen	0	
2	16	1	02:01		Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	10 Dokumen	40,000,000						10 Dokumen	0	
2	16	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	40,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	6 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya	100 Persen	2,541,220,616						100 Persen	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Administrasi keuangan Perangkat Daerah											
2	16	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2,461,220,616	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	23 Orang/bulan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	35 Dokumen	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	35 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen							0 Dokumen			
2	16	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	370,065,500						100 Persen	0	
2	16	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,065,500	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	1 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	85,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan	0	4 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	16	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	65,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	4 Paket	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	2 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	205,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	30 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Jenis	71,370,000					6 Jenis	0		
2	16	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	3 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	16	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	36,370,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			0	4 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Perangkat Daerah	100 Persen	1,204,520,521					100 Persen	0		
2	16	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	120,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	3 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,084,520,521		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 Persen	195,000,000					100 Persen	0		
2	16	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	65,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	16	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	0 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit							17 Unit		
2	16	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1 gedung	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	1 gedung	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	5 Persen	1,250,000,000						5 Persen	1,000,000,000	
2	16	2	02:01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	65 Persen	1,250,000,000						65 Persen	1,000,000,000	
2	16	2	02:01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas	0	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	16	2	02:01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	650,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(Mentawai Mantap) 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	3 Layanan	700,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	02:01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi n Informasi Program atau Kebijakan (HIBAH PWI / 150)	3 Dokumen	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(Mentawai Mantap) 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	3 Dokumen	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	2	02:01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	(Mentawai Mantap) 3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	2 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	70 Persen	3,560,000,000						70 Persen	0	
2	16	3	02:01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain Yang Dikelola	3 Domain	3,060,000,000						3 Domain	0	
2	16	3	02:01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	36 Unit	3,060,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan	0	36 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
								Tuapejat	Umum							
2	16	3	02:02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks SPBE	2 indeks	500,000,000					2 indeks	0		
2	16	3	02:02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	3	02:02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen						1 Dokumen			
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			40,000,000						0		
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Keterisian Data Pembangunan Perangkat Daerah	90 Persen	40,000,000					90 Persen	0		
2	20	2	02:01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang	10 Perangkat Daerah	40,000,000					10 Perangkat Daerah	0		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Kabupaten/Kota	Menyediakan Data Statistik Sektoral										
2	20	2	02:01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	40,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	0	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			5,715,230,034							5,397,000,000	
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	3,265,230,034						100 Persen	3,897,000,000	
2	17	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai	22 orang	2,855,489,016						22 orang	3,070,000,000	
2	17	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	2,785,489,016	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	ASN pada dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	46 Orang/bulan	3,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	ASN pada dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	0 Dokumen	70,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
															N	
						terbayarnya honorarium ASN	7 orang						7 orang			
2	17	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 buah	294,741,018					12 buah	157,000,000		
						tersedianya alat listrik	12 buah						12 buah			
2	17	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	7,660,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	tersedianya komponen listrik	0 Paket	10,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						persentase peningkatan layanan operasional perkantoran	4 kelompok						4 kelompok			
2	17	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	92,081,018	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	tersedianya komponen listrik	0 Paket	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						tersedianya jumlah dan jenis alat kebersihan kantor yang dibutuhkan	30 jenis						30 jenis			
2	17	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis dan jumlah yang dicetak dan digandakan	13 jenis	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	tersedianya komponen listrik	13 jenis	27,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						Jumlah Paket Barang Cetak	0 Paket						0 Paket			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						dan Penggandaan yang Disediakan										
2	17	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 jenis	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	tersedianya komponen listrik	4 jenis	20,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	tersedianya komponen listrik	0 Laporan	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						jumlah menghadiri undangan rakor luar daerah	14 kali							14 kali		
2	17	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa pelayanan Kantor	55 Persen	70,000,000						55 Persen	75,000,000	
2	17	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 rekening	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Koordinasi pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	4 rekening	75,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	50 Persen	45,000,000						50 Persen	45,000,000	
2	17	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 jenis	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	terpeliharanya kendaraan dinas	13 jenis	45,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi sehat	10 Persen	200,000,000					10 Persen	500,000,000		
2	17	5	02:01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus/pengaw as/anggota yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	86 Persen	200,000,000					86 Persen	500,000,000		
2	17	5	02:01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	meningkatnya kualitas sdm usaha mikro	150 orang	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOS Reguler		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	pelatihan pengurus koperasi	150 orang	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANGA N
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume usaha Koperasi	2 persen	200,000,000						2 persen	300,000,000	
2	17	6	02:01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang sehat	30 Persen	200,000,000						30 Persen	300,000,000	
2	17	6	02:01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kelompok usaha bidang pertanian, perikanan dan pariwisata yang mendapatkan penyuluhan koperasi	5 kelompok	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	peningkatan pemberdayaan akses pasar	5 kelompok	300,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANGA N
						jumlah koperasi yang difasilitasi perubahan akta koperasinya	10 kecamatan					7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)		10 kecamatan		
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai	0 Unit Usaha							0 Unit Usaha		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kabupaten/Kota										
						koperasi pengelola pasar rakyat yang mendapatkan pendampingan manajemen	1 koperasi						1 koperasi			
						tersedianya jumlah ranperda tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan umkm	1 dokumen						1 dokumen			
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	5 persen	450,000,000					5 persen	700,000,000		
2	17	7	02:01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan Bina Kelompok UKM Produktif (Modal diatas Rp. 50Jt)	5 Persen	450,000,000					5 Persen	700,000,000		
2	17	7	02:01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	kelompok koperasi	0 Dokumen	200,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						tersedianya data UMKM	500 umkm						500 umkm			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	17	7	02:01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	tersedianya data UMKM yang memenuhi syarat SIKP	120 umkm	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	kelompok koperasi	120 umkm	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan							
									Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kelurahan							
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			1,600,000,000							0	
2	17	8	02:01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			1,600,000,000							0	
2	17	8	02:01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	meningkatnya produksi umkm	17 UMK	1,600,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)		17 UMK	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Matobe							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
							Nasional	Daerah					
						Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu							
						Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Maileppet							
						Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muntei							
						Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Sigapokna							
						Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat							
						Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap							
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						600,000,000	
3	30	3				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan omset Pedagang pagar yang direvitalisasi	8 persen	400,000,000			8 persen	600,000,000
3	30	3	02:01			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan	30 Persen	400,000,000			30 Persen	600,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						tugas pokok dan fungsi perangkat daerah										
3	30	3	02:01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	pedagang pasar yang ada di kabupaten kepulauan mentawai	1 Unit	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	30	3	02:01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	80 persen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	pedagang pasar yang ada di kabupaten kepulauan mentawai	80 persen	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1,551,392,462						400,000,000		
3	31	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	360,580,000						100 Persen	400,000,000	
3	31	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa pelayanan Kantor	55 Persen	360,580,000						55 Persen	400,000,000	
3	31	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	360,580,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Koordinasi pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	0 Laporan	400,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						terbayarnya Honor Non ASN	20 Orang							20 Orang		
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			1,190,812,462							0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
3	31	2	02:01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			1,190,812,462						0		
3	31	2	02:01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah hibah daerah	10 kecamatan	1,190,812,462	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Betumonga	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)		10 kecamatan	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRI AN DAN PERDAGANGA N
						jumlah ikm yang diberikan pembinaan	4 kecamatan							4 kecamatan		
						jumlah ikm yang di revitalisasi	10 kecamatan							10 kecamatan		
						jumlah ikm yang di verifikasi paktual	10 kecamatan							10 kecamatan		
						jumlah produk kerja industri kerajinan bambu	1 produk							1 produk		
						jumlah produk kerja pengolahan sagu	1 produk							1 produk		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			1,170,000,000							765,000,000	
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80 persen	300,000,000						80 persen	100,000,000	
2	7	2	02:01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana Tenaga Kerja makro dan rencana Tenga kerja mikro yang ditetapkan	1 dokumen	300,000,000						1 dokumen	100,000,000	
2	7	2	02:01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga	1 Dokumen	300,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan	7. Pembangunan	Tenaga kerja	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PENANAMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Kerja Makro			Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Umum-Dana Alokasi Umum	Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)			MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	20 persen	650,000,000						20 persen	430,000,000	
2	7	3	02:01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan	60 persen	650,000,000						60 persen	430,000,000	
2	7	3	02:01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 Orang	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Tenaga kerja	60 Orang	365,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
												7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)				
2	7	3	02:01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya rutin kantor BLK Mini	20 jenis	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Tenaga kerja	20 jenis	65,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartif struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	40 persen	220,000,000						40 persen	235,000,000	
2	7	5	02:01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang	Jumlah pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran	40 persen	220,000,000						40 persen	235,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
					Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	perjanjian kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota											
2	7	5	02:01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	30 dokumen	220,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Tenaga Kerja	30 dokumen	235,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5,394,553,792							6,213,000,000		
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	4,342,453,792							100 Persen	5,393,000,000	
2	18	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	30,000,000							100 persen	35,000,000	
2	18	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPPTSP	5 Dokumen	35,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	100 persen	3,010,593,792							100 persen	3,100,000,000	
2	18	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang	2,941,393,792	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Pegawai DPMPPTSP	24 orang	3,000,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	18	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 orang	69,200,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Pegawai DPMPTSP	7 orang	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumberdaya manusia terlatih	100 persen	36,200,000						100 persen	75,000,000	
2	18	1	02:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 stel	11,200,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Aparatur DPMPTSP	14 stel	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	6 kali	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Aparatur DPMPTSP	6 kali	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100 persen	362,500,000						100 persen	566,000,000	
2	18	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	13,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Aparatur DPMPTSP	15 Jenis	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	118,500,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Aparatur DPMPTSP	3 Paket	245,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 jenis	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai)	Aparatur DPMPTSP	15 jenis	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
															SATU PINTU	
2	18	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Aparatur DPMPTSP	6 Dokumen	6,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Aparatur DPMPTSP	36 Laporan	275,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100 persen	25,000,000						100 persen	685,000,000	
2	18	1	02:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	3 Unit	35,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana Kegiatan Administrasi Umum	100 persen	653,160,000						100 persen	665,000,000	
2	18	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 rekening	115,200,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	3 rekening	125,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 orang	537,960,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	26 orang	540,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100 persen	225,000,000						100 persen	267,000,000	
2	18	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	10 Unit	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah	DPMPTSP	10 Unit	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Tuapejat	Umum		(Mentawai Kerja)			TERPADU SATU PINTU	
2	18	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 jenis	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	3 jenis	22,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	120,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	1 paket	130,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	1	02:09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	10 Unit	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	80 persen	690,000,000						80 persen	300,000,000	
2	18	2	02:01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi kab/kota	80 persen	240,000,000						80 persen	0	
2	18	2	02:01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	240,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
												7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	18	2	02:02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi kab/kota	1 dokumen	450,000,000						1 dokumen	300,000,000	
2	18	2	02:02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	450,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	DPMPTSP	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	85 Persen	201,600,000						85 Persen	250,000,000	
2	18	4	02:01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu	5 kecamatan	201,600,000						5 kecamatan	250,000,000	
2	18	4	02:01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Kecamatan	201,600,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Masyarakat/p elaku usaha	5 Kecamatan	250,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	2 persen	160,500,000						2 persen	270,000,000	
2	18	5	02:01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi investasi kab/kota	50 persen	160,500,000						50 persen	270,000,000	
2	18	5	02:01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	10 Pelaku Usaha	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara,	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah	Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
					Penanaman Modal	Pelaksanaan Penanaman Modal			Tuapejat	Khusus Non Fisik		(Mentawai Kerja)			TERPADU SATU PINTU		
2	18	5	02:01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	10 Pelaku Usaha	60,500,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	120,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			13,971,100,993							15,232,300,000		
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	3,671,100,993							100 Persen	3,897,300,000	
2	23	1	02:01		Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	100 Persen	30,000,000							100 Persen	31,000,000	
2	23	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2 Dokumen	31,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN	
2	23	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kesejahteraan ASN	100 Persen	2,810,567,513							100 Persen	3,000,000,000	
2	23	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	2,617,917,513		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	23 Orang	2,800,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN	
2	23	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	192,650,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 dokumen	200,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN	
2	23	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas	90 Persen	268,263,480							90 Persen	276,300,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Administrasi Perkantoran										
2	23	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	20 Paket	11,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN
2	23	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistikk kantor yang disediakan	3 Paket	51,263,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	3 Paket	51,300,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN
2	23	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	17,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	13 Paket	18,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN
2	23	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Dokumen	16,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN
2	23	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	36 Laporan	180,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN
2	23	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	90 Persen	38,000,000						90 Persen	39,000,000	
2	23	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	38,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Unit	39,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN
2	23	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90 Persen	454,270,000						90 Persen	475,000,000	
2	23	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	3 Rekening	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	3 Rekening	15,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Disediakan										
2	23	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	439,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	11 Laporan	460,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN
2	23	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya barang milik daerah dalam kondisi baik	90 Persen	70,000,000						90 Persen	76,000,000	
2	23	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Unit	16,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN
2	23	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10 Unit	55,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN
2	23	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15 Unit	5,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	20 Persen	10,300,000,000						20 Persen	11,335,000,000	
2	23	2	02:01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Sesuai SNP	20 Persen	150,000,000						20 Persen	175,000,000	
2	23	2	02:01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	10 Persen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Sekolah, Masyarakat, OPD	10 Persen	60,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN
2	23	2	02:01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai	Persentase perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan	1 Persen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Sekolah, Masyarakat, OPD	1 Persen	55,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKA AN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					dengan Standar Nasional Perpustakaan											
2	23	2	02:01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Persen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Sekolah, Masyarakat, OPD	1 Persen	60,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	2	02:02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudayaan gemar membaca di masyarakat	22 Persen	10,150,000,000						22 Persen	11,160,000,000	
2	23	2	02:02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	10 persen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD, Sekolah, Masyarakat	10 persen	160,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	2	02:02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	10,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sipora Jaya	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	OPD, Sekolah, Masyarakat	1 Perpustakaan	11,000,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			235,050,000							235,050,000	
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	30 Persen	235,050,000						30 Persen	235,050,000	
2	24	2	02:01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daftar arsip aktif yang telah dibuat daftar	15 Persen	170,000,000						15 Persen	170,000,000	
2	24	2	02:01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terlaksananya Pembinaan/Penataan serta Pengawasan tata kelola kearsipan pada OPD/Desa	10 OPD/Desa	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD/ Desa	10 OPD/Desa	170,000,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	2	02:03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten	15 Persen	65,050,000						15 Persen	65,050,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
2	24	2	02:03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Orang	65,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Orang	65,050,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			21,514,682,289						8,677,500,000		
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	6,832,574,872					100 Persen	6,972,500,000		
3	25	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	50,000,000					2 Dokumen	180,500,000		
						Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen						3 Dokumen			
						Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan LAPORAN hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen						2 Dokumen			
						Tersedianya Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan	23 Dokumen						23 Dokumen			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Dokumen RKA-SKPD										
						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	3 Dokumen						3 Dokumen			
						Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan						4 Laporan			
3	25	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	4 Dokumen	25,500,000	DINAS PERIKANAN	
3	25	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	5,772,324,872					41 Orang	5,500,000,000		
						Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen						12 Dokumen			
						Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen						50 Dokumen			
						Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen						2 Dokumen			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	16 Dokumen						16 Dokumen			
						Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen						2 Dokumen			
						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen						2 Dokumen			
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	48 Dokumen						48 Dokumen			
3	25	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/b ulan	4,333,070,615	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	42 Orang/bulan	4,000,000,000	DINAS PERIKANAN
												5. Pembangunan Pertanian				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
3	25	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,439,254,257	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	1 Dokumen	1,500,000,000	DINAS PERIKANAN	
									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)						
3	25	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	317,500,000						3 Dokumen	387,000,000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan							5 Laporan			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	40 Laporan							40 Laporan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan	5 Paket						5 Paket			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	6 Paket						6 Paket			
						Tersediannya Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Paket						11 Paket			
						Tersediannya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2 Dokumen						2 Dokumen			
						Tersediannya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	32 Paket						32 Paket			
						Tersediannya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket						6 Paket			
3	25	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	6 Paket	18,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	85,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		5. Pembangunan Pertanian Terpadu,	Dinas Perikanan	32 Paket	86,000,000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
3	25	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5 Paket	37,500,000	Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum							
3	25	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5 Paket	37,500,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	5 Paket	38,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	2 Dokumen	35,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	40 Laporan	210,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Unit Kendaraan	1 unit	75,000,000							1 unit	75,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Urusan Pemerintah Daerah	Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan										
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	10 unit						10 unit			
						Tersedianya Jumlah Paket Mebel	0 unit						0 unit			
						Tersedianya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	2 unit						2 unit			
3	25	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	50 Unit	75,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	400,000,000						12 Laporan	450,000,000	
						Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan							2 Laporan		
3	25	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai	Dinas Perikanan	1 Laporan	450,000,000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
											Nasional					Daerah		
3	25	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitas	4 unit	217,750,000						4 unit	380,000,000			
						Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 unit							1 unit				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	3 unit							3 unit				
						Terbayarnya Kendaraan DInas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perizinannya	14 unit							14 unit				
						Terbayarnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit							5 unit				
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap dan Lainnya	5 unit							5 unit				
3	25	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	1 Unit	30,000,000		DINAS PERIKANAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
3	25	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	120,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	13 Unit	125,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	67,750,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Dinas Perikanan	30 Unit	75,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Kecil	9000 ton	13,800,000,000						9000 ton	110,000,000	
3	25	3	02:02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang di Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	20 Kelompok	13,700,000,000						20 Kelompok	0	
						Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	950 Orang							950 Orang		
						Tersedianya Unit Usaha yang di Fasilitas Penyaluran Bantuan Ppendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3 Unit Usaha							3 Unit Usaha		
3	25	3	02:02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah prasarana nelayan yang diadakan	604 Unit	13,700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana		5. Pembangunan Pertanian	Kelompok Nelayan	604 Unit	0	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum			Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)				
3	25	3	02:03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	1 Dokumen	100,000,000						1 Dokumen	110,000,000	
						Tersedianya Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	2 Layanan							2 Layanan		
3	25	3	02:03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Nelayan	1 Layanan	110,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan kelompok nelayan budidaya	250 ton	550,000,000						250 ton	910,000,000	
3	25	4	02:02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tersedianya Jumlah Kelompok Usaha Yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan	10 kelompok	550,000,000						10 kelompok	910,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						pendidikan dan pelatihan										
						Tersedianya Kelompok Pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	4 kelompok						4 kelompok			
						Tersedianya Kelompok Pembudidaya ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok						10 Kelompok			
3	25	4	02:02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Ikan	10 Kelompok	550,000,000	DINAS PERIKANAN
									Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Semua Kelurahan							
3	25	4	02:02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	4 Kelompok	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Ikan	4 Kelompok	110,000,000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
3	25	4	02:02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	10 Kelompok	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan Matotonan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pembudidaya Ikan	10 Kelompok	250,000,000	DINAS PERIKANAN	
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Kelompok/usaha kecil pengelolaan perikanan yang produktif	17 persen	332,107,417	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan						17 persen	685,000,000	
3	25	6	02:01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan resiko	1 Dokumen	57,107,417							1 Dokumen	55,000,000	
3	25	6	02:01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	1 Dokumen	57,107,417	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		5. Pembangunan Pertanian Terpadu,	Kelompok Pengolahan Perikanan	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PERIKANAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum						
3	25	6	02:02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terkendalinya Mutu Ikan	44 unit	200,000,000					44 unit	550,000,000		
3	25	6	02:02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	Kelompok Pengolahan Perikanan	2 Unit Usaha	550,000,000	DINAS PERIKANAN
3	25	6	02:03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	93 Ton	75,000,000					93 Ton	80,000,000		
						Tersedianya Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 unit						2 unit			
3	25	6	02:03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi	93 Ton	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		5. Pembangunan Pertanian Terpadu,	Kelompok Pengolahan Perikanan	93 Ton	80,000,000	DINAS PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum			Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			400,000,000							750,000,000	
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			400,000,000							750,000,000	
3	25	4	02:04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			400,000,000							750,000,000	
3	25	4	02:04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	1 Unit	750,000,000	DINAS PERIKANAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			600,000,000							900,000,000	
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			400,000,000							700,000,000	
2	19	2	02:02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi			400,000,000							450,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
2	19	2	02:02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Terbayarnya hibah untuk organisasi kepemudaan (KONI dan Pramuka)	2 Organisasi	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	2 Organisasi	450,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			200,000,000						200,000,000		
2	19	3	02:05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			200,000,000						200,000,000		
2	19	3	02:05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat			6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	0 Dokumen	200,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
						Terfasilitasinya tournament olahraga tradisional/rekreasi (Laju Sampan)	1 Paket						1 Paket			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			12,415,431,448						11,260,216,210		
3	26	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,144,726,998						8,140,000,000		
3	26	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,000,000						75,000,000		
3	26	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra, renja, laporan keuangan, dan lakip yang terbuat	4 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	4 Dokumen	75,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
							Nasional	Daerah							
						Semua Kelurahan									
		Jumlah musrenbang tingkat kecamatan yang dihadiri	10 Kali						6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	10 Kali					
3	26	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6,303,403,498					6,350,000,000			
3	26	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/b ulan	4,453,453,498	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		46 Orang/bulan	4,500,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3	26	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	1,849,950,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	1,850,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
					Lancarnya operasional Perkantoran		43 Orang					43 Orang			
					Terbayarnya honorarium ASN		43 Orang					43 Orang			
					Terbayarnya honorarium Non ASN		53 Orang					53 Orang			
3	26	1	02:04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			50,000,000					360,000,000		
3	26	1	02:04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	12 Dokumen	60,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			468,323,500					420,000,000		
3	26	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	23,323,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	0 Paket	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terbayarnya ATK	1 tahun	175,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	PENDAPATAN ASLI DAERAH			1 tahun	100,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
							Nasional	Daerah							
						Sipora Utara, Tuapejat						OLAHRAGA			
		tersedianya alat kebersihan kantor	1 tahun							1 tahun					
		Tersedianya alat makan minum	4 kali							4 kali					
3	26	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	0 Paket	50,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	0 Dokumen	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	0 Dokumen	20,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	12 Laporan	250,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113,000,000						105,000,000	
3	26	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	113,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	0 Laporan	105,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						terbayarnya listrik dan air	1 tahun						1 tahun		
3	26	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			160,000,000						180,000,000	
3	26	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100,000,000					2 Unit	80,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Unit	100,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
								Tuapejat								
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				4,750,000,000					1,250,000,000		
3	26	2	02:01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				330,000,000					400,000,000		
3	26	2	02:01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	7 Dokumen		330,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	7 Dokumen	400,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	2	02:02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			400,000,000						600,000,000		
3	26	2	02:02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung dilokasi kawasan wisata	7 Unit/Jenis/ Paket		400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	7 Unit/Jenis/ Paket	600,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						terbangunnya dermaga/jetty	1 Paket							1 Paket		
						Terbangunnya gapura/ identitas gerbang	1 Paket							1 Paket		
						Terbangunnya ikon selamat datang dibumi sikerei	1 Paket							1 Paket		
						Terbangunnya pos pengawas pantai	1 Paket							1 Paket		
						Terbangunnya talud pantai mapadegat dan katiet	1 Paket							1 Paket		
						Terpeliharanya bangunan uma/ panggung kesenian di mapadegat dan kulukubuk	2 Unit							2 Unit		
						Terpeliharanya gazebo di lokasi wisata mapadegat dan kulukubuk	6 Unit							6 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
							Nasional	Daerah							
		Terpeliharanya jalan pedestrian dikulukubuk dan mapadegat	500 Meter							500 Meter					
		Terpeliharanya kafetaria mapadegat dan kulukubuk	2 Unit							2 Unit					
		Terpeliharanya kantor TIC	3 Unit							3 Unit					
		Terpeliharanya toilet dan ruang bilas di lokasi wisata mapadegat dan kulukubuk	2 Unit							2 Unit					
		Tertatanya daerah aliran sungai kulukubuk	1 Paket							1 Paket					
		Tertatanya halaman homestay katiet	1 Paket							1 Paket					
3	26	2	02:03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		4,020,000,000					250,000,000			
3	26	2	02:03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Berkembangnya desa muntei menjadi kampung wisata berbasis budaya/adat	1 Paket	4,020,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	1 Paket	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
					Berkembangnya desa saibi samukop sebagai kawasan ekowisata	1 Paket							1 Paket		
					Tersediannya dokumen perencanaan kawasan wisata sakaladat siberut barat	1 Dokumen							1 Dokumen		
					Tersediannya dokumen perencanaan penataan kawasan wisata pantai sikabalu	1 Dokumen							1 Dokumen		
					Tersediannya dokumen perencanaan pengembangan air	1 Dokumen							1 Dokumen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						terjun mattobat di desa bulasat										
						Tersedianya Dokumen perencanaan kawasan wisata pantai mabolak sikakap	1 Dokumen						1 Dokumen			
						Terselenggaranya mentawai gathering drone	1 Kali						1 Kali			
						Tertatanya kawasan pariwisata mapadegat	1 Paket						1 Paket			
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			100,000,000						1,450,000,000		
3	26	3	02:01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			100,000,000						1,450,000,000		
3	26	3	02:01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Dokumen	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	6 Dokumen	200,000,000		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			420,704,450						420,216,210		
3	26	5	02:01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			420,704,450						420,216,210		
3	26	5	02:01	4	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	tersedianya tenaga kerja pariwisata yang bersertifikat	30 Orang	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	30 Orang	0		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	26	5	02:01	6	Fasilitasi Pengembangan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif	0 Orang	220,704,450		PENDAPATAN ASLI		6. Pembangunan	0 Orang	220,216,210		DINAS PARIWISATA,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
							Nasional	Daerah							
	Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				DAERAH (PAD)		Pariwisata (Mentawai Emas)			PEMUDA DAN OLAHRAGA				
		Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif	40 Orang						40 Orang						
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1	SEKRETARIAT DAERAH		49,085,726,481						41,033,434,220					
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	34,463,506,431				100 Persen	24,943,434,220				
4	1	1	02:01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, Laporan Keuangan, LAKIP SKPD	20 dokumen	50,000,000			20 dokumen	100,000,000				
4	1	1	02:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	10 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya layanan administrasi keuangan	2 layanan	11,766,219,358					2 layanan	372,000,000	
4	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/b ulan	11,412,219,358	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	99 Orang/bulan	12,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	354,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Dokumen	360,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya aneka alat tulis kantor	12 Bulan	2,833,936,300					12 Bulan	3,054,998,130	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
4	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	699,998,300	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	4 Paket	824,998,130	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	167,678,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Paket	220,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	710,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,266,260,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	1,300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	8 Jenis	3,657,105,905						8 Jenis	3,900,000,000	
4	1	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit	3,300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	11 Unit	3,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	82,105,905		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	10 Unit	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	275,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Unit	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan internet, listrik, air bersih dan telepon seluler (Pimpnan Daerah)	12 Bulan	4,305,851,668						12 Bulan	4,598,140,000	
4	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	498,450,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	598,140,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
4	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	3,807,401,668	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	24 Laporan	4,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	8,647,541,900						12 Bulan	9,867,296,090	
4	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	400,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	8 Unit	440,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	6,547,550,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	25 Unit	7,552,305,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	10 Unit	25,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	180,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	4 Unit	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1,499,991,900	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	4 Unit	1,649,991,090	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH	2 Otang	1,460,000,000						2 Otang	1,121,000,000	
4	1	1	02:11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala	1 Orang/Bulan	350,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Orang/Bulan	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Tuapejat	Umum						
											10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)					
4	1	1	02:11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	28 Paket	110,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	28 Paket	121,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/B ulan	1,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Orang/Bulan	650,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
											10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)					
4	1	1	02:12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terselenggaranya kebutuhan harian rumah tangga pimpinan daerah	12 Bulan	449,996,000						12 Bulan	500,000,000	
4	1	1	02:12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	449,996,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Paket	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
											10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)					
											10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)					
											10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)					
4	1	1	02:13		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	1 Dokumen	600,000,000						1 Dokumen	660,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Persentase LAKIP OPD kategori baik	65 Dokumen						65 Dokumen			
4	1	1	02:13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	36 Dokumen	312,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	36 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	66,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Laporan	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	36 Dokumen	84,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	36 Dokumen	90,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Dokumen	78,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Dokumen	85,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	65,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi keprotokolan yang terfasilitasi	24 Kali	692,855,300						24 Kali	770,000,000	
4	1	1	02:14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	348,490,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	104,994,800	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	120,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	02:14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	12 Laporan	239,370,500	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Persentase jumlah produk hukum	2 Persen	12,535,501,300						2 Persen	13,850,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					KESEJAHTERAAN RAKYAT	yang digugat atau bermasalah										
						Persentase kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mendukung program prioritas daerah	100 Persen						100 Persen			
						Persentase Penyelesaian Perkara hukum pema baik litigasi maupun non litigasi	88 Persen						88 Persen			
4	1	2	02:01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	85 Persen	563,860,000					85 Persen	670,000,000		
4	1	2	02:01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	220,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
						Terlaksananya Peningkatan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen						1 Dokumen			
						Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen						1 Dokumen			
						Terlaksananya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1 Dokumen						1 Dokumen			
4	1	2	02:01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi Forum Komunikasi Kecamatan	10 Kecamatan	222,320,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	10 Kecamatan	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
						Inventarisasi Permasalahan di Kecamatan dan Solusinya	10 Kecamatan						10 Kecamatan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Terlaksananya Pembinaan terhadap Kecamatan	10 Kecamatan						10 Kecamatan			
						Terlaksananya Penyusunan Pedoman Teknis Penataan Wilayah Kecamatan	1 Dokumen						1 Dokumen			
4	1	2	02:01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Proses Administrasi Pergantian Antar Waktu Pimpinan dan Anggota Legislatif	1 Dokumen	191,540,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dokumen						1 Dokumen			
						Menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Dokumen						1 Dokumen			
						Menyusun Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Dokumen						1 Dokumen			
						Menyusun Bahan Laporan Pertanggungjawab an Kepala Daerah (LKPJ)	1 Dokumen						1 Dokumen			
4	1	2	02:02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	95 Persen	8,868,345,000						95 Persen	9,700,000,000	
4	1	2	02:02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2 Dokumen	4,200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	2 Dokumen	4,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
4	1	2	02:02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	168,345,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	2 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	02:02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	4,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	3 Dokumen	5,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	02:03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	95 Persen	820,296,300						95 Persen	980,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
4	1	2	02:03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	15 Dokumen	220,333,300	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat & ASN	15 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	02:03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Pemda yang ditangani dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin	5 Kasus	500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat & ASN	5 Kasus	620,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	02:03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasika n dan disebarluaskan	4 Dokumen	99,963,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat & ASN	4 Dokumen	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	02:04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase produk hukum yang terevaluasi atau terfasilitasi	85 Persen	2,283,000,000						85 Persen	2,500,000,000	
4	1	2	02:04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Melakukan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Instansi Lainnya	1 Dokumen	2,283,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	masyarakat, OPD	1 Dokumen	2,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan perekonomian yang diitindaklanjuti	80 Persen	2,086,718,750						80 Persen	2,240,000,000	
4	1	3	02:01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	30 Persen	457,924,500						30 Persen	475,000,000	
4	1	3	02:01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dewan Pengawas Defenitif	3 Orang	291,325,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	3 Orang	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Regulasi BUMD dan BLUD	2 Regulasi							2 Regulasi		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
4	1	3	02:01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen ETPD	2 Dokumen	166,599,500	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat	2 Dokumen	175,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen koordinasi Tim Percepatan TPAKD	1 Dokumen							1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Pengendalian Inflasi	6 Dokumen							6 Dokumen		
						Standarisasi satuan harga barang dan jasa (SSHEJ)	1 Dokumen							1 Dokumen		
4	1	3	02:02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	persentase OPD dengan relisasi keuangan dan fisik lebih dari 85 persen	80 Persen	600,000,000						80 Persen	700,000,000	
4	1	3	02:02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	175,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	175,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02:02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	175,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Laporan	175,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02:02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Laporan	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02:03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase OPD yang mengikuti ULP tepat waktu	90 Persen	939,152,250						90 Persen	970,000,000	
						tersedianya layanan pengadaan barang dan jasa	1 Layanan							1 Layanan		
4	1	3	02:03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	341,337,400	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	masyarakat, OPD	12 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
4	1	3	02:03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	521,460,850	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	masyarakat, OPD	12 Dokumen	530,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02:03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah PNS peserta sosialisasi peraturan Kebijakan pengadaan barang dan jasa	80 orang	76,354,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	masyarakat, OPD	80 orang	90,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	02:04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	30 Persen	89,642,000						30 Persen	95,000,000	
						Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik	30 Persen							30 Persen		
						Tersedianya layanan kebijaka SDA	1 Layanan							1 Layanan		
4	1	3	02:04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	89,642,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	95,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	2				SEKRETARIAT DPRD			33,485,122,252							30,419,470,976	
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN			16,933,010,039							13,926,138,840	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
4	2	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,726,271,199						669,400,000		
4	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/b ulan	3,456,871,199	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		33 Orang/bulan	400,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
											10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)					
4	2	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 DOK	269,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 DOK	269,400,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,000,000						100,000,000		
4	2	1	02:05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	5 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			5 Orang	100,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	1,013,984,640					3 Jenis	1,063,984,640		
4	2	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	8 Jenis	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS	8 Jenis	35,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	3 Paket	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS	3 Paket	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS	3 Jenis	50,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana	10. Penataan Birokrasi (Mentawai	PNS	1 Paket	350,000,000	SEKRETARIAT DPRD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
4	2	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	100,000,000		Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PNS	1 Paket	100,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Dok	78,984,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PNS	1 Dok	78,984,640	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PNS	6 Laporan	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			200,000,000						200,000,000		
4	2	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Unit	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
						Tersedianya Mabel	2 Paket						2 Paket			
4	2	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,576,072,000						1,576,072,000		
4	2	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Rek	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Rek	300,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Pegawai Kontrak	59 Orang	1,276,072,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			59 Orang	1,276,072,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			625,000,000						625,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
4	2	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan peorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	275,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	8 Unit	275,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	22 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	22 Unit	150,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Unit	200,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			9,591,682,200						9,591,682,200		
4	2	1	02:15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	20 Orang/Bulan	9,426,682,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	20 Orang/Bulan	9,426,682,200	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	164 Stel	165,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	164 Stel	165,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	1	02:16		Layanan Administrasi DPRD			100,000,000						100,000,000		
4	2	1	02:16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	0 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 Laporan	100,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
						Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan						4 Laporan			
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			16,552,112,213						16,493,332,136		
4	2	2	02:01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			1,655,832,136						1,655,832,136		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
4	2	2	02:01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	265,832,136		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	265,832,136	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	16 Dokumen	1,100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	16 Dokumen	1,100,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	40,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			1,015,000,000						1,015,000,000		
4	2	2	02:02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	32,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	32,500,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	32,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	32,500,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:02	3	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	1 Dokumen	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4	2	2	02:03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			3,200,000,000							
4	2	2	02:03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan	650,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	4 Laporan	650,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	4 Laporan	550,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	650,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	4 Laporan	650,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	4 Laporan	500,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	4 Laporan	350,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	1 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	02:04		Peningkatan Kapasitas DPRD			2,600,000,000						2,600,000,000	
4	2	2	02:04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman	6 Dokumen	1,900,000,000		Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi	6 Dokumen	1,900,000,000	SEKRETARIAT DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Tugas DPRD				Umum-Dana Alokasi Umum		(Mentawai Prima)				
4	2	2	02:04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6 Dokumen	270,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	6 Dokumen	270,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	3 Orang	180,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	4 Orang	240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	4 Orang	240,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusun Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	10,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			5,431,280,077						5,500,000,000		
4	2	2	02:05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan	2,131,280,077		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6 Laporan	2,200,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:05	3	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	3 Dokumen	3,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	3 Dokumen	3,300,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:08		Fasilitasi Tugas DPRD			2,650,000,000						2,522,500,000		
4	2	2	02:08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6 Dokumen	2,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	6 Dokumen	2,500,000,000	SEKRETARIAT DPRD	
4	2	2	02:08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	0 Laporan	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 Laporan	22,500,000	SEKRETARIAT DPRD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
						Kelurahan										
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	3 Dokumen							3 Dokumen						
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	1	PERENCANAAN		9,637,779,747							10,496,900,000					
5	1	1								100 Persen	6,768,900,000					
5	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	6,373,779,747				100 Persen	6,768,900,000			
5	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	2 Layanan	4,465,919,747				2 Layanan	4,700,000,000			
5	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/b ulan	4,315,919,747	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	30 Orang/bulan	4,500,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 orang	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 orang	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Layanan	639,000,000						5 Layanan	710,000,000	
5	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Paket	25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
5	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	160,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Paket	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	85,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	6 Paket	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	25,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	350,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	36 Laporan	360,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya layanan pengadaan Barang Milik Daerah	3 layanan	155,000,000						3 layanan	170,000,000	
5	1	1	02:07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Unit	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Unit	65,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Unit	20,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan penunjang perangkat daerah	2 layanan	776,860,000						2 layanan	786,900,000	
5	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	340,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi	OPD	12 Laporan	350,000,000	BADAN PERENCANAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
					Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Umum-Dana Alokasi Umum					N PEMBANGUN AN DAERAH		
5	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	436,860,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	436,900,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUN AN DAERAH
5	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan pemeliharaan BMD perangkat daerah	4 layanan	337,000,000							4 layanan	402,000,000	
5	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	140,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	2 Unit	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUN AN DAERAH
5	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	17,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	2 Unit	17,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUN AN DAERAH
5	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Unit	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUN AN DAERAH
5	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Unit	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUN AN DAERAH
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	konsistensi program RPJMD Kedalam RKPD	100 persen	1,914,000,000							100 persen	1,550,000,000	
5	1	2	02:01		Penyusunan Perencanaan dan	jumlah tahapan penyusunan	3 tahapan	1,250,000,000							3 tahapan	1,110,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Pendanaan	dokumen perencanaan daerah										
5	1	2	02:01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	2 Berita Acara	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	02:01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah berita acara musrenbang kabupaten/kota	2 berita acara	350,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	2 berita acara	360,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	02:01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJP D/RPJM D/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJP D/RPJM D/RKPD)	3 Dokumen	600,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Dokumen	550,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	02:02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Layanan Data dan Informasi Bidang Perencanaan	4 Dokumen	350,000,000						4 Dokumen	120,000,000	
5	1	2	02:02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	2	02:02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	78 Orang	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	78 Orang	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
									Kab. Kepulauan	Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
								Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Umum-Dana Alokasi Umum		(Mentawai Prima)					
5	1	2	02:03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah koordinasi pengendalian dan monitoring pembangunan	10 kali	314,000,000					10 kali	320,000,000		
5	1	2	02:03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	314,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Laporan	320,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPD dan program prioritas kedalam Renja Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	85 Persen	1,350,000,000					85 Persen	2,178,000,000		
5	1	3	02:01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya Layanan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	4 layanan	450,000,000					4 layanan	1,127,500,000		
5	1	3	02:01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Laporan	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	20 Laporan	82,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	18 Laporan	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	18 Laporan	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan	25 Laporan	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai	OPD	25 Laporan	110,000,000	BADAN PERENCANAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Alokasi Umum		Prima)			PEMBANGUN AN DAERAH	
5	1	3	02:01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	190,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	4 Laporan	210,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUN AN DAERAH
5	1	3	02:02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersedianya layanan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	5 layanan	450,000,000						5 layanan	550,500,000	
5	1	3	02:02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	140,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	OPD	1 Dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUN AN DAERAH
5	1	3	02:02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	OPD	1 Laporan	80,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUN AN DAERAH
5	1	3	02:02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang	1 Laporan	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan	OPD	1 Laporan	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUN AN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Perekonomian										
5	1	3	02:02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 Dokumen	140,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	OPD	1 Dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	OPD	1 Laporan	60,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya layanan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	4 layanan	450,000,000						4 layanan	500,000,000	
5	1	3	02:03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	2 Dokumen	180,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	2 Dokumen	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
5	1	3	02:03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	5 Laporan	70,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10 Laporan	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	10 Laporan	110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	1	3	02:03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	10 Laporan	110,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	OPD	10 Laporan	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			750,000,000							950,000,000	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			750,000,000							950,000,000	
5	5	2	02:01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			300,000,000							400,000,000	
5	5	2	02:01	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	1 Laporan	300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Laporan	400,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Otonomi Daerah										
5	5	2	02:02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	2 penelitian	450,000,000					2 penelitian	550,000,000		
5	5	2	02:02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan OPD	1 Dokumen	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	5	2	02:02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat dan OPD	1 Dokumen	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	2				KEUANGAN			160,411,410,994							158,259,208,039	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	38,304,773,156						100 Persen	23,449,444,727	
5	2	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	2 Layanan	254,736,000						2 Layanan	280,209,600	
5	2	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	254,736,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	3 Laporan	280,209,600	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	2 Dokumen	34,768,367,656						2 Dokumen	20,085,207,427	
5	2	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	33,667,027,656	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	51 Orang/bulan	18,873,733,427	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
									Semua Kelurahan							
5	2	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	1,101,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	3 Dokumen	1,211,474,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	2 Dokumen	100,000,000						2 Dokumen	110,000,000	
5	2	1	02:04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Laporan	110,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	7 Layanan	799,589,500						7 Layanan	588,858,100	
5	2	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Paket	40,198,400	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Paket	165,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	260,726,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Paket	290,900,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	68,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Paket	75,163,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,997,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Dokumen	17,596,700	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1 Laporan	254,736,000		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai)	0	1 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						dan Konsultasi SKPD				Alokasi Umum						
5	2	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	2 Layanan	328,000,000					2 Layanan	360,800,000		
5	2	1	02:07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	328,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 1 Unit	360,800,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	2	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	1 Layanan	1,469,336,000					1 Layanan	1,528,269,600		
5	2	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	782,156,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 2 Laporan	772,371,600	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	2	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	687,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 1 Laporan	755,898,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	2	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Adm. Perkantoran	3 Layanan	584,744,000					3 Layanan	496,100,000		
5	2	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	128,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 3 Unit	140,800,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	2	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	209,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 3 Unit	229,900,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	2	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	247,744,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 1 Unit	125,400,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi					Umum					
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	90 Persen	120,604,491,838						90 Persen	133,139,409,412	
5	2	2	02:01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	2,547,915,805						6 Dokumen	3,123,184,246	
5	2	2	02:01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	101,309,305			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 2 Dokumen	205,015,036	BADAN KEUANGAN DAERAH
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
5	2	2	02:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	77,450,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 2 Dokumen	132,000,000	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	842,109,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 2 Dokumen	926,320,010	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	839,018,500			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 2 Dokumen	1,031,820,350	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	216,897,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 2 Dokumen	238,586,700	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah	72 Orang	471,132,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 72 Orang	589,442,150	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Pemerintah Kabupaten/Kota										
5	2	2	02:02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Syarat Penyaluran DAU, DAK dan DID	5 Dokumen	957,893,700					5 Dokumen	1,053,674,600		
5	2	2	02:02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	4 Dokumen	308,514,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	4 Dokumen	339,365,950	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	2	2	02:02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Dokumen	183,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	3 Dokumen	202,301,000	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	2	2	02:02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3 Dokumen	116,965,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	3 Dokumen	128,652,700	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	2	2	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan	12 Laporan	223,013,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	12 Laporan	245,314,300	BADAN KEUANGAN DAERAH	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)										
5	2	2	02:02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	9 Dokumen	125,491,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	9 Dokumen	138,040,650	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pedoman Pengambilan Keputusan Daerah dalam Penyusunan Anggaran dan Salah Satu Syarat Opini BPK	7 Dokumen	1,139,129,500						7 Dokumen	1,407,042,450	
5	2	2	02:03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	41 Dokumen	61,209,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	41 Dokumen	67,330,120	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	59,391,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	18 Laporan	65,330,100	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	37 Laporan	201,787,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	37 Laporan	287,966,580	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen	206,211,000		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai	0	2 Dokumen	314,832,100	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				Alokasi Umum						
5	2	2	02:03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	122,609,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Dokumen	134,869,900	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	148,186,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Dokumen	163,004,600	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	72 Orang	339,735,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	72 Orang	373,709,050	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan Baik	2 Dokumen	115,959,552,833						2 Dokumen	127,555,508,116	
5	2	2	02:04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	12,485,992,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Laporan	13,734,591,266	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	2	02:04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	103,473,560,773	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Laporan	113,820,916,850	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang dan Jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	80 Persen	418,873,000	Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum			80 Persen	429,385,050		
5	2	3	02:01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara Baik dan Benar	6 Dokumen	418,873,000					6 Dokumen	429,385,050		
5	2	3	02:01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	36,645,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	4 Dokumen	48,310,050	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3	02:01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36 Laporan	92,353,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	36 Laporan	108,028,800	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3	02:01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Laporan	76,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	10 Laporan	83,875,550	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3	02:01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	121,297,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	30 Dokumen	133,427,250	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3	02:01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	56,793,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	2 Laporan	0	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	3	02:01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang	2 Laporan	35,535,000		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai)	0	2 Laporan	55,743,400	BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
						Disusun				Alokasi Umum		Prima)					
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap total pendapatan	8.5 Persen	1,083,273,000						8.5 Persen	1,240,968,850		
5	2	4	02:01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi, Itensifikasi dan Kajian Potensi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	6 Dokumen	1,083,273,000						6 Dokumen	1,240,968,850		
5	2	4	02:01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	186,692,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Laporan	95,361,200	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	4	02:01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Unit	182,588,500			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	4 Unit	90,847,350	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	4	02:01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 Obyek Pajak	127,299,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Obyek Pajak	272,686,700	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	4	02:01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	99,983,500			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Dokumen	109,981,850	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	4	02:01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	129,595,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	1 Dokumen	279,265,250	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	2	4	02:01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	357,115,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0	4 Laporan	392,826,500	BADAN KEUANGAN DAERAH
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
5	3				KEPEGAWAIAN			8,050,079,408					9,491,000,000			
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	5,100,079,408					100 Persen	6,497,000,000		
5	3	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100 Persen	3,781,756,826					100 Persen	5,003,000,000		
5	3	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/b ulan	3,631,756,826	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	55 Orang/bulan	4,500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	1 Dokumen	451,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	1 Dokumen	26,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	2 Laporan	26,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
5	3	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100 Persen	365,000,000					100 Persen	380,000,000		
5	3	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	pegawai BKPSDM	5 Paket	16,000,000	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	pegawai BKPSDM	1 Paket	51,000,000	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	70,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	pegawai BKPSDM	3 Paket	71,000,000	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	pegawai BKPSDM	3 Paket	16,000,000	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	pegawai BKPSDM	5 Dokumen	16,000,000	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	pegawai BKPSDM	20 Laporan	210,000,000	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
5	3	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah	12 Laporan	700,000,000					12 Laporan	760,000,000		
5	3	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	250,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	3 Laporan	260,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tebaga Kontrak yg di bayarkan	18 Orang	450,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	18 Orang	500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perkantoran	5 Unit	253,322,582						5 Unit	354,000,000	
5	3	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	3 Unit	31,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	6 Unit	21,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	0 Unit	51,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	5 Unit							5 Unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Dipelihara										
5	3	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	153,322,582	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	1 Unit	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	200 indek	2,950,000,000						200 indek	2,994,000,000	
5	3	2	02:01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya Pemberhentian dan Informasi ASN	60 Persen	375,000,000						60 Persen	396,000,000	
5	3	2	02:01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	210,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	02:01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	76,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	02:01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	110,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	02:02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN Sesuai Anjab dan ABK	60 Persen	725,000,000						60 Persen	736,000,000	
5	3	2	02:02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	650,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	660,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
5	3	2	02:02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	300 Dokumen	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai	300 Dokumen	76,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	02:03		Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya Kapasitas Kinerja ASN	60 Persen	1,700,000,000						60 Persen	1,710,000,000	
5	3	2	02:03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	20 Orang	700,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai	20 Orang	710,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	02:03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Dokumen	1,000,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	02:04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya Disiplin ASN	60 Persen	150,000,000						60 Persen	152,000,000	
5	3	2	02:04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	1 Dokumen	76,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	02:04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	75,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai BKPSDM	10 Orang	76,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			3,100,000,000							2,338,615,000	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi	10 Persen	3,100,000,000						10 Persen	2,338,615,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
5	4	2	02:01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan	20 Persen	800,000,000					20 Persen	638,615,000		
5	4	2	02:01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5 Orang	800,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN Kabupaten Kepulauan Mentawai	5 Orang	638,615,000	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen						1 Dokumen			
5	4	2	02:02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Peningkatan dan pengembangan Kopetensi Manajerial dan Fungsional	25 Persen	2,300,000,000					25 Persen	1,700,000,000		
5	4	2	02:02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	2,300,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Semua ASN Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Laporan	1,700,000,000	BADAN KEPEGAWAI AN DAN PENGEMBAN GAN SUMBER DAYA MANUSIA	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	1				INSPEKTORAT DAERAH			9,790,307,543						12,105,000,000		
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas	100 Persen	6,458,516,270					100 Persen	7,045,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						perangkat daerah										
6	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5,139,055,743					100 Persen	4,500,000,000		
6	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/b ulan	4,989,055,743		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	37 Orang/bulan	4,300,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	12 Dokumen	200,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	81,617,104					100 Persen	150,000,000		
						Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen						100 Persen			
6	1	1	02:05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	81,617,104		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	10 Orang	150,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	398,000,000					100 Persen	675,000,000		
6	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	13,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Paket	30,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	6 Paket	10,000,000		Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	1. Pembangunan	Gedung Kantor dan	6 Paket	20,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Tangga yang Disediakan				Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendidikan (Mentawai Cerdas)	ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai			
6	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	120,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	3 Paket	300,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	2 Paket	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Paket	50,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	2 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Dokumen	25,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Gedung Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	12 Laporan	250,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan BMD urusan Perangkat Daerah	100 Persen	244,245,423						100 Persen	820,000,000	
6	1	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas	1 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai)	Kantor dan ASN dilingkungan	1 Unit	450,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
					Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				Alokasi Umum		Prima)	Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai				
6	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	72,663,423		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	5 Unit	120,000,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	02:07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket software yang disediakan	1 Paket	71,582,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Paket	250,000,000	INSPEKTORAT	
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit							0 Unit			
6	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	449,598,000							100 Persen	600,000,000	
6	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	137,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	36 Laporan	150,000,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	312,598,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kantor dan ASN dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	11 Laporan	450,000,000	INSPEKTORAT	
6	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	146,000,000						100 Persen	300,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
6	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	60,000,000				10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Sarana Kantor dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 Unit	100,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	56,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Sarana Kantor dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	6 Unit	150,000,000	INSPEKTORAT
6	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Jenis	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan Sarana Kantor dilingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	5 Jenis	50,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP	level 3 level	2,705,000,000						level 3 level	3,800,000,000	
						Persentase tindak lanjut temuan	80 Persen							80 Persen		
6	1	2	02:01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Internal	100 Persen	2,213,000,000						100 Persen	3,120,000,000	
6	1	2	02:01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Laporan	423,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	20 Laporan	500,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	02:01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	330,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	12 Laporan	420,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	02:01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	108 Laporan	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan	108 Laporan	500,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
6	1	2	02:01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	37 Laporan	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	37 Laporan	200,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	02:01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	16 Laporan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	16 Laporan	800,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	02:01	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepaka tan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Kesepakatan	350,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	02:01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, Aparatur Desa, SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Dokumen	350,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	02:02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	100 Persen	492,000,000						100 Persen	680,000,000	
6	1	2	02:02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	95,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD, Aparatur Desa, Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Laporan	180,000,000	INSPEKTORAT
6	1	2	02:02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	397,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD, Aparatur Desa, Masyarakat	12 Laporan	500,000,000	INSPEKTORAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
								Umum			dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai					
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	85 Persen	626,791,273					85 Persen	1,260,000,000		
6	1	3	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100 Persen	206,791,273					100 Persen	330,000,000		
6	1	3	02:01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomen dasi	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2 Rekomendasi	30,000,000	INSPEKTORAT	
6	1	3	02:01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0 Rekomen dasi	194,791,273		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	0 Rekomendasi	300,000,000	INSPEKTORAT	
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomen dasi						2 Rekomendasi			
6	1	3	02:02		Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	100 Persen	420,000,000					100 Persen	930,000,000		
						Terlaksananya Zona Integritas	100 Persen						100 Persen			
6	1	3	02:02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	4 perangka t daerah	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD dan Aparatur Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan	4 perangkat daerah	300,000,000	INSPEKTORAT	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Daerah										
6	1	3	02:02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	9 perangka t daerah	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD dan Aparatur Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	9 perangkat daerah	180,000,000	INSPEKTORAT
6	1	3	02:02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD dan Aparatur Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	5 Kegiatan	300,000,000	INSPEKTORAT
6	1	3	02:02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangka t daerah	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN, SKPD dan Aparatur Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	1 perangkat daerah	150,000,000	INSPEKTORAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			6,818,195,941							7,666,800,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,641,304,441							7,331,800,000	
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80,000,000							82,500,000	
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		8 Laporan	82,500,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,606,744,341							3,105,200,000	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	23 orang/bu lan	2,354,333,618		Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai)		23 orang/bulan	2,360,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
											Nasional					Daerah		
						Tunjangan ASN					Alokasi Umum							
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	252,410,723				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Dokumen	745,200,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			120,050,100								186,100,000		
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	2,500,100				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		10 Jenis	3,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20,000,000		Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Utara, Muara Sikabalu		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Paket	45,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2,550,000						10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		10 Paket	3,100,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	95,000,000				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		26 Laporan	135,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3,580,000,000								3,635,000,000		
7	1	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	80,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		100 Unit	135,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3,500,000,000				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	3,500,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			215,750,000								230,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	24,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 Laporan	30,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA	
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	191,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	12 Laporan	200,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA	
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38,760,000						93,000,000		
7	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	3 Unit	65,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA	
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	4 Unit	7,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA	
7	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	10 Unit	21,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7,200,000						25,000,000		
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7,200,000						25,000,000		
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	7,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain	12 Laporan						12 Laporan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						yang Dilimpahkan										
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			59,709,000						115,000,000		
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			59,709,000						115,000,000		
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasya rakatan	34,709,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 Lembaga Kemasyaraka tan	40,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25,000,000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	12 Laporan	75,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			74,982,500						130,000,000		
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			74,982,500						130,000,000		
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	100 Orang	23,982,500					10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	100 Orang	75,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Kesatuan Republik Indonesia	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	51,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24 Dokumen	55,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			35,000,000						65,000,000		
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			35,000,000						65,000,000		
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	12 Dokumen	65,000,000	KECAMATAN SIBERUT UTARA	
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			2,462,239,078						2,399,037,870		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B Indek	2,239,475,678					B Indek	2,171,790,470		
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Desa yang di Evaluasi	3 Desa	30,000,000					3 Desa	34,996,000		
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	3 Laporan	34,996,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan admisitasi umum yang dilaksanakan	11 Kegiatan	1,652,749,178						11 Kegiatan	1,568,527,129	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/b ulan	1,502,749,178		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan	11 Orang/bulan	1,312,867,129	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Kecamatan	12 Dokumen	255,660,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan yang dilaksanakan	11 Layanan	108,966,500						11 Layanan	108,966,500	
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,023,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur pemerintahan Kecamatan	1 Paket	5,023,700	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	29,406,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur pemerintahan Kecamatan	4 Paket	29,406,200	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	2 Paket	5,011,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur pemerintahan Kecamatan	2 Paket	5,011,600	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	69,525,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur pemerintahan Kecamatan	6 Laporan	69,525,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7	1	1	02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana diadakan	5 Jenis	73,000,000					5 Jenis	78,500,000			
7	1	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur pemerintahan Kecamatan	20 Unit	18,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur pemerintahan Kecamatan	3 Unit	35,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur pemerintahan Kecamatan	1 Unit	25,500,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan admsinitasi umum yang dilaksanakan	12 Bulan	336,000,000						12 Bulan	336,000,000	
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintah Kecamatan	12 Laporan	12,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	324,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintah Kecamatan	16 Laporan	324,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang dan aset yang dipelihara	2 Jenis	38,760,000						2 Jenis	44,800,841	
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	2 Unit	2,760,000		Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aset barang milik daerah yang dikelola	2 Unit	2,760,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Alokasi Umum	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prima)	oleh Kecamatan Siberut Tengah			
7	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aset barang milik daerah yang dikelola oleh Kecamatan Siberut Tengah	6 Unit	6,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aset barang milik daerah yang dikelola oleh Kecamatan Siberut Tengah	1 Unit	36,040,841	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B Indek	23,911,000						B Indek	23,911,000	
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan Kepada Camat	1 Kegiatan	23,911,000						1 Kegiatan	23,911,000	
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	23,911,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat kecamatan Siberut Tengah	1 Laporan	23,911,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B Indek	39,999,900						B Indek	39,999,900	
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	3 Desa	39,999,900						3 Desa	39,999,900	
						Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 kali							1 kali		
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan			20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur,Peme rintahan, Masyarakat dan TP-PKK		20,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Pembangunan di Desa			Tengah, Semua Kelurahan	Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	19,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur,Peme rintahan, Masyarakat dan TP-PKK	1 Laporan	19,999,900	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B indeks	82,298,500						B indeks	86,782,500	
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kecamatan sesuai penugasan kepala daerah	1 Kegiatan	82,298,500						1 Kegiatan	86,782,500	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	18,782,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat kecamatan Siberut Tengah	100 Orang	18,782,500	KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	63,516,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat kecamatan Siberut Tengah	12 Dokumen	68,000,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B Indek	76,554,000						B Indek	76,554,000	
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi ADD yang dilaksanakan	4 kali	76,554,000						4 kali	76,554,000	
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	76,554,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Aparatur Pemerintahan Desa	3 Dokumen	76,554,000	KECAMATAN SIBERUT TENGAH
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			2,380,087,572							2,744,766,163	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2,130,485,363						100 Persen	2,463,944,000	
						Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen							100 Persen		
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Persen	80,770,000						90 Persen	110,000,000	
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	80,770,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Pedesaan di wilayah Kecamatan	4 Laporan	110,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusnya Pelaporan Administrasi Keuangan	90 Persen	1,522,644,061					90 Persen	1,750,000,000		
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima Gaji dan tunjangan daerah	11 Orang	1,322,644,061	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Lingkungan Pegawai Kecamatan Siberut Barat	11 Orang	1,400,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	200,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN Lingkungan Pegawai Kecamatan Siberut Barat	14 Dokumen	350,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Perengkapan dan Peralatan Perangkat Daerah	90 Persen	128,516,443						90 Persen	168,800,000	
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8,000,000					Pegawai OPD Kecamatan Siberut Barat		8,800,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	38,016,443	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai OPD Kecamatan Siberut Barat	3 Paket	45,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 buku	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai OPD Kecamatan Siberut Barat	12 buku	5,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai OPD Kecamatan Siberut Barat	10 Laporan	110,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75,000,000							85,000,000	
7	1	1	02:07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		1 Unit	85,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Honorarium Jasa Pelayanan Umum Kantor	90 Persen	259,200,000					90 Persen	280,144,000		
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	12 Laporan	30,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	235,200,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kecamatan Siberut Barat	12 Laporan	250,144,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Jasa Pemeliharaan Barang Inventaris	90 Persen	64,354,859						90 Persen	70,000,000	
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	34,354,859		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan Siberut Barat	2 Unit	35,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Kantor Kecamatan Siberut Barat	2 Unit	35,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Barat	B Indek	51,960,000						B Indek	85,000,000	
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tersedianya Dokumen Kependudukan Masyarakat	90 Persen	51,960,000						90 Persen	85,000,000	
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	51,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	6 Laporan	85,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan	62 persen	55,725,709						62 persen	15,822,163	
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 Persen	55,725,709						90 Persen	15,822,163	
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			41,903,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat		0	KECAMATAN SIBERUT BARAT
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	13,822,709	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	Masyarakat Kecamatan Siberut Barat	2 Laporan	15,822,163	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Perayaan HUT RI	100 Persen	76,846,500						100 Persen	103,000,000	
						Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diseles aikan	100 Persen							100 Persen		
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Perayaan HUT RI	90 Persen	76,846,500						90 Persen	103,000,000	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	100 Orang	21,485,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	asyarakat Wilayah Kecamatan Siberut Barat	100 Orang	38,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Pelayanan Publik					
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Laporan	55,361,500	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Simalegi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	asyarakat Wilayah Kecamatan Siberut Barat	3 Laporan	65,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Persen	65,070,000						100 Persen	77,000,000	
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pemerintahan yang bebas KKN	90 Persen	65,070,000						90 Persen	77,000,000	
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Dokumen	65,070,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pegawai Pemerintahan Desa Wilayah Kecamatan Siberut Barat	4 Dokumen	77,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			2,516,836,691							3,214,200,000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,354,836,691							2,874,200,000	
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan			49,995,000							60,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	49,995,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	8 Laporan	60,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	
												3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)				
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,769,005,000						2,100,000,000		
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/b ulan	1,364,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	14 Orang/bulan	1,600,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	405,005,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	12 Dokumen	500,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			179,036,691						225,000,000		
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan n Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	12 Paket	20,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	32 Paket	99,036,691	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana		1. Pembangunan Pendidikan	32 Paket	110,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
		Disediakan			Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Alokasi Umum		(Mentawai Cerdas)								
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		4 Paket	15,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Laporan	80,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90,000,000							135,000,000	
7	1	1	02:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		12 Unit	60,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		6 Unit	50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	1	02:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)		3 Unit	25,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			266,800,000							354,200,000	
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		12 Laporan	50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Disediakan										
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	226,800,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Tailelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	12 Laporan	304,200,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7,000,000						60,000,000		
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7,000,000						60,000,000		
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	7,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Tailelu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	12 Laporan	60,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			55,000,000						90,000,000		
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			55,000,000						90,000,000		
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		40,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	6 Laporan	50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN			60,000,000						140,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					UMUM											
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			60,000,000						140,000,000		
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 Orang	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	150 Orang	90,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen						0 Dokumen			
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			40,000,000						50,000,000		
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan			40,000,000						50,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
											Nasional					Daerah	
					Pengawasan Pemerintahan Desa												
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	40,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Barat Daya, Pasakiat Taileleu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)		3 Dokumen	50,000,000	KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN			3,234,634,966							4,583,000,000		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	2,922,685,966							100 Persen	4,045,000,000	
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya layanan perencanaan, peng anggaran dan evaluasi kinerja	1 layanan	139,998,000							1 layanan	190,000,000	
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	139,998,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Laporan	190,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya layanan administrasi keuangan	2 layanan	2,171,429,783							2 layanan	2,850,000,000	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/b ulan	2,041,429,783	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	19 Orang/bulan	2,500,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Dokumen	350,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	TERSEDINYA LAYANAN ADMINISTRASI UMUM	4 LAYANAN	157,863,183					4 LAYANAN	210,000,000		
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,812,800	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Paket	12,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	41,050,383	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Paket	75,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Paket	13,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	12 Laporan	110,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya layanan penunjang urusan pemerintah	2 layanan	251,700,000						2 layanan	465,000,000	
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening penyediaan jasa komunikasi air dan listrik yang terbayarkan	1 Rekening	12,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Rekening	15,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	239,700,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi	OPD	12 Laporan	450,000,000	KECAMATAN SIBERUT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Umum-Dana Alokasi Umum		(Mentawai Prima)			SELATAN	
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya layanan pemeliharaan BMD	1 layanan	201,695,000					1 layanan	330,000,000		
7	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	90,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	5 Unit	100,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,135,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Unit	100,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	1	02:09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	86,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	1 Unit	130,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan	B Indek	61,215,000						B Indek	78,000,000	
7	1	2	02:01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	tersedianya layanan penyelenggaraan kegiatan tingkat kecamatan	1 layanan	26,215,000						1 layanan	40,000,000	
7	1	2	02:01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	26,215,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	5 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	tersedianya layanan urusan pe,merintahan yang dilimpahkan	1 layanan	35,000,000					1 layanan	38,000,000		
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	OPD	3 Laporan	38,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan	62 persen	50,734,000					62 persen	100,000,000		
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	tersedianya layanan pemberdayaan Desa	2 layanan	50,734,000					2 layanan	100,000,000		
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga Kemasya rakatan	24,519,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	0 Lembaga Kemasyaraka tan	40,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	26,215,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	1 Laporan	60,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan	100 Persen	100,000,000					100 Persen	175,000,000		
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	tersedianya layanan urusan pemerintahan umum	2 layanan	100,000,000					2 layanan	175,000,000		
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti	50 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi	masyarakat	50 Orang	75,000,000	KECAMATAN SIBERUT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
		Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		(Mentawai Prima)			SELATAN				
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu	85 Persen	100,000,000						85 Persen	185,000,000	
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	tersedianya layanan fasilitasi dan koordinasi desa	2 layanan	100,000,000						2 layanan	185,000,000	
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Siberut Selatan, Muara Siberut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Desa	1 Dokumen	125,000,000	KECAMATAN SIBERUT SELATAN
7	1	6	02:01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi	5 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan			10. Penataan Birokrasi	Desa	5 Dokumen	60,000,000	KECAMATAN SIBERUT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Mentawai, Siberut Selatan, Semua Kelurahan					(Mentawai Prima)			SELATAN			
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1	KECAMATAN		2,972,673,930								3,361,494,800				
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	2,713,159,130						100 Persen	3,027,126,000			
7	1	1	02:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	80 Persen	21,940,452					80 Persen	38,750,000			
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	21,940,452	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Desa di Kecamatan Sipora Utara	6 Laporan	38,750,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya KegiatanAdminist rasi Keuangan	100 Persen	1,924,481,828						100 Persen	2,032,200,000		
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/b ulan	1,896,081,828	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN OPD Kecamatan Sipora Utara	14 Orang/bulan	2,000,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Ketersediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	28,400,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	ASN OPD Kecamatan Sipora Utara	12 bulan	32,200,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Daerah	100 Persen	112,960,850						100 Persen	185,450,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	4 Jenis	4,960,850	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Staf Kecamatan Sipora Utara	4 Jenis	5,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor yang tersedia	13 Jenis	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Staf Kecamatan Sipora Utara	13 Jenis	88,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
						Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	25 Jenis							25 Jenis		
						Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang tersedia	559 kotak							559 kotak		
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang tersedia	6 Jenis	8,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Staf Kecamatan Sipora Utara	6 Jenis	11,750,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Staf Kecamatan Sipora Utara	12 Laporan	80,200,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik	75 Persen	60,000,000						75 Persen	93,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
7	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Staf Kantor Camat Sipora Utara	5 Unit	93,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	508,776,000						100 Persen	511,776,000	
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	24,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kantor Camat dan Pegawai Kontrak Kantor Camat Sipora Utara	12 bulan	27,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor	28 Orang	484,776,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kantor Camat dan Pegawai Kontrak Kantor Camat Sipora Utara	28 Orang	484,776,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	80 Persen	85,000,000						80 Persen	165,450,000	
7	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan	1 Unit	25,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi	Staf kantor Camat Sipora	1 Unit	33,000,000	KECAMATAN SIPORA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Umum-Dana Alokasi Umum			Utara			UTARA
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staf kantor Camat Sipora Utara	6 Unit	65,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	10,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Staf kantor Camat Sipora Utara	14 Unit	17,450,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	1	02:09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Sido Makmur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Staf kantor Camat Sipora Utara	1 Unit	50,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Sipora Utara	B Indek	53,000,000						B Indek	77,000,000	
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat	2 Urusan	53,000,000						2 Urusan	77,000,000	
7	1	2	02:04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan terhadap masyarakat	150 Dokumen	28,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Sipora Utara	150 Dokumen	38,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Penduduk yang terekam KTP-EL	100 Orang	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat Sipora Utara	100 Orang	38,500,000	KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan						12 Laporan			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan masyarakat dalam pembangunana di kecamatan	62 persen	47,794,800					62 persen	60,000,000		
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65 Persen	47,794,800					65 Persen	60,000,000		
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 kali	22,794,800	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan Sipora Utara	1 kali	30,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
											3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)					
											3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)					
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	6 Laporan	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan	Kelembagaan Masyarakat di Kecamatan Sipora Utara	6 Laporan	30,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
											Nasional					Daerah		
						Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kelurahan									
7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diseles aikan	100 Persen	113,720,000						100 Persen	145,000,000		
7	1	5	02:01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	113,720,000						100 Persen	145,000,000		
7	1	5	02:01	1		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	400 Orang	33,720,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Sipora Utara	400 Orang	50,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	5	02:01	8		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Sipora Utara	6 Dokumen	95,000,000	KECAMATAN SIPORA UTARA
7	1	6				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Laporan	85 Persen	45,000,000						85 Persen	52,368,800		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					PEMERINTAHAN DESA	Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu										
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi, mendapat rekomendasi dan terawasi	80 Persen	45,000,000					80 Persen	52,368,800		
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang TerfasilitasiPengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa	6 Desa	45,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)	Aparatur Desa di Kecamatan Sipora Utara	6 Desa	52,368,800	KECAMATAN SIPORA UTARA	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen						6 Dokumen			
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			3,475,642,107						4,073,640,622		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	3,261,642,107					100 Persen	3,747,640,622		
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	100 Persen	80,000,000					100 Persen	150,000,000		
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Kali	80,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kecamatan Sipora Selatan	12 Kali	150,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	2,604,440,507						100 Persen	2,905,640,622	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/b ulan	2,504,440,507	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Sipora Selatan	23 Orang/bulan	2,785,640,622	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	23 Orang	120,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Paket yang tersedia	100 Persen	180,000,000						100 Persen	270,000,000	
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 jenis	5,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan sipora Selatan	6 jenis	15,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan sipora Selatan	2 Paket	25,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan sipora Selatan	3 Paket	65,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan sipora Selatan	2 Paket	15,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	100,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		Kecamatan sipora Selatan	24 Laporan	150,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	100 Persen	58,000,000	Sioban							
7	1	1	02:07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	38,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Sipora Selatan	1 Unit	39,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	1 Unit	26,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	100 Persen	316,000,000						100 Persen	317,000,000	
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	3 Rekening enis	24,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	3 Rekeningenis	24,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Orang	292,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	20 Orang	293,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	100 Persen	23,201,600						100 Persen	40,000,000	
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	13,201,600	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	4 Unit	25,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	2 jenis	10,000,000	Kab. Kepulauan	Dana Transfer		10. Penataan Birokrasi	Kecamatan Sipora Selatan	2 jenis	15,000,000	KECAMATAN SIPORA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Lainnya yang Dipelihara			Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Umum-Dana Alokasi Umum					SELATAN	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepatuhan Teknis Peraturan Perizinan	100 Persen	55,000,000						100 Persen	90,000,000	
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Kepatuhan Teknis Peraturan Pelayanan Perizinan	100 Persen	55,000,000						100 Persen	90,000,000	
7	1	2	02:04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	10 Laporan	30,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	Kecamatan Sipora Selatan	12 Laporan	60,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Forum Pembangunan	100 Persen	70,000,000						100 Persen	85,000,000	
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peksanaan Forum Pembangunan Tk,Kecamatan	100 Persen	50,000,000						100 Persen	60,000,000	
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan		35,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	7 Laporan	25,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	3	02:06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penumbuhan Karakter Kesadaran dalam Pemangamalan Pancasila	100 Persen	20,000,000						100 Persen	25,000,000	
7	1	3	02:06	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Keluarga	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	8. Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)	Kecamatan Sipora Selatan	1 Keluarga	25,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pelestarian bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kali						1 Kali			
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika	100 Persen	59,000,000						100 Persen	66,000,000	
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika	100 Persen	59,000,000						100 Persen	66,000,000	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	100 Orang	24,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	100 Orang	30,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Indonesia	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Laporan	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	1 Laporan	36,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penataan Dokumen Aset di Tk.Kecamatan	100 Persen	30,000,000						100 Persen	85,000,000	
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penataan Dokumen dan Pengawasa Aset Desa di Tk.Kecamatan	100 Persen	30,000,000						100 Persen	85,000,000	
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Desa	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Kecamatan Sipora Selatan	7 Desa	85,000,000	KECAMATAN SIPORA SELATAN
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			2,688,703,015							3,070,703,339	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,424,479,015							2,686,917,339	
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,819,104,231							2,009,405,355	
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/b ulan	1,711,871,815	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16 Orang/bulan	1,783,405,355	KECAMATAN PAGAI UTARA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	107,232,416	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	226,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA	
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			227,092,784						273,811,984		
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	12,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket	13,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA	
					penerangan Kantor Tercukupi disetiap Bulan		4 Jenis						4 Jenis			
7	1	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop Komputer dan Printer	7 Paket	77,092,784	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 Paket	77,092,784	KECAMATAN PAGAI UTARA	
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Serta Lancarnya Kegiatan Pelayanan Administrasi Kantor	51 Jenis	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			51 Jenis	60,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA	
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	8,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Paket	8,800,000	KECAMATAN PAGAI UTARA	
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		15 Jenis						15 Jenis			
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	114,919,200	KECAMATAN PAGAI UTARA	
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			348,782,000						372,000,000		
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	0 Laporan	12,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Saumanganya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan	12,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Disediakan										
						Tersedianya Jasa Sumber daya Listrik	24 bulan						24 bulan			
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	336,782,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan	360,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA	
						Terselenggaranya Urusan Pemerintah Umum	12 Bulan						12 Bulan			
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29,500,000						31,700,000		
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	17,500,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 Unit	18,500,000	KECAMATAN PAGAI UTARA	
7	1	1	02:09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	12,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan				0 Unit	13,200,000	KECAMATAN PAGAI UTARA	
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	7 Unit						7 Unit			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			87,224,000						109,996,000		
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			87,224,000						109,996,000		
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terciptanya perencanaan yang berkeadilan dan berkelanjutan	1 kali	57,224,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 kali	62,946,000	KECAMATAN PAGAI UTARA	
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	3 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana			3 Laporan	47,050,000	KECAMATAN PAGAI UTARA	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Alokasi Umum					
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			92,000,000							141,800,000	
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			92,000,000							141,800,000	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 Orang	96,800,000	KECAMATAN PAGAI UTARA	
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	42,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Dokumen	45,000,000	KECAMATAN PAGAI UTARA	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			85,000,000							131,990,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									131,990,000		
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Dokumen	47,240,000	KECAMATAN PAGAI UTARA	
7	1	6	02:01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	fungsi kontrol dan fungsi evaluasi serta pelaporan dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	3 Desa	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Desa	84,750,000	KECAMATAN PAGAI UTARA	
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			2,783,557,434						3,190,249,510		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	2,512,230,434					100 Persen	2,889,070,990		
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100 Persen	68,038,000					100 Persen	75,522,180		
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan	68,038,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat			4 Desa di Kecamatan Pagai Selatan	28 Laporan	75,522,180	KECAMATAN PAGAI SELATAN	
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100 Persen	1,778,530,388					100 Persen	2,074,663,939		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1,556,427,004	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak	16 Orang/bulan	1,785,231,439	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	222,103,384	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak	12 Dokumen	289,432,500	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	323,442,046						100 persen	359,020,671	
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Pagai Selatan	1 Paket	5,550,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	92,161,790	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Pagai Selatan	6 Unit	102,299,587	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	68,431,700	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Pagai Selatan	4 Paket	75,959,187	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Pagai Selatan	1 Paket	5,550,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	152,848,556	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Pagai Selatan	28 Laporan	169,661,897	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase peningkatan	100 persen	294,050,000						100 persen	326,395,500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
	Pemerintahan Daerah	elayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah														
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4,800,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	PNS dan Tenaga Kontrak	12 Laporan	5,328,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	289,250,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS dan Tenaga Kontrak	12 Laporan	321,067,500	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	48,170,000						100 persen	53,468,700	
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	35,960,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Pagai Selatan	8 Unit	39,915,600	KECAMATAN PAGAI SELATAN
												10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)				
7	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	12,210,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Barang Milik Daerah di Kantor Kecamatan Pagai Selatan	16 Unit	13,553,100	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	100 persen	41,332,000						100 persen	45,878,520	
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah masyarakat, LPM dan desa yang terbina	95 Persen	41,332,000						95 Persen	45,878,520	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga	25,290,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat, LPM, Desa	7 Lembaga	28,071,900	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	16,042,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat, LPM, Desa	4 Laporan	17,806,620	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100 persen	80,775,000						100 persen	89,665,800	
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan HUT RI	1 Kegiatan	80,775,000						1 Kegiatan	89,665,800	
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	100 Orang	30,775,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Pagai Selatan	100 Orang	34,165,800	KECAMATAN PAGAI SELATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Masyarakat di Kecamatan Pagai Selatan	12 Dokumen	55,500,000	KECAMATAN PAGAI SELATAN
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu	85 Persen	149,220,000						85 Persen	165,634,200	
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	4 Desa	149,220,000						4 Desa	165,634,200	
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27 Dokumen	149,220,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Sinaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	Pemerintahan Desa	27 Dokumen	165,634,200	KECAMATAN PAGAI SELATAN
								Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat								
								Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Malakopa								
								Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Makalo								
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN			3,464,878,408							4,168,970,562	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3,288,307,158							3,789,315,130	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7	1	1	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30,000,000						55,000,000		
7	1	1	02:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	55,000,000	KECAMATAN SIKAKAP	
7	1	1	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,842,507,158						3,114,432,405		
7	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/b ulan	2,792,507,158		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			26 Orang/bulan	2,900,000,000	KECAMATAN SIKAKAP	
7	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	214,432,405	KECAMATAN SIKAKAP	
7	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			148,000,000						270,302,725		
7	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	8,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9 Paket	8,800,000	KECAMATAN SIKAKAP	
7	1	1	02:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7 Paket	99,000,000	KECAMATAN SIKAKAP	
7	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Paket	53,382,725	KECAMATAN SIKAKAP	
7	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	60,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana			12 Laporan	109,120,000	KECAMATAN SIKAKAP	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						dan Konsultasi SKPD			Sikakap, Semua Kelurahan	Alokasi Umum						
7	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			28,000,000						85,800,000		
7	1	1	02:07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	28,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Unit	85,800,000	KECAMATAN SIKAKAP	
7	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			218,800,000						240,680,000		
7	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	33,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 bulan	36,300,000	KECAMATAN SIKAKAP	
7	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	185,800,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Laporan	204,380,000	KECAMATAN SIKAKAP	
						Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 Orang						15 Orang			
7	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21,000,000						23,100,000		
7	1	1	02:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	21,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			8 Unit	23,100,000	KECAMATAN SIKAKAP	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan dan Pelayanan Publik			20,000,000						22,000,000		
7	1	2	02:04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada			20,000,000						22,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Camat											
7	1	2	02:04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	20,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	0 Laporan	22,000,000	KECAMATAN SIKAKAP	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan						12 Laporan			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			60,000,000						124,180,982		
7	1	3	02:01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			60,000,000						124,180,982		
7	1	3	02:01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 desa	35,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 desa	62,855,982	KECAMATAN SIKAKAP	
7	1	3	02:01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 desa	25,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 desa	61,325,000	KECAMATAN SIKAKAP	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			66,571,250						156,474,450		
7	1	5	02:01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			66,571,250						156,474,450		
7	1	5	02:01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	100 Orang	36,571,250	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 Orang	59,674,450	KECAMATAN SIKAKAP	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Kelurahan							
7	1	5	02:01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	6 Dokumen	96,800,000	KECAMATAN SIKAKAP
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			30,000,000						77,000,000		
7	1	6	02:01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			30,000,000						77,000,000		
7	1	6	02:01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	30,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9 Dokumen	77,000,000	KECAMATAN SIKAKAP
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			7,190,344,236							3,953,000,000	
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1,789,544,236							2,163,000,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
				DAERAH KABUPATEN/KOTA											
8	1	1	02:02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,317,554,237						1,450,000,000		
8	1	1	02:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/b ulan	1,180,106,236		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	12 Orang/bulan	1,300,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT
8	1	1	02:02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	137,448,001		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	12 Dokumen	150,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT
8	1	1	02:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			125,049,999						330,000,000	
8	1	1	02:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5,049,999	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	12 Paket	6,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT
8	1	1	02:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	6 Paket	90,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT
8	1	1	02:06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	6 Paket	16,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT
8	1	1	02:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9 Dokumen	18,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
8	1	1	02:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	200,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
8	1	1	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50,000,000						60,000,000		
8	1	1	02:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	4 Unit	60,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
8	1	1	02:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			271,940,000						286,000,000		
8	1	1	02:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	12 Laporan	26,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
8	1	1	02:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	246,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			14 Laporan	260,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
8	1	1	02:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25,000,000						37,000,000		
8	1	1	02:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	1 Unit	25,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
8	1	1	02:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	12 Unit	5,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai,	Dana Transfer Umum-Dana		10. Penataan Birokrasi (Mentawai)	12 Unit	12,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA,	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Dipelihara			Sipora Utara, Tuapejat	Alokasi Umum		Prima)			POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT	
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			4,550,000,000						730,000,000		
8	1	3	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			4,550,000,000						730,000,000		
8	1	3	02:01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9 Dokumen	4,500,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	9 Dokumen	650,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT	
8	1	3	02:01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring,	3 Laporan	50,000,000		Dana Transfer		9. Pembangunan	3 Laporan	80,000,000	KANTOR KESATUAN	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				Umum-Dana Alokasi Umum		Kebudayaan (Mentawai Beradab)			BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									110,000,000		
8	1	4	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									110,000,000		
8	1	4	02:01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	3 Laporan	110,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									430,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
8	1	5	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		330,000,000						430,000,000			
8	1	5	02:01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	1 Dokumen	150,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT		
8	1	5	02:01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	150 Orang	160,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT		
8	1	5	02:01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	50 Orang	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	50 Orang	120,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
						Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								400,000,000			
8	1	6	02:01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								400,000,000			
8	1	6	02:01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 Orang	95,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	20 Orang	100,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT	
8	1	6	02:01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	2 Laporan	85,800,000				9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	2 Laporan	100,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
					Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
8	1	6	02:01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	290,000,000	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Utara, Tuapejat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	4 Dokumen	200,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT	
TOTAL								878.905.272.098					934,240,782,392			

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Indikator kinerja menunjukkan kinerja yang akan dicapai setiap perangkat daerah dalam tahun rencana sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada RPD 2023-2026.

Dalam rangka mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan maka ditetapkan IKU dan target capaian pada Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama

NO	IKU	Target Kinerja	
		2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	61,98	62,48
2	Rata Lama sekolah	7,36 tahun	7,45 tahun
3	Harapan Lama Sekolah	13,09 tahun	13,18 tahun
4	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,55	0,58
5	Angka Harapan Hidup	65,19 tahun	65,34 tahun
6	Prevalensi Stunting	20,00%	17,00%
7	Persentase Penduduk Miskin	14,57%	14,44%
8	Indeks Kinerja Infrastruktur	10%	12%
9	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (>40 km/jam)	15%	17%
10	Persentase Pemanfaatan Sumber Air Baku	70%	72%
11	Persentase kawasan permukiman yang terlindungi dari daya rusak air	70%	75%
12	Persentase tercapainya Luas RTH Minimal 30% terhadap luas wilayah perkotaan	100%	100%

NO	IKU	Target Kinerja	
		2023	2024
13	Cakupan Layanan Transportasi	80%	83%
14	Cakupan layanan telekomunikasi	85%	88%
15	Rasio Elektrifikasi	85%	86%
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	>80	>80
17	Persentase Rumah Layak Huni	40%	43%
18	Jumlah Desa STBM	2 desa	3 desa
19	Indeks Resiko Bencana	197	190
20	Pertumbuhan ekonomi	3,93%	4,27%
21	Indek Gini	0,320	0,316
22	Pendapatan Perkapita	Rp.58,47 jt	Rp.61,82 jt
23	Persentase Wirausaha yang Tumbuh	15%	15%
24	Nilai Investasi	20 miliar rupiah	30 miliar rupiah
25	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,75%	2,70%
26	Tingkat Inflasi	3,80%	3,50%
27	Indek RB	B	B
28	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	30	35
29	Indek Kepuasan masyarakat	80	82
30	Indeks Profesional ASN	80	82
31	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
32	Indeks SPBE	2	2,2
33	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3
34	Opini BPK	WTP	WTP
35	WBK/WBBM	2 OPD	3 OPD
36	Nilai SAKIP	B	B
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan	51,5	51,55
38	Jumlah MHA yang dilestarikan	5 MHA	7 MHA
39	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,3	11,5
40	Tingkat Kriminalitas	3,5 persen	3,5 persen
41	Tingkat Kabupaten layak Anak	400	500 (pratama)
42	Indek Pembangunan Gender	89,90	89,95

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pada akhir penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Tabel 6.2
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan ekonomi	BPS	2,89%	3,93%	4,27%
2	Indek Gini	BPS	0,321	0,320	0,316
3	Pendapatan Perkapita	BPS	Rp.54,80 jt	Rp.58,47 jt	Rp.61,82 jt
4	Persentase Penduduk Miskin	BPS	14,84%	14,57%	14,44%
5	Indeks Pembangunan Manusia	BPS	61,35	61,98	62,48
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS	2,79%	2,75%	2,70%
7	Rata Lama sekolah	BPS	7,20 tahun	7,36 tahun	7,45 tahun
8	Angka Harapan Hidup	BPS	64,73 tahun	65,19 tahun	65,34 tahun
9	Prevalensi Stunting	SGGI	27,3%	20,00%	17,00%
10	Indeks Pembangunan Gender	BPS	89,81	89,90	89,95
ASPEK PELAYANAN UMUM					
I.	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.	Urusan Pendidikan				
	a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	19,05%	22%	25%
	b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-	Dinas Pendidika dan	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	12tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Kebudayaan			
	c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	100%	100%	100%
	d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	100%	100%	100%
2.	URUSAN KESEHATAN				
	a. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Dinas Kesehatan	70/ 100.000 Penduduk	80/ 100.000 Penduduk	85/ 100.000 penduduk
	b. Persentase RS rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	0	1 RSUD	1 RSUD
	c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Dinas Kesehatan	60%	70%	75%
	d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Dinas Kesehatan	60%	70%	75%
	e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dinas Kesehatan	60%	70%	75%
	f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dinas Kesehatan	60%	70%	75%
	g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	70%	75%	80%
	h. Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	75%	80%	82%
	i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	70%	75%	78%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	73%	80%	82%
	k. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan	76%	80%	82%
	l. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Dinas Kesehatan	75%	83%	85%
	m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Dinas Kesehatan	76%	80%	82%
	n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Dinas Kesehatan	80%	83%	85%
3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,20%	5%	5,20%
	b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4%	4,70%	5%
	c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20ha	23ha	25ha
	d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40%	45%	47%
	e. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26%	30%	31%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	f. Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68%	75%	78%
	g. Tingkat kemandapan jalan kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7%	10%	11%
	h. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2%	3%	5%
	i. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NA	85%	88%
4.	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8%	10%	13%
	b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	NA	2%	2%
	c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5%	10%	12%
	d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tangga Layak Huni)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6500 unit	5000 unit	4500 unit
	e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 kawasan permukiman	1 kawasan permukiman	1 kawasan permukiman
5.	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	a. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%
	b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80%	85%	88%
	c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	60	65%	68%
	d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	bencana				
	e. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%
	f. Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	20 menit	15 menit	15 menit
6.	URUSAN SOSIAL				
	a. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100%	100%
	b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100%	100%
II	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.	URUSAN TENAGA KERJA				
	a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70%	80%	85%
	b. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2%	3%	5%
	c. Tingkat produktivitas tenaga kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16%	20%	22%
	d. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35%	40%	42%
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0%	0,1%	0,15%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
2.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	20%	25%	42%
	b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100%	100%
	c. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	100%	100%	100%
3.	URUSAN PANGAN				
	a. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37,67	50	52
4.	URUSAN PERTANAHAN				
	Penanganan sengketa tanah yang dilakukan secara mediasi (persen)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	100	100
	Persentase luas lahan bersertifikat (persen)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,14	1,2	1,25
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	38	40	42
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0,02	0,1
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.200 ha	1.200 ha	1.200 ha
	Tersedianya Tanah Obyek <i>Landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
5.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	>80	>80	>80
	b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5%	7%	7%
	c. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	75%	80%	85%
6.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	a. Perekaman KTP elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95%	99,20%	99,25%
	b. Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70%	75%	78%
	c. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32%	40%	50%
	d. Persentase kepemilikan akte kelahiran (persen)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77,24%	78%	80%
7.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	a. Persentase pengentasan desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35%	30%	26%
	b. Persentase peningkatan status desa mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11%	12%	12%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
8.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA				
	a. TFR (Angka Kelahiran Total)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	b. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	62%	65%	68%
	c. Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,12%	1,10%	1,05%
9.	URUSAN PERHUBUNGAN				
	a. Rasio konektivitas kabupaten/kota	Dinas Perhubungan	75%	80%	82%
	b. V/C Ratio di jalan Kota	Dinas Perhubungan	0,18	0,19	0,20
10.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	a. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	64%	70%	80%
	b. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,20%	10%	20%
	c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,20%	5%	7%
11.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	a. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	44%	50%	55%
	b. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	1,20%	2%	2%
12.	URUSAN PENANAMAN MODAL				
	a. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,20%	2	2,10%
13.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8%	10%	15%
	b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	45%	50%	55%
	c. Peningkatan prestasi olahraga	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	NA	2%	5%
14.	URUSAN STATISTIK				
	a. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	70%	75%	78%
	b. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	70%	75%	78%
15.	URUSAN PERSANDIAN				
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika	NA	Tingkat kematangan I	Tingkat kematangan II
16.	URUSAN KEBUDAYAAN				
	a. Terlestarikannya cagar budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55%	60%	63%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
17.	PERPUSTAKAAN				
	a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	15%	20%	25%
	b. Indeks pembangunan literasi masyarakat	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	11	11,3	11,5
18.	URUSAN KEARSIPAN				
	a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional pasal 40 dan pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10%	30%	35%
	b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	NA	10%	15%
III	URUSAN PILIHAN				
1.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	a. Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Dinas Perikanan	8.694 ton	9.000 ton	9.500 ton
2.	URUSAN PARIWISATA				
	a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	10%	11%	13%
	b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	12%	15%	18%
	c. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	0,76%	0,80%	1%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	14%	15%	16%
3.	URUSAN PERTANIAN				
	a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7000 ton	7000 ton	7000 ton
	b. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100%	100%	100%
4.	URUSAN PERDAGANGAN				
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	15%	20%	30%
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	63%	70%	75%
	Persentase kinerja realisasi pupuk	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0,35%	0,5%	1%
	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0,2%	0,25%	0,32%
5.	URUSAN PERINDUSTRIAN				
	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	1.25	3 IKM	5 IKM
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0	0,5%	1%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0	1,2%	1,5%
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0	1,2%	1,5%
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	0	1,2%	1,5%
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	ada	ada	ada
IV	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1.	URUSAN KEPEGAWAIAN				
	a. Nilai Sistem Merit	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	NA	200	220
	b. Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,20%	10%	12%
2.	URUSAN MANAJEMEN KEUANGAN				
	a. Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Kategori Baik	Badan Keuangan Daerah	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Sumber Data	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	TARGET KINERJA	
				2023	2024
	b. Persentase PAD terhadap total pendapatan	Badan Keuangan Daerah	5,24	8,50%	8,70%
	c. Persentase tahapan penyusunan rencana penganggaran tepat waktu	Badan Keuangan Daerah	80%	90%	95%
	d. Persentase Barang dan Jasa yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik	Badan Keuangan Daerah	72%	80%	81%
3.	URUSAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK				
	a. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	8%	20%	30%
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Tingkat Kriminalitas	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	6 persen	3,5 persen	3,5 persen
2	Rasio Ketergantungan (%)	BPS	62,78	62,40%	62,35%
3	Pengeluaran Perkapita	BPS	6.321 rb rupiah/orang/tahun	6.442 rb rupiah/orang/tahun	6.536 rb rupiah/orang/tahun

BAB VII

PENUTUP

Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik.

Pemulihan ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat terutama pada hilirisasi komoditas pertanian menjadi fokus pembangunan daerah tahun 2023 dan menjadi bagian agregasi pijakan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Tahun 2045. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan lembaga pemerintah lainnya bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia usaha perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun

2023 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a small vertical tick at the right end, and a shorter horizontal stroke below it.

MARTINUS D.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2022**